



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2025



Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Kudus
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan karunia-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Kudus Akhir Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan disampaikan sebagai wujud pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan serta komitmen Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel.

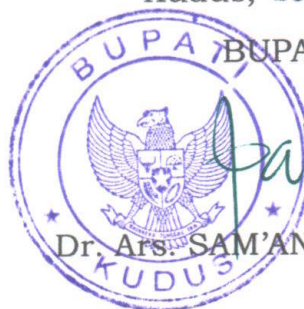
Penyusunan LKPJ merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut diamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki 3 (tiga) kewajiban pelaporan yang wajib disampaikan setelah berakhirnya tahun anggaran, yaitu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah (Kemendagri), menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD, dan memberikan informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

LKPJ sendiri merupakan laporan dengan substansi pokok hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus selama satu tahun anggaran, gambaran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan daerah, serta berbagai kebijakan strategis yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pada kesempatan yang baik ini, diucapkan terima kasih kepada Pimpinan beserta Anggota DPRD Kabupaten Kudus atas keharmonisan yang terbina selama ini. Disampaikan juga apresiasi untuk jajaran Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus, serta penghargaan untuk masyarakat Kabupaten Kudus atas partisipasi dan peran serta dalam pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Kudus yang sejahtera, harmoni dan takwa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 20 Februari 2026



Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, ST, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 DASAR HUKUM	1
1.2 VISI DAN MISI	3
1.3 DATA UMUM DAERAH	6
1. Data Geografis Wilayah.....	6
2. Jumlah Penduduk	7
3. Pertumbuhan Penduduk.....	10
4. Jumlah Aparatur Sipil Negara	11
5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	13
6. Realisasi belanja menurut Jenis Belanja	15
7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.....	16
BAB II	
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	18
2.1 KEBIJAKAN UMUM	18
2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	20
2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN.....	20
2.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).....	21
2.5 PENDAPATAN TRANSFER.....	27
2.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.....	27
2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PER URUSAN	28
2.8 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN.....	30
BAB III	
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	31
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	31
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	33
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	81
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan	135
3.1.4 Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan.....	138
3.1.5 Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149
3.1.6 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	327
3.1.7 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	336
3.1.8 Unsur Kewilayahan	339
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	383
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	396

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN..... 446
4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN 446
4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN..... 447

BAB V.....
PENUTUP 448

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Rapat Paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian Penyampaian LKPJ hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2025, merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Penyusunan LKPJ dilaksanakan dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Obyek laporan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan koridor yang diatur dalam dokumen-dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 264);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah No 248);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah No 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024 Nomor 13).

1.2 VISI DAN MISI BUPATI 2025-2029

VISI

Mempedomani sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045 tahap 1, yaitu periode 2025-2029 yang terdiri dari 6 sasaran pokok yaitu terwujudnya ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, meningkatnya kualitas manusia yang unggul dan berakhlak, meningkatnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan budaya masyarakat maju, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan maka ditetapkan Visi **“Menuju Masyarakat Kudus Sejahtera, Harmoni dan Taqwa”**.

Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan yakni sebagai berikut:

Sejahtera. Sejahtera berarti keadaan atau kondisi yang mengarah pada kualitas hidup dalam suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang baik terpenuhi kebutuhan fisik, sosial ekonomi dan spiritualnya, sehat, bahagia dan berdaya. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat.

Harmoni. Harmoni adalah keadaan atau kondisi di mana berbagai unsur atau elemen saling bekerja sama dengan seimbang dan selaras, sehingga tercipta kesatuan yang mendukung tercapainya tujuan bersama. Harmoni dalam konteks masyarakat, adalah segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar individu, kelompok, maupun dengan lingkungan sekitar, berjalan dengan seimbang dan penuh kedamaian yang termanifestasikan menjadi pribadi dengan toleransi tinggi, empati, peduli dan gotong royong sehingga tercipta suasana kondusif untuk pertumbuhan dan kesejahteraan bersama.

Taqwa. Taqwa menggambarkan keadaan atau kondisi di mana ajaran agama dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan di berbagai aspek kehidupan, menjaga akhlak, taat beribadah, santun, berbudi pekerti luhur sehingga menjadi tauladan, menghormati sesama dan menjaga keharmonisan. Manusia yang bertaqwa akan menjalankan tata kelola dengan baik di setiap tingkatan mulai dari individu sebagai pribadi sampai dengan kelompok sebagai unsur masyarakat, swasta maupun pemerintah.

MISI

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi terumus dalam misi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*

Ekonomi yang tumbuh baik didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata serta peran UMKM dan ekonomi kreatif. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan ketahanan pangan, dan dapat mengentaskan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kompeten, tingkat investasi yang terjaga, kecukupan infrastruktur, aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang didukung oleh potensi lokal dan kondusifitas yang stabil. Meningkatkan peran petani, PKL, santri dan generasi muda sebagai penggerak perekonomian.

2. *Mandiri Kesehatan dan Berdikari.*

Layanan kesehatan yang prima dan inklusif untuk seluruh masyarakat termasuk difabel dan lansia, dengan ketersediaan tenaga kesehatan dengan rasio baik serta tersedianya peralatan medis dan sarana prasarana kesehatan yang baik sehingga mampu meningkatkan kesehatan ibu dan anak menjadi komitmen Bupati periode 2025-2030. Perlindungan sosial yang adaptif melalui *Universal Health Coverage* (UHC) dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja/ tenaga rentan. Pembangunan rumah sakit baru untuk memperluas akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.

3. *Pendidikan berkarakter, kearifan budaya.*

Upaya membentuk sumber daya manusia yang unggul, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk karakter dan menanamkan kearifan budaya. Pembangunan pendidikan didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan yang merata melalui peningkatan: nol anak putus sekolah, kesempatan belajar 13 Tahun, pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar menengah, pemberdayaan pondok pesantren, beasiswa untuk anak berprestasi tidak mampu, kesejahteraan guru madin dan guru swasta, serta pelestarian dan pengembangan budaya serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga.

4. *Masyarakat Kudus yang agamis, guyub rukun, toleransi dan menjaga persatuan NKRI.*

Masyarakat Kudus diharapkan memiliki dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya dalam setiap sendi kehidupannya. Masyarakat yang memiliki keimanan kuat, beribadah dengan rutin, memiliki toleransi yang tinggi dan gotong royong serta menekankan pentingnya hidup bersama yang harmonis dalam kerangka NKRI sesuai nilai moral dan etika agama. Untuk mewujudkan ini maka menjadi komitmen Bupati untuk memberikan bantuan token/pulsa

untuk tempat-tempat ibadah, kolaborasi yang baik dengan BAZNAS, melakukan pemerhatian tempat ibadah dan mendukung FKUB serta lintas agama.

5. *Infrastruktur mantap dan kualitas lingkungan hidup.*

Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan, berupa peningkatan kualitas infrastruktur publik melalui pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur wilayah yang mendukung peningkatan akses dan konektivitas wilayah, infrastruktur digital, serta prasarana pertanian sebagai penunjang produktivitas. Program unggulan seperti Sapu Bersih (Saber) Jalan Berlubang, perbaikan lampu penerangan jalan umum (LPJU), rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan prasarana pertanian, perwujudan penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang ditunjang sistem transportasi massal berbasis aglomerasi yang terpadu dan berkelanjutan, menjadi bagian integral dari penguatan infrastruktur wilayah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan infrastruktur dasar melalui peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mendorong cakupan rumah layak huni yang lebih luas, pengurangan kawasan kumuh, serta pemerataan pembangunan infrastruktur permukiman baik di desa maupun kota. Penyediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak, aman serta berkelanjutan menjadi prioritas guna menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Kualitas lingkungan hidup memastikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan masyarakat melalui konservasi alam, ketersediaan air, lahan dan udara yang berkualitas, pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang mengimplementasikan teknologi modern dan berkelanjutan, serta mitigasi terhadap risiko bencana atas dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup.

6. *Tata kelola yang adaptif dan pelayanan publik yang profesional dan inovatif.*

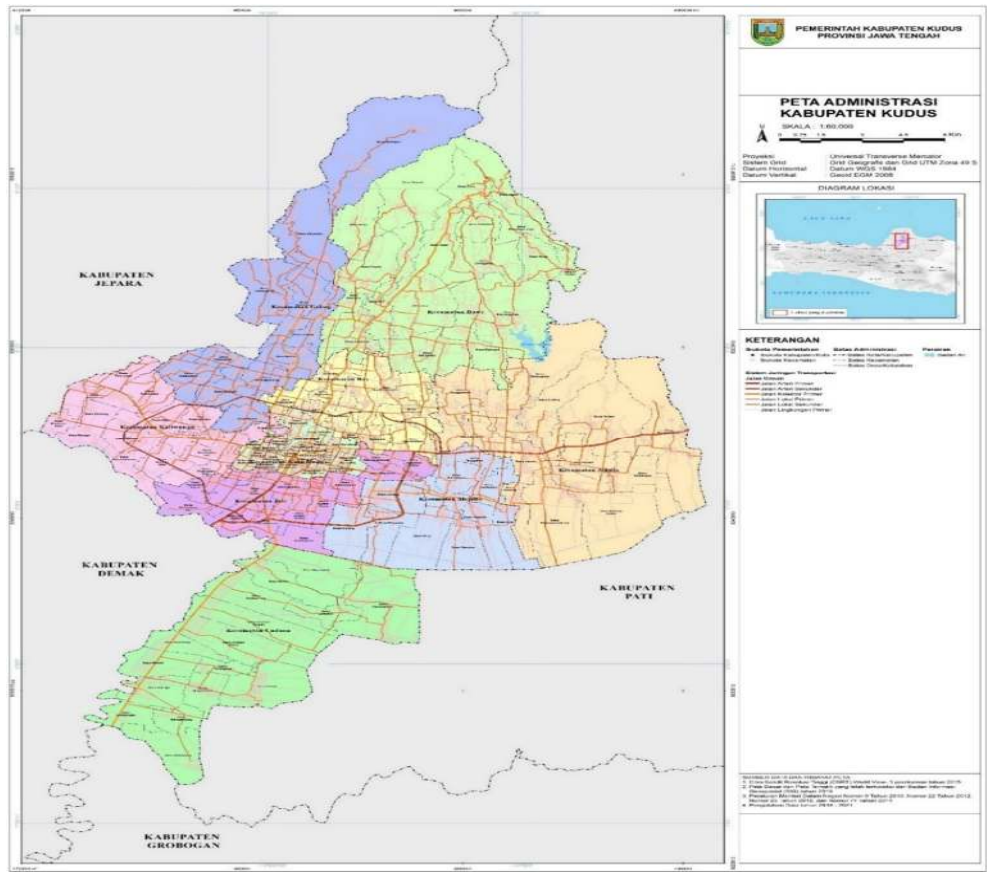
Kinerja yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan harus dikelola secara baik sehingga mampu mengadaptasi perubahan lingkungan yang cepat secara profesional. Pengelolaan itu meliputi penggunaan sumber daya yang dimiliki secara jujur, efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi yang modern serta digitalisasi.

1.1 DATA UMUM DAERAH

a. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kudus



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Berdasarkan gambar 1.1, di atas secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 7°1'13" dan 7°22'57" Lintang Selatan dan 110°45'30" dan 110°58'37" Bujur Timur. Letak Kabupaten Kudus sangat strategis karena berada di persimpangan jalur Semarang dan Surabaya serta Purwodadi dan Jepara. Disamping itu, Kabupaten Kudus ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dalam struktur perkotaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam sistem perwilayahan, Kabupaten Kudus termasuk dalam Wanarakuti yang berpusat di Perkotaan Kudus dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan

Lokal Provinsi dan Nasional. Wilayah Kabupaten Kudus keseluruhannya merupakan daratan tanpa adanya wilayah pesisir, hanya sedikit di wilayah utara merupakan wilayah perbukitan Gunung Muria.

Data luas wilayah dan pembagian administrasi wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi
Kabupaten Kudus 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jml Desa	Jumlah Kelurahan	Jml RW	Jml RT
1	Kaliwungu	3.419,01	15	0	68	449
2	Kota	1.141,50	16	9	110	507
3	Jati	2.732,57	14	0	79	389
4	Undaan	7.456,67	16	0	63	357
5	Mejobo	3.736,65	11	0	69	341
6	Jekulo	8.710,76	12	0	85	445
7	Bae	2.406,56	10	0	51	291
8	Gebog	6.038,18	11	0	82	435
9	Dawe	9.102,59	18	0	110	584
Jumlah		44.744,50	123	9	717	3.798

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, Secara admininstratif, wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 123 desa, 717 Rukun Warga (RW) dan 3.798 Rukun Tetangga (RT).

2. Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut :

Tabel 1.3
Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Kudus Tahun 2021 – 2025

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205
2022	433.802	49,97	434.277	50,03	868.079
2023	436.585	49,99	436.846	50,01	873.431
2024	438.626	49,97	439.195	50,03	877.821
2025	440.029	49,95	440.829	50,05	880.858

Sumber : DKB Semester 1 Tahun 2025 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kudus cenderung stabil dari tahun ke tahun. Adapun perbandingan komposisi penduduk laki-laki pada tahun 2024 sebanyak 438.626 orang atau 49,97% dan perempuan sebanyak

439.195 atau sekitar 50,03%. Sedangkan pada tahun 2025 jumlah penduduk sebanyak 880.858 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 440.029 orang atau sekitar 49,95 % dan perempuan sebanyak 440.829 orang atau 50,05%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat dibanding laki-laki, namun demikian peningkatannya masih cenderung stabil dan tidak fluktuatif.

Komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1.4 di bawah ini :

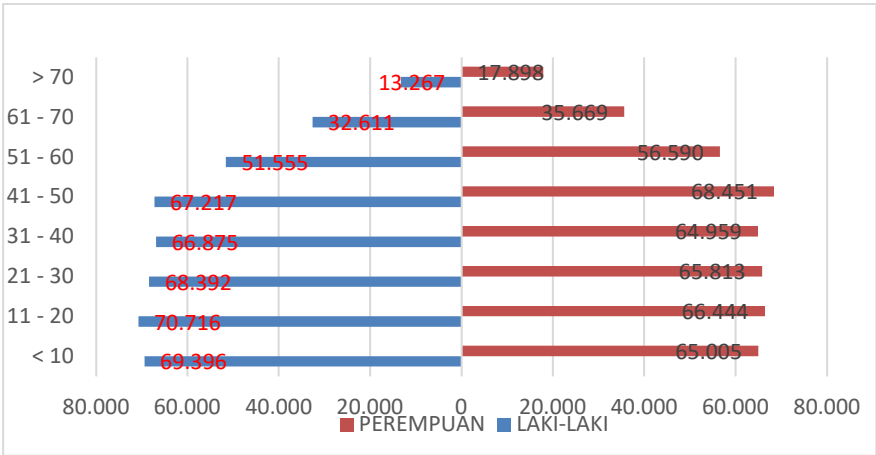
Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin
Kabupaten Kudus Tahun 2025

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
≤ 10	69.396	65.005	134.401
11-20	70.716	66.444	137.160
21-30	68.392	65.813	134.205
31-40	66.875	64.959	131.834
41-50	67.217	68.451	135.668
51-60	51.555	56.590	108.145
61-70	32.611	35.669	68.280
> 70	13.267	17.898	31.165
Jumlah	440.029	440.829	880.858

Diolah dari : DKB Semester 1 Tahun 2025 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada usia yang muda lebih besar daripada kelompok usia lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Secara lebih jelas tegambarkan dalam grafik piramida penduduk di bawah ini.

Grafik 1.1.
Piramida Penduduk Per-usia Perjenis Kelamin Kabupaten Kudus
Tahun 2025



Berdasarkan grafik 1.1, diketahui bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Kudus berbentuk piramida segi lima yang menunjukkan surplus pada usia balita sampai dengan usia 50 tahun. Bentuk piramida penduduk yang terbalik mengindikasikan terjadinya pola Aging Population pada suatu daerah yang dapat berdampak pada *Dependency Ratio* (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan piramida penduduk di atas jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada kelompok usia 11-20 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 137.160 jiwa terdiri perempuan 66.444 dan laki-laki 70.716 sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 41-50 tahun sebesar 135.668 jiwa terdiri dari perempuan 68.451 dan laki-laki 67.217. Hal ini berkaitan dengan tabel 1.5 terkait dependensi rasio di bawah ini:

Table 1.5
Komposisi Penduduk menurut *Dependensy Racio*
di Kabupaten Kudus Tahun 2025

Tahun	≤14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36
2022	189.271	618.301	60.507	868.079	40,40
2023	201.713	614.458	57.260	873.431	42,15
2024	186.406	621.783	69.632	877.821	41,18
2025	191.942	620.870	68.046	880.858	41,87

Diolah dari : DKB semester 1 tahun 2025 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2025 sebesar 41,87. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2024 sebesar 41,18. Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun).

Distribusi penduduk tingkat pendidikan di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari jumlah penduduk sesuai jenjang pendidikan berdasarkan catatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas, sebagaimana terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.6.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus
Tahun 2021-2025

Tingkat pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
Tidak/Belum Sekolah	225.946	235.344	242.423	246.338	248.502
Belum Tamat SD/ Sederajat	62.373	59.661	57.637	55.276	54.457
Tamat SD/ sederajat	229.125	219.953	214.236	208.611	206.912
SLTP/ sederajat	144.005	140.876	139.680	139.283	139.310
SLTA/ sederajat	157.921	161.995	167.016	173.288	175.742
Akademi / Sarjana	47.835	50.250	52.439	55.025	55.935
Jumlah Penduduk	867.205	868.079	873.431	877.821	880.858

Sumber : DKB Semester 1 Tahun 2025 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel 1.6. di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudus pada tahun 2025 adalah pada jenjang Tidak/Belum Sekolah yaitu 248.502 penduduk. Jumlah penduduk yang SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang SLTP/ Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2025 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/ Sarjana mengalami peningkatan 910 orang atau naik 1,65 % dibandingkan tahun 2024.

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah penduduk dasar tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan ditunjukkan pada tabel 1.8 di bawah ini.

Tabel 1.8
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kudus
Tahun 2021 – 2025

Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan
2021	867.205	0,14
2022	868.079	0,10
2023	873.431	0,61
2024	877.821	0,50
2025	880.858	0,35

Diolah dari : DKB semester 1 tahun 2025 (Dinas Dukcapil)

Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tampak pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,14, turun menjadi 0,10 di tahun 2022, meningkat tajam di tahun 2023 menjadi sebesar 0,6, selanjutnya turun di tahun 2024 menjadi 0,50, dan menurun lagi di tahun 2025 menjadi 0,35.

4. Jumlah Aparatur Sipil Negara

Jumlah Aparatur Sipil Negara per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Kabupaten sebanyak 6.866, naik dibandingkan keadaan pada akhir Tahun 2024 sebesar 6.543 orang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian rasio antara Aparatus Sipil Negara dan jumlah penduduk pada Tahun 2025 sebesar 0,78 persen.

Kondisi ini belum ideal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat sebagaimana pernah diungkapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedikitnya rasio Pegawai Negeri Sipil di daerah dan jumlah penduduk adalah 1,5%

Adapun penyebaran Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus tergambar pada tabel 1.9 di bawah ini yang menunjukkan jumlah Aparatur Sipil Negara di setiap Perangkat Daerah Kerja.

Tabel 1.9
Jumlah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kudus Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	6	18	28	52
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Urusan Pemerintahan Umum	11	6	7	24
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Trantibum Linmas	14	6	6	26
4	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	20	16	34	70
5	Badan Perenc. Pemb. Penelitian & Pengemb. Daerah	Fungsi Penunjang Perencanaan	6	28	7	41
		Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	1	4	1	6
6	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	17	54	72	143
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Urusan Kearsipan	3	7	6	16
		Urusan Perpustakaan	3	8	3	14
8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Urusan Kebudayaan	4	3	12	19
		Urusan Pariwisata	5	6	13	24
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	15	8	29
10	Dinas Kesehatan	Urusan Kesehatan	8	767	105	880
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Urusan Komunikasi dan Informatika	5	15	4	24
		Urusan Statistik	0	2	3	5
		Urusan Persandian	0	2	3	5

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	20	48	78
		Urusan Pertanahan	0	0	0	0
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Urusan Pemerintahan bidang PMD	14	7	11	32
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Penanaman Modal	4	14	8	26
15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pendidikan	9	3714	90	3813
		Urusan Kepemudaan dan Olahraga	2	13	85	100
16	Dinas Perdagangan	Urusan Perdagangan	7	10	86	103
17	Dinas Perhubungan	Urusan Perhubungan	11	10	54	75
18	Dinas Pertanian dan Pangan	Urusan Pertanian	8	46	7	61
		Urusan Pangan	2	3	7	12
		Urusan Perikanan	1	2	7	10
		Urusan Kehutanan	0	0	0	0
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	3	9	39	51
		Urusan Lingkungan Hidup	3	10	71	84
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	Urusan Sosial	5	7	7	19
		Urusan Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	4	6	12
		Urusan Pengendalian Penduduk dan KB	1	2	6	9
21	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Urusan Tenaga Kerja	7	23	4	34
		Urusan Perindustrian	2	3	5	10
		Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	2	4	8
		Urusan Transmigrasi	0	0	0	0
22	Inspektorat	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan	7	46	9	62
23	RSUD dr. Loekmono Hadi	Urusan Kesehatan	12	427	87	526
24	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Trantibum Linmas	11	28	45	84
25	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan	8	7	18	33
26	Kecamatan Bae	Urusan Pemerintahan Umum	6	0	10	16
27	Kecamatan Dawe	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	10	19
28	Kecamatan Gebog	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	12	21
29	Kecamatan Jati	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	11	20

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
30	Kecamatan Jekulo	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	12	21
31	Kecamatan Kaliwungu	Urusan Pemerintahan Umum	8	0	7	15
32	Kecamatan Kota Kudus	Urusan Pemerintahan Umum	47	0	45	92
33	Kecamatan Mejobo	Urusan Pemerintahan Umum	9	0	15	24
34	Kecamatan Undaan	Urusan Pemerintahan Umum	7	0	11	18
JUMLAH			353	5.364	1.149	6.866

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kudus Tahun 2025

5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dilakukan untuk mendukung ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut ditujukan agar kebutuhan dana pembangunan dapat terpenuhi secara mandiri. Dengan kata lain, Pemda dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan PAD dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (kemandirian fiskal daerah). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjamin adanya sumber-sumber pendapatan yang cukup dan tumbuh berkelanjutan (sustainable revenue growth) dalam rangka mendanai berbagai kebutuhan daerah.

UU HKPD memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah. Hal ini karena salah satu tujuan UU HKPD adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah yang diwujudkan dalam kebijakan opsen pajak yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, UU HKPD memberikan keleluasaan yang lebih tinggi kepada Pemda dalam hal pemungutan atas PDRD yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, Pemda dilarang melakukan pungutan di luar yang ditetapkan dalam UU HKPD tersebut.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemda melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Pada tahun 2025, Pemkab Kudus melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Hal-hal yang telah dilakukan tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pajak daerah antara lain:

1. Pemantapan dasar hukum pengelolaan PDRD dengan penyusunan Peraturan Bupati Kudus No.21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda 4/2023 tentang PDRD;
2. Sosialisasi dan edukasi PDRD;
3. Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB-P2 secara selektif agar lebih mendekati harga pasar;
4. Penyesuaian kompensasi untuk Pajak Air Tanah;
5. Pemutakhiran dan perbaikan pengelolaan basis data pajak daerah;
6. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
7. Penagihan dan penertiban pajak daerah;
8. Pengelolaan piutang pajak daerah;
9. Pembangunan, pemutakhiran, dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah;
10. Pemberian insentif dan penghargaan kepada wajib pajak; dan Peningkatan kapasitas organisasi (SDM dan sarana prasarana).

Adapun upaya-upaya yang dilakukan terkait optimalisasi retribusi daerah adalah:

1. Penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan pemantauan atas kegiatan pemungutan retribusi;
3. Penyusunan kajian potensi bekerja sama dengan instansi lain;
4. Pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal;
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
6. Pengelolaan piutang retribusi daerah;
7. Penertiban dan penegakan hukum;
8. Perbaikan dan pemutakhiran pengelolaan basis data; dan
9. Penerapan metode pembayaran nontunai, termasuk implementasi pembayaran QRIS pada beberapa objek retribusi daerah.

Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui kebijakan antara lain pembinaan pengelolaan BUMD, pengawasan kinerja manajemen BUMD, dan penambahan penyertaan modal pada BUMD. Sedangkan untuk akun lain-Lain PAD yang sah, beberapa langkah yang dilakukan antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan manajemen kas, dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Langkah-langkah optimalisasi untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan cara koordinasi, perbaikan dan rekonsiliasi data. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara pemenuhan persyaratan

penggunaan dana dan pelaporan secara tepat waktu. Selain itu, dilakukan juga konsultansi dan audiensi terkait kebijakan TKD untuk memastikan kepatuhan atas peraturan yang telah ditentukan.

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Target PAD TA 2025 ditetapkan sebesar Rp692.080.401.298,00 dapat terealisasi sebesar Rp726.639.905.022,00 atau 104,99%. Secara umum, penerimaan PAD dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan untuk semua jenis pendapatan. Komponen hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (113,01%) memiliki capaian tertinggi, disusul kemudian retribusi daerah (109,57%), pajak daerah (106,09%), dan terakhir lain-lain PAD yang sah (96,91%). Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Kudus dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.10
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus TA 2025

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	2.433.918.766.766	2.479.424.243.099	101,87
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	692.080.401.298	726.639.905.022	104,99
Pajak Daerah	326.426.341.000	328.609.585.472	100,67
Retribusi Daerah	331.308.950.326	363.003.118.493	109,57
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.831.519.000	12.240.871.700	113,01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.513.590.972	22.786.329.357	96,91
Pendapatan Transfer	1.741.838.365.468	1.752.784.338.077	100,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.623.516.788.468	1.628.517.667.010	100,31
Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.321.577.000	124.266.671.067	105,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2026)

6. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Kebijakan Belanja diprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Kebijakan pelaksanaan belanja oleh Pemerintah Kabupaten Kudus disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Adapun target dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp2.642.648.461.418,- dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp2.455.719.781.542,- atau mencapai 92,93%. Adapun komposisi realisasi belanja dapat dilihat pada Tabel 1.11 berikut :

Tabel 1.11
Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1.	Belanja Operasi	1.937.801.679.418	1.797.794.489.922	92,77
2.	Belanja Modal	377.126.189.828	353.741.992.524	93,8
3.	Belanja Tak Terduga	7.918.256.336	2.226.835.000	28,12
4.	Belanja Transfer	319.802.335.836	301.956.464.096	94,42
Jumlah		2.642.648.461.418	2.455.719.781.542	92,93

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 2025)

Dari perbandingan antara potensi kemampuan pendapatan sebesar Rp. 2.433.918.766.766,- dengan kewajiban untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp. 2.642.648.461.418,- maka terjadi kondisi defisit anggaran yang mencapai (Rp. 208.729.694.652,-). Keadaan defisit tersebut selanjutnya ditutup dari pembiayaan Pemerintah.

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Yang pada intinya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Struktur Pembiayaan

Sedangkan dilihat dari strukturnya, sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- a. PenerimaanPembiayaan
 - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adapun Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.12 di bawah ini:

Tabel 1.12
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2025

No	Uraian Pendapatan	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	Penerimaan Pembiayaan	208.729.694.652	208.729.694.652	100
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	208.729.694.652	208.729.694.652	100
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	-	-	
	Pembiayaan Netto	208.729.694.652	208.729.694.652	100

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 2026)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Implementasinya, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan pengelolaan keuangan daerah tersebut diubah beberapa kali agar keuangan daerah dikelola secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 18 Februari 2025. Peraturan Bupati ini mengatur penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Sub jenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian, termasuk penggunaan Belanja Tidak Terduga dari Dinas PKPLH Kabupaten Kudus untuk penataan sampah di TPA Tanjungrejo dan pergeseran antar obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek antar belanja;
2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 25 Maret 2024. Peraturan Bupati ini mengatur amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2025, Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus untuk penanganan Rehabilitasi ruang kelas SD 2 Purwosari yang roboh, penambahan anggaran dari Bantuan Keuangan dari provinsi Jawa Tengah dan pergeseran antar obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek antar belanja;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 15 Agustus 2025;
4. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 15 Agustus 2025;
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini mengatur Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk SKPD BPBD dan Dinas Dukcapil, tambahan alokasi anggaran BOS Kinerja, perubahan alokasi anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan pergeseran antar sub rincian obyek, pergeseran antar rincian obyek dan pergeseran antar obyek belanja dalam DPPA SKPD;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini mengatur penggunaan Belanja Tidak Terduga SKPD Dinas PKPLH, Dinas perhubungan, Dinas Dukcapil, Bappeda dan Kecamatan Undaan, alokasi tambahan anggaran insentif fiskal tahun berjalan, DAK non fisik tunjangan profesi guru ASN, dan pergeseran antar sub rincian obyek, pergeseran antar rincian obyek dan pergeseran antar obyek belanja dalam DPPA SKPD;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini mengatur Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dinas PKPLH yang digunakan untuk penataan sampah di TPA Tanjungrejo dan pergeseran antar sub rincian obyek, pergeseran antar rincian obyek dan pergeseran antar obyek belanja dalam DPPA SKPD;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini mengatur Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan keuangan khusus kepada provinsi yang dilanda bencana alam (SE mendagri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ) tanggal 1 Desember 2025 dan pergeseran antar sub rincian obyek, pergeseran antar rincian obyek dan pergeseran antar obyek pendapatan dalam DPPA SKPD.

2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dilakukan untuk mendukung ketersediaan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan tersebut ditujukan agar kebutuhan dana pembangunan dapat terpenuhi secara mandiri. Dengan kata lain, Pemda dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan PAD dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (kemandirian fiskal daerah). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjamin adanya sumber-sumber pendapatan yang cukup dan tumbuh berkelanjutan (sustainable revenue growth) dalam rangka mendanai berbagai kebutuhan daerah.

2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN

UU HKPD memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah. Hal ini karena salah satu tujuan UU HKPD adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah yang diwujudkan dalam kebijakan opsen pajak yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Selain itu, UU HKPD memberikan keleluasaan yang lebih tinggi kepada Pemda dalam hal pemungutan atas PDRD yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, Pemda dilarang melakukan pungutan di luar yang ditetapkan dalam UU HKPD tersebut.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemda melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif, tetapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

Pada tahun 2025, Pemkab Kudus melakukan berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Hal-hal yang telah dilakukan tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pajak daerah antara lain :

1. Pemantapan dasar hukum pengelolaan PDRD dengan penyusunan Peraturan Bupati Kudus No.21 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda 4/2023 tentang PDRD;
2. Sosialisasi dan edukasi PDRD;
3. Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB-P2 secara selektif agar lebih mendekati harga pasar;
4. Penyesuaian kompensasi untuk Pajak Air Tanah;
5. Pemutakhiran dan perbaikan pengelolaan basis data pajak daerah;
6. Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;

7. Penagihan dan penertiban pajak daerah;
8. Pengelolaan piutang pajak daerah;
9. Pembangunan, pemutakhiran, dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah;
10. Pemberian insentif dan penghargaan kepada wajib pajak; dan
11. Peningkatan kapasitas organisasi (SDM dan sarana prasarana).

Adapun upaya-upaya yang dilakukan terkait optimalisasi retribusi daerah adalah:

1. Penyediaan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan pemantauan atas kegiatan pemungutan retribusi;
3. Penyusunan kajian potensi bekerja sama dengan instansi lain;
4. Pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal;
5. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
6. Pengelolaan piutang retribusi daerah;
7. Penertiban dan penegakan hukum;
8. Perbaikan dan pemutakhiran pengelolaan basis data; dan
9. Penerapan metode pembayaran nontunai, termasuk implementasi pembayaran QRIS pada beberapa objek retribusi daerah.

Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui kebijakan antara lain pembinaan pengelolaan BUMD, pengawasan kinerja manajemen BUMD, dan penambahan penyertaan modal pada BUMD. Sedangkan untuk akun lain-Lain PAD yang sah, beberapa langkah yang dilakukan antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan manajemen kas, dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Langkah-langkah optimalisasi untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan cara koordinasi, perbaikan dan rekonsiliasi data. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara pemenuhan persyaratan penggunaan dana dan pelaporan secara tepat waktu. Selain itu, dilakukan juga konsultansi dan audiensi terkait kebijakan TKD untuk memastikan kepatuhan atas peraturan yang telah ditentukan.

2.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa target PAD TA 2025 ditetapkan sebesar Rp. 692.080.401.298,- dapat terealisasi sebesar Rp. 726.639.905.022,- atau 104,99%. Secara umum, penerimaan PAD dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan untuk

semua jenis pendapatan. Komponen hasil kekayaan daerah yang dipisahkan (113,01%) memiliki capaian tertinggi, disusul kemudian retribusi daerah (109,57%), pajak daerah (100,67%), dan terakhir lain-lain PAD yang sah (96,91%).

Tabel 2.1
Pendapatan Asli Daerah Kab Kudus TA 2025

SUMBER PAD	TARGET	REALISASI	%
Pajak Daerah	326.426.341.000	328.609.585.472	100,67
Retribusi Daerah	331.308.950.326	363.003.118.493	109,57
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.831.519.000	12.240.871.700	113,01
Lain-lain PAD yang Sah	23.513.590.972	22.786.329.357	96,91
Jumlah	692.080.401.298	726.639.905.022	104,99

Adapun berdasarkan kontribusi masing-masing jenis PAD sebagaimana pada Tabel 2.2 di bawah ini, struktur PAD Kabupaten Kudus TA 2025 didominasi oleh retribusi daerah 47,87% disusul pajak daerah sebesar 47,17%, lain-lain PAD yang sah sebesar 3,40%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1,56%.

Tabel 2.2
Kontribusi Masing-Masing Jenis PAD Kab Kudus TA 2025

JENIS PENERIMAAN	REALISASI	% Kontribusi
Pajak Daerah	326.426.341.000	47,17
Retribusi Daerah	331.308.950.326	47,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.831.519.000	1,56
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	23.513.590.972	3,40
Jumlah PAD	692.080.401.298	100,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2026) diolah

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah dalam APBD TA 2025 ditetapkan sebesar Rp. 326.426.341.000,-. Realisasi pajak daerah adalah sebesar Rp. 328.609.585.472,- atau melampaui target dengan capaian sebesar 100,67%. Secara umum sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.3, kinerja realisasi pajak daerah TA 2025 dapat mencapai target yang telah ditetapkan kecuali pada sektor pajak sarang burung wallet dan Opsen BBNKB. Dalam rangka optimalisasi PAD, berbagai upaya yang dilakukan antara lain penyesuaian NJOP PBB-P2 secara selektif agar lebih mendekati harga pasar, pemutakhiran sistem informasi pajak daerah, pemantauan transaksi pajak secara elektronik, penyesuaian kompensasi pajak air tanah, kolaborasi dan sinergitas dengan Samsat Kudus, sosialisasi, pemeriksaan, dan penagihan.

Selain upaya ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan, capaian realisasi pajak daerah juga didukung pertumbuhan ekonomi lokal dan secara khusus perkembangan bisnis kuliner. Berkembangnya berbagai outlet merek restoran global dan nasional menyumbang kenaikan yang signifikan pada PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Begitu juga pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya mobilitas sosial masyarakat mendukung pertumbuhan pajak daerah yang berbasis konsumsi sebagaimana terjadi pada PBJT dan pajak air tanah. Pertumbuhan ekonomi juga mendorong tingginya transaksi jual beli tanah yang menyumbang kenaikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan pembebasan denda PBB-P2 juga turut mendukung tercapainya target tahun 2025. Namun demikian, sentimen global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah memberikan dampak yang signifikan terhadap PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Table 2.3
Capaian Pajak Daerah TA 2025

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PBB-P2	54.480.000.000	56.041.745.902	102,87
BPHTB	47.850.000.000	49.861.337.580	104,20
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	97.600.000.000	99.601.555.268	102,05
- PBJT Makanan & Minuman	17.150.000.000	18.318.899.676	106,82
- PBJT Tenaga Listrik	74.500.000.000	74.911.664.422	100,55
- PBJT Jasa Perhotelan	4.330.000.000	4.634.487.113	107,03
- PBJT Jasa Parkir	820.000.000	909.006.008	110,85
- PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	800.000.000	827.498.049	103,44
Pajak Reklame	3.750.000.000	4.167.005.675	111,12
Pajak Air Tanah	5.000.000.000	5.150.262.047	103,01
Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	70.000.000	101.000.000	144,29
Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000	4.805.000	68,64
Opsen PKB	75.006.364.000	77.984.203.500	103,97
Opsen BBNKB	42.662.977.000	35.697.670.500	83,67
JUMLAH	326.426.341.000	328.609.585.472	100,67

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2026) diolah

b. Retribusi Daerah

Dari target sebesar Rp. 331.308.950.326,-, retribusi daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 363.003.118.493,- atau 109,57%. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 2.4
Capaian Retribusi Daerah Kab. Kudus TA 2025

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Retribusi Jasa Umum	316.784.518.326	347.204.529.544	109,60
Retribusi Jasa Usaha	12.496.141.000	14.308.278.213	114,50
Retribusi Perizinan Tertentu	2.028.291.000	1.490.310.736	73,48
TOTAL	331.308.950.326	363.003.118.493	109,57

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2026) diolah

Retribusi jasa umum dari target Rp. 316.784.518.326,- dapat terealisasi sebesar Rp. 347.204.529.544,- atau sebesar 109,60% dari target. Dari 4 (empat) jenis retribusi jasa umum terdapat 2 (dua) jenis retribusi yang mencapai target, yaitu pelayanan kesehatan (112,14%) dan pelayanan kebersihan (106,29%). Adapun 2 (dua) jenis yang tidak mencapai target, yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum (90,44%) dan pelayanan pasar (54,90%). Tidak tercapainya target retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diakibatkan terdapat perbaikan jalan melintasi beberapa kantong parkir tepi jalan sedangkan untuk pelayanan pasar masih terdapat piutang pada tahun sebelumnya yang menjadi target untuk tahun 2025.

Tabel 2.5
Capaian Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kudus TA 2025

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.181.478.326	336.637.961.916	112,14
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.154.591.000	2.290.163.243	106,29
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.999.441.000	1.441.950.184	72,12
Retribusi Pelayanan Pasar	12.449.008.000	6.834.454.201	54,90
JUMLAH	316.784.518.326	347.204.529.544	109,60

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2026) diolah

Untuk retribusi jasa usaha dari target sebesar Rp.12.496.141.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.14.308.278.213,- atau sebesar 75,19%. Terdapat 4 (empat) jenis yang mencapai target yaitu Retribusi Tempat Khusus Parkir (112,70%), retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa (100,52%), penjualan produksi usaha daerah (300,73%) dan retribusi pemanfaatan asset daerah (136,71%). Adapun retribusi lain yang tidak tercapai target disebabkan turunnya jumlah kunjungan wisata dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta capaian retribusi pelayanan kegaitan tempat usaha yang sebelumnya merupakan pemanfaatan kekayaan asset daerah. Rincian retribusi jasa usaha sebagaimana pada Tabel 2.6.

Table 2.6
Capaian Hasil Retribusi Jasa Usaha Kab. Kudus TA 2025

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Retribusi Terminal	-	-	-
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.576.700.000	1.776.981.500	112,70
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	319.810.000	321.482.000	100,52
Retribusi Rumah Potong Hewan	51.860.000	50.674.000	97,71
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.776.808.000	2.440.080.500	87,87
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	106.508.000	320.304.000	300,73
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.264.472.000	649.231.558	51,34
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.399.983.000	8.749.524.655	136,71
JUMLAH	12.496.141.000	14.308.278.213	114,50

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2026) diolah

Retribusi perizinan tertentu ditargetkan sebesar Rp.2.028.291.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 1.490.310.736,- atau sebesar 74,48% dari APBD yang telah ditetapkan. Tingginya capaian retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) (225,2%) disebabkan adanya penambahan penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus. Sedangkan tidak tercapainya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada tahun 2025 disebabkan karena proses transisi dari IMD ke PBG sehingga perlu penyesuaian. Hasil retribusi perizinan tertentu yang terinci sebagaimana Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Capaian Hasil Retribusi Perizinan Tertentu Kab. Kudus TA 2025

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.949.412.000	1.312.678.336	67,34
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	78.879.000	177.632.400	225,20
JUMLAH	2.028.291.000	1.490.310.736	73,48

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2026) diolah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 12.240.871.700,- dari target sebesar Rp. 10.831.519.000,- atau sebesar 113,01% dari target yang telah ditetapkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terinci sebagaimana Tabel 2.8.

Table 2.8
 Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 Kabupaten Kudus TA 2025

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PD BPR BKK Kudus	622.898.000	622.898.406	100,00
Bank Jateng	7.586.212.000	8.995.563.907	118,58
Bank Daerah Kudus (Perseroda)	22.366.000	22.366.126	100,00
PDAM	2.600.043.000	2.600.043.261	100,00
Percetakan	-	-	-
JUMLAH	10.831.519.000	12.240.871.700	113,01

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2025) diolah

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 22.786.329.357,- dari target sebesar Rp. 23.513.590.972,- atau sebesar 96,91% dengan rincian sebagaimana dalam Tabel 2.9. Tidak tercapainya target pendapatan yang telah ditetapkan dikarenakan perbaikan manajemen kas akibat kebijakan Pemerintah Pusat yang berdampak pada turunnya simpanan Pemkab pada bank persepsi dan perbedaan nilai pengembalian kelebihan bayar belanja asset tetap TA 2025.

Tabel 2.9
 Capaian Lain-Lain PAD Yang Sah TA 2025

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	80.000.000	941.496.886	1.176,87
Jasa Giro	2.600.000.000	1.954.432.519	75,17
Pendapatan Bunga	9.566.751.000	3.726.027.390	38,95
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	292.224.221	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	586.000.000	631.526.078	107,77
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	13.240.726	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	635.376.385	-
Pendapatan dari Pengembalian	7.821.780.298	10.725.641.215	137,13
Pendapatan BLUD	2.859.059.674	3.862.503.937	135,10
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	-	3.860.000	-
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	-	-	-
JUMLAH	23.513.590.972	22.786.329.357	96,91

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2026) diolah

2.5 PENDAPATAN TRANSFER

Pada TA 2025 target pendapatan transfer ditetapkan sebesar Rp.1.741.838.365.468,- dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.752.784.338.077,- atau sebesar 100,63%. Target penerimaan ini terdiri pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang dianggarkan sebesar Rp. 1.623.516.788.468,- terealisasi sebesar Rp. 1.628.517.667.010,- atau sebesar 100,31%. Adapun pendapatan transfer antar daerah yang dianggarkan sebesar Rp.118.321.577.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 124.266.671.067,- atau sebesar 105,02%. Penurunan ini sejalan dengan rendahnya realisasi pemungutan pajak daerah di provinsi. pendapatan transfer antar daerah bersumber baik dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan yang tidak mencapai target.

Tabel 2.10
Capaian Pendapatan Transfer TA 2025

JENIS PENERIMAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.623.516.788.468	1.628.517.667.01	100,31
Dana Bagi Hasil (DBH)	355.745.280.000	363.408.259.400	102,15
Dana Alokasi Umum (DAU)	829.124.788.000	846.416.733.014	102,09
Dana Alokasi Khusus (DAK)	270.044.229.468	267.843.443.554	99,19
Dana Desa	140.654.773.000	122.938.794.042	87,40
Insentif Fiskal	27.947.718.000	27.910.437.000	99,87
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	118.321.577.000	124.266.671.067	105,02
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106.408.077.000	112.599.774.237	105,82
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	11.913.500.000	11.666.896.830	97,93
JUMLAH	1.741.838.365.468	1.752.784.338.077	100,63

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data per 15 Januari 2026) diolah

2.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pada TA 2025 tidak terdapat realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selama ini, akun ini menampung pendapatan hibah daerah sebagaimana diatur dalam PP 2/2012 yang diperoleh sebagai bagian dari penguatan PDAM melalui insentif pemasangan sambungan rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR). Pendapatan ini selanjutnya diteruskan sebagai penanaman modal pemerintah daerah kepada PDAM. Tidak tercapainya target penerimaan ini karena pemasangan SR yang masih di bawah target yang ditetapkan dalam perjanjian hibah daerah.

2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PER URUSAN

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka dianggarkan alokasi belanja bagi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis masing-masing urusan pemerintahan.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk belanja dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2025 sebesar Rp. 2.642.648.461.418,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.455.719.781.542,- atau mencapai 92,93%.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 tersebut tersebar untuk membiayai pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) Urusan ditambah Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Terbagi menjadi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (Delapan Belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 6 (Delapan) Urusan Pilihan, 2 (Dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 5 (Lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum. Adapun komposisi realisasi belanja per urusan dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini :

Tabel 2.10
Anggaran Dan Realisasi Belanja Per Urusan TA 2025

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		1.624.530.580.407	1.528.791.489.308	94,11
	1	Pendidikan	608.148.161.630	581.061.897.836	95,55
	2	Kesehatan	706.361.558.221	652.270.072.964	92,34
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.837.834.078	174.724.853.807	96,62
	4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	32.565.634.340	30.278.425.792	92,98
	5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	21.650.747.600	19.805.931.489	91,48
	6	Sosial	74.966.644.538	70.650.307.420	94,24
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar		203.436.219.505	190.992.372.706	93,88
	7	Tenaga Kerja	13.747.109.400	12.613.013.263	91,75
	8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	730.051.700	596.143.116	81,66
	9	Pangan	1.355.492.900	1.315.798.120	97,07
	10	Pertanahan	621.841.000	414.657.100	66,68
	11	Lingkungan Hidup	16.496.961.325	14.469.539.386	87,71

NO	URUSAN		ANGGARAN DAN REALISASI		
			Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.321.068.400	7.909.004.832	95,05
	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.083.260.184	15.297.859.990	95,12
	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.002.730.300	7.813.597.447	86,79
	15	Perhubungan	65.832.212.168	64.121.302.339	97,40
	16	Komunikasi dan Informatika	17.425.746.300	16.843.552.851	96,66
	17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1.411.136.500	1.327.528.830	94,08
	18	Penanaman Modal	6.679.014.100	5.948.893.154	89,07
	19	Kepemudaan dan Olahraga	8.850.703.364	8.199.574.662	92,64
	20	Statistik	64.931.000	22.349.000	34,42
	21	Persandian	78.445.000	61.281.879	78,12
	22	Kebudayaan	18.702.087.729	17.331.325.525	92,67
	23	Perpustakaan	17.850.581.335	16.548.921.103	92,71
	24	Kearsipan	182.846.800	158.030.109	86,43
3	Urusan Pemerintahan Pilihan		60.255.344.935	54.978.268.631	91,24
	25	Kelautan dan Perikanan	182.237.000	164.040.450	90,01
	26	Pariwisata	7.970.655.961	7.757.935.957	97,33
	27	Pertanian	22.989.501.046	21.238.535.147	92,38
	28	Kehutanan	14.897.000	14.485.250	97,24
	29	Perdagangan	28.067.519.928	24.828.995.404	88,46
	30	Perindustrian	1.030.534.000	974.276.423	94,54
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan		258.338.601.777	234.093.589.367	90,62
	27	Sekretariat Daerah	166.734.396.028	155.869.309.755	93,48
	28	Sekretariat DPRD	91.604.205.749	78.224.279.612	85,39
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan		397.678.276.886	365.642.811.035	91,94
	29	Perencanaan	12.173.205.134	11.332.862.849	93,10
	30	Keuangan	369.738.952.072	340.255.498.795	92,03
	31	Kepegawaian	13.348.508.180	11.863.346.779	88,87
	32	Pendidikan dan Pelatihan	1.950.627.700	1.750.728.574	89,75
	33	Penelitian dan Pengembangan	466.983.800	440.374.038	94,30
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan		23.804.953.000	12.639.039.664	53,09
	34	Inspektorat Daerah	23.804.953.000	12.639.039.664	53,09
7	Unsur Kewilayahan		61.357.007.608	56.325.651.327	91,80
	35	Kecamatan	61.357.007.608	56.325.651.327	91,80
8	Unsur Pemerintahan Umum		13.247.477.300	12.256.559.504	92,52
	36	Kesatuan Bangsa dan Politik	13.247.477.300	12.256.559.504	92,52
		Jumlah	2.642.648.461.418	2.455.719.781.542	92,93

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 15 Januari 2026)

2.8 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN

Permasalahan

Terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah TA 2025 di Kabupaten Kudus yang dapat diidentifikasi antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
- 2) Tingginya selisih NJOP PBB-P2 dibandingkan dengan harga pasar;
- 3) Rendahnya tingkat literasi digital dalam pengelolaan PDRD;
- 4) Pengelolaan data dan sistem informasi PDRD yang kurang memadai;
- 5) Pengendalian dan pengawasan pengelolaan PDRD kurang memadai;
- 6) Pengelolaan BUMD yang kurang optimal;
- 7) Pemanfaatan aset daerah kurang optimal; dan
- 8) Kapasitas sumber daya yang terbatas.

Alternatif Solusi

Dari rumusan masalah yang teridentifikasi, terdapat beberapa alternatif solusi yang diupayakan dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, edukasi, layanan konsultasi, dan pembinaan secara berkesinambungan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar PDRD;
- 2) Memantapkan dasar hukum pemungutan PDRD melalui penyusunan aturan pengelolaan sesuai kebutuhan.
- 3) Melakukan penyesuaian NJOP PBB-P2 lebih mendekati harga pasar;
- 4) Memperluas cakupan digitalisasi pendapatan daerah;
- 5) Melakukan pemutakhiran data dan mengembangkan sistem informasi sebagai bagian sistem pendukung keputusan;
- 6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan transaksi perpajakan daerah;
- 7) Memperkuat pembinaan dan pengawasan BUMD;
- 8) Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- 9) Melakukan koordinasi yang lebih baik terkait dana-dana transfer dan mengidentifikasi variabel-variabel penghitungan alokasi untuk memproyeksikan pendapatan transfer ke depan; dan
- 10) Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya secara berkelanjutan.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan diantaranya melalui asas desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan umum dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Dalam rangka desentralisasi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lebih jauh dijabarkan pada Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren pada pasal 11 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Selanjutnya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ditindaklanjuti dengan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sejumlah 24 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 6 (Enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selain urusan wajib sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten juga memiliki opsi untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun pelaksanaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan adalah sebagai berikut:

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus tertuang dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten

Kudus. Selanjutnya capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana di bawah ini, yang antara lain memuat:

- Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
- Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan Pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung Pemerintahan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

RINGKASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus meliputi 24 Jenis Urusan yang terdiri dari 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Khusus untuk capaian penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pelaporannya juga disampaikan melalui Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terdiri atas Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial, serta Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya penyelenggaraan Urusan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				147.617.889		141.248.235	147.617.889	95,69%		Subkegiatan bersumber dana APBN, pencairan transfer langsung ke lembaga/ sekolah untuk BOS dan BOP, transfer ke masing-masing guru untuk Tunjangan Profesi Guru, keduanya mempengaruhi realisasi keuangan (SP2D dan SPJ) karena menunggu proses rekonsiliasi pengSPJan lembaga/sekolah untuk BOS dan BOP, konfirmasi ke masing-masing guru untuk Tunjangan Profesi Guru.	Pelaksanaan subkegiatan yang telah direncanakan harus dilaksnakan segera dari triwulan I agar semua target capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai.	- Menjaga sinergi antara Disdikpora dengan DPRD Kabupaten Kudus dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, meskipun dengan keterbatasan anggaran. -Tetap terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Komisi D, serta terjaganya fokus penggunaan anggaran daerah pada program dan kegiatan yang lebih prioritas dan berdampak langsung kepada masyarakat.
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		147.372.889		141.080.806		95,73%				
			Angka Anak Tidak Sekolah usia 7 - 18 Tahun (ATS)	Persentase		0,36		0,51		141,67%			
			Persentase warga negara usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (APS PAUD) (SPM)	Persen		100		99,18		99,18%			
			Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun (SPM)	persen		97,82		99,97		102,20%			
			Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS kesetaraan) (SPM)	Persen		100		90,31		90,31%			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		75.223.205		71.517.844		95,07%				
			Persentase Sekolah Dasar (SD) terakreditasi A	Persen		84,43		78,64		93,14%			
			Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik	Persen		97,5		96,38		98,85%			
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		230.000		228.716		99,44%				
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang		1		1		100,00%			
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah		200.000		198.568		99,28%				
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		1		1		100,00%			
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		968.440		859.961		88,80%				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		7		7		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		450.000		446.080		99,13%				-Pengadaan mobil dinas operasional tidak dilaksanakan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan adanya prioritas anggaran pada program dan kegiatan yang bersifat wajib serta langsung berdampak pada pelayanan masyarakat.
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		3		3		100,00%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		150.000		148.750		99,17%				
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		1		1		100,00%			
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.000.000		873.614		87,36%				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		4		4		100,00%			
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		839.569		814.716		97,04%				
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		3115		3115		100,00%			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		5.280.509		4.198.531		79,51%				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		4815		4815		100,00%			
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		46.373.719		45.299.949		97,68%				
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		425		425		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		8.816.488		8.160.986		92,57%				
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang		425		425		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		50.000		49.550		99,10%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		425		425		100,00%			
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan		25.000		24.550		98,20%				
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		5		5		100,00%			
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		15.000		13.650		91,00%				
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		425		425		100,00%			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		130.000		77.641		59,72%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		4		4		100,00%			
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		452.350		406.496		89,86%				
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		5		5		100,00%			
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		193.000		191.758		99,36%				
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		1		1		100,00%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		960.000		952.793		99,25%				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		9		9		100,00%			
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		30.000		29.500		98,33%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/ atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		425		425		100,00%			
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		298.867		180.817		60,50%				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan		425		425		100,00%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		8.552.335		8.155.943		95,37%				
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		61		61		100,00%			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		207.928		205.274		98,72%				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket		2		2		100,00%			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		38.769.538		37.782.527		97,45%				
			Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) terakreditasi A	Persen		80,77		66,67		82,54%			
			Presentase Sarpras Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik	Persen		99,3		93,83		94,49%			
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		400.000		397.249		99,31%				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		2		2		100,00%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		716.025		710.605		99,24%				
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		5		5		100,00%			
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		360.000		349.200		97,00%				
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik		600		600		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		367.650		339.916		92,46%				
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik		1796		1796		100,00%			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		1.914.199		1.402.320		73,26%				
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		2007		2007		100,00%			
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		26.698.193		26.552.479		99,45%				
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		53		53		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		7.524.229		7.393.318		98,26%				
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang		54		54		100,00%			
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		20.000		19.400		97,00%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang		54		54		100,00%			
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan		25.000		24.550		98,20%				
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital		5		5		100,00%			
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		10.000		9.700		97,00%				
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang		54		54		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		88.242		72.849		82,56%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		4		4		100,00%			
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		233.000		201.258		86,38%				
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen		5		5		100,00%			
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		175.000		80.583		46,05%				
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan		54		54		100,00%			
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		10.000		8.740		87,40%				
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang		54		54		100,00%			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		228.000		220.360		96,65%				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket		4		4		100,00%			
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		28.954.216		27.402.264		94,64%				
			Persentase satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B (SPM)	Persen		70,64		89		125,99%			
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		60.000		60.000		100,00 %				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		1		1		100,00%			
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		12.497.956		10.928.068		87,44%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		660		660		100,00%			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		380.000		333.417		87,74%				
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		455		455		100,00%			
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		13.861.260		14.038.787		101,28 %				
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		445		445		100,00%			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		50.000		47.975		95,95%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pembangunan Ruang Kelas Baru		950.000		950.000		100,00 %				
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		4		4		100,00%			
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		595.000		595.000		100,00 %				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		7		7		100,00%			
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		360.000		310.600		86,28%				
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket		16		16		100,00%			
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		200.000		138.418		69,21%				
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan		455		455		100,00%			
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		4.425.930		4.378.171		98,92%				
			Persentase Satuan Pendidikan Kesetaraan yang terakreditasi	Persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		60.000		44.942		74,90%				
			Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan		18		18		100,00%			
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan		4.095.930		4.220.749		103,05 %				
			Jumlah Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		18		18		100,00%			
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		195.000		87.615		44,93%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		4.042		3.985		98,58%				
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan		1		1		100,00%			
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		70.958		20.880		29,43%				
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik		3000		3000		100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		120.000		93.348		77,79%				
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (Pendidikan Kesetaraan) (SPM)	Angka		58,67		59,22		100,94%			
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) (SPM)	Angka		59,78		86,28		144,33%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) (SPM)	Angka		70,28		86,49		123,06%			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		85.000		64.178		75,50%				
			Persentase mulok yg ditetapkan	Persen		60		60		100,00%			
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar		15.000		2.428		16,19%				
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen		3		3		100,00%			
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		40.000		40.000		100,00 %				
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku		80		80		100,00%			
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar		15.000		12.000		80,00%				
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	Orang		35		35		100,00%			
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar		15.000		9.750		65,00%				
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen		3		3		100,00%			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		35.000		29.170		83,34%				
			Persentase Mulok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang ditetapkan	Persen		60		60		100,00%			
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		5.000		5.000		100,00 %				
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		25.000		19.170		76,68%				
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku		460		460		100,00%			
			Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		5.000		5.000		100,00 %				
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		125.000		74.080		59,26%				
			Persentase satuan pendidikan yang memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai standar	Persen		82		85,47		104,23%			
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persen	125.000	81,96	74.080	81,96	59,26%	100,00%			
			Persentase kegiatan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan										
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		100.000		53.558		53,56%				
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dokumen		3		3		100,00%			
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		25.000		20.522		82,09%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Laporan		3		3		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN				100.829.374		92.079.429	100.829.374	91,32%		Adanya Kebijakan efisiensi dari beberapa sub Kegiatan dari pemerintah Pusat sehingga mempengaruhi Realisasi	apaian tahun 2025 sudah bagus agar ditingkatkan di tahun 2026, kegiatan mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.	- Perencanaan Kinerja: Melakukan peninjauan kembali dokumen perencanaan kinerja untuk keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta target yang ditetapkan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis perencanaan kinerja juga akan kami prioritaskan. - Pelaporan Kinerja: Memperkuat sistem pelaporan kinerja dengan memperjelas alur pelaporan, memperbaiki kualitas data yang dilaporkan, dan melaksanakan monitoring secara periodik terkait konsistensi antara realisasi kinerja dan rencana yang telah disusun.
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		98.047.104		89.498.386		91,28%				
			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen		100		97,51		97,51%			
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	per 1000 penduduk		1,6		1,6		100,00%			
			Persentase Desa/ Kelurahan STBM	Persen		75		75		100,00%			
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		85,73		85,73%			
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		82,26		82,26%			
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		85,11		85,11%			
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		86,69		86,69%			
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		100		100,00%			
			Persentase warga negara usia produktif yang endapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		100		100,00%			
			Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		100		100,00%			
			Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Persentase warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		100		100,00%			- Evaluasi Internal: Melaksanakan Evaluasi internal yang lebih sistematis dan objektif, mekanisme monitoring yang lebih rutin dan komprehensif, serta penyusunan laporan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. - Koordinasi dan komunikasi : Menjaln komunikasi secara intensif dengan Komisi D DPRD Kabupaten Kudus untuk memastikan sinergi dalam perencanaan program dan penyusunan kebijakan bidang kesehatan. -Pelibatan dalam Sosialisasi dan Advokasi : Mengundang anggota Komisi D dalam setiap kegiatan sosialisasi program kesehatan untuk memperkuat penyebaran informasi kepada masyarakat.
			Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		100		100,00%			
			Persentase warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	persen		100		171		171,00%			
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (minimal strata utama)	persen		100		100		100,00%			
			Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	persen		100		100		100,00%			
			Persentase fasyankes yang melakukan respons KLB/wabah(PE,pemeriksaan laboratorium, tata laksna kasus)	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		31.050.521		28.397.405		91,46%				
			Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial	persen		100		100		100,00%			
			Persentase puskesmas dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) yang memenuhi standar	persen		100		100		100,00%			
			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		1.213.500		912.251		75,18%				
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit		1		1		100,00%			
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2.396.625		2.004.040		83,62%				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit		3		3		100,00%			
			Pengembangan Puskesmas		7.781.290		7.743.736		99,52%				
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit		30		30		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		2.045.987		1.698.196		83,00%				-Pemenuhan layanan kesehatan sesuai siklus hidup di tingkat desa Meningkatkan kualitas serta kemudahan akses bagi masyarakat Di perolehnya gambaran terkait permasalahan kesehatan di suatu wilayah -Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan BKPSDM Kab. Kudus terkait kebutuhan tenaga atau pegawai tersebut. -Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan mendapat SDM (Tenaga Kesehatan & Tenaga Medis) sesuai prioritas dan sesuai kualifikasi pendidikan -Di penuhnya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan akses dari sebuah bangunan gedung - Sebagai dasar dalam proses pengusulan kepesertaan khususnya segmen PBPUPemda.
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit		1		1		100,00%			
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		3.516.999		3.417.381		97,17%				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		76		76		100,00%			
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		247.543		179.102		72,35%				
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit		58		58		100,00%			
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		13.848.578		12.442.697		89,85%				
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket		4		4		100,00%			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		66.114.146		60.343.988		91,27%				
			Cakupan balita ditimbang	persen		100		100		100,00%			
			Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	persen		100		100		100,00%			
			Cakupan kunjungan bayi	persen		100		85,11		85,11%			
			Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen		100		85,73		85,73%			
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	persen		95		117		123,16%			
			Cakupan penemuan dan pengobatan penderita Diabetes melitus	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Cakupan penjangkaran pada usia pendidikan dasar	persen		100		100		100,00%			Masyarakat mendapatkan layanan kesehatan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat lanjut dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan. -Akan dilaksanakan penguatan satgas dan jaringan puskesmas yang sudah ada. -Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Kudus, Bapelkes Provinsi Jawa Tengah dan Kemenkes terkait SDM dalam pembangunan sarana prasarana kesehatan - Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui UKOM dengan CAT -Setiap pegawai/karyawan an di Dinas Kesehatan agar mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.
			Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)	persen		90		85		94,44%			
			Persentase Fasyankes yang memiliki sertifikat akreditasi yang masih berlaku	persen		100		100		100,00%			
			Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans berbasis digital	persen		100		100		100,00%			
			Persentase kejadian luar biasa (KLB) di desa/ kelurahan ditanggulangi	persen		100		100		100,00%			
			Persentase penderita hipertensi berobat secara teratur	persen		100		100		100,00%			
			Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	persen		98		100		102,04%			
			Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	persen		100		100		100,00%			
			Persentase puskesmas dengan pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia	persen		100		100		100,00%			
			Persentase puskesmas dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	persen		100		100		100,00%			
			Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	persen		100		100		100,00%			
			Persentase Puskesmas yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM	persen		100		100		100,00%			
			Persentase sarana air minum yang diawasi/ diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar	persen		83		83		100,00%			
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	persen		0,7		0,7		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		250.000		224.608		89,84%				
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		13509		11054		81,83%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		133.000		118.990		89,47%				
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		12894		10607		82,26%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		123.000		90.396		73,49%				
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		12280		10451		85,11%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		714.000		595.612		83,42%				
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		61400		53371		86,92%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		305.000		286.864		94,05%				
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		126551		126551		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		421.484		398.118		94,46%				
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		572447		572447		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		36.837		35.352		95,97%				
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		103891		102375		98,54%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		204.330		196.000		95,92%				
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		232426		232426		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		23.020		20.000		86,88%				
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang		18032		18032		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		45.959		45.734		99,51%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang		2173		2173		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		151.684		126.837		83,62%				
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		12869		22056		171,39%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		245.196		237.660		96,93%				
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang		16867		16448		97,52%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		10.646		7.472		70,19%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen		52		52		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		3.232.785		2.797.378		86,53%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		132.084		122.279		92,58%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		430.845		335.950		77,97%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen		12		11		91,67%			
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		723.592		668.869		92,44%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan		82.834		65.476		79,04%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		82.130		80.535		98,06%				
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang		125		125		100,00%			
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		369.595		336.441		91,03%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen		156		156		100,00%			
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		56.239.342		51.824.800		92,15%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		215.000		155.018		72,10%				
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket		50		50		100,00%			
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		50.000		35.227		70,45%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen		12		12		100,00%			
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		12.165		2.454		20,18%				
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		241.149		115.411		47,86%				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit		36		36		100,00%			
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		200.000		179.915		89,96%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan		228		228		100,00%			
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		150.000		109.544		73,03%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen		52		52		100,00%			
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		666.335		571.990		85,84%				
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit		1		1		100,00%			
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		36.500		34.649		94,93%				
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		826		3091		374,21%			
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		113.040		91.296		80,76%				
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang		1908		709		37,16%			
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria		3.206		3.063		95,55%				
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang		3000		3000		100,00%			
			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		469.391		430.051		91,62%				
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		315.000		288.310		91,53%				
			Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaporkan data dan sistem informasi kesehatan	persen		100		90		90,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		315.000		288.310		91,53%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen		3		3		100,00%			
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		567.437		468.683		82,60%				
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	persen		100		100		100,00%			
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		540.923		443.436		81,98%				
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit		44		44		100,00%			
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		26.513		25.247		95,22%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen		11		11		100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		857.957		795.645		92,74%				
			Persentase faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar	persen		100		90		90,00%			
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		128.320		96.358		75,09%				
			Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	persen		100		80		80,00%			
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		50.000		32.478		64,96%				
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		50.000		37.059		74,12%				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang		920		890		96,74%			
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		28.320		26.821		94,71%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		729.637		699.287		95,84%				
			Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terpenuhi standar kompetensinya	persen		100		90		90,00%			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		729.637		699.287		95,84%				
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang		73		73		100,00%			
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		533.078		473.627		88,85%				
			Persentase sarana kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		232.568		193.782		83,32%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Persentase Industri Rumah Tangga yang terdata telah memiliki rekomendasi produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	persen		100		100		100,00%			
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		232.568		193.782		83,32%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen		60		60		100,00%			
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		75.000		67.989		90,65%				
			Persentase penyedia Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang terdata dengan rekomendasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	persen		100		100		100,00%			
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		75.000		67.989		90,65%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	Dokumen		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)										
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		225.510		211.856		93,95%				
			Persentase penyedia makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang terdata dan dilakukan pembinaan	persen		100		100		100,00%			
			Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		225.510		211.856		93,95%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		1.391.236		1.311.772		94,29%				
			Cakupan Desa Siaga Aktif	persen		81,73		81,73		100,00%			
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		858.464		815.289		94,97%				
			Persentase Desa/ Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	persen		100		100		100,00%			
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		858.464		815.289		94,97%				
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		350.000		326.669		93,33%				
			Persentase rumah tangga ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	persen		80,5		80,5		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		350.000		326.669		93,33%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		182.772		169.815		92,91%				
			Persentase Posyandu aktif	persen		85,7		85,7		100,00%			
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		182.772		169.815		92,91%				
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		12		12		100,00%			
	RSUD dr. LOEKMONO HADI				75.926.827		71.129.246	75.926.827	93,68%		Ada satu kegiatan yang belum selesai, dikarenakan penyedia menghentikan kegiatan.	Capaian tahun 2025 sudah bagus agar ditingkatkan di tahun 2026, kegiatan mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.	- Telah dilakukan Pendampingan penyusunan rancangan Draf Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi dan rancangan Draf Peraturan Bupati tentang Barang dan Jasa RSUD dr. Loekmono Hadi - Telah disusun Masterplan pengembangan Tahun 2025, serta Pemaparan Masterplan ke stakeholder
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		75.926.827		71.129.246		93,68%				
			Persentase sarana prasarana sesuai standart	Persen		87,5		82,22		93,97%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		75.926.827		71.129.246		93,68%				
			Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia	persen		100		100		100,00%			
			Persentase sarpras kesehatan yang berfungsi dengan baik	persen		75		100		133,33%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		1.498.500		1.366.000		91,16%				
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit		2		2		100,00%			
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		17.850.286		17.325.586		97,06%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit		82		82		100,00%			
			Pengembangan Rumah Sakit		56.578.041		52.437.660		92,68%				
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000	Unit		2		2		100,00%			
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				156.839.838		158.750.032	156.839.838	101,22 %		Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan PL, Lelang, maupun E kalatog karena kendala Menunggu Ekatalog versi 6 dari LKPP	diperlukan penetapan target indikator agar lebih SMART dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, personil , dan kondisi eksternal yang berpengaruh dalam pencapaian target indikator. keterlambatan kegiatan fisik, yang disebabkan permasalahan pada proses pelaksanaan kegiatan pengadaan perlu menjadi catatan penting sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan TA 2026	- Penyelesaian pekerjaan tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi - Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik - Komunikasi yang baik antara OPD dengan DPRD
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		16.736.366		16.133.966		96,40%				
			Presentase Infrastruktur irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen		93,25		90,59		97,15%			
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		3.254.500		3.202.237		98,39%				
			Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh insfrastruktur pengendalian banjir	persen		100		100		100,00%			
			Rehabilitasi Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir		400.000		394.102		98,53%				
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit		2		16		800,00%			
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		2.854.500		2.808.135		98,38%				
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM		4		976		24400,00 %			
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		13.481.866		12.931.729		95,92%				
			Rasio luas daerah irigasi wilayah kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		427.516		394.235		92,22%				
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM		0,5		0,5		100,00%			
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		12.505.966		12.007.513		96,01%				
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM		9		46,7		518,89%			
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		260.605		257.310		98,74%				
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM		75		75		100,00%			
			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi		287.778		272.672		94,75%				
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga		15		15		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		604.320		594.330		98,35%				
			Prosentase rumah tangga berakses air minum perpipaan	Persen		41		29,55		72,07%			
			Persentase pemantauan kualitas SPAM (desa)	%		100		100		100,00%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		604.320		594.330		98,35%				
			Persentase Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	persen		100		100		100,00%			
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		400.000		395.381		98,85%				
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		100.000		97.979		97,98%				
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik		1,5		1,5		100,00%			
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		104.320		100.970		96,79%				
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit		20		20		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		2.503.371		2.481.982		99,15%				
			Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	Persen		99,35		98,87		99,52%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		2.503.371		2.481.982		99,15%				
			Persentase sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dalam kondisi baik	persen		99,35		98,87		99,52%			
			Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		1.849.963		1.835.992		99,24%				
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	M ³ /Hari		25		25		100,00%			
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		653.408		645.990		98,86%				
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga		10		10		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		43.492.820		42.345.214		97,36%				
			Persentase saluran drainase kabupaten dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	Persen		68		66,71		98,10%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		43.492.820		42.345.214		97,36%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Rasio luas daerah genangan air yang terlayani oleh sistem drainase	persen		95		95		100,00%			
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		37.904.619		37.041.720		97,72%				
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan		8		64		800,00%			
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan		5.588.201		5.303.494		94,91%				
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan		5		71		1420,00%			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		2.061.274		1.961.426		95,16%				
			Rasio Bangunan berijin	Persen		8		5,6		70,00%			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		2.061.274		1.961.426		95,16%				
			persentase rekomendasi teknis bangunan yang di terbitkan sesuai dengan standart	persen		71		71		100,00%			
			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		1.809.348		1.764.385		97,51%				
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung		5		5		100,00%			
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		251.927		197.041		78,21%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataa	Dokumen		150		239		159,33%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		90.949.641		94.756.521		104,19%				
			Prosentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi Mantap	Persen		95		91,89		96,73%			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persen	90.949.641	94	94.756.521	91,89	104,19%	97,76%			
			Persentase Penyelenggaraan Jalan dan jembatan Kabupaten/Kota	persen		96		95,45		99,43%			
			Persentase alat berat dalam kondisi baik	persen									
			Penggantian Jembatan		2.021.835		1.963.081		97,09%				
			Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembatan		7		2		28,57%			
			Pembangunan Jalan		12.780.881		19.422.117		151,96%				
			Panjang Jalan yang Dibangun	KM		5		5,79		115,80%			
			Rehabilitasi Jembatan		2.528.586		2.261.593		89,44%				
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan		5		18		360,00%			
			Pembangunan Jembatan		214.378		210.393		98,14%				
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan		0		0		0%			
			Rehabilitasi Jalan		73.403.960		70.899.338		96,59%				
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM		2		42,39		2119,50%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		28.517		25.264		88,59%				
			Persentase tenaga jasa kontruksi yang memiliki sertifikasi kompetensi	Persen		54		54		100,00%			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		28.517		25.264		88,59%				
			Cakupan jumlah tenaga kontruksi yang dilatih	persen		54		54		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		28.517		25.264		88,59%				
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang		60		60		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		463.529		451.331		97,37%				
			persentase ketersediaan dokumen regulasi rencana tata ruang	Persen		60		60		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		310.709		306.480		98,64%				
			Persentase kesesuaian perencanaan tata ruang	persen		20		20		100,00%			
			Penyusunan Peta Dasar		190.350		188.430		98,99%				
			Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta		1		1		100,00%			
			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota		120.360		118.050		98,08%				
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota		152.820		144.851		94,79%				
			persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	persen		97,1		98,26		101,19%			
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		152.820		144.851		94,79%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen		1		1		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				4.705.921		4.396.209	4.705.921	93,42%		1. Minimnya kualitas dan kuantitas sarpras pengelolaan persampahan 2. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan 3R (reduce, reuse, recycle) yang semakin menambah beban kinerja TPA	Perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan berbasis hasil evaluasi kinerja tahun berjalan, melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.	- Mengurangi permasalahan penumpukan sampah di desa. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis wilayah/ desa. Tersedianya lokasi TPST dan alternatif perluasan TPA guna mendukung pengelolaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		513.346		484.129		94,31%				
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Persen		100		100		100,00%			
			Rata-rata persentase pelayanan penyediaan perumahan layak	Persen		87,75		82,74		94,29%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/ kab/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen		100		100		100,00%	3. Alih fungsi lahan dan keterbatasan lahan dalam peningkatan ruang terbuka hijau 4. Masih adanya pencemaran lingkungan		sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan - Mengurangi beban dan kapasitas overload di TPA Tanjungrejo. Menyediakan solusi sementara penanganan sampah di desa. Terwujudnya pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		4.107		2.984		72,66%				
			Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang ditindaklanjuti	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		375		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		3.732		2.984		79,96%				
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		15.600		15.000		96,15%				
			Persentase Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang disediakan	persen		100		100		100,00%			
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		15.000		15.000		100,00 %				
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota		600		0		0,00%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Rumah Tangga		1		0		0,00%			
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		464.988		441.353		94,92%				
			Persentase okupansi hunian rusunawa	persen		63,3		48,23		76,19%			
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	464.988	1	441.353	1	94,92%	100,00%			
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		28.651		24.792		86,53%				
			Presentase dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	28.229	1	24.373	1	86,34%	100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum		422		419		99,27%				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/ Rumah Susun Umum	Laporan		1		1		100,00%			
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		797.897		565.464		70,87%				
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	Persen		19,07		22,75		119,30%			
			Presentase lingkungan permukiman kumuh yang ditangani	Persen		66,59		68,93		103,51%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		797.897		565.464		70,87%				
			Presentase dokumen rencana penataan lingkungan permukiman yang disusun sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Presentase RTLH yang diperbaiki dan atau dibangun	persen		62,03		64,56		104,08%			
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		763.112		538.112		70,52%				
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah		49		34		69,39%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	34.785		27.352		78,63%				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			1		1		100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		3.394.679		3.346.616		98,58%				
			Persentase PSU dalam kondisi baik	Persen		76,57		77,15		100,76%			
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		3.394.679		3.346.616		98,58%				
			Persentase perbaikan PSU perumahan	persen		66,67		400		599,97%			
			Persentase Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan yang sudah diserahkan ke pemkab	persen		56,1		58,7		104,63%			
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		3.394.679		3.346.616		98,58%				
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi		9		17		188,89%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				2.234.686		1.884.225	2.234.686	84,32%		Komunikasi yang kurang efektif dan manajemen yang kurang kompeten menjadikan pelaksanaan kegiatan kurang berjalan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Rendahnya komitmen dan motivasi dalam bekerja membuat progres capaian kinerja kurang optimal.	- Perencanaan pencapaian kinerja dan rencana anggaran agar lebih diselenggarakan dengan pentahapan pelaksanaan dalam satu tahun anggaran, sehingga progres capaian dapat terakumulasi secara optimal sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. - Perlu dilakukan perencanaan yang lebih baik, mengingat pada tahun 2026 akan diberlakukan kebijakan penurunan TKD yang berdampak pada keterbatasan pagu anggaran di seluruh OPD. Dengan kondisi tersebut, maka hanya kebutuhan mengikat, wajib, dan prioritas yang dapat dianggarkan. - Diperlukan juga penetapan target indikator agar lebih SMART-C dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, personil, dan kondisi eksternal yang berpengaruh dalam pencapaian target indikator pada tahun 2026.	Dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Satpol PP Kabupaten Kudus akan melaksanakan koordinasi komunikasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis terkait agar lebih maksimal dalam melaksanakan penindakan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah.
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1.218.482		885.044		72,63%				
			Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang terselesaikan	Persen		85		100		117,65%			
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		258.599		240.633		93,05%				
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		11.565		10.203		88,22%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		13.347		11.722		87,83%				
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		12		10		83,33%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		17.262		14.839		85,96%				
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang		850		457		53,76%			
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		1.409		1.293		91,78%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen		2		2		100,00%			
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		1.334		1.233		92,46%				
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen		9		9		100,00%			
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		197.279		188.018		95,31%				
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan		30		30		100,00%			
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		5.463		5.260		96,29%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan		1		1		100,00%			
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah		2.744		0		0,00%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan		1		0		0,00%			
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8.196		8.064		98,39%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit		67		67		100,00%			
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		900.621		587.838		65,27%				
			Cakupan Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	persen		100		100		100,00%			
			Jumlah Strategi Penegakan Perda dan Perkada	strategi		3		3		100,00%			
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		27.037		18.417		68,12%				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		12		12		100,00%			
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		860.354		560.301		65,12%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan		180		100		55,56%			
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		13.230		9.120		68,94%				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		59.263		56.573		95,46%				
			Jumlah Fasilitas Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	kali		1		1		100,00%			
			Persentase Aparat Satpol PP yang memiliki kompetensi PPNS	persen		10		10		100,00%			
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		59.263		56.573		95,46%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		1.016.204		999.181		98,32%				
			Persentase ketercapaian SPM Damkar (FORMULASI : jumlah SPM Damkar yang terpenuhi dibagi jumlah SPM Damkar sesuai permendagri SPM dikali 100%)	Persen		100		97,85		97,85%			
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.012.804		995.781		98,32%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	jenis		2		2		100,00%			
			kualitas layanan pemadam kebakaran sesuai standar pelayanan	persen		100		100		100,00%			
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		54.660		54.107		98,99%				
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen		5		5		100,00%			
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		958.144		941.674		98,28%				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		76		72		94,74%			
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		3.400		3.400		100,00 %				
			Cakupan layanan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	persen		100		100		100,00%			
			Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	pnjek		482		591		122,61%			
			Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		3.400		3.400		100,00 %				
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				1.292.037		1.135.646	1.292.037	87,90%		Koordinasi dengan lintas OPD merupakan salah satu tantangan. Namun demikian hal ini dapat difasilitasi dengan baik melalui koordinasi dengan OPD terkait, seperti Dinas PUPR, BBWS Pemali Juana dan Pemdes.	BPBD perlu mengingatkan kembali Kencana agar menganggarkan mesin pemotong Senso pada tiap kecamatan untuk memotong pohon-pohon tumbang yang kemungkinan setiap saat bisa terjadi.	Perlu dibentuk atau dioptimalkan forum koordinasi rutin dengan OPD terkait, menyusun SOP dan penetapan SOP bersama yang mengatur alur koordinasi serta pembagian peran masing-masing, Pemerintah Desa perlu dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pengawasan lapangan, melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama secara berkala terhadap hasil koordinasi lintas OPD. -Dokumen kebencanaan akan lebih baik karena telah melibatkan semua pihak termasuk unsur pentahelix -Kalak BPBD akan dievaluasi kinerjanya -BTT telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 34 Tahun 2025 yang menjadi pedoman
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1.292.037		1.135.646		87,90%				
			Persentase ketercapaian SPM Trantibumlinmas Sub-Urusan Bencana	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase Desa Tangguh Bencana	Persen		55		55		100,00%			
			Persentase Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana di Wilayah Rawan Bencana	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase penanganan darurat kebencanaan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Persen		100		100		100,00%			
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		164.641		157.624		95,74%				
			Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	persen		100		100		100,00%			
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		128.675		124.327		96,62%				
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang		575		575		100,00%			
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		35.966		33.297		92,58%				
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		577.892		556.876		96,36%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		104.795		102.800		98,10%				
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit		327		327		100,00%			
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		24.688		21.771		88,18%				
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang		500		500		100,00%			
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		65.290		64.025		98,06%				
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan		2		2		100,00%			
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		24.683		20.826		84,38%				
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang		50		50		100,00%			
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		33.705		32.944		97,74%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		115.471		113.770		98,53%				
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan		12		12		100,00%			
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		87.070		82.804		95,10%				
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		122.190		117.935		96,52%				
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan		3		3		100,00%			
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		477.054		366.192		76,76%				
			Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	persen		100		100		100,00%			
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		1.040		950		91,35%				
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	108.000	1	72.720	1	67,33%	100,00%			
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat										
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		69.838		57.842		82,82%				
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang		20		20		100,00%			
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		295.636		232.431		78,62%				
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang		200		200		100,00%			
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit		1.040		850		81,73%				
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen		1		1		100,00%			
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		1.500		1.400		93,33%				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan		1		1		100,00%			
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		72.450		54.954		75,85%				
			Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Pascabencana	persen		100		100		100,00%			
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		38.112		28.994		76,08%				
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		34.338		25.960		75,60%				
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		2		2		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				66.778.605		63.770.312	66.778.605	95,50%		1. Pelaksanaan tidak memenuhi rencana Timeline yang telah dibuat, karena kurangnya personil 2. Pada Anggaran DAK BOKB semula difocusing (Manmin dan SPPD 50%), kemudian dikembalikan lagi di anggaran Perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur, waktu tidak mencukupi 3. Kegiatan Pembangunan Fisik di Anggaran Perubahan yang memerlukan proses pengadaan secara Lelang, Waktu pelaksanaan pekerjaan (+/- 3 bulan) tidak mencukupi	Diharapkan perencanaan tahun berikutnya dapat diimbangi dengan komitmen pimpinan beserta pegawai, agar target kinerja dapat dicapai	-Dengan Terlaksananya Sosialisasi Kie Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di 9 Kecamatan Dan Seluruh Desa Kabupaten Kudus, Anak Sekolah Di 9 Kecamatan SLTA Sederajat -Tujuan Adanya Peran Aktif Dari Anggota Dprd Kabupaten Kudus Dan Admin Desa Supaya Penyaluran Yang Kondusif Dan Bantuan Yang Diserahkan Tepat Sasaran
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		419.907		344.636		82,07%				
			Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS	persen		85		85		100,00%			
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		419.907		344.636		82,07%				
			Persentase PSKS yang aktif dalam Penangan PPKS	persen		85		85		100,00%			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		28.804		21.899		76,03%				
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		24		24		100,00%			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		262.355		237.122		90,38%				
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kab/Kota	Orang		9		9		100,00%			
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		128.748		85.614		66,50%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga		11		11		100,00%			
			Peningkatan kualitas SDM PKH	kali		1		1		100,00%			
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial (SPM)	persen	1.899.508	100	1.613.400	100	84,94%	100,00%			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		477.471		455.162		95,33%				
			Persentase anak terlantar yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar	persen		100		100		100,00%			
			Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar	persen		100		100		100,00%			
			persentase lansia terlantar yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dasar	persen		100		100		100,00%			
			Persentase penyandang disabilitas miskin yg menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Permakanan		50.600		46.326		91,55%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		120		120		100,00%			
			Penyediaan Sandang		30.600		29.289		95,72%				
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		50		50		100,00%			
			Penyediaan Alat Bantu		212.611		207.590		97,64%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		125		125		100,00%			
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		9.746		8.750		89,77%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		15		15		100,00%			
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		4.023		3.470		86,26%				
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		16		16		100,00%			
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		5.673		5.265		92,80%				
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Orang		15		15		100,00%			
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		7.938		5.620		70,80%				
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		5		5		100,00%			
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		2.766		2.028		73,34%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kab/Kota	Orang		5		5		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		139.613		133.832		95,86%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	Orang		20		20		100,00%			
			Publikasi / Sosialisasi SPM Sosial	kali		2		2		100,00%			
			Pemberian Layanan Kedaruratan		3.288		3.031		92,16%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10		10		100,00%			
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		5.015		4.365		87,04%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10		10		100,00%			
			Pemberian Layanan Rujukan		5.598		5.598		100,00 %				
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		10		10		100,00%			
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		1.422.037		1.158.238		81,45%				
			Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat bantuan rehabilitasi sosial	persen		78		78		100,00%			
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		4.990		4.940		99,00%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	Orang		139		139		100,00%			
			Pemberian Layanan Kedaruratan		107.156		81.774		76,31%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		500		500		100,00%			
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		7.809		7.058		90,38%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Orang	1.302.082	20	1.064.466	20	81,75%	100,00%			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen		154		154		100,00%			
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		64.155.509		61.573.699		95,98%				
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	persen		90		85		94,44%			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		64.155.509		61.573.699		95,98%				
			Persentase data PPKS Daerah Kab/Kota yang tervalidasi	persen		67		80		119,40%			
			Persentase keluarga yang mengalami graduasi setelah mendapat bantuan sosial	persen		8		24		300,00%			
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		686.320		507.875		74,00%				
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota yang Didata	Orang		312435		288212		92,25%			
			Sosialisasi Peningkatan KUBE PKH Mandiri	kecamatan		9		9		100,00%			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota		4.401.989		2.635.510		59,87%				
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga		48074		26994		56,15%			
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		59.067.200		58.430.313		98,92%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Keluarga		49056		48139		98,13%			
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		278.447		219.590		78,86%				
			Persentase korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	persen		100		100		100,00%			
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		262.263		204.567		78,00%				
			Persentase korban bencana alam/sosial yang menerima bansos selama masa tanggap darurat (SPM)	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Makanan		180.560		146.823		81,32%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		500		500		100,00%			
			Penyediaan Sandang		49.000		30.635		62,52%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		100		100		100,00%			
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		26.170		23.659		90,40%				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		100		100		100,00%			
			Pelayanan Dukungan Psikososial		6.533		3.450		52,81%				
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		16.184		15.023		92,83%				
			Persentase Tagana yang trampil dalam penanganan bencana	persen		60		50		83,33%			
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		16.184		15.023		92,83%				
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		20		20		100,00%			
			<i>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</i> <i>Persentase pemeliharaan TMP yang sesuai standar</i>	<i>persen</i>	<i>25.233</i>	<i>100</i>	<i>18.988</i>	<i>100</i>	<i>75,25%</i>	<i>100,00%</i>			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		25.233		18.988		75,25%				
			Jumlah pemeliharaan TMP Kab/Kota	kali		2		2		100,00%			
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	25.233	53	18.988	53	75,25%	100,00%			

3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

(* dalam ribu rupiah)

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIA N, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				3.786.899		3.552.167	3.786.899	93,80%		Meskipun kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, perubahan kebijakan anggaran di awal tahun memerlukan penyesuaian pelaksanaan yang berdampak pada keterlambatan beberapa kegiatan. Kebijakan efisiensi anggaran juga membuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi lebih kompleks. Selain itu, kebijakan daerah terkait pengadaan makan dan minum berdampak pada belum optimalnya serapan anggaran pada beberapa sub-kegiatan.	Untuk tahun depan, Dinas Nakerperinkop harus dapat meningkatkan indikator pada tahun sebelumnya. Dengan perencanaan yang matang, maka implementasi dari program, kegiatan, dan sub kegiatan akan lebih terarah dan terukur. Setiap program dan kegiatan yang disusun harus dapat mendukung indikator utama OPD.	Monitoring kebhakerjaan dilakukan untuk: 1. Mengetahui sejauh mana alumni berhasil mendapatkan pekerjaan atau wirausaha. 2. memperoleh data dan informasi terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi alumni saat memasuki dunia kerja serta merumuskan tindak lanjut yang tepat.
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		18.320		12.763		69,67%				
			Persentase perusahaan yang melaksanakan kegiatan mengacu ke rencana tenaga kerja	persen		0,8		0,91		113,75%			
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		18.320		12.763		69,67%				
			Persentase Perusahaan yang menyusun RTK Mikro	Persen		11		14,81		134,64%			
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		18.320		12.763		69,67%				
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang		8		8		100,00%			
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		3.419.831		3.225.609		94,32%				
			Presentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	persen		19		11,8		62,11%			
			Presentase Kebekerjaan Lulusan Pelatihan	persen		60		60,7		101,17%			
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		3.408.250		3.215.603		94,35%				
			Persentase peserta pelatihan yang terampil	Persen		86		96		111,63%			
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		3.408.250		3.215.603		94,35%				
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang		1040		1040		100,00%			
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Presentase LPKS yang dibina	Persen	11.581	70	10.007	70,27	86,41%	100,39%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		11.581		10.007		86,41%				
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga		26		26		100,00%			
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		272.261		249.026		91,47%				
			Presentase pencari kerja yang ditempatkan	persen		75,85		75,88		100,04%			
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		36.919		34.379		93,12%				
			Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Pelayanan Antar Kerja baik AKL, AKAD	Persen		71,8		72,13		100,46%			
			Pelayanan antar Kerja		23.264		21.330		91,69%				
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang		3020		4408		145,96%			
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		13.655		13.049		95,56%				
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang		175		178		101,71%			
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		210.092		193.430		92,07%				
			presentase informasi pasar kerja yang tersedia	Persen		80		81,97		102,46%			
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		78.655		66.219		84,19%				
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang		6100		6111		100,18%			
			Job Fair/Bursa Kerja		131.437		127.211		96,79%				
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang		100		158		158,00%			
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		25.250		21.217		84,03%				
			Persentase perlindungan PMI di Kabupaten	Persen		91		100		109,89%			
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		25.250		21.217		84,03%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang		210		229		109,05%			
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		76.488		64.768		84,68%				
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen		18		18		100,00%			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		44.278		39.412		89,01%				
			Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)/ PKB	persen		18		18		100,00%			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		5.000		4.989		99,78%				
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan		15		37		246,67%			
			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		2.000		2.000		100,00 %				
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan		3		12		400,00%			
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	37.278	5	32.423	5	86,98%	100,00%			
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kasus yang terselesaikan	Persen	32.210	100	25.356	100	78,72%	100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		12.350		11.450		92,71%				
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara		5		13		260,00%			
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.000		2.000		100,00 %				
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara		5		13		260,00%			
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		2.230		1.857		83,27%				
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja		2		2		100,00%			
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		11.670		6.094		52,22%				
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga		1		1		100,00%			
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	3.960	40	3.955	40	99,87%	100,00%			
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				730.052		596.143	730.052	81,66%		1. Pelaksanaan tidak memenuhi rencana Timeline yang telah dibuat, karena kurangnya personil	Diharapkan perencanaan tahun berikutnya dapat diimbangi dengan komitmen pimpinan beserta pegawai, agar target kinerja dapat dicapai	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		608.477		512.250		84,19%		2. Pada Anggaran DAK BOKB semula difocusing (Manmin dan SPPD 50%), kemudian		

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja Langsung APBD	persen		47		84,27		179,30%	dikembalikan lagi di anggaran Perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur, waktu tidak mencukupi 3. Kegiatan Pembangunan Fisik di Anggaran Perubahan yang memerlukan proses pengadaan secara Lelang, Waktu pelaksanaan pekerjaan (+/-3 bulan) tidak mencukupi		
			Persentase Perempuan yang bekerja	persen		93,8		94,57		100,82%			
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		55.805		47.203		84,59%				
			Persentase Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah Kab /Kota yang telah dilatih PUG	persen		85		100		117,65%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		55.805		47.203		84,59%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		552.672		465.047		84,15%				
			Persentase perempuan yang terampil setelah mendapat pelatihan pemberdayaan perempuan	persen		70		70		100,00%			
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	552.672	9	465.047	9	84,15%	100,00%			
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia										
			Sosialisasi peningkatan kapasitas Organisasi Wanita	kali		6		6		100,00%			
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		17.956		10.092		56,21%				
			Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani	persen		100		100		100,00%			
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persen	11.109	100	7.386	100	66,48%	100,00%			
			Persentase lembaga penyedia layanan kekerasan terhadap perempuan										

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		11.109		7.386		66,48%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		6.847		2.707		39,53%				
			Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		2.916		857		29,41%				
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		10		10		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		3.931		1.849		47,04%				
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan		10		10		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		4.441		3.771		84,91%				
			Data SIGA yang sesuai ketentuan	persen		100		94,44		94,44%			
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4.441		3.771		84,91%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah data sistem informasi gender dan anak yang tervalidasi	Dokumen		7		7		100,00%			
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota		4.441		3.771		84,91%				
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kab/Kota yang Tersedia	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		53.373		40.830		76,50%				
			Persentasi Fasilitas layanan Publik Ramah Anak	persen		25		25		100,00%			
			Persentase Forum Anak yang aktif	persen		64		64		100,00%			
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		25.360		20.267		79,92%				
			Persentase Lembaga Layanan anak yang telah Memiliki SPM	Persen		75		75		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		25.360		20.267		79,92%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Persen	28.014	70	20.563	70	73,40%	100,00%			
			Persentase forum anak yang aktif										
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		28.014		20.563		73,40%				
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan	persen	45.805	100	29.200	100	63,75%	100,00%			
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		7.829		3.285		41,95%				
			Persentase media massa yang pernah bekerjasama untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Persen		50		50		100,00%			
			koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota		7.829		3.285		41,95%				
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		20.925		12.027		57,48%				
			Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan dari kekerasan	persen		100		100		100,00%			
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	20.925	18	12.027	18	57,48%	100,00%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		17.051		13.889		81,46%				
			Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan dari kekerasan	persen		100		100		100,00%			
			Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota		17.051		13.889		81,46%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen		1		1		100,00%			
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				1.275.939		1.238.759	1.275.939	97,09%		Adanya pergantian PPK karena memasuki masa purna sampai adanya pergantian PPK membuat pelaksanaan pekerjaan jadwalnya mundur sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai yang ditargetkan	Apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus atas peningkatan kinerja ASN yang tetap stabil dan berorientasi pada hasil meskipun dihadapkan pada kendala transisi PPK. Keberhasilan dalam meminimalisir dampak keterlambatan jadwal merupakan buah dari koordinasi yang sangat baik antar lini serta komitmen kuat dalam melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan. Konsistensi dalam menjalankan monitoring dan evaluasi rutin, yang terbukti menjadi instrumen efektif dalam mendeteksi hambatan sejak dini sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil untuk menjaga target tetap dalam jangkauan. Langkah- langkah ke depannya untuk meningkatkan kinerja	- Adanya koordinasi dan kolaborasi pendampingan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan - Desa dapat memberikan kontribusi ketahanan pangan melalui dana desa, sehingga dapat membantu pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan - Peningkatan kapasitas dan kesadaran para pelaku usaha pemotongan unggas dalam rangka terwujudnya Jaminan Produk Halal - Penjaminan produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) sehingga menciptakan ketentraman batin pada masyarakat/ konsumen - Memberikan pemahaman mengenai
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		219.035		209.979		95,87%				
			Persentase Kelompok lumbung pangan yang berdaya	persen		78,26		78,26		100,00%			
			Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		219.035		209.979		95,87%				
			Jumlah lumbung pangan yang dimanfaatkan	Unit		18		18		100,00%			
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya		219.035		209.979		95,87%				
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit		3		3		100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		929.094		902.986		97,19%				
			Persentase ketersediaan pangan utama	persen		100		111,46		111,46%			
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		223.758		222.498		99,44%				
			Prosentase informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah yang tersedia	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		157.533		157.475		99,96%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan		14		14		100,00%		pelaksanaan anggaran dan fisik 2026, antara lain: 1. Perencanaan suksesi yang proaktif, memetakan pegawai terkait masa purna dan mempersiapkan penggantinya. 2. Membuat SOP serah terima jabatan yang komprehensif 3. Mitigasi jadwal melalui manajemen kontrak.	teknis penyembelihan yang sah secara Islam sehingga menghasilkan produk yang halal. - Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat memanfaatkan alat dan mesin pertanian secara gratis sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi. - Petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi. - Petani atas nama pribadi atau kelompok tani dapat mengajukan rekomendasi pembelian BBM subsidi - Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat mengajukan permohonan bantuan obat-obatan pertanian untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman -Petani yang tergabung dalam Poktan/
			Pemantauan Stok Pangan		9.410		8.810		93,62%				
			Informasi Stok Pangan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/ Kota		56.815		56.213		98,94%				
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/ Kota	Laporan		40		40		100,00%			
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota		668.603		655.570		98,05%				
			Prosentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah	persen		88,88		72,97		82,10%			
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		627.313		622.445		99,22%				
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Ton		64		64		100,00%			
			Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota		41.290		33.125		80,23%				
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara	Ton		64		64		100,00%			
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		36.733		24.918		67,84%				
			Prosentase kelompok olahan pangan lokal yang berdaya	persen		62,07		62,07		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		36.733		24.918		67,84%				
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan		15		15		100,00%			
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		87.661		85.980		98,08%				
			Persentase daerah rawan pangan	persen		6,81		4,55		66,81%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		87.661		85.980		98,08%				Gapoktan dapat mengajukan permohonan bantuan prasarana pertanian. - Dinas Pertanian melalui PPL membantu penyusunan RDKK. Pembagian alokasi pupuk bersubsidi memperhitungkan RDKK dan LP2B. Mekanisme penyaluran melalui distributor, kios pupuk lengkap (pengecer) dan kelompok tani. - Data inventarisasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Kudus - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani - Upaya pembinaan generasi muda untuk pengenalan pertanian - Upaya regenerasi SDM pertanian - Meningkatkan pemasaran produk pertanian dan olahan hasil pertanian
			Jumlah desa rawan pangan yang terfasilitasi	Desa		18		18		100,00%			
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		9.270		9.270		100,00 %				
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen		12		12		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota		78.391		76.710		97,86%				
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan		20		20		100,00%			
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		40.149		39.813		99,16%				
			Persentase pangan segar aman konsumsi	persen		89		92,31		103,72%			
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		40.149		39.813		99,16%				
			Prosentase kelompok penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan	persen		86		100		116,28%			
			Prosentase pangan segar aman konsumsi yang diuji	persen		86		84,62		98,40%			
			Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		40.149		39.813		99,16%				
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					621.841		414.657	621.841	66,68%		Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan PL, Lelang, maupun E kalatog karena kendala Menunggu Ekatalog versi 6 dari LKPP	Diperlukan penetapan target indikator agar lebih SMART dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, personil, dan kondisi eksternal yang berpengaruh dalam pencapaian target indikator. keterlambatan kegiatan fisik, yang disebabkan permasalahan pada proses pelaksanaan kegiatan pengadaan perlu menjadi catatan penting sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan TA 2026	- Penyelesaian pekerjaan tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi - Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik - Komunikasi yang baik antara OPD dengan DPRD
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			68.169		7.101		10,42%				
				Persentase luas tanah terkena pembangunan untuk kepentingan umum yang terselesaikan dokumen administrasinya	Persen		95		60		63,16%			
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			68.169		7.101		10,42%				
				Persentase dokumen administrasi penunjang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diselesaikan sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			68.169		7.101		10,42%				
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			553.672		407.556		73,61%				
				Persentase luas konsolidasi tanah yang terselesaikan	Persen		75		100		133,33%			
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			553.672		407.556		73,61%				
				Persentase kegiatan penunjang dan administrasi konsolidasi tanah	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			553.672		407.556		73,61%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				15.910.771		14.469.539	15.910.771	90,94%		1. Minimnya kualitas dan kuantitas sarpras pengelolaan persampahan 2. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan 3R (reduce, reuse, recycle) yang semakin menambah beban kinerja TPA 3. Alih fungsi lahan dan keterbatasan lahan dalam peningkatan ruang terbuka hijau 4. Masih adanya pencemaran lingkungan	Perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan berbasis hasil evaluasi kinerja tahun berjalan, melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.	- Mengurangi permasalahan penumpukan sampah di desa. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis wilayah/desa. Tersedianya lokasi TPST dan alternatif perluasan TPA guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan. - Mengurangi beban dan kapasitas overload di TPA Tanjungrejo. Menyediakan solusi sementara penanganan sampah di desa. Terwujudnya pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		204.633		196.949		96,25%				
			Presentase dokumen perencanaan Lingkungan hidup yang disusun sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		84.749		81.278		95,90%				
			Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota		84.749		81.278		95,90%				
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		119.883		115.671		96,49%				
			Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang		119.883		115.671		96,49%				
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		302.442		290.739		96,13%				
			Persentase hasil uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	Persen		12,5		41,67		333,36%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Persentase hasil uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	Persen		87,56		100		114,21%			
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		302.442		290.739		96,13%				
			Persentase dokumen pengendalian lingkungan hidup yang sesuai dengan standar	persen		100		100		100,00%			
			Persentase pelaksanaan Uji Sampling Lingkungan Hidup (IKA+IKU) sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		191.459		187.468		97,92%				
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen		1		1		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		87.750		84.980		96,84%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota		23.233		18.292		78,73%				
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		975.863		415.719		42,60%				
			Persentase ruang terbuka hijau	Persen		8,1129		8,017		98,82%			
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		975.863		415.719		42,60%				
			Presentase Keanekaragaman Hayati dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		975.391		415.294		42,58%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Ha		9,0537		0		0,00%			
			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		473		425		89,95%				
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Unit		2		2		100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		2.888		2.799		96,92%				
			Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai aturan	Persen		80,3		86,9		108,22%			
			Penyimpanan Sementara Limbah B3		2.888		2.799		96,92%				
			Presentase dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan	persen		66,67		60,34		90,51%			
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		2.888		2.799		96,92%				
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan		1		1		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		10.012		9.971		99,59%				
			Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Persen		83,65		83,65		100,00%			
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		10.012		9.971		99,59%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Presentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang berpotensi melakukan kerusakan lingkungan	persen		49,21		50,48		102,58%			
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		10.012		9.971		99,59%				
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha		154		159		103,25%			
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		244.805		230.817		94,29%				
			Persentase kelompok masyarakat aktif melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Persen		89,47		90,06		100,66%			
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		244.805		230.817		94,29%				
			Jumlah akumulasi kelompok masyarakat /lembaga bidang pengelolaan LH yang terbentuk	Lembaga		166		161		96,99%			
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		7.552		7.397		97,95%				
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat		237.253		223.420		94,17%				
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga		140		244		174,29%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		117.062		115.987		99,08%				
			Presentase penerimaan penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	Persen		88,24		39,13		44,34%			
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		117.062		115.987		99,08%				
			jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang menerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Entitas		15		23		153,33%			
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		117.062		115.987		99,08%				
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		17		9		52,94%			
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		10.532		10.525		99,94%				
			Presentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten yang ditindaklanjuti	Persen		100		100		100,00%			
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota		10.532		10.525		99,94%				
			Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditindaklanjuti	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota		10.532		10.525		99,94%				
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan		10		10		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		14.042.536		13.196.033		93,97%				
			Persentase pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah/ reduce, pemanfaatan sampah/ reuse, daur ulang/ recycled) dari sumber sampah	Persen		30		0,94		3,13%			
			Persentase penanganan sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah)	Persen		70		50,32		71,89%			
			Pengelolaan Sampah		14.042.536		13.196.033		93,97%				
			Persentase Timbulan sampah yang ditangani	persen		70		51,26		73,23%			
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah		3.756.660		3.406.123		90,67%				
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase		0,23		0,23		100,00%			
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		178.455		131.033		73,43%				
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton		8245,59		80887,65		980,98%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		10.107.421		9.658.877		95,56%				
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kab/kota atau TPA/TPST Regional	Ton		85045		34310		40,34%			
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.656.793		1.748.277	1.656.793	105,52 %		1. Kurangnya sosialisasi, edukasi pemahaman masyarakat dalam mengurus pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan pemutakhiran data kependudukan; 2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi literasi digital masyarakat atas penggunaan identitas Kependudukan Digital (IKD);	Pada Renja OPD tahun berikutnya, perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, khususnya penguatan kegiatan sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pengembangan inovasi pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan	- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait digitalisasi dokumen kependudukan salah satunya melalui IKD-KTP Digital. - Prasyarat untuk aktivasi IKD adalah melalui perekaman KTP bagi wajib KTP. Saat ini telah di optimalkan penuntasan perekaman KTP dan kepemilikan KTP dengan target sejumlah 100%, dan capaian perekaman/kep emilikan KTP per 30 November 2025 adalah sejumlah 99,14%. Adapun target IKD dihitung berdasarkan jumlah wajib KTP yang sudah rekam. Target IKD tersebut menjadi sasaran utama penduduk yang dapat melakukan akitvasi IKD Telah dilakukan
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		820.978		794.587		96,79%				
			Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Persen		95,22		93,52		98,21%			
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk		820.978		794.587		96,79%				
			Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA, dan Surat Pindah-Datang) sesuai standar	Dokumen		126370		134767		106,64%			
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		820.978		794.587		96,79%				
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		373.068		367.979		98,64%				
			Persentase rata-rata kepemilikan dokumen pencatatan sipil	persen		92		88,59		96,29%			
			Pelayanan Pencatatan Sipil		373.068		367.979		98,64%				
			Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan anak, akta pengakuan anak, dokumen pengangkatan anak , dokumen perubahan peristiwa penting dan catatan pinggir akta pencapil) sesuai standar	Dokumen		26024		27343		105,07%			
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		373.068		367.979		98,64%				
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan		9		9		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		462.747		585.711		126,57 %				upaya aktivasi IKD s.d 2025 dengan capaian 6,75%. - Peningkatan kompetensi petugas pelayanan adminduk sehingga dapat memberikan pelayanan yang ramah, dan membahagiaka n masyarakat.
			Persentase ketersediaan data kependudukan skala kabupaten yang mutakhir sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		462.747		585.711		126,57 %				
			Jumlah inovasi pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar	proposal		2		2		100,00%			
			Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten (buku profil kependudukan, dan agregat kependudukan semesteran) yang tersusun sesuai standar	Dokumen		3		3		100,00%			
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		462.747		585.711		126,57 %				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		12		12		100,00%			
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.538.026		9.406.988	9.538.026	98,63%		Nilai kematangan OPD belum mencapai target disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan bukti dukung dan konsistensi implementasi tata kelola, serta keterbatasan pemahaman teknis dan koordinasi internal dalam proses penilaian.	Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun 2026, perlu strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas daerah, OPD dan mandatori agar target kinerja tetap tercapai.	- Meningkatkan kemampuan SDM Perangkat Desa Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Dana Desa. - Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa Mengurangi resiko kesalahan dan penyalahgunaan keuangan dan aset desa. - Agar RT lebih berperan aktif sebagai Mitra Pemerintah Desa dan bermanfaat bagi Warganya dengan
			PROGRAM PENATAAN DESA		4.480.248		4.570.769		102,02 %				
			Persentase desa yang tertata	Persen		3		3		100,00%			
			Penyelenggaraan Penataan Desa		4.480.248		4.570.769		102,02 %				
			Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana desa	Persen		4		4		100,00%			
			Fasilitasi Tata Wilayah Desa		3.200		3.160		98,75%				
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		2.670		2.651		99,29%				
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		4.474.378		4.564.958		102,02 %				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit		3		3		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		55.742		53.985		96,85%				menyesuaikan anggaran yang ada. - Akan mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan diklat dan menyesuaikan anggaran yang ada - Meningkatkan kualitas laporan keuangan Mengidentifikasi kesi kelemahan dan kekurangan data dukung LPJ Penyelesaian LPJ tepat waktu
			Persentase desa yang meningkat PAdesa yang bersumber dari Kerjasama Desa	Persen		15		15		100,00%			
			Fasilitasi Kerja sama antar Desa		55.742		53.985		96,85%				
			Jumlah Kerjasama Desa	Desa		120		120		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota		5.530		5.518		99,77%				
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Dokumen		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota		4.190		4.109		98,07%				
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Dokumen		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		46.022		44.359		96,39%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		4.293.770		4.171.530		97,15%				
			nilai rata-rata variabel penyelenggaraan pemerintahan desa dan integritas pemerintah desa dalam IPPD	Nilai		205		205		100,00%			
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		4.293.770		4.171.530		97,15%				
			Nilai variabel integritas pemdes	Nilai		30		30		100,00%			
			Nilai variabel perencanaan desa	Nilai		50		50		100,00%			
			Nilai variabel keuangan desa	Nilai		50		50		100,00%			
			Nilai variabel aset desa	Nilai		50		50		100,00%			
			Nilai variabel kelembagaan pemdes	Nilai		25		25		100,00%			
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		8.286		7.762		93,68%				
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		3		3		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		109.168		105.201		96,37%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen		3		3		100,00%			
			Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		8.050		7.880		97,89%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen		123		123		100,00%			
			Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		210.651		203.360		96,54%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		3		3		100,00%			
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		2.087.240		2.059.892		98,69%				
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		1645		1645		100,00%			
			Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa		2.275		1.038		45,63%				
			Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan		30		30		100,00%			
			Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		3.065		3.065		100,00 %				
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen		20		20		100,00%			
			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		233.579		205.899		88,15%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen		3		3		100,00%			
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		50.033		36.378		72,71%				
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan		2		2		100,00%			
			Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		14.595		10.303		70,59%				
			Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan		5		5		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		126.697		110.303		87,06%				
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen		132		132		100,00%			
			Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		19.524		15.426		79,01%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		27.877		27.315		97,98%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		2		2		100,00%			
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		15.862		15.167		95,62%				
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		369		369		100,00%			
			Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		42.990		35.283		82,07%				
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa		5		16		320,00%			
			Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		5.290		5.152		97,39%				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan		2		2		100,00%			
			Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa		27.870		27.588		98,99%				
			Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen		2		2		100,00%			
			Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		1.300.719		1.294.519		99,52%				
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		708.266		610.703		86,23%				
			nilai variabel kelembagaan masyarakat desa	Nilai		38		38		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kab/Kota		708.266		610.703		86,23%				
			Nilai lembaga kemasyarakatan desa	Nilai		15		15		100,00%			
			Nilai lembaga ekonomi desa	Niai		15		15		100,00%			
			Nilai lembaga sosial budaya, inovasi dan kelompok masyarakat lainnya	Niai		8		8		100,00%			
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		60.477		58.275		96,36%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		2		2		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		110.061		96.227		87,43%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		77.551		62.282		80,31%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		37.062		31.790		85,78%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		90.003		80.084		88,98%				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan		3		3		100,00%			
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		15.880		14.686		92,48%				
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		317.232		267.358		84,28%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.002.730		7.813.597	9.002.730	86,79%		1. Pelaksanaan tidak memenuhi rencana Timeline yang telah dibuat, karena kurangnya personil 2. Pada Anggaran DAK BOKB semula difocusing (Manmin dan SPPD 50%), kemudian dikembalikan lagi di anggaran Perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur, waktu tidak mencukupi 3. Kegiatan Pembangunan Fisik di Anggaran Perubahan yang memerlukan proses pengadaan secara Lelang, Waktu pelaksanaan pekerjaan (+/-3 bulan) tidak mencukupi	Diharapkan perencanaan tahun berikutnya dapat diimbangi dengan komitmen pimpinan beserta pegawai, agar target kinerja dapat dicapai	-Dengan Terlaksananya Sosialisasi Kie Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di 9 Kecamatan Dan Seluruh Desa Kabupaten Kudus, Anak Sekolah Di 9 Kecamatan SLTA Sederajat -Tujuan Adanya Peran Aktif Dari Anggota Dprd Kabupaten Kudus Dan Admin Desa Supaya Penyaluran Yang Kondusif Dan Bantuan Yang Diserahkan Tepat Sasaran
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			340.272		223.194		65,59%				
				Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun		21		21,1		100,48%			
				Persentase Peringkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	persen		50		52,9		105,80%			
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			13.487		7.611		56,44%				
				Prosentase Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang memahami kebijakan Kependudukan Jalur di Satuan Pendidikan (SMP/SMA dan yg sederajat)	Dokumen		7		11		157,14%			
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			13.487		7.611		56,44%				
				Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			326.785		215.583		65,97%				
				Jumlah dokumen profil kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen		7		7		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		69.848		30.324		43,41%				
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan		1		1		100,00%			
			Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		76.200		50.200		65,88%				
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan		1		1		100,00%			
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		84.000		54.438		64,81%				
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		96.737		80.621		83,34%				
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyusunan Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDBK)	Dok		1		1		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		4.089.734		3.275.911		80,10%				
			Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	persen		13,75		4,12		29,96%			
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen		16,45		14,66		89,12%			
			Cakupan PUS yang ber-KB Aktif	persen		73		69,15		94,73%			
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		816.902		707.466		86,60%				
			Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	Persen		12		21		175,00%			
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana		375.897		326.443		86,84%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		83.196		70.393		84,61%				
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan		9		9		100,00%			
			Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		134.977		122.243		90,57%				
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen		1		1		100,00%			
			Advokasi Program Bangsa kencana oleh polka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		222.832		188.387		84,54%				
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi		7		7		100,00%			
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		2.040.780		1.858.851		91,09%				
			Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		1.056.000		969.850		91,84%				
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		984.780		889.001		90,27%				
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P)	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		1.106.012		591.508		53,48%				
			Persentase faskes yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah	Persen		98,7		100		101,32%			
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		40.225		27.050		67,25%				
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		12		12		100,00%			
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		1.027.265		552.668		53,80%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang		100		100		100,00%			
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		38.522		11.790		30,61%				
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan		12		12		100,00%			
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		126.040		118.086		93,69%				
			Persentase organisasi yang aktif dalam pelaksanaan KB di daerah	Persen		6,25		6,25		100,00%			
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		126.040		118.086		93,69%				
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung		22		22		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		4.572.724		4.314.492		94,35%				
			Persentase Kecamatan yang memiliki UPPKS Aktif	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		256.324		201.792		78,73%				
			Persentase UPPKA yang aktif di kecamatan	Persen		29,55		96,2		325,55%			
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		117.000		93.598		80,00%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit		20		20		100,00%			
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		139.324		108.194		77,66%				
			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok		9		9		100,00%			
			Pelaksanaan Sekolah Lansia (Prog. Unggulan Bupati)	kali		5		5		100,00%			
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		4.316.400		4.112.700		95,28%				
			Jumlah laporan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Laporan		1		1		100,00%			
			Persentase Pemantauan Data Keluarga Beresiko Stunting	persen		80		80		100,00%			
			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		1.962.000		1.952.190		99,50%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita)	laporan		12		12		100,00%			
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		2.354.400		2.160.510		91,76%				
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan		9		9		100,00%			
BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN				50.504.762		49.666.104	50.504.762	98,34%		Faktor eksternal, seperti kondisi cuaca dan dinamika kebutuhan masyarakat, turut mempengaruhi percepatan pelaksanaan beberapa kegiatan, sehingga terdapat indikator kinerja yang belum tercapai secara optimal meskipun realisasi anggaran telah mendekati target	Koordinasi lintas sektor atau lintas OPD dalam pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan fisik keselamatan jalan dan PJU yang bersinggungan dengan masyarakat langsung sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan	- Meningkatkan efektivitas dan kecepatan penanganan LPJU rusak atau padam tanpa harus menunggu laporan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan penerangan jalan, keselamatan pengguna jalan, dan efisiensi pemeliharaan LPJU dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta mengoptimalkan kontribusi Pendapatan Asli
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		50.504.762		49.666.104		98,34%				
			Cakupan Rekayasa Lalu Lintas Pada Titik Kemacetan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten / Kota	Persen		63,75		63,84		100,14%			
			Persentase Terpenuhinya Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persen		92,69		93,07		100,41%			
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		393.374		392.272		99,72%				
			Jumlah Dokumen Perencanaan LLAJ	Dokumen		5		5		100,00%			
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		393.374		392.272		99,72%				
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Dokumen		5		5		100,00%			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota		49.533.106		48.724.764		98,37%				
			Cakupan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/ Kota	Persen		68		68		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		6.656.046		6.272.685		94,24%				Daerah (PAD) dari sektor perparkiran. - Mengurangi tingkat kemacetan, meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, serta mendukung pengelolaan transportasi yang lebih adaptif terhadap peningkatan jumlah kendaraan. - Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Dinas Perhubungan, memperbaiki kualitas pelayanan uji petik muatan dan pemeliharaan LPJU, serta memastikan organisasi berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit		383		383		100,00%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		42.877.060		42.452.079		99,01%				
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit		1200		1200		100,00%			
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		6.184		5.839		94,41%				
			Cakupan Terminal penumpang type C dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		6.184		5.839		94,41%				
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		1		1		100,00%			
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		295.493		290.995		98,48%				
			Cakupan Penerbitan Rekomendasi Penyelenggaraan Dan Penyediaan Fasilitas parkir	Persen		50		50		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		295.493		290.995		98,48%				
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		3		3		100,00%			
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		195.540		187.714		96,00%				
			Cakupan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Persen		94		94		100,00%			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		50.400		45.000		89,29%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit		10		10		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		145.140		142.714		98,33%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit		10		10		100,00%			
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		69.807		53.386		76,48%				
			Cakupan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	Persen		50		50		100,00%			
			Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		69.807		53.386		76,48%				
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		11.258		11.134		98,90%				
			Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		11.258		11.134		98,90%				
			Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.186.332		7.945.701	8.186.332	97,06%		Meskipun semua kegiatan sedang dijalankan dengan baik, namun perubahan pada sektor anggaran yang terjadi di awal tahun membutuhkan banyak penyesuaian, hal tersebut cukup menghambat proses pelaksanaan	1.Apresiasi kepada Dinas Kominfo yang mencapai kinerja fisik dan keuangan kategori sangat tinggi, agar dipertahankan untuk kinerja tahun 2026. 2.Semakin maraknya gangguan pada sistem jaringan dan pencurian data maka agar	- Risiko terjadinya penganggaran melebihi target indikator pada periode selanjutnya dapat diminimalkan - Bentuk aktivitas dari program tersebut adalah sosialisasi dan rapat dalam upaya meningkatkan
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		7.375.658		7.190.224		97,49%				
			Nilai Survey Kepuasan Publik	nilai		83		83,23		100,28%			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		7.375.658		7.190.224		97,49%				
			Persentase respon masyarakat terhadap konten yang dipublikasikan	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Relasi Media		3.975		750		18,87%		kegiatan; Selain itu, dampak perubahan tersebut juga membuat kolaborasi antarinstitusi menjadi lebih kompleks, mengingat hampir semua instansi pemerintah terdampak efisiensi; Kebijakan daerah terkait pengadaan makan dan minum membuat serapan anggaran tidak maksimal di beberapa sub-kegiatan	diperkuat fungsi pengamanan aplikasi, website dan data-data pemda. 3.Berkaitan dengan kinerja urusan statistik, Dinas kominfo sebagai walidata agar lebih mengintensifkan kolaborasi bersama produsen data, pembina data pemda, pembina data statistik. 4.Optimalisasi layanan keamanan informasi dan persandian antara lain melalui manajemen keamanan siber dan pengelolaan infrastruktur komunikasi yang aman.	kapasitas SDM yang menangani data untuk peningkatan mutu statistik daerah.Target indikator sub kegiatan pada program tersebut = 60 orang, tetapi kondisi riil yang hadir sosialisasi 70 orang, karena ada beberapa perangkat daerah yang hadir lebih dari 1 orang, dan hal ini tidak berdampak pada penganggaran.
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan		1		1		100,00%			
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		50.000		49.950		99,90%				
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas		1		1		100,00%			
			Pelayanan Informasi Publik		28.356		26.772		94,41%				
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan		25		33		132,00%			
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		187.450		185.128		98,76%				
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi		50		50		100,00%			
			Diseminasi Informasi		6.612.411		6.470.844		97,86%				
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase		100		100		100,00%			
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik		493.466		456.780		92,57%				
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media		2		2		100,00%			
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		810.674		755.477		93,19%				
			Nilai SPBE domain tata kelola	nilai		4,4		3,9		88,64%			
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		810.674		755.477		93,19%				
			Jumlah aplikasi yang dikelola di pusat data	Aplikasi		96		96		100,00%			
			Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		5.300		1.475		27,83%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan		1		1		100,00%			
			Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		307.737		302.478		98,29%				
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		4.664		1.876		40,22%				
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi		2		2		100,00%			
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		9.552		6.947		72,72%				
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi		1		1		100,00%			
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		4.500		2.950		65,56%				
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas	unit		32		32		100,00%			
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		476.631		439.751		92,26%				
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah		3		3		100,00%			
			Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		2.290		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					1.411.137		1.327.529	1.411.137	94,08%		Meskipun kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, perubahan kebijakan anggaran di awal tahun memerlukan penyesuaian pelaksanaan yang berdampak pada keterlambatan beberapa kegiatan. Kebijakan efisiensi anggaran juga membuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi lebih kompleks. Selain itu, kebijakan daerah terkait pengadaan makan dan minum berdampak pada belum optimalnya serapan anggaran pada beberapa sub-kegiatan.	Untuk tahun depan, Dinas Nakerperinkop harus dapat meningkatkan indikator pada tahun sebelumnya. Dengan perencanaan yang matang, maka implementasi dari program, kegiatan, dan sub kegiatan akan lebih terarah dan terukur. Setiap program dan kegiatan yang disusun harus dapat mendukung indikator utama OPD.	Meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM binaan melalui intervensi yang lebih tepat sasaran sesuai kewenangan OPD. Hasil tindak lanjut berupa tersedianya data UMKM binaan yang terpetakan, meningkatnya kapasitas pelaku usaha, serta terarahnya fasilitasi pelatihan dan permodalan.
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			29.020		25.845		89,06%				
				Presentase koperasi yang mendapatkan izin usaha simpan pinjam	persen		6		3,26		54,33%			
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			29.020		25.845		89,06%				
				Presentase Koperasi yang terverifikasi izin usaha simpan pinjam	Persen		6		3,26		54,33%			
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			29.020		25.845		89,06%				
				Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha		6		6		100,00%			
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			70.000		69.738		99,63%				
				Persentase SDM Pengelola Koperasi yang mempunyai kompetensi	persen		20		21,17		105,85%			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			70.000		69.738		99,63%				
				Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat pengetahuannya	Persen		20		21,17		105,85%			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			70.000		69.738		99,63%				
				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang		30		30		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		269.000		243.282		90,44%				
			Persentase Meningkatnya Koperasi Berkualitas	persen		3		3		100,00%			
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		269.000		243.282		90,44%				
			Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan	persen		7		7		100,00%			
			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota		269.000		243.282		90,44%				
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha		132		132		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		634.490		599.387		94,47%				
			Persentase pelaku usaha Mikro yang meningkat kapasitas SDMnya	persen		36		36		100,00%			
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		634.490		599.387		94,47%				
			Persentase usaha mikro yang terlatih dan terampil	Persen		80		80		100,00%			
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		23.614		13.778		58,35%				
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha		35		35		100,00%			
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		569.243		552.875		97,12%				
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha		135		135		100,00%			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		41.634		32.735		78,62%				
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang		35		35		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		408.626		389.276		95,26%				
			Persentase Usaha mikro yang meningkat produksinya	persen		25		25		100,00%			
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		408.626		389.276		95,26%				
			Persentase usaha mikro yang menerapkan teknologi modern	Persen		24		25		104,17%			
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		408.626		389.276		95,26%				
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha		35		35		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				618.273		555.900	618.273	89,91%		1. PP No 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdampak terhadap perubahan pada beberapa persyaratan perizinan berusaha akan tetapi belum terakomodir di sistem OSS mengakibatkan terjadinya beberapa kendala teknis.	1. penyusunan regulasi tetap sesuaikan dengan jadwal pusat, koordinasikan untuk persiapan penyusunannya	- Mendekatkan pelayanan dari Dinas/Instansi vertikal kepada Masyarakat.
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		117.361		104.360		88,92%		2. disamping pameran/event2, lakukan promosi digital melalui website maupun di semua media sosial	2. disamping pameran/event2, lakukan promosi digital melalui website maupun di semua media sosial	- Petugas layanan gerai semakin meningkat kompetensinya dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.
			Persentase Investor yang mendapat dukungan kemudahan investasi	persen		53		126		237,74%	3. tingkatkan kembali koordinasi bidang, libatkan pimpinan dan bentuk tim kerja sesuai kemampuan personil	3. tingkatkan kembali koordinasi bidang, libatkan pimpinan dan bentuk tim kerja sesuai kemampuan personil	- Pelayanan perizinan semakin mudah, cepat dan transparan.
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		30.031		23.914		79,63%				- Dengan adanya kegiatan pengawasan baik rutin maupun insidental diharapkan tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat sehingga seluruh ketentuan
			Investor yang mendapatkan fasilitas/insentif kemudahan berusaha	Investor		15		19		126,67%			
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		5.790		3.290		56,82%				
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen		1		1		100,00%	2. Perlunya dilakukan penyesuaian beberapa regulasi dengan adanya PP No 28 Tahun 2025 dan membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya.		
			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		24.241		20.624		85,08%		3. Beberapa regulasi daerah belum dapat disusun diantaranya Peraturan Bupati		

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen		2		2		100,00%	tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Perbup tentang Insentif dan kemudahan berusaha masih menunggu Penetapan Perda Penanaman Modal dan Penyusunan RUPM Nasional sebagai pedoman penyusunan RUPM di daerah. 4. Media promosi investasi belum optimal dalam pemanfaatannya. 5. Koordinasi antar bidang dalam pemenuhan data belum optimal.		standar pengajuan perizinan berusaha termasuk komitmen pengelolaan lingkungan dari pelaku usaha dapat dipenuhi. - Penerbitan perizinan toko swalayan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan dengan lingkungan/ masyarakat. - Permasalahan Hotel Sato terselesaikan dengan baik.
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		87.330		80.446		92,12%				
			Persentase Kajian potensi investasi yang tersusun	persen		100		100		100,00%			
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		6.550		3.900		59,54%				
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		80.780		76.546		94,76%				
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		152.177		147.233		96,75%				
			Persentase calon investor yang merealisasikan potensi investasi	persen		20		20		100,00%			
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		152.177		147.233		96,75%				
			Persentase pelaksanaan promosi	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		152.177		147.233		96,75%				
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		185.234		156.316		84,39%				
			IKM atas pelayanan perizinan	indeks		97		88,43		91,16%			
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		185.234		156.316		84,39%				
			Persentase perizinan dan non perizinan yang sesuai standar pelayanan	Persen		92		92,19		100,21%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		182.122		153.780		84,44%				
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		2420		3231		133,51%			
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		3.112		2.536		81,49%				
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha		800		955		119,38%			
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		84.382		72.297		85,68%				
			Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	<i>persen</i>		60		62,16		103,60%			
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		84.382		72.297		85,68%				
			Persentase investor yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen		40		58,33		145,83%			
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		8.820		6.174		70,00%				
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.		6		10		166,67%			
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		49.433		48.924		98,97%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha		111		215		193,69%			
			Pengawasan Penanaman Modal		26.128		17.200		65,83%				
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha		105		321		305,71%			
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		79.120		75.693		95,67%				
			Persentase perizinan dan non perizinan yang berbasis teknologi informasi	persen		100		100		100,00%			
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		79.120		75.693		95,67%				
			Persentase data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dirilis ke publik	persen		100		100		100,00%			
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		79.120		75.693		95,67%				
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					9.221.103		8.587.247	9.221.103	93,13%		Subkegiatan bersumber dana APBN, pencairan transfer langsung ke lembaga/ sekolah untuk BOS dan BOP, transfer ke masing-masing guru untuk Tunjangan Profesi Guru, keduanya mempengaruhi realisasi keuangan (SP2D dan SPJ) karena menunggu proses rekonsiliasi pengSPJan lembaga/sekolah untuk BOS dan BOP, konfirmasi ke masing-masing guru untuk Tunjangan Profesi Guru.	Pelaksanaan subkegiatan yang telah direncanakan harus dilaksanakan segera dari triwulan I agar semua target capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai.	- Disdikpora Kabupaten Kudus akan mengupayakan pelibatan anggota DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Komisi D yang membidangi Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. - Verifikasi dan Validasi data penerima TKGS dilaksanakan setiap tahun agar data penerima selalu valid dan tepat sasaran. - akan melaksanakan movev, pendataan serta sosialisasi terkait kebutuhan database Disdikpora.
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			590.486		407.008		68,93%				
				Presentase organisasi pemuda yang aktif	Persen		97,97		97,98		100,01%			
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			390.486		258.897		66,30%				
				Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persen		97,97		97,98		100,01%			
			Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota			100.000		49.661		49,66%				
				Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen		2		2		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota			100.000		83.890		83,89%				
				Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang		70		70		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			150.000		85.010		56,67%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan		2		2		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota		40.486		40.336		99,63%				
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang		8		8		100,00%			
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		200.000		148.111		74,06%				
			Persentase organisasi kepemudaan yang mendapatkan pemberdayaan dan pengembangan	Persen		52,53		52,53		100,00%			
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota		100.000		73.699		73,70%				
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi		1		1		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota		100.000		74.412		74,41%				
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang		120		120		100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		8.530.617		8.080.238		94,72%				
			persentase peningkatan prestasi olahraga	persen		4,79		4,45		92,90%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		3.129.600		2.757.817		88,12%				
			Persentase Sarpras olahraga dalam kondisi baik	Persen		55,56		50		89,99%			
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota		3.129.600		2.757.817		88,12%				
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit		8		8		100,00%			
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		950.000		874.987		92,10%				
			Jumlah atlet pelajar berprestasi di tingkat provinsi	orang		175		102		58,29%			
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		950.000		874.987		92,10%				
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan		2		2		100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		390.400		386.817		99,08%				
			Jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat	orang		175		175		100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		370.400		367.672		99,26%				
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang		210		210		100,00%			
			pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota		20.000		19.145		95,73%				
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		4.060.617		4.060.617		100,00 %				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Persentase organisasi keolahragaan yang dibina	Persen		92,31		100		108,33%			
			Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota		4.060.617		4.060.617		100,00 %				
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Dokumen		3		3		100,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100.000		100.000		100,00 %				
			Persentase organisasi Pramuka yang aktif	Persen		100		100		100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		100.000		100.000		100,00 %				
			Persentase anggota kepramukaan yang dibina	persen		100		100		100,00%			
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		100.000		100.000		100,00 %				
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan		1		1		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				64.931		22.349	64.931	34,42%		Meskipun semua kegiatan sedang dijalankan dengan baik, namun perubahan pada sektor anggaran yang terjadi di awal tahun membutuhkan banyak penyesuaian, hal tersebut cukup menghambat proses pelaksanaan kegiatan; Selain itu, dampak perubahan tersebut juga membuat kolaborasi antarinstitusi menjadi lebih kompleks, mengingat hampir semua instansi pemerintah terdampak efisiensi; Kebijakan daerah	1. Apresiasi kepada Dinas Kominfo yang mencapai kinerja fisik dan keuangan kategori sangat tinggi, agar dipertahankan untuk kinerja tahun 2026. 2. Semakin maraknya gangguan pada sistem jaringan dan pencurian data maka agar diperkuat fungsi pengamanan aplikasi, website dan data-data pemda. 3. Berkaitan dengan kinerja urusan statistik, Dinas kominfo sebagai walidata agar lebih mengintensifkan kolaborasi bersama produsen data, pembina data pemda,	Risiko terjadinya penganggaran melebihi target indikator pada periode selanjutnya dapat diminimalkan. Bentuk aktivitas dari program tersebut adalah sosialisasi dan rapat dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani data untuk peningkatan mutu statistik daerah. Target indikator sub kegiatan pada kegiatan dan program tersebut = 60 orang, tetapi kondisi riil yang hadir sosialisasi 70 orang, karena ada beberapa
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		64.931		22.349		34,42%				
			Indeks Pembangunan Statistik	indeks		2,9		2,88		99,31%			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		64.931		22.349		34,42%				
			Persentase ketercukupan data statistik sektoral	persen		100		100		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		25.570		7.800		30,50%				
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang		140		140		100,00%			
			Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		16.341		9.291		56,85%				
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		11.850		1.720		14,51%		terkait pengadaan makan dan minum membuat serapan anggaran tidak maksimal di beberapa sub- kegiatan	4.Optimalisasi layanan keamanan informasi dan persandian antara lain melalui manajemen keamanan siber dan pengelolaan infrastruktur komunikasi yang aman.	perangkat daerah yang hadir lebih dari 1 orang, dan hal ini tidak berdampak pada penganggaran.
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen		5		5		100,00%			
			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar		11.170		3.539		31,68%				
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen		3		3		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				78.445		61.282	78.445	78,12%		Meskipun semua kegiatan sedang dijalankan dengan baik, namun perubahan pada sektor anggaran yang terjadi di awal tahun membutuhkan banyak penyesuaian, hal tersebut cukup menghambat proses pelaksanaan kegiatan; Selain itu, dampak perubahan tersebut juga membuat kolaborasi antarinstansi menjadi lebih kompleks, mengingat hampir semua instansi pemerintah terdampak efisiensi; Kebijakan daerah terkait pengadaan makan dan minum membuat serapan anggaran tidak maksimal di beberapa sub- kegiatan	1.Apresiasi kepada Dinas Kominfo yang mencapai kinerja fisik dan keuangan kategori sangat tinggi, agar dipertahankan untuk kinerja tahun 2026. 2.Semakin maraknya gangguan pada sistem jaringan dan pencurian data maka agar diperkuat fungsi pengamanan aplikasi, website dan data-data pemda. 3.Berkaitan dengan kinerja urusan statistik, Dinas kominfo sebagai walidata agar lebih mengintensifkan kolaborasi bersama produsen data, pembina data pemda, karena ada beberapa perangkat daerah yang hadir lebih dari 1 orang, dan hal ini tidak berdampak pada penganggaran.	- Risiko terjadinya penganggaran melebihi target indikator pada periode selanjutnya dapat diminimalkan. - Bentuk aktivitas dari program tersebut adalah sosialisasi dan rapat dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani data untuk peningkatan mutu statistik daerah.Target indikator sub kegiatan pada kegiatan dan program tersebut = 60 orang, tetapi kondisi ril yang hadir sosialisasi 70 orang, karena ada beberapa perangkat daerah yang hadir lebih dari 1 orang, dan hal ini tidak berdampak pada penganggaran.
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		78.445		61.282		78,12%				
			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	indeks		340		499		146,76%			
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		78.445		61.282		78,12%				
			Persentase sistem elektronik yan telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian	Persen		56		56		100,00%			
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		69.095		60.106		86,99%				
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		9.350		1.176		12,58%				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					6.736.068		6.618.523	6.736.068	98,25%		Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan karena ada pergantian pimpinan, Disbudpar dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) sehingga dalam pelaksanaan administrasi di bulan oktober agak terkendala serta adanya pengurangan anggaran lewat pergeseran anggaran setelah perubahan yang berdampak pada beberapa kegiatan yang perlu disusun/ direncana ulang agar menyesuaikan kebijakan yang ada sehingga kegiatan banyak yang terlaksana di akhir Tahun Anggaran di bulan November dan Desember	Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun 2026, perlu strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas daerah, OPD dan mandatori agar target kinerja tetap tercapai.	- Agar pengembangan obyek wisata dilakukan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak - Dengan pelaksanaan promosi pariwisata secara masif, diharapkan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas sehingga jumlah kunjungan meningkat, serta memperkuat citra pariwisata Kabupaten Kudus Mengoptimalkan PAD - Menciptakan pengelolaan retribusi yang transparan, efisien, aman dan modern - Mengoptimasi aset-aset Pemkab dalam peningkatan PAD - Dengan berdasarkan Dokumen Basic Design Pembangunan DPK Gunung Muria diharapkan dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata di Kudus sehingga jumlah kunjungan wisata akan meningkat dan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.715.182		2.665.579		98,17%				
				Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	Persen		83		123,02		148,22%			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			2.715.182		2.665.579		98,17%				
				Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Persen		80		117,23		146,54%			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			2.442.418		2.395.475		98,08%				
				Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek		50		326		652,00%			
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			272.764		270.104		99,02%				
				Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang		50		50		100,00%			
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			536.616		506.228		94,34%				
				Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen		75		87,7		116,93%			
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			44.865		37.563		83,72%				
				Persentase Cagar Budaya Daerah yang ditetapkan	Persen		15		19,8		132,00%			
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			11.855		5.376		45,35%				
				Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek		390		454		116,41%			
			Penetapan Cagar Budaya			33.010		32.186		97,50%				
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek		92		90		97,83%			
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota			491.751		468.665		95,31%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
				Persentase cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan	Persen		75		87,7		116,93%			hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kudus. - Peningkatan sarpras dan pelayanan bagi wisatawan
				Pelindungan Cagar Budaya		354.370		345.973		97,63%				
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek		267		398		149,06%			
				Pengembangan Cagar Budaya		21.381		18.336		85,76%				
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek		1		4		400,00%			
				Pemanfaatan Cagar Budaya		116.000		104.357		89,96%				
				Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek		1		2		200,00%			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		3.484.270		3.446.716		98,92%				
				Persentase Kenaikan jumlah kunjungan museum	<i>persen</i>		10		-12,35		-123,50%			
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		3.484.270		3.446.716		98,92%				
				Jumlah Kunjungan Museum	Orang		99000		71327		72,05%			
				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu		786.915		774.854		98,47%				
				Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Unit		10642		11803		110,91%			
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		1.505.441		1.493.814		99,23%				
				Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit		7		7		100,00%			
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		1.191.913		1.178.047		98,84%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit		51		57		111,76%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					12.510.957		11.711.830	12.510.957	93,61%		Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100%, Secara umum bahwa program atau kegiatan yang direncanakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kudus pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV telah berjalan sesuai yang direncanakan. Ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian atau realisasi target yaitu : Untuk Indikator yang rendah akan lebih mudah dalam Pencapaian Target Kinerja, sedangkan Target Kinerja yg tinggi kemungkinan lebih sulit dalam pencapaian kinerjanya dikarenakan adanya Perubahan Anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga untuk pencapaian target mundur begitu juga serapan anggarannya	Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun 2026 perlu strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas OPD dan mandatori agar target kinerja tetap tercapai	- Meningkatkan akses informasi dan minat baca masyarakat serta memperluas jangkauan layanan perpustakaan melalui optimalisasi Pojok Baca Digital dan perluasan akses buku digital, sehingga permasalahan keterbatasan akses bacaan dan rendahnya pemanfaatan layanan literasi oleh masyarakat dapat teratasi, serta minat baca dan akses informasi masyarakat semakin meningkat. - Kelancaran pelaksanaan program Bunda Literasi dan optimalisasi peran di semua tingkatan. - Meningkatkan budaya baca di lingkungan sekolah dan memperluas pemanfaatan koleksi digital. - Mengurangi ketergantungan anak pada gadget dan menumbuhkan minat baca sejak dini.
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			12.510.957		11.711.830		93,61%				
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	nilai		25,22		25,22		100,00%			
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.453.548		1.379.476		94,90%				
				Persentase perpustakaan yg memenuhi standar nasional	Persen		6,68		7,46		111,68%			
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			11.250		11.250		100,00 %				
				Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan		10		10		100,00%			
			Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.069.704		1.055.217		98,65%				
				Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan		1		1		100,00%			
			Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			3.668		3.555		96,91%				
				Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang		30		30		100,00%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			69.261		45.335		65,45%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		Eksemplar		375		375		100,00%			
			Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			299.665		264.120		88,14%				
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		Perpustakaan		1		1		100,00%			
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			11.057.409		10.332.354		93,44%				
			Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		Persen		2,43		3,65		150,21%			
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			29.743		29.673		99,76%				
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		Perpustakaan		4		4		100,00%			
			Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			10.995.560		10.270.717		93,41%				
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Perpustakaan		1		1		100,00%			
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			32.106		31.964		99,56%				
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		Lokus		87		114		131,03%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					182.847		158.030	182.847	86,43%		Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100 %, Secara umum bahwa program atau kegiatan yang direncanakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kudus pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV telah berjalan sesuai yang direncanakan. Ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian atau realisasi target yaitu : Untuk Indikator yang rendah akan lebih mudah dalam Pencapaian Target Kinerja, sedangkan Target Kinerja yg tinggi kemungkinan lebih sulit dalam pencapaian kinerjanya dikarenakan adanya Perubahan Anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga untuk pencapaian target mundur begitu juga serapan anggarannya	Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun 2026 perlu strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas OPD dan mandatori agar target kinerja tetap tercapai.	- Meningkatkan akses informasi dan minat baca masyarakat serta memperluas jangkauan layanan perpustakaan melalui optimalisasi Pojok Baca Digital dan perluasan akses buku digital, sehingga permasalahan keterbatasan akses bacaan dan rendahnya pemanfaatan layanan literasi oleh masyarakat dapat teratasi, serta minat baca dan akses informasi masyarakat semakin meningkat. - Kelancaran pelaksanaan program Bunda Literasi dan optimalisasi peran di semua tingkatan. - Meningkatkan budaya baca di lingkungan sekolah dan memperluas pemanfaatan koleksi digital. - Mengurangi ketergantungan anak pada gadget dan menumbuhkan minat baca sejak dini.
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			171.063		150.525		87,99%				
				<i>persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan</i>	<i>persen</i>		36,2		36,2		100,00%			
				<i>persentase perangkat daerah dan BUMD yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku</i>	<i>persen</i>		63,16		63,16		100,00%			
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			140.106		125.133		89,31%				
				Persentase PD dan BUMD yang melaksanakan tertib arsip	Persen		57,89		57,89		100,00%			
			Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			30.658		23.987		78,24%				
				Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas		53000		53059		100,11%			
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			49.027		43.477		88,68%				
				Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas		26000		26004		100,02%			
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			60.421		57.669		95,44%				
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		22		22		100,00%			
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			18.969		18.900		99,64%				
				Persentase arsip statis yang diserahkan oleh PD dan BUMD sesuai NSPK	Persen		13		13,2		101,54%			
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			18.969		18.900		99,64%				
				Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		75		75		100,00%			
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			11.988		6.492		54,16%				
				Persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Persen		35		35,5		101,43%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN		11.988		6.492		54,16%				
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna		25		25		100,00%			
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		11.784		7.505		63,69%				
			persentase arsip perangkat daerah dan BUMD yang terselamatkan	persen		34,9		34,9		100,00%			
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun		2.150		2.145		99,77%				
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Persen		17,6		18,2		103,41%			
			Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		2.150		2.145		99,77%				
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip		100		100		100,00%			
			Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		5.980		1.800		30,10%				
			Persentase arsip yang terselamatkan	Persen		0,26		0,26		100,00%			
			Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana		5.980		1.800		30,10%				
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip		25		25		100,00%			
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan		1.800		1.800		100,00 %				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Persentase arsip statis perangkat daerah yang terselamatkan	Persen		0,26		0,26		100,00%			
			Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		1.800		1.800		100,00 %				
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar		50		50		100,00%			
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		1.854		1.760		94,93%				
			Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang diautentifikasi	Persen		0,65		0,67		103,08%			
			Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		1.854		1.760		94,93%				
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip		400		400		100,00%			

3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

* dalam ribu rupiah

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				182.237		164.040	182.237	90,01%		Adanya pergantian PPK karena memasuki masa purna sampai adanya pergantian PPK membuat pelaksanaan pekerjaan jadwalnya mundur sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai yang ditargetkan	Apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus atas peningkatan kinerja ASN yang tetap stabil dan berorientasi pada hasil meskipun dihadapkan pada kendala transisi PPK. Keberhasilan dalam meminimalisir dampak keterlambatan jadwal merupakan buah dari koordinasi yang sangat baik antar lini serta komitmen kuat dalam melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan. Konsistensi dalam menjalankan monitoring dan evaluasi rutin, yang terbukti menjadi instrumen efektif dalam mendeteksi hambatan sejak dini sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil untuk menjaga target tetap dalam jangkauan. Langkah- langkah ke depannya	- Adanya koordinasi dan kolaborasi pendampingan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan - Desa dapat memberikan kontribusi ketahanan pangan melalui dana desa, sehingga dapat membantu pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan - Peningkatan kapasitas dan kesadaran para pelaku usaha pemotongan unggas dalam rangka terwujudnya Jaminan Produk Halal - Penjaminan produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) sehingga menciptakan ketentraman batin pada masyarakat/ konsumen - Memberikan pemahaman mengenai teknis penyembelihan yang sah secara Islam sehingga menghasilkan produk yang halal. - Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat memanfaatkan alat dan mesin pertanian secara gratis sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi. -Petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi. -Petani atas nama pribadi atau kelompok tani dapat mengajukan rekomendasi pembelian BBM subsidi - Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat mengajukan permohonan bantuan obat-obatan pertanian untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		37.557		35.897		95,58%				
			Persentase nelayan yang berdaya	persen		100		100		100,00%			
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		24.147		23.603		97,75%				
			Jumlah penyediaan sarpras perikanan tangkap yang dimanfaatkan	Unit		60		60		100,00%			
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		24.147		23.603		97,75%				
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit		60		60		100,00%			
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		13.410		12.294		91,68%				
			Cakupan kelompok nelayan kecil yang terbina	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		13.410		12.294		91,68%				
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok		15		15		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		107.319		93.090		86,74%				
			Persentase pembudidaya perikanan yang berdaya	persen		99,23		98,46		99,22%			
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		26.787		21.457		80,10%				
			Jumlah pembudidaya ikan yang meningkat ketrampilannya	Orang		45		45		100,00%			
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		26.787		21.457		80,10%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok		30		30		100,00%	untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan angaran dan fisik 2026, antara lain: 1. Perencanaan suksesi yang proaktif, memetakan pegawai terkait masa purna dan mempersiapkan penggantinya. 2. Membuat SOP serah terima jabatan yang komprehensif 3. Mitigasi jadwal melalui manajemen kontrak.	- Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat mengajukan permohonan bantuan prasarana pertanian. - Dinas Pertanian melalui PPL membantu penyusunan RDKK. Pembagian alokasi pupuk bersubsidi memperhitungkan RDKK dan LP2B. Mekanisme penyaluran melalui distributor, kios pupuk lengkap (pengecer) dan kelompok tani. - Data inventarisasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Kudus - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani - Upaya pembinaan gerenrasi muda untuk pengenalan pertanian - Upaya regeneriasi SDM pertanian - Meningkatkan pemasaran produk pertanian dan olahan hasil pertanian	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		80.532		71.633		88,95%					
		Jumlah sarpras budidaya perikanan yang dimanfaatkan	Kelompok		30		30		100,00%				
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		80.532		71.633		88,95%					
		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit		63		63		100,00%				
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		37.361		35.053		93,82%					
		Persentase pengolah hasil perikanan yang berdaya	persen		99,57		96,15		96,57%				
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		37.361		35.053		93,82%					
		Cakupan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terampil	Persen		98		98		100,00%				
		Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		37.361		35.053		93,82%					
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha		49		49		100,00%				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				7.970.656		7.757.939	7.970.656	97,33%		Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan karena ada pergantian pimpinan, Disbudpar dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) sehingga dalam pelaksanaan administrasi di bulan oktober agak terkendala serta adanya	Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun 2026, perlu strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas daerah, OPD dan mandatori agar target kinerja tetap tercapai.	- Agar pengembangan obyek wisata dilakukan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak - Dengan pelaksanaan promosi pariwisata secara masif, diharapkan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas sehingga jumlah kunjungan meningkat, serta memperkuat citra pariwisata Kabupaten Kudus Mengoptimalkan PAD - Menciptakan pengelolaan retribusi yang transparan, efisien, aman dan modern
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		5.786.588		5.605.461		96,87%					
		Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatanya	Objek		10		10		100,00%				
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		4.075.634		3.981.171		97,68%					
			Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Destinasi Wisata Yang dikelola	Persen		7,5		7,5		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		4.075.634		3.981.171		97,68%		pengurangan anggaran lewat pergeseran anggaran setelah perubahan yang berdampak pada beberapa kegiatan yang perlu disusun/direncana ulang agar menyesuaikan kebijakan yang ada sehingga kegiatan banyak yang terlaksana di akhir Tahun Anggaran di bulan November dan Desember		- Mengoptimalkan aset-aset Pemkab dalam peningkatan PAD - Dengan berdasarkan Dokumen Basic Design Pembangunan DPK Gunung Muria diharapkan dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata di Kudus sehingga jumlah kunjungan wisata akan meningkat dan hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kudus. - Peningkatan sarpras dan pelayanan bagi wisatawan
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit		70		70		100,00%			
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1.694.868		1.611.169		95,06%				
			Destinasi Pariwisata yang Meningkatkan Aksesibilitas/Lebarnya Wisatawan	Destinasi		5		5		100,00%			
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1.694.868		1.611.169		95,06%				
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi		6		5		83,33%			
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		16.086		13.120		81,56%				
			Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dokumen		6		6		100,00%			
			Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/kota		13.561		11.020		81,26%				
			Jumlah usaha yang dibangun dan diawasi	Usaha		12		12		100,00%			
			Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota		2.525		2.100		83,17%				
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Dokumen		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		1.739.068		1.708.681		98,25%				
			Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	Persen		86		100		116,28%			
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1.739.068		1.708.681		98,25%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Persentase Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan terhadap jumlah destinasi wisata yang ada	Persen		38		43,18		113,63%			
			Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		1.739.068		1.708.681		98,25%				
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan		12		19		158,33%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		375.000		375.000		100,00%				
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase		2,7		3,8		140,74%			
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif/afesAA		375.000		375.000		100,00%				
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Pengembangannya	Pelaku Usaha		30		75		250,00%			
			Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)		375.000		375.000		100,00%				
			Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	Pelaku Usaha		15		75		500,00%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		70.000		68.797		98,28%				
			Persentase Subsektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	Persen		24		24		100,00%			
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		70.000		68.797		98,28%				
			Jumlah Komunitas Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	Komunitas		4		4		100,00%			
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan		70.000		68.797		98,28%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang		40		120		300,00%			
BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				7.091.904		6.762.441	7.091.904	95,35%		Adanya pergantian PPK karena memasuki masa purna sampai adanya pergantian PPK membuat pelaksanaan pekerjaan jadinya mundur sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai yang ditargetkan	Apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus atas peningkatan kinerja ASN yang tetap stabil dan berorientasi pada hasil meskipun	- Adanya koordinasi dan kolaborasi pendampingan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan - Desa dapat memberikan kontribusi ketahanan pangan melalui dana desa, sehingga dapat membantu pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan - Peningkatan kapasitas dan kesadaran para pelaku usaha
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		3.806.043		3.570.454		93,81%				
			persentase penyediaan sarana pertanian yang memadai	persen		99		93,3		94,24%			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		2.029.117		1.883.435		92,82%				
			Jumlah bibit tanaman yang ditanam	batang		5000		0		0,00%			
			Jumlah penyediaan alsintan yang dimanfaatkan	unit		3070		3070		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Prosentase penyediaan pupuk	Persen		90		96,6		107,33%		dihadapkan pada kendala transisi PPK. Keberhasilan dalam meminimalisir dampak keterlambatan jadwal merupakan buah dari koordinasi yang sangat baik antar lini serta komitmen kuat dalam melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan. Konsistensi dalam menjalankan monitoring dan evaluasi rutin, yang terbukti menjadi instrumen efektif dalam mendeteksi hambatan sejak dini sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil untuk menjaga target tetap dalam jangkauan. Langkah- langkah ke depannya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan fisik 2026, antara lain: 1. Perencanaan suksesi yang proaktif, memetakan pegawai terkait masa purna dan mempersiapkan penggantinya. 2. Membuat SOP serah terima jabatan yang komprehensif 3. Mitigasi jadwal melalui manajemen kontrak.	pemotongan unggas dalam rangka terwujudnya Jaminan Produk Halal - Penjaminan produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) sehingga menciptakan ketentraman batin pada masyarakat/ konsumen - Memberikan pemahaman mengenai teknis penyembelihan yang sah secara Islam sehingga menghasilkan produk yang halal. - Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat memanfaatkan alat dan mesin pertanian secara gratis sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi. -Petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi. - Petani atas nama pribadi atau kelompok tani dapat mengajukan rekomendasi pembelian BBM subsidi -Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat mengajukan permohonan bantuan obat-obatan pertanian untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman - Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat mengajukan permohonan bantuan prasarana pertanian. - Dinas Pertanian melalui PPL membantu penyusunan RDKK. Pembagian alokasi pupuk bersubsidi memperhitungkan RDKK dan LP2B. Mekanisme penyaluran melalui distributor, kios pupuk lengkap (pengecer) dan kelompok tani. - Data inventarisasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Kudus - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani - Upaya pembinaan generasi muda untuk pengenalan pertanian - Upaya regenerasi SDM pertanian
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		27.631		27.460		99,38%				
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan		12		12		100,00%			
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		2.001.486		1.855.976		92,73%				
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		1.776.927		1.687.019		94,94%				
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	stek		1500		1500		100,00%			
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor		128		210		164,06%			
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		1.776.927		1.687.019		94,94%				
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor		128		210		164,06%			
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten / Kota Lainnya	stek		1500		1500		100,00%			
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		2.139.932		2.104.445		98,34%				
			persentase prasarana pertanian kondisi baik	persen		71,16		71,13		99,96%			
			Pengembangan Prasarana Pertanian		124.900		107.331		85,93%				
			luas LP2B yang ditetapkan	hektar		20005		20154,25		100,75%			
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		124.900		107.331		85,93%				
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Pembangunan Prasarana Pertanian		2.015.032		1.997.114		99,11%				- Meningkatkan pemasaran produk pertanian dan olahan hasil pertanian
			Jumlah prasarana pertanian kondisi baik	Km		483		485,58		100,53%			
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		1.666.694		1.651.707		99,10%				
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		11		11		100,00%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		348.338		345.407		99,16%				
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		205.991		187.522		91,03%				
			Persentase hewan terserang penyakit yang tertangani	persen		100		100		100,00%			
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		151.278		136.576		90,28%				
			Jumlah hewan ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Ekor		8995		13435		149,36%			
			Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		30.744		30.087		97,86%				
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah		9		9		100,00%			
			Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		120.534		106.490		88,35%				
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		20.604		18.385		89,23%				
			Jumlah hewan yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas	Ekor		183		263		143,72%			
			Jumlah pengawasan penyembelihan hewan di RPH	Ekor		1620		1906		117,65%			
			Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		7.834		7.529		96,11%				
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan		12		12		100,00%			
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		12.770		10.855		85,01%				
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		34.110		32.560		95,46%				
			Presentase unit usaha produk hewan yang telah menerapkan persyaratan higiene sanitasi	%		60		60		100,00%			
			Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan		34.110		32.560		95,46%				
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha		40		40		100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		200.515		197.147		98,32%				
			<i>Persentase luas lahan pertanian bebas serangan Hama/ Penyakit</i>	<i>persen</i>		88		84,92		96,50%			
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		200.515		197.147		98,32%				
			Presentase luas serangan OPT yang dikendalikan	persen		82		100		121,95%			
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		200.515		197.147		98,32%				
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		3041		1519		49,95%			
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		739.423		702.873		95,06%				
			<i>persentase kelompok ternak yang berdaya</i>	<i>persen</i>		21,13		24,81		117,42%			
			<i>persentase kelompok tani yang berdaya</i>	<i>persen</i>		26,67		25,93		97,23%			
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		739.423		702.873		95,06%				
			Presentase kelompok tani yang terampil	persen		100		95		95,00%			
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		134.223		120.785		89,99%				
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		9		9		100,00%			
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		400.000		397.028		99,26%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit		4		2		50,00%			
			Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		205.200		185.060		90,19%				
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang		45		45		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				14.897		14.485	14.897	97,24%		1. Minimnya kualitas dan kuantitas sarpras pengelolaan persampahan 2. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan 3R (reduce, reuse, recycle) yang semakin menambah beban kinerja TPA 3. Alih fungsi lahan dan keterbatasan lahan dalam peningkatan ruang terbuka hijau 4. Masih adanya pencemaran lingkungan	Perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan berbasis hasil evaluasi kinerja tahun berjalan, melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.	- Mengurangi permasalahan penumpukan sampah di desa. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis wilayah/desa. Tersedianya lokasi TPST dan alternatif perluasan TPA guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan. - Mengurangi beban dan kapasitas overload di TPA Tanjungrejo. Menyediakan solusi sementara penanganan sampah di desa. Terwujudnya pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		14.897		14.485		97,24%				
			Persentase tutupan lahan tahura	Persen		29,85		39,1		130,99%			
			Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota		14.897		14.485		97,24%				
			Presentase penyediaan tanaman tahura	persen		66,67		152,73		229,08%			
			Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota		14.897		14.485		97,24%				
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha		2,5129		2,5129		100,00%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN				5.045.321		4.615.315	5.045.321	91,48%		Kondisi sarana perdagangan dan peralatan pendukung, khususnya sarana distribusi dan peralatan UTTP, belum seluruhnya dalam kondisi optimal Jumlah dan kompetensi SDM teknis, terutama yang menangani kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan, masih terbatas Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta kondisi pasar yang dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan situasi ekonomi makro menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan	Pada tahun berikutnya, diperlukan peningkatan kualitas sarana perdagangan dan peralatan UTTP melalui pengadaan, peremajaan, dan pemeliharaan yang terencana serta terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan dan peningkatan kompetensi SDM teknis yang menangani kegiatan tera,	- Meningkatkan literasi digital bagi Pedagang Pasar/Pelaku UMKM. - Membekali Pedagang Pasar/Pelaku UMKM dengan keterampilan pemasaran online (e-commerce, marketplace, media sosial). - Mendorong Pedagang Pasar/Pelaku UMKM memanfaatkan aplikasi digital untuk operasional usaha. - Memperluas akses pasar melalui platform digital. Meningkatkan omset penjualan bagi para Pedagang Pasar - Kios/los yang kosong/ tidak ada aktivitas jual beli akan dimanfaatkan oleh pedagang baru. - Memberikan kesempatan kepada pedagang lain untuk berjualan di pasar - Meningkatkan pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat - Meningkatkan omset penjualan bagi para Pedagang Pasar
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		4.376		4.212		96,25%				
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	persen		72		72		100,00%			
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		1.696		1.694		99,86%				
			Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izi pusat perbelanjaan	persen		75		75		100,00%			
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1.696		1.694		99,86%				
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		10		10		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang		2.680		2.518		93,97%		dan berdampak pada capaian program stabilisasi harga.	tera ulang, dan pengawasan, termasuk melalui pelatihan dan sertifikasi secara berkelanjutan	- Memperluas akses pasar melalui platform digital. - Mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat - mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para pedagang di pasar tradisional. - menumbuhkan kembali kebiasaan berbelanja produk lokal, - Meningkatkan pendapatan para pedagang di Pasar Tradisional - Mendekatkan jarak dan waktu dalam pengurusan administrasi pasar - Aduan dan kebutuhan pedagang selesai di pasar tanpa harus ke kantor Dinas - Menyelesaikan permasalahan yang ada di masing-masing pasar - Menurangi biaya operasional pedagang pasar - Menjaga kelangsungan usaha/ membantu pedagang pasar untuk menjaga kelangsungan usahanya - Menjamin kepatuhan toko swalayan dan toko modern terhadap ketentuan jam operasional yang berlaku. - Menjaga ketertiban umum serta kenyamanan Masyarakat - Meningkatnya tingkat kepatuhan toko swalayan dan toko modern terhadap jam operasional - Peningkatan kepatuhan untuk membayar retribusi - Mempermudah proses pembayaran Retribusi - Mengurangi penyalahgunaan/kebocoran retribusi - Meningkatkan Pendapatan Daerah - Menyampaikan informasi produk/ barang dagangan - Meningkatkan omset penjualan - Meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Tradisional
			Persentase Gudang yang mempunyai TDG	persen		8		8		100,00%			
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		2.680		2.518		93,97%				
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen		5		5		100,00%			
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		4.020.961		3.637.721		90,47%				
			Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	persen		85		79,31		93,31%			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		3.809.035		3.439.537		90,30%				
			Persentase pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan terhadap kebutuhan pembangunan dan revitalisasi sarana distribusi perdagangan	persen		3,44		4		116,28%			
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		2.846.305		2.535.422		89,08%				
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		29		29		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		962.730		904.114		93,91%				
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		29		29		100,00%			
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		211.926		198.184		93,52%				
			Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang meningkat kapasitasnya	persen		75		75		100,00%			
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		211.926		198.184		93,52%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen		8		8		100,00%			
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		132.090		111.516		84,42%				
			Persentase bahan pokok penting yang harganya stabil	persen		80		70,83		88,54%			
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		124.356		105.632		84,94%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			cakupan informasi pemantauan harga barang pokok penting di tingkat distributor	persen		45		45		100,00%			- Menciptakan ketertiban, kebersihan dan keamanan dilingkungan Pasar. - Menjaga fungsi fasilitas umum yang ada di sekitar pasar - Memastikan Toko Modern mematuhi ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan - Pelanggaran jam operasional tersebut menimbulkan keluhan dari pelaku UMKM karena berdampak pada persaingan usaha - Diberikannya teguran dan sanksi administratif kepada Toko Modern yang melanggar ketentuan - Meningkatnya kepatuhan Toko Modern terhadap jam operasional
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		13.610		13.385		98,35%				
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		360		360		100,00%			
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		3.220		3.136		97,41%				
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan		360		360		100,00%			
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		107.527		89.111		82,87%				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan		2		2		100,00%			
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		7.733		5.883		76,08%				
			Persentase kesesuaian distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi dengan RDKK	persen		88		89,5		101,70%			
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		2.303		2.300		99,86%				
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		2.790		2.453		87,93%				
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan		12		12		100,00%			
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		2.640		1.130		42,81%				
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		150.598		139.008		92,30%				
			Persentase Pertumbuhan Ekspor	Persen		0,2		0,2		100,00%			
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		150.598		139.008		92,30%				
			Persentase Peningkatan Kuantitas dan Jenis Barang Ekspor	persen		6		6		100,00%			
			Peningkatan Citra Produk Ekspor		150.598		139.008		92,30%				
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk		2		2		100,00%			
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		35.563		29.928		84,15%				
			Persentase peralatan UTTP yang terstandardisasi	Persen		97		83,63		86,22%			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		35.563		29.928		84,15%				
			Persentase pelayanan metrologi legal yang sesuai standar	persen		7		7		100,00%			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		27.253		21.789		79,95%				
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit		12055		10083		83,64%			
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		8.311		8.139		97,93%				
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang		60		60		100,00%			
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		701.734		692.931		98,75%				
			Persentase produk lokal yang meningkat Kapasitas pemasarannya	persen		5		5		100,00%			
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		701.734		692.931		98,75%				
			Persentase Perluasan jaringan perdagangan	persen		2		2		100,00%			
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		701.734		692.931		98,75%				
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					1.030.534		974.276	1.030.534	94,54%		Meskipun kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, perubahan kebijakan anggaran di awal tahun memerlukan penyesuaian pelaksanaan yang berdampak pada keterlambatan beberapa kegiatan. Kebijakan efisiensi anggaran juga membuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi lebih kompleks. Selain itu, kebijakan daerah terkait pengadaan makan dan minum berdampak pada belum optimalnya serapan anggaran pada beberapa sub-kegiatan.	Untuk tahun depan, Dinas Nakerperinkop harus dapat meningkatkan indikator pada tahun sebelumnya. Dengan perencanaan yang matang, maka implementasi dari program, kegiatan, dan sub kegiatan akan lebih terarah dan terukur. Setiap program dan kegiatan yang disusun harus dapat mendukung indikator utama OPD.	Menjaga ketertiban dan fungsi sempadan jalan. Koordinasi lintas OPD telah dilaksanakan, namun kepatuhan PKL masih belum optimal sehingga diperlukan tindak lanjut secara bertahap.
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			1.025.178		969.065		94,53%				
			Persentase usaha industri yang mempunyai produk dan jasa terstandarisasi (SNI/ GMP/ ISO/HACCP/ Halal)		persen		4,8		4,806		100,13%			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			1.025.178		969.065		94,53%				
			Jumlah dokumen RPIK yang tersusun sesuai ketentuan	Dokumen			1		1		100,00%			
			Persentase IHT dibina	Persen			50		55		110,00%			
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			75.000		74.328		99,10%				
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen			2		2		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			700.000		654.215		93,46%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen			1		1		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			100.000		93.518		93,52%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen			1		1		100,00%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			148.988		145.972		97,98%				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masy	Dokumen			1		1		100,00%			
			Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			1.190		1.033		86,81%				
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen			1		1		100,00%			
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA			2.570		2.555		99,41%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Persentase IKM yang mempunyai izin Usaha industri	persen		8,8		8,8383		100,44%			
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		2.570		2.555		99,41%				
			Persentase IKM yang terfasilitasi izin usaha industri sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		1.300		1.291		99,31%				
			~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen		3		3		100,00%			
			Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		1.270		1.264		99,51%				
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi,	Dokumen		1		1		100,00%			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		2.786		2.656		95,34%				
			Persentase Industri yang Menyampaikan informasi industri di SIINAS yang lengkap dan terkini	persen		4		4,0547		101,37%			
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		2.786		2.656		95,34%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
			Persentase data industri yang tersedia dalam SIINAS	Persen		40		40		100,00%			
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1.500		1.488		99,19%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen		1		1		100,00%			
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		1.286		1.169		90,86%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen		1		1		100,00%			

3.1.5. Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(* dalam ribu rupiah)

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				453.994.537		439.334.812	453.994.537	96,77%		Subkegiatan bersumber dana APBN, pencairan transfer langsung ke lembaga/sekolah untuk BOS dan BOP, transfer ke masing-masing guru untuk Tunjangan Profesi Guru, keduanya mempengaruhi realisasi keuangan (SP2D dan SPJ) karena menunggu proses rekonsiliasi pengSPJan lembaga/sekolah untuk BOS dan BOP, konfirmasi ke masing-masing guru untuk Tunjangan Profesi Guru.	Pelaksanaan subkegiatan yang telah direncanakan harus dilaksanakan segera dari triwulan I agar semua target capaian kinerja dan realisasi anggaran dapat tercapai.	- Disdikpora Kabupaten Kudus akan mengupayakan pelibatan anggota DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Komisi D yang membidangi Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. - Verifikasi dan Validasi data penerima TKGS dilaksanakan setiap tahun agar data penerima selalu valid dan tepat sasaran. - akan melaksanakan monev, pendataan serta sosialisasi terkait kebutuhan database Disdikpora.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		453.994.537		439.334.812		96,77%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Dikpora)	Nilai		32		32		100,00%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49.233		46.526		94,50%				
		Persentase capaian kinerja sub kegiatan	Persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		29.668		27.657		93,22%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		16		16		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.915		5.779		97,69%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		7		7		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		2.494		2.472		99,10%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		1.156		1.152		99,69%				
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10.000		9.467		94,67%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		449.561.277		435.226.170		96,81%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RKA/DPA/DPPA	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		449.319.709		435.009.859		96,82%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		4660		4660		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		235.680		210.494		89,31%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5.888		5.817		98,80%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		35.000		34.600		98,86%				
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	Persen		100		100		100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		35.000		34.600		98,86%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2		2		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		19.485		19.270		98,89%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	Persen		0,04		0,04		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		9.485		9.299		98,04%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		2		2		100,00%			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		10.000		9.971		99,71%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		125		125		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		311.190		301.252		96,81%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14.500		14.496		99,97%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		40.160		40.088		99,82%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.158		3.045		96,41%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		59.884		57.762		96,46%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		39.000		38.993		99,98%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		60.000		56.030		93,38%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		13		13		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		11.042		7.477		67,72%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		83.446		83.361		99,90%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		506.936		487.238		96,11%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		506.936		487.238		96,11%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		17		17		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.415.227		1.252.225		88,48%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500		1.500		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		614.297		547.395		89,11%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17.461		17.447		99,92%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		781.969		685.883		87,71%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		17		17		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.096.190		1.967.531		93,86%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		96,22		96,22		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		199.855		199.825		99,99%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		61		61		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.530		20.512		99,91%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		29		29		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.850.939		1.722.522		93,06%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		5		5		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		24.866		24.672		99,22%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		25		25		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS KESEHATAN				134.550.584		126.535.072	134.550.584	94,04%		Adanya Kebijakan efisiensi dari beberapa sub Kegiatan dari pemerintah Pusat sehinga mempengaruhi Realisasi	Capaian tahun 2025 sudah bagus agar ditingkatkan di tahun 2026, kegiatan mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.	- Perencanaan Kinerja: Melakukan peninjauan kembali dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta target yang ditetapkan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis perencanaan kinerja juga akan kami prioritaskan. - Pelaporan Kinerja: Memperkuat sistem pelaporan kinerja dengan memperjelas alur pelaporan, memperbaiki kualitas data yang dilaporkan, dan melaksanakan monitoring secara periodik terkait konsistensi antara realisasi kinerja dan rencana yang telah disusun. - Evaluasi Internal: Melaksanakan Evaluasi internal yang lebih sistematis dan objektif, mekanisme monitoring yang lebih rutin dan komprehensif, serta penyusunan laporan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. - Koordinasi dan komunikasi: Menjalin komunikasi secara intensif dengan Komisi D DPRD Kabupaten Kudus untuk memastikan sinergi dalam perencanaan program dan penyusunan kebijakan bidang kesehatan. - Pelibatan dalam Sosialisasi dan Advokasi : Mengundang anggota Komisi D dalam setiap kegiatan sosialisasi program kesehatan untuk memperkuat penyebaran informasi kepada masyarakat.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		134.550.584		126.535.072		94,04%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai		42		44		104,76%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		810.510		644.889		79,57%				
		Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen		100		79,57		79,57%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		367.211		242.503		66,04%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		35		35		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		431.634		398.411		92,30%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		32		32		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		6.365		0		0,00%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.300		3.975		75,00%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		126.846.935		119.776.139		94,43%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		81,5		92,9		113,99%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		126.689.462		119.642.258		94,44%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		17678		15424		87,25%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		133.828		112.955		84,40%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		23.645		20.926		88,50%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		72		72		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		120.000		118.820		99,02%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	persen		50		50		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		120.000		118.820		99,02%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		50		50		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		399.067		375.435		94,08%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		18.367		18.356		99,94%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		211.552		209.047		98,82%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		11		11		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		17.877		17.607		98,49%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		15		15		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		59.651		44.081		73,90%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		10		10		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		22.465		20.095		89,45%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		4.200		4.200		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		64.956		62.048		95,52%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		440.823		414.286		93,98%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		340.945		322.770		94,67%				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Pengadaan Mebel		99.878		91.516		91,63%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		114		114		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.913.586		4.270.659		86,92%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		150		48		32,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		2		2		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		517.710		448.359		86,60%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		4		4		100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		82.196		60.660		73,80%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		7		7		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.313.530		3.761.592		87,20%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		36		36		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.019.663		934.845		91,68%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		257.432		181.139		70,36%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		41		41		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		762.231		753.706		98,88%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		52		52		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RSUD dr. LOEKMONO HADI				317.595.232		290.880.658	317.595.232	91,59%		Ada satu kegiatan yang belum selesai, dikarenakan penyedia menghentikan kegiatan.	Capaian tahun 2025 sudah bagus agar ditingkatkan di tahun 2026, kegiatan mulai dilaksanakan di awal tahun anggaran sesuai perencanaan yang telah disusun sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal.	- Telah dilakukan Pendampingan penyusunan rancangan Draf Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr.Loekmono Hadi dan rancangan Draf Peraturan Bupati tentang Barang dan Jasa RSUD dr. Loekmono Hadi - Telah disusun Masterplan pengembangan Tahun 2025, serta Pemaparan Masterplan ke stakeholder
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		317.595.232		290.880.658		91,59%				
		Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		48		44		91,67%			
		Peningkatan Pelayanan BLUD		317.595.232		290.880.658		91,59%				
		Rasio Pelayanan	persen		96,12		99,34		103,35%			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		317.595.232		290.880.658		91,59%				
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		1		1		100,00%	Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan PL, Lelang, maupun E kalatog karena kendala Menunggu Ekatalog versi 6 dari LKPP	diperlukan penetapan target indikator agar lebih SMART dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, personil , dan kondisi eksternal yang berpengaruh dalam pencapaian target indikator. keterlambatan kegiatan fisik, yang disebabkan permasalahan pada proses pelaksanaan kegiatan pengadaan perlu menjadi catatan penting sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan TA 2026	- Penyelesaian pekerjaan tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi - Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik - Komunikasi yang baik antara OPD dengan DPRD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				16.997.996		16.021.398	16.997.996	94,25%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		16.997.996		16.021.398		94,25%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas PUPR)	Nilai		44		45		102,27%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		37.149		24.192		65,12%				
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.963		9.674		60,60%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		15		15		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.105		7.147		64,36%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		1		1		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		4.513		4.251		94,20%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.568		3.120		56,03%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.963.967		10.392.804		94,79%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		10.851.287		10.306.536		94,98%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		87		77		88,51%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		112.680		86.268		76,56%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		19.067		7.404		38,83%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	persen		100		100		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		19.067		7.404		38,83%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		2		2		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		259.535		255.586		98,48%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14.274		14.072		98,58%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		74.903		73.733		98,44%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		11.799		11.775		99,79%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		94.400		92.068		97,53%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan		17.102		17.076		99,85%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		47.057		46.863		99,59%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		20		20		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		161.021		153.585		95,38%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		75.012		72.750		96,98%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		10		10		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		86.009		80.835		93,98%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		10		10		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.549.287		2.374.626		93,15%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.050		1.970		96,10%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		200		200		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		305.587		172.399		56,42%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		2.241.650		2.200.256		98,15%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.007.971		2.813.201		93,52%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		776.070		727.309		93,72%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		55		55		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		2.189.097		2.043.696		93,36%				
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit		21		21		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		42.804		42.196		98,58%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		34		34		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				27.848.623		25.163.711	27.848.623	90,36%		1. Minimnya kualitas dan kuantitas sarpras pengelolaan persampahan 2. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan 3R (reduce, reuse, recycle) yang semakin menambah beban kinerja TPA 3. Alih fungsi lahan dan keterbatasan lahan dalam peningkatan ruang terbuka hijau 4. Masih adanya pencemaran lingkungan	Perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan berbasis hasil evaluasi kinerja tahun berjalan, melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah.	- Mengurangi permasalahan penumpukan sampah di desa. - Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis wilayah/ desa. - Tersedianya lokasi TPST dan alternatif perluasan TPA guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan. - Mengurangi beban dan kapasitas overload di TPA Tanjungrejo. - Menyediakan solusi sementara penanganan sampah di desa. - Terwujudnya pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		27.848.623		25.163.711		90,36%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	nilai		40		42		105,00%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.947		14.976		75,08%				
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.331		8.203		87,91%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.264		2.606		41,60%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		570		559		98,20%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.782		3.608		95,40%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.924.519		14.506.602		91,10%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		87,5		89,74		102,56%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		15.840.512		14.438.717		91,15%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		135		138		102,22%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		75.007		59.111		78,81%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		9.000		8.774		97,49%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		13		13		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.120		1.108		98,96%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	persen		16,79		16,67		99,29%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1.120		1.108		98,96%				
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		2		2		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		138.604		127.783		92,19%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		75		98,82		131,76%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.450		9.099		87,07%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		13		13		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		22.878		22.060		96,43%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		30		30		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		25.845		22.992		88,96%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		20		20		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		19.544		14.007		71,67%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12.638		12.484		98,78%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1		1		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45.450		45.342		99,76%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		11		11		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		131.715		106.006		80,48%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		31.797		29.693		93,38%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		14		14		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		99.918		76.314		76,38%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		19		16		84,21%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.969.717		9.835.314		89,66%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		216.110		223.458		103,40%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		10.753.607		9.611.856		89,38%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		663.001		571.921		86,26%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		82,47		82,47%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		454.400		365.241		80,38%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		130		94		72,31%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		17.381		17.085		98,30%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		23		32		139,13%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		191.220		189.596		99,15%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				11.320.466		10.338.812	11.320.466	91,33%		Komunikasi yang kurang efektif dan manajemen yang kurang kompeten menjadikan pelaksanaan kegiatan kurang berjalan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Rendahnya komitmen dan motivasi dalam bekerja membuat progres capaian kinerja kurang optimal.	- Perencanaan pencapaian kinerja dan rencana anggaran agar lebih diselaraskan dengan pentahapan pelaksanaan dalam satu tahun anggaran, sehingga progres capaian dapat terakumulasi secara optimal sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. - Perlu dilakukan perencanaan yang lebih baik, mengingat pada tahun 2026 akan diberlakukan kebijakan penurunan TKD yang berdampak pada keterbatasan pagu anggaran di seluruh OPD. Dengan kondisi tersebut, maka hanya kebutuhan mengikat, wajib, dan prioritas yang dapat dianggarkan. - Diperlukan juga penetapan target indikator agar lebih SMART-C dan rasional dengan kemampuan anggaran, personil, dan kondisi eksternal yang berpengaruh dalam pencapaian target indikator pada tahun 2026.	Dalam upaya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Satpol PP Kabupaten Kudus akan melaksanakan koordinasi komunikasi dan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis terkait agar lebih maksimal dalam melaksanakan penindakan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.320.466		10.338.812		91,33%				
		Nilai hasil evaluasi kematangan kelembagaan Perangkat Daerah sejumlah 11 variabel sesuai PMDN No. 99 Tahun 2018	Nilai		36		41		113,89%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.051		13.453		78,90%				
		Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13.114		12.359		94,24%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.049		1.094		53,39%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		1.888		0		0,00%				
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		3		3		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.114.547		6.505.519		91,44%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		87,5		87,5		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.049.441		6.454.585		91,56%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		83		84		101,20%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		61.840		49.415		79,91%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		27		25		92,59%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3.266		1.519		46,51%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25.333		16.260		64,19%				
		Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun	persen		24,49		24,49		100,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		700		699		99,90%				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1		1		100,00%			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		2.127		2.067		97,16%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		50		50		100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		22.506		13.495		59,96%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		4		3		75,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		137.453		119.544		86,97%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.900		2.996		76,84%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		0,7		70,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.544		10.709		92,77%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.369		5.205		70,63%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5		4		80,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		39.626		27.960		70,56%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.412		5.407		99,91%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		69.603		67.267		96,64%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50.826		44.407		87,37%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50.826		44.407		87,37%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		5		5		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.302.125		2.995.022		90,70%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.890		1.000		52,91%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		141.073		122.227		86,64%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.159.162		2.871.796		90,90%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		673.131		644.607		95,76%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		623.444		596.820		95,73%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		38		30		78,95%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.890		14.841		99,67%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		21		18		85,71%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		20.042		19.918		99,38%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		14.755		13.028		88,30%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		16		14		87,50%			
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				6.776.559		6.450.613	6.776.559	95,19%		Koordinasi dengan lintas OPD merupakan salah satu tantangan. Namun demikian hal ini dapat difasilitasi dg baik melalui koordinasi dengan OPD terkait, seperti Dinas PUPR, BBWS Pemali Juana dan Pemdes.	BPBD perlu mengingatkan kembali Kencana agar menganggarkan mesin pemotong Senso pada tiap kecamatan untuk memotong pohon- pohon tumbang yang kemungkinan setiap saat bisa terjadi.	Perlu dibentuk atau dioptimalkan forum koordinasi rutin dengan OPD terkait, menyusun SOP dan penetapan SOP bersama yang mengatur alur koordinasi serta pembagian peran masing-masing. Pemerintah Desa perlu dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan hingga pengawasan lapangan,
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		6.776.559		6.450.613		95,19%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Persen		37		40		108,11%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		37.701		25.305		67,12%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama secara berkala terhadap hasil koordinasi lintas OPD. -Dokumen kebencanaan akan lebih baik karena telah melibatkan semua pihak termasuk unsur pentahelix -Kalak BPBD akan dievaluasi kinerjanya -BTT telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 34 Tahun 2025 yang menjadi pedoman
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.881		13.408		64,21%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6		6		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.982		3.792		63,38%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		6		6		100,00%			
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		4.008		1.590		39,67%				
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		5		5		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.830		6.516		95,40%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.986.354		3.850.079		96,58%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		95		95		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.913.154		3.786.529		96,76%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		21		21		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		73.200		63.550		86,82%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25.510		15.064		59,05%				
		Persentase ASN yang memenuhi 20 JP pertahun	persen		100		100		100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		25.510		15.064		59,05%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		10		11		110,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		208.383		173.846		83,43%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		9.998		8.580		85,81%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		27.000		23.281		86,23%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.798		4.777		99,56%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		28.568		28.151		98,54%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10.294		6.351		61,70%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.600		85,71%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24		24		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		123.525		99.106		80,23%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1		1		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		577.370		548.611		95,02%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		215.952		198.238		91,80%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		42		42		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		274.369		265.695		96,84%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		40		40		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		87.049		84.678		97,28%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.073.885		995.812		92,73%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		92.041		108.557		117,94%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		981.845		887.255		90,37%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		867.356		841.895		97,06%				
		Persentase BMD dalam kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		66.253		60.507		91,33%				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		413.850		404.970		97,85%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		21		21		100,00%			
		Pemeliharaan Mebel		7.520		7.350		97,74%				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		10		10		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		60.000		55.436		92,39%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		14		14		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		306.320		301.682		98,49%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		4		4		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		13.413		11.950		89,09%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8.188.040		6.879.996	8.188.040	84,02%		1. Pelaksanaan tidak memenuhi rencana Timeline yang telah dibuat, karena kurangnya personil 2. Pada Anggaran DAK BOKB semula difocusing (Manmin dan SPPD 50%), kemudian dikembalikan lagi di anggaran Perubahan, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur, waktu tidak mencukupi 3. Kegiatan Pembangunan Fisik di Anggaran Perubahan yang memerlukan proses pengadaan secara Lelang, Waktu pelaksanaan pekerjaan (+/- 3 bulan) tidak mencukupi	Diharapkan perencanaan tahun berikutnya dapat diimbangi dengan komitmen pimpinan beserta pegawai, agar target kinerja dapat dicapai	-Dengan Terlaksananya Sosialisasi Kie Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan di 9 Kecamatan Dan Seluruh Desa Kabupaten Kudus, Anak Sekolah Di 9 Kecamatan SLTA Sederajat -Tujuan Adanya Peran Aktif Dari Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dan Admin Desa Supaya Penyaluran Yang Kondusif Dan Bantuan Yang Diserahkan Tepat Sasaran
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		8.188.040		6.879.996		84,02%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	nilai		48		40		83,33%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25.370		13.713		54,05%				
		Persentase Capaian Kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.175		5.625		61,31%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10		10		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.941		1.883		31,70%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		23		23		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		4.384		450		10,26%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.870		5.755		98,04%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.393.464		4.848.995		89,91%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		87,5		100		114,29%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.331.604		4.796.010		89,95%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		490		490		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		49.260		43.660		88,63%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12.600		9.325		74,01%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.000		10.000		100,00%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	persen		100		100		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		10.000		10.000		100,00%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		2		2		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		321.324		296.833		92,38%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.000		8.000		100,00%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		28.476		26.026		91,40%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		50		50		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		45.946		40.686		88,55%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		215.137		200.584		93,24%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		8		8		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		4.200		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		19.565		17.337		88,61%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		360.245		291.492		80,91%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		360.245		291.492		80,91%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.136.615		1.013.129		89,14%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.148		2.362		75,01%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		6		6		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		270.645		210.232		77,68%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		57.610		10.750		18,66%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		7		7		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		805.212		789.786		98,08%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		941.022		405.834		43,13%				
		Persentase BMD dalam kondisi Baik	persen		97		97		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		264.105		260.554		98,66%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		80		80		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		661.337		133.781		20,23%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		3		2		66,67%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.580		11.499		73,81%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		32		32		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				9.960.210		9.060.846	9.960.210	90,97%		Meskipun kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, perubahan kebijakan anggaran di awal tahun memerlukan penyesuaian pelaksanaan yang berdampak pada keterlambatan beberapa kegiatan. Kebijakan efisiensi anggaran juga membuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi lebih kompleks. Selain itu, kebijakan daerah terkait pengadaan makan dan minum berdampak pada belum optimalnya serapan anggaran pada beberapa sub-kegiatan.	Untuk tahun depan, Dinas Nakerperinkop harus dapat meningkatkan indikator pada tahun sebelumnya. Dengan perencanaan yang matang, maka implementasi dari program, kegiatan, dan sub kegiatan akan lebih terarah dan terukur. Setiap program dan kegiatan yang disusun harus dapat mendukung indikator utama OPD.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		9.960.210		9.060.846		90,97%				
		Nilai Kematangan OPD	nilai		46		46		100,00%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29.535		15.871		53,74%				
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	Persen		95		95		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.627		5.208		54,09%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10		10		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.460		8.585		55,53%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		8		8		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		2.430		216		8,89%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.018		1.862		92,27%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.343.718		6.954.562		94,70%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		87,5		87,5		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.256.220		6.873.550		94,73%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		44		44		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		82.028		75.723		92,31%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		5.470		5.289		96,69%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.000		12.503		41,68%				
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi	JP/Tahun		20		20		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		30.000		12.503		41,68%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3		3		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		232.995		189.401		81,29%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		95		95		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.011		6.778		96,68%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		29.726		18.527		62,32%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10.562		6.140		58,13%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		26.412		15.416		58,37%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		15.630		9.703		62,08%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		7.200		6.200		86,11%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		3		3		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.120		1.925		90,80%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		5		5		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		134.334		124.712		92,84%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		20		20		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		87.799		80.554		91,75%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		87.799		80.554		91,75%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.867.864		1.560.510		83,55%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		96		96		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.730		3.400		71,88%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		470.483		299.741		63,71%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.392.651		1.257.369		90,29%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		368.301		247.445		67,19%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		81		81		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		245.999		168.197		68,37%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		39		39		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		46.882		9.575		20,42%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		100		100		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		40.000		38.731		96,83%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		35.420		30.942		87,36%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		24		24		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL				6.366.875		6.160.728	6.366.875	96,76%		1. Kurangnya sosialisasi, edukasi pemahaman masyarakat dalam mengurus pelaporan peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan pemutakhiran data kependudukan; 2. Kurangnya sosialisasi dan edukasi literasi digital masyarakat atas penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD);	Pada Renja OPD tahun berikutnya, perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, khususnya penguatan kegiatan sosialisasi, peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pengembangan inovasi pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan	- Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait digitalisasi dokumen kependudukan salah satunya melalui IKD- KTP Digital. - Prasyarat untuk aktivasi IKD adalah melalui perekaman KTP bagi wajib KTP. Saat ini telah di optimalkan penuntasan perekaman KTP dan kepemilikan KTP dengan target sejumlah 100%, dan capaian perekaman/kepemilikan KTP per 30 November 2025 adalah sejumlah 99,14%. Adapun target IKD dihitung berdasarkan jumlah wajib KTP yang sudah rekam. Target IKD tersebut menjadi sasaran utama penduduk yang dapat melakukan aktivasi IKD Telah dilakukan upaya aktivasi IKD s.d 2025 dengan capaian 6,75%. - Peningkatan kompetensi petugas pelayanan adminduk sehingga dapat memberikan pelayanan yang ramah, dan membahagiakan masyarakat.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		6.366.875		6.160.728		96,76%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Dukcapil)	nilai		41		45		109,76%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		113.829		102.732		90,25%				
		Persentase pencapaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		80.166		72.444		90,37%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		21		21		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24.073		22.613		93,94%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		33		33		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		4.980		3.618		72,65%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		2		2		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.610		4.057		88,00%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.110.220		4.106.372		99,91%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA	Persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.051.195		4.050.306		99,98%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		31		31		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		59.025		56.066		94,99%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		27		27		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		59.213		48.806		82,42%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	persen		53		62		116,98%			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		2.650		743		28,02%				
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		12		12		100,00%			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		2.331		2.326		99,77%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		150		150		100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		54.232		45.738		84,34%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		69		69		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		142.620		126.410		88,63%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.885		2.788		71,77%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17.578		16.089		91,53%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12.561		9.669		76,98%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.948		4.639		77,99%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.450		7.905		93,55%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.800		3.480		72,50%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		18.965		11.469		60,48%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70.434		70.371		99,91%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		53.455		50.190		93,89%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		53.455		50.190		93,89%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		9		9		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.705.053		1.566.427		91,87%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.010		885		44,05%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		22.288		18.478		82,90%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.680.755		1.547.064		92,05%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		182.485		159.791		87,56%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		182.485		159.791		87,56%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		26		28		107,69%			
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				6.315.734		5.890.872	6.315.734	93,27%		Nilai kematangan OPD belum mencapai target disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan bukti dukung dan konsistensi implementasi tata kelola, serta keterbatasan pemahaman teknis	Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun 2026, perlu strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas daerah, OPD dan mandatori agar target kinerja tetap tercapai.	- Meningkatkan kemampuan SDM Perangkat Desa Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Dana Desa. - Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan aset desa Mengurangi resiko kesalahan dan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.315.734		5.890.872		93,27%				
		Nilai Kematangan OPD	nilai		46		45		97,83%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		43.113		29.017		67,31%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%	dan koordinasi internal dalam proses penilaian.		penyalahgunaan keuangan dan aset desa. -Agar RT lebih berperan aktif sebagai Mitra Pemerintah Desa dan bermanfaat bagi Warganya dengan menyesuaikan anggaran yang ada. -Akan mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan diklat dan menyesuaikan anggaran yang ada -Meningkatkan kualitas laporan keuangan Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan data dukung LPJ - Penyelesaian LPJ tepat waktu
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.560		17.692		86,05%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6		6		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.294		2.146		29,42%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		8.620		2.555		29,64%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		6.639		6.624		99,78%				
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		2		2		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.823.965		4.514.855		93,59%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		89		89		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.731.985		4.423.555		93,48%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		29		29		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		91.980		91.300		99,26%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.000		7.653		63,77%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	Persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		12.000		7.653		63,77%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		26		26		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		234.699		227.344		96,87%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		81.656		76.746		93,99%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.029		9.948		99,19%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		8.921		8.852		99,23%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		22.890		21.659		94,62%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12.130		12.128		99,98%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8.616		8.600		99,81%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		5.003		4.973		99,40%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		10		10		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75.872		74.921		98,75%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		30		30		100,00%			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		9.584		9.517		99,30%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		200.397		191.993		95,81%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		44.820		40.340		90,00%				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Pengadaan Mebel		26.976		23.495		87,09%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		128.601		128.159		99,66%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		4		4		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		726.808		649.016		89,30%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500		500		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		115.949		103.639		89,38%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		3		3		100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.541		6.462		98,80%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		3		3		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		603.819		538.415		89,17%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		3		3		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		274.752		270.994		98,63%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		218.624		215.322		98,49%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		18		18		100,00%			
		Pemeliharaan Mebel		10.378		10.378		100,00%				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		2		2		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		15.000		14.855		99,03%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30.750		30.439		98,99%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PERHUBUNGAN				15.159.129		14.455.198	15.159.129	95,36%		Faktor eksternal, seperti kondisi cuaca dan dinamika kebutuhan masyarakat, turut mempengaruhi percepatan pelaksanaan beberapa kegiatan, sehingga terdapat indikator kinerja yang belum tercapai secara optimal meskipun realisasi anggaran telah mendekati target	Koordinasi lintas sektor atau lintas OPD dalam pelaksanaan kegiatan terutama pekerjaan fisik keselamatan jalan dan PJU yang bersinggungan dengan masyarakat langsung sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan	- Meningkatkan efektivitas dan kecepatan penanganan LPJU rusak atau padam tanpa harus menunggu laporan masyarakat, sehingga kualitas pelayanan penerangan jalan, keselamatan pengguna jalan, dan efisiensi pemeliharaan LPJU dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. - Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir, meminimalkan potensi kebocoran pendapatan, serta mengoptimalkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran. - Mengurangi tingkat kemacetan, meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, serta mendukung pengelolaan transportasi yang lebih adaptif terhadap peningkatan jumlah kendaraan. - Meningkatkan kinerja dan profesionalisme Dinas Perhubungan, memperbaiki kualitas pelayanan uji petik muatan dan pemeliharaan LPJU, serta memastikan organisasi berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		15.159.129		14.455.198		95,36%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD))	Angka		37		33		89,19%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		29.667		27.455		92,54%				
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.094		8.077		99,79%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.809		5.656		72,43%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		8.733		8.702		99,64%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.032		5.020		99,76%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.485.089		9.005.305		94,94%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		87,5		87,5		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		9.393.317		8.931.123		95,08%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		72		72		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		90.311		72.800		80,61%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		27		27		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.461		1.382		94,61%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		15.000		14.630		97,53%				
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	persen		100		100		100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		15.000		14.630		97,53%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.655		2.920		79,89%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP per th	Orang		6		6		100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		3.655		2.920		79,89%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		175.397		163.182		93,04%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		18.687		16.063		85,96%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25.846		21.957		84,95%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12.466		8.439		67,69%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		20.503		20.008		97,59%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		44.000		42.974		97,67%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.650		91,67%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		52.095		52.091		99,99%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1		1		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		160.614		159.040		99,02%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		22.980		21.800		94,87%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		90		90		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		137.634		137.240		99,71%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		7		7		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.105.692		4.914.005		96,25%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.260		3.260		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		261.493		228.041		87,21%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13.440		12.690		94,42%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.827.499		4.670.014		96,74%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		184.015		168.662		91,66%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		169.015		153.891		91,05%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		47		47		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		15.000		14.771		98,47%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9.239.415		8.813.180	9.239.415	95,39%		Meskipun semua kegiatan sedang dijalankan dengan baik, namun perubahan pada sektor anggaran yang terjadi di awal tahun membutuhkan banyak penyesuaian, hal tersebut cukup menghambat proses pelaksanaan kegiatan; Selain itu, dampak perubahan tersebut juga membuat kolaborasi antarinstansi menjadi lebih kompleks, mengingat hampir semua instansi pemerintah terdampak efisiensi; Kebijakan daerah terkait pengadaan makan dan minum membuat serapan anggaran tidak maksimal di beberapa sub-kegiatan	1.Apresiasi kepada Dinas Kominfo yang mencapai kinerja fisik dan keuangan kategori sangat tinggi, agar dipertahankan untuk kinerja tahun 2026. 2.Semakin maraknya gangguan pada sistem jaringan dan pencurian data maka agar diperkuat fungsi pengamanan aplikasi, website dan data-data pemda. 3.Berkaitan dengan kinerja urusan statistik, Dinas kominfo sebagai walidata agar lebih mengintensifkan kolaborasi bersama produsen data, pembina data pemda, pembina data statistik. 4.Optimalisasi layanan keamanan informasi dan persandian antara lain melalui manajemen keamanan siber dan pengelolaan infrastruktur komunikasi yang aman.	Risiko terjadinya penganggaran melebihi target indikator pada periode selanjutnya dapat diminimalkan. Bentuk aktivitas dari program tersebut adalah sosialisasi dan rapat dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani data untuk peningkatan mutu statistik daerah. Target indikator sub kegiatan pada kegiatan dan program tersebut = 60 orang, tetapi kondisi riil yang hadir sosialisasi 70 orang, karena ada beberapa perangkat daerah yang hadir lebih dari 1 orang, dan hal ini tidak berdampak pada penganggaran.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		9.239.415		8.813.180		95,39%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	nilai		44		42		95,45%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8.795		3.551		40,38%				
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.449		0		0,00%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		13		13		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		371		371		100,00%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.975		3.180		80,00%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.591.687		4.462.588		97,19%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.509.787		4.394.417		97,44%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		28		35		125,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		72.900		60.540		83,05%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		9.000		7.631		84,78%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6.000		5.874		97,90%				
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	persen		100		100		100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		6.000		5.874		97,90%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		470.217		454.813		96,72%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	Persen		12		12		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		45.217		39.036		86,33%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3		4		133,33%			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		425.000		415.776		97,83%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		200		200		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		150.754		136.384		90,47%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		34.374		32.723		95,20%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		24.674		19.633		79,57%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		8.605		5.608		65,17%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		14.400		12.180		84,58%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		68.702		66.240		96,42%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		214.907		124.431		57,90%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		7.594		7.326		96,47%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		207.313		117.105		56,49%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		9		9		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.544.156		3.419.777		96,49%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.000		2.786		69,66%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.857.416		2.807.160		98,24%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		682.740		609.831		89,32%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		252.898		205.762		81,36%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		217.295		171.447		78,90%				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		35.603		34.315		96,38%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		50		50		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				6.060.741		5.392.993	6.060.741	88,98%		1. PP No 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdampak terhadap perubahan pada beberapa persyaratan perizinan berusaha akan tetapi belum terakomodir di sistem OSS mengakibatkan terjadinya beberapa kendala teknis. 2. Perlunya dilakukan penyesuaian beberapa regulasi dengan adanya PP No 28 Tahun 2025 dan membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya. 3. Beberapa regulasi daerah belum dapat disusun diantaranya Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Perbup tentang Insentif dan kemudahan berusaha masih menunggu Penetapan Perda Penanaman Modal dan Penyusunan RUPM Nasional sebagai pedoman penyusunan RUPM di daerah. 4. Media promosi investasi belum optimal dalam pemanfaatannya. 5. Koordinasi antar bidang dalam pemenuhan data belum optimal	1. penyusunan regulasi tetap disesuaikan dengan jadwal pusat, koordinasikan untuk persiapan penyusunannya 2. disamping melalui pameran/event2, lakukan promosi digital melalui website maupun di semua media sosial 3. tingkatkan kembali koordinasi bidang, libatkan pimpinan dan bentuk tim kerja sesuai kemampuan personil	- Mendekatkan pelayanan dari Dinas/Instansi vertikal kepada Masyarakat. - Petugas layanan gerai semakin meningkat kompetensinya dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. - Pelayanan perizinan semakin mudah, cepat dan transparan. - Dengan adanya kegiatan pengawasan baik rutin maupun insidental diharapkan tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat sehingga seluruh ketentuan standar pengajuan perizinan berusaha termasuk komitmen pengelolaan lingkungan dari pelaku usaha dapat dipenuhi. - Penerbitan perizinan toko swalayan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan dengan lingkungan/masyarakat. - Permasalahan Hotel Sato terselesaikan dengan baik.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		6.060.741		5.392.993		88,98%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	nilai		40		33		82,50%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.651		10.110		94,92%				
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.584		4.525		98,71%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		19		19		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.446		2.212		90,42%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		25		25		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		441		434		98,30%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.180		2.940		92,45%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.461.648		4.004.131		89,75%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		87,5		86,88		99,29%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.403.823		3.949.254		89,68%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		350		350		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		56.265		53.390		94,89%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.560		1.487		95,32%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		14		14		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		17.500		17.480		99,89%				
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	persen		100		100		100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		17.500		17.480		99,89%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		39.522		32.530		82,31%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	Persen		50		100		200,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		39.522		32.530		82,31%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		12		55		458,33%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		183.521		171.800		93,61%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.716		5.702		99,76%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		48.365		48.155		99,57%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12.409		12.316		99,25%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		39.175		39.096		99,80%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		24.188		20.889		86,36%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		8.400		7.200		85,71%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		4		4		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45.269		38.441		84,92%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		18		25		138,89%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		15.676		15.096		96,30%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		15.676		15.096		96,30%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		988.272		837.743		84,77%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.450		1.770		72,24%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		339.768		265.649		78,19%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		646.054		570.325		88,28%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		343.951		304.104		88,42%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		44.650		36.888		82,62%				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		159.382		139.858		87,75%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10		10		100,00%			
		Pemeliharaan Mebel		4.888		4.855		99,32%				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		13		13		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		21.300		21.157		99,33%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		30		30		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		34.600		33.579		97,05%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		79.131		67.767		85,64%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		17		17		100,00%			
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				11.876.471		10.628.625	11.876.471	89,49%		Pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan karena ada pergantian pimpinan, Disbudpar dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) sehingga dalam pelaksanaan administrasi di bulan oktober agak terkendala serta adanya pengurangan anggaran lewat pengeseran anggaran setelah perubahan yang berdampak pada beberapa kegiatan yang perlu	Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun 2026, perlu strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas daerah, OPD dan mandatori agar target kinerja tetap tercapai.	- Agar pengembangan obyek wisata dilakukan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak - Dengan pelaksanaan promosi pariwisata secara masif, diharapkan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas sehingga jumlah kunjungan meningkat, serta memperkuat citra pariwisata Kabupaten Kudus - Mengoptimalkan PAD - Menciptakan pengelolaan retribusi yang transparan, efisien, aman dan modern - Mengoptimisasi aset-aset Pemkab dalam peningkatan PAD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		11.876.471		10.628.625		89,49%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	Nilai		43		44		102,33%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		81.117		72.971		89,96%				
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	persen		100		96		96,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		33.770		31.019		91,85%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		14		14		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.570		25.012		87,55%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		39		39		100,00%	disusun/ direncana ulang agar menyesuaikan kebijakan yang ada sehingga kegiatan banyak yang terlaksana di akhir Tahun Anggaran di bulan November dan Desember		- Dengan berdasarkan Dokumen Basic Design Pembangunan DPK Gunung Muria diharapkan dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata di Kudus sehingga jumlah kunjungan wisata akan meningkat dan hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kudus. - Peningkatan sarpras dan pelayanan bagi wisatawan
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		12.894		11.060		85,78%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		2		2		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.883		5.880		99,95%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.268.199		5.132.229		81,88%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		97		94,06		96,97%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6.103.701		4.970.902		81,44%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		45		43		95,56%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		57.280		54.270		94,75%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		107.218		107.057		99,85%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		115		115		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		55.000		52.281		95,06%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Presentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen		90		90		100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		55.000		52.281		95,06%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		15		15		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		359.800		356.781		99,16%				
		Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Yang Sesuai Standar	Persen		85		85		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.000		5.929		98,81%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25.000		24.859		99,43%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.000		2.884		96,13%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		76.000		73.832		97,15%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		92.000		91.907		99,90%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.800		4.763		99,23%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		60		60		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150.000		149.690		99,79%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3.000		2.918		97,27%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1200		1200		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		351.181		342.682		97,58%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		86,35		86,35%			
		Pengadaan Mebel		161.615		158.282		97,94%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		189.566		184.400		97,27%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		7		6		85,71%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.065.546		3.982.000		97,95%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		85		100		117,65%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.580		1.380		87,34%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		575.081		504.468		87,72%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.488.885		3.476.152		99,64%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		695.628		689.683		99,15%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		80		94,96		118,70%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		165.000		164.825		99,89%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		27		27		100,00%			
		Pemeliharaan Mebel		17.550		17.531		99,89%				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		28		28		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.000		15.000		100,00%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		66		66		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		498.078		492.327		98,85%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				5.339.625		4.838.803	5.339.625	90,62%		Penetapan target kinerja pada triwulan IV sudah ada pencapaian 100%, Secara umum bahwa program atau kegiatan yang direncanakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Kudus pada Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV telah berjalan sesuai yang direncanakan. Ada beberapa faktor penghambat dalam pencapaian atau realisasi target yaitu: Untuk Indikator yang rendah akan	Dengan adanya efisiensi anggaran di tahun 2026 perlu strategi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas OPD dan mandatori agar target kinerja tetap tercapai.	- Meningkatkan akses informasi dan minat baca masyarakat serta memperluas jangkauan layanan perpustakaan melalui optimalisasi Pojok Baca Digital dan perluasan akses buku digital, sehingga permasalahan keterbatasan akses bacaan dan rendahnya pemanfaatan layanan literasi oleh masyarakat dapat teratasi, serta minat baca dan akses informasi masyarakat semakin meningkat. - Kelancaran pelaksanaan program Bunda Literasi dan optimalisasi peran di semua tingkatan.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		5.339.625		4.838.803		90,62%				
		Nilai Kematangan organisasi Perangkat daerah	Nilai		39		37		94,87%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.143		1.444		20,22%				
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.408		709		11,07%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		7		7		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		735		735		100,00%		lebih mudah dalam Pencapaian Target Kinerja, sedangkan Target Kinerja yg tinggi kemungkinan lebih sulit dalam pencapaian kinerjanya dikarenakan adanya Perubahan Anggaran dan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga untuk pencapaian target mundur begitu juga serapan anggarannya		- Meningkatkan budaya baca di lingkungan sekolah dan memperluas pemanfaatan koleksi digital. - Mengurangi ketergantungan anak pada gadget dan menumbuhkan minat baca sejak dini.
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.200.948		3.837.074		91,34%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.135.896		3.771.019		91,18%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		364		364		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		65.052		66.055		101,54%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.000		10.190		67,93%				
		Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	Orang		3		3		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		15.000		10.190		67,93%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		3		3		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		127.455		113.771		89,26%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.022		3.507		87,18%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		22.659		18.506		81,67%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12.829		11.982		93,40%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17.038		14.828		87,03%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.672		3.638		99,05%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		5.616		5.050		89,92%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		4		4		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		449		449		100,00%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		3		3		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		61.170		55.812		91,24%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		15		15		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		37.825		24.228		64,05%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		37.825		24.228		64,05%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		711.459		666.835		93,73%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500		1.500		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		3		3		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		132.364		115.126		86,98%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		577.595		550.209		95,26%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		239.794		185.262		77,26%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		39.950		35.442		88,72%				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		184.685		137.459		74,43%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		14		14		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.159		12.360		81,54%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		23		23		100,00%			
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN				15.977.151		14.553.134	15.977.151	91,09%		Adanya pergantian PPK karena memasuki masa purna sampai adanya pergantian PPK membuat pelaksanaan pekerjaan jadwalnya mundur sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai yang ditargetkan	Apresiasi yang tinggi diberikan kepada seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus atas peningkatan kinerja ASN yang tetap stabil dan berorientasi pada hasil meskipun dihadapkan pada kendala transisi PPK. Keberhasilan dalam meminimalisir dampak keterlambatan jadwal merupakan buah dari koordinasi yang sangat baik antar lini serta komitmen kuat dalam melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan. Konsistensi dalam menjalankan monitoring dan evaluasi rutin, yang terbukti menjadi instrumen efektif dalam mendeteksi hambatan sejak dini sehingga langkah-langkah korektif dapat segera diambil untuk menjaga target tetap dalam jangkauan. Langkah- langkah ke depannya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan fisik 2026, antara lain: 1, Perencanaan suksesi yang proaktif, memetakan pegawai terkait masa purna	- Adanya koordinasi dan kolaborasi pendampingan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan - Desa dapat memberikan kontribusi ketahanan pangan melalui dana desa, sehingga dapat membantu pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan - Peningkatan kapasitas dan kesadaran para pelaku usaha pemotongan unggas dalam rangka terwujudnya Jaminan Produk Halal - Penjaminan produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) sehingga menciptakan ketentraman batin pada masyarakat/ konsumen - Memberikan pemahaman mengenai teknis penyembelihan yang sah secara Islam sehingga menghasilkan produk yang halal. - Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat memanfaatkan alat dan mesin pertanian secara gratis sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi. - Petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		15.977.151		14.553.134		91,09%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat daerah (KOPD)	nilai		41		39		95,12%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.393		20.205		73,76%				
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11.832		8.795		74,33%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.707		3.008		44,85%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		23		23		100,00%			
		Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		2.896		2.446		84,46%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.958		5.956		99,97%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%		dan mempersiapkan penggantinya. 2. Membuat SOP serah terima jabatan yang komprehensif 3. Mitigasi jadwal melalui manajemen kontrak	-Petani atas nama pribadi atau kelompok tani dapat mengajukan rekomendasi pembelian BBM subsidi - Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat mengajukan permohonan bantuan obat-obatan pertanian untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman - Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat mengajukan permohonan bantuan prasarana pertanian. - Dinas Pertanian melalui PPL membantu penyusunan RDKK. Pembagian alokasi pupuk bersubsidi memperhitungkan RDKK dan LP2B. Mekanisme penyaluran melalui distributor, kios pupuk lengkap (pengecer) dan kelompok tani. - Data inventarisasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Kudus - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani - Upaya pembinaan generasi muda untuk pengenalan pertanian - Upaya regenerasi SDM pertanian - Meningkatkan pemasaran produk pertanian dan olahan hasil pertanian
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.179.371		12.083.785		91,69%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		92,63		92,63%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.114.565		12.025.348		91,69%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		1044		1044		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		64.806		58.437		90,17%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		13.415		810		6,04%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	persen		70,33		70,33		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		13.415		810		6,04%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		8		8		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		180.679		138.389		76,59%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		95		95		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		13.418		13.217		98,50%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		19.156		18.042		94,18%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		37		37		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12.391		6.276		50,65%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		38.457		33.647		87,49%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10.083		8.960		88,86%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		390		21,67%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		5		5		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		85.374		57.857		67,77%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		105		108		102,86%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		111.079		107.842		97,09%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		79.554		77.040		96,84%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		31.525		30.803		97,71%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.993.859		1.857.369		93,15%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		94		94		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.980		1.980		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		411.989		297.860		72,30%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		4		4		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.579.890		1.557.529		98,58%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		471.355		344.734		73,14%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		74		74		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		299.612		177.574		59,27%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		120		124		103,33%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16.493		16.453		99,76%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		36		36		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		155.250		150.707		97,07%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DINAS PERDAGANGAN				23.022.199		20.216.701	23.022.199	87,81%		Kondisi sarana perdagangan dan peralatan pendukung, khususnya sarana distribusi dan peralatan UTTP, belum seluruhnya dalam kondisi optimal Jumlah dan kompetensi SDM teknis, terutama yang menangani kegiatan tera/ tera ulang dan pengawasan, masih terbatas Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok, ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta kondisi pasar yang dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan situasi ekonomi makro menjadi faktor eksternal yang sulit dikendalikan dan berdampak pada capaian program stabilisasi harga.	Pada tahun berikutnya, diperlukan peningkatan kualitas sarana perdagangan dan peralatan UTTP melalui pengadaan, peremajaan, dan pemeliharaan yang terencana serta terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan dan peningkatan kompetensi SDM teknis yang menangani kegiatan tera, tera ulang, dan pengawasan, termasuk melalui pelatihan dan sertifikasi secara berkelanjutan	- Meningkatkan literasi digital bagi Pedagang Pasar/Pelaku UMKM. - Membekali Pedagang Pasar/Pelaku UMKM dengan keterampilan pemasaran online (e-commerce, marketplace, media sosial). - Mendorong Pedagang Pasar/Pelaku UMKM memanfaatkan aplikasi digital untuk operasional usaha. - Memperluas akses pasar melalui platform digital. - Meningkatkan omset penjualan bagi para Pedagang Pasar - Kios/los yang kosong/ tidak ada aktivitas jual beli akan dimanfaatkan oleh pedagang baru. - Memberikan kesempatan kepada pedagang lain untuk berjualan di pasar - Meningkatkan pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat - Meningkatkan omset penjualan bagi para Pedagang Pasar - Memperluas akses pasar melalui platform digital. - Mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat - mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para pedagang di pasar tradisional. - menumbuhkan kembali kebiasaan berbelanja produk lokal, - Meningkatkan pendapatan para pedagang di Pasar Tradisional - Mendekatkan jarak dan waktu dalam pengurusan administrasi pasar
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		23.022.199		20.216.701		87,81%				
		Nilai KOPD	Nilai		40		45		112,50%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.497		23.351		81,94%				
		Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	persen		89		102,23		114,87%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11.422		10.906		95,48%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		15		15		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.580		4.634		61,14%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
		Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1.975		1.941		98,27%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		2		2		100,00%			
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		2.079		576		27,69%				
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		4		4		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan PD		5.440		5.293		97,30%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.238.949		11.709.791		88,45%				- Aduan dan kebutuhan pedagang selesai di pasar tanpa harus ke kantor Dinas - Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing pasar - Menurangi biaya operasional pedagang pasar - Menjaga kelangsungan usaha / membantu pedagang pasar untuk menjaga kelangsungan usahanya - Menjamin kepatuhan toko swalayan dan toko modern terhadap ketentuan jam operasional yang berlaku. - Menjaga ketertiban umum serta kenyamanan Masyarakat - Meningkatkan tingkat kepatuhan toko swalayan dan toko modern terhadap jam operasional - Peningkatan kepatuhan untuk membayar retribusi - Mempermudah proses pembayaran Retribusi - Mengurangi penyalahgunaan/kebobocoran retribusi - Meningkatkan Pendapatan Daerah - Menyampaikan informasi produk/barang dagangan - Meningkatkan omset penjualan - Meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Tradisional - Menciptakan ketertiban, kebersihan dan keamanan dilingkungan Pasar. - Menjaga fungsi fasilitas umum yang ada di sekitar pasar - Memastikan Toko Modern mematuhi ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		88		90,24		102,55%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		13.145.707		11.629.121		88,46%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		108		108		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		83.270		72.320		86,85%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		9.972		8.351		83,74%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		75		75		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		18.790		11.458		60,98%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	persen		2		2		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		16.405		9.158		55,82%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		5		5		100,00%			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		2.385		2.300		96,44%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		75		75		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		239.540		233.228		97,37%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		85		92		108,24%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.999		2.998		99,97%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			-Pelanggaran jam operasional tersebut menimbulkan keluhan dari pelaku UMKM karena berdampak pada persaingan usaha - Diberikannya teguran dan sanksi administratif kepada Toko Modern yang melanggar ketentuan Meningkatnya kepatuhan Toko Modern terhadap jam operasional
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13.861		13.684		98,73%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.960		5.050		72,56%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		17.392		15.058		86,58%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		142.120		140.642		98,96%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		7.200		7.200		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		3		3		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		980		795		81,12%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		10		10		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		48.028		47.801		99,53%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		20		20		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		202.521		199.415		98,47%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		60.426		59.200		97,97%				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		136.856		135.131		98,74%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5.239		5.084		97,04%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.869.259		7.638.997		86,13%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		95		95		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.600		2.600		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		960.477		723.087		75,28%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		7.906.182		6.913.310		87,44%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		424.643		400.461		94,31%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		85		80,01		94,13%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		392.473		387.235		98,67%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		26		26		100,00%			
		Pemeliharaan Mebel		2.000		1.971		98,53%				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		5		5		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.900		6.991		70,62%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		9		9		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20.270		4.265		21,04%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		8		7		87,50%			
BAGIAN PEMERINTAHAN				129.631		111.334	129.631	85,89%		Terkait efisiensi anggaran makan minum rapat, realisasi anggaran sub kegiatan evaluasi kerja sama adalah 0 (nihil) akan tetapi kegiatan rapat evaluasi kerja sama masih dilaksanakan tanpa anggaran	1. Penyesuaian target untuk capaian kinerja di atas 100%. 2. Berkaitan dengan turunnya TKDD tahun 2026, berdampak pada menurunnya alokasi anggaran ke perangkat daerah, sebagai tindaklanjut atas hal tersebut, agar disesuaikan target kinerja output yang pencapaiannya berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		129.631		111.334		85,89%				
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	Persen		75		98,74		131,65%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	indeks		89,5		91,27		101,98%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		17.090		13.005		76,10%				
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		89		93,2		104,72%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		17.090		13.005		76,10%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		13.800		12.580		91,16%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Level variabel Diklat aparaturnya pada kematangan PD	Level		4		3		75,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		13.800		12.580		91,16%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		2		2		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		44.766		42.957		95,96%				
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Level		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.620		6.510		98,34%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3.690		3.667		99,38%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		11		11		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		5.778		5.775		99,95%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.400		2.400		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		26.279		24.606		93,63%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		15		23		153,33%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.700		1.700		100,00%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.700		1.700		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		52.275		41.092		78,61%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		70,3		117,17%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		45.375		37.137		81,84%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		3		3		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.900		3.955		57,32%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10		10		100,00%			
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				222.018		187.436	222.018	84,42%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		222.018		187.436		84,42%		Belum optimalnya koordinasi dengan Instansi/ Lembaga terkait	1. Optimalisasi koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dengan cara mendokumentasikan hasil koordinasi dan memperkuat dengan pemantauan dan pengendalian yang efektif. 2. Berkaitan dengan penurunan TKDD yang signifikan di tahun 2026, target kinerja yang berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran agar disesuaikan.	
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	Persen		75		78,95		105,27%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	indeks		89,5		91,27		101,98%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		61.624		57.095		92,65%				
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		89		93,2		104,72%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		61.624		57.095		92,65%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.430		7.730		62,19%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Level		4		3		75,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		12.430		7.730		62,19%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		47.369		40.105		84,67%				
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Level		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8.005		7.894		98,61%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9.169		7.942		86,63%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.400		7.480		89,05%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		1.800		1.800		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		19.995		14.989		74,96%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.360		1.350		99,26%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.360		1.350		99,26%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		99.235		81.156		81,78%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		70,3		117,17%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		85.254		69.358		81,36%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9		9		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.981		11.798		84,39%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		18		18		100,00%			
BAGIAN HUKUM				176.801		153.134	176.801	86,61%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		176.801		153.134		86,61%		Kegiatan pemeliharaan terjadi pergeseran di semester II sehingga pagu bertambah dan realisasi tidak tercapai maksimal	1.Capaian kinerja fisik kategori sangat tinggi agar dipertahankan untuk kinerja tahun 2026 2.Faktor pendorong dan penghambat disampaikan/diidentifikasi kasi/dianalisis secara memadai sehingga dapat menggambarkan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan untuk kinerja berikutnya. 3.Capaian aktivitas Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan indikator Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi mencapai 120% agar	
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	Persen		75		98,74		131,65%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	indeks		89,5		91,27		101,98%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.960		12.180		93,98%				
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		89		93,2		104,72%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12.960		12.180		93,98%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		40.365		37.687		93,37%			dicek kembali dalam menentukan targetnya, apakah sudah berdasar data series capaian tahun-tahun sebelumnya,	
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Level		4		3		75,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		40.365		37.687		93,37%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		5		5		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		51.968		49.831		95,89%				
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Level		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9.369		8.584		91,63%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.638		7.226		94,60%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		1.975		1.913		96,85%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.808		2.040		72,65%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		1		1		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30.179		30.069		99,63%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		25		38		152,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda		600		600		100,00%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		600		600		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70.908		52.836		74,51%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		70,3		117,17%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		65.532		48.901		74,62%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		7		7		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.376		3.935		73,20%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit		9		9		100,00%			
BAGIAN PEREKONOMIAN				113.506		106.076	113.506	93,45%		Kegiatan Pemantauan Kebijakan SDA sebagian besar baru dilaksanakan pada triwulan IV karena menunggu jadwal dari Pemerintah Provinsi dan menunggu GU 1 Setda. Kabupaten Kudus dan Prosentase BUMD yang mencapai target dibawah dari target 80% realisasinya hanya mencapai 60%	Capaian kinerja kegiatan dengan indikator persentase BUMD yang mencapai target laba belum mencapai target, sesuai kewenangan Bagian Perekonomian yaitu berkontribusi pada meningkatnya kualitas kebijakan bidang Perekonomian dan pembangunan, maka agar dilakukan monitoring dan evaluasi guna memberikan solusi rancangan kebijakan, sehingga semua BUMD dapat mencapai target laba.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		113.506		106.076		93,45%				
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	Persen		75		78,95		105,27%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	indeks		89,5		91,27		101,98%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.960		22.735		94,89%				
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		89		93,2		104,72%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		23.960		22.735		94,89%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.253		4.238		99,65%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Level		4		4		100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		4.253		4.238		99,65%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		28.159		27.722		98,45%				
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Level		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.602		11.463		98,80%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		876		870		99,32%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2.970		2.966		99,88%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		10		10		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.706		1.567		91,86%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		1.800		1.700		94,44%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		10		10		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9.205		9.156		99,47%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		7		7		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		720		720		100,00%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		720		720		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		2		2		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		56.415		50.662		89,80%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		70,3		117,17%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		51.015		45.282		88,76%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4		4		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.570		3.555		99,58%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		11		11		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.830		1.825		99,73%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				147.818		119.761	147.818	81,02%		1) perencanaan penganggaran yang kurang realistis 2) pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran maupun capaian kinerja kurang efektif 3) pengendalian internal belum optimal	1. Capaian kinerja fisik kategori sangat tinggi agar dipertahankan untuk tahun 2026. 2. Sesuai kewenangan Bagian Administrasi Pembangunan bahwa dokumen administrasi pembangunan yang dihasilkan adalah dalam upaya pengendalian internal yang efektif, maka hasil monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat output dipublikasikan ke masuarakat melalui SIPD e-walidata.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		147.818		119.761		81,02%				
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	Persen		75		78,95		105,27%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	indeks		89,5		91,27		101,98%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23.127		20.127		87,03%				
		Level variabel PPD pada kematangan PD	Level		4		5		125,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.909		7.459		94,31%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		5		5		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.101		4.225		69,25%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		7		7		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1.809		1.424		78,73%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.309		7.019		96,03%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		16.000		15.184		94,90%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		89		93,2		104,72%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		16.000		15.184		94,90%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.938		3.903		99,11%				
		Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD	Level		4		5		125,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3.938		3.903		99,11%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8.790		7.050		80,20%				
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Level		4		4		100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		8.790		7.050		80,20%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		40.533		38.592		95,21%				
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Level		3		5		166,67%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12.098		10.992		90,86%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		291		282		97,01%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.700		4.148		88,25%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3.777		3.622		95,90%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.700		94,44%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		10		83,33%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		17.867		17.848		99,89%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		5		6		120,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		540		540		100,00%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		540		540		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		54.890		34.366		62,61%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		70,3		117,17%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		50.830		32.316		63,58%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		3		3		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.840		850		29,93%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		4		1		25,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.220		1.200		98,36%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				170.907		132.044	170.907	77,26%		Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama LKPP RI Nomor 28006/SES/12/202 tanggal 03 Desember 2025 perihal Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025, bahwa LKPP tidak melakukan penilaian ITKP, sehingga Nilai ITKP Tahun 2025 akan menggunakan nilai tahun sebelumnya, yaitu Nilai ITKP Tahun 2024	1. Berkoordinasi dan konsultasi dengan LKPP untuk penghitungan/penilaian tata kelola pengadaan setelah masa transisi dan didokumentasikan dengan baik sebagai dasar penyesuaian dalam dokumen perencanaan selanjutnya. 2. Berkaitan dengan menurunnya TKDD tahun 2026, berimplikasi pada berkurangnya alokasi anggaran belanja perangkat daerah, agar disesuaikan target output kegiatan/subkegiatan yang berbanding lurus dengan ketersediaan anggara.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		170.907		132.044		77,26%				
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	indeks		89,5		91,27		101,98%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.590		28.949		86,18%				
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		89		93,2		104,72%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		33.590		28.949		86,18%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		14.064		12.339		87,73%				
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Level		3		5		166,67%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		158		144		91,20%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		953		864		90,68%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		10.820		9.258		85,56%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		333		273		81,89%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.100		1.100		100,00%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.100		1.100		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		122.153		89.657		73,40%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		70,3		117,17%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		103.155		81.132		78,65%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9		9		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		9.330		4.720		50,58%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		13		13		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.668		3.805		39,36%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		17		17		100,00%			
BAGIAN UMUM				44.092.392		39.528.373	44.092.392	89,65%		- Efisiensi belanja (efisiensi belanja penggandaan (pengiriman dokumen melalui softcopy) dan efisiensi dari pengadaan kartu lebaran dan kartu natal. - Penetapan pagu yang tinggi pada Subgiat Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDh/WKDH (besaran pagu ditentukan oleh TAPD bukan dari OPD)	1.Berkaitan dengan serapan anggaran yang relatif rendah pada Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan KDh/ WKDH, agar diefektifkan koordinasi dan konsultasi dengan TAPD 2.Berkaitan dengan menurunnya alokasi anggaran sebagai dampak dari menurunnya TKDD tahun 2026, maka target output yang berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran agar disesuaikan.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		44.092.392		39.528.373		89,65%				
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	Persen		75		78,95		105,27%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	indeks		89,5		91,27		101,98%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.865		15.572		98,15%				
		Level monitoring dan pemantauan pelaksanaan tugas pada kematangan kelembagaan PD	Level		4		5		125,00%			
		Level variabel PPD pada kematangan PD	Level		4		5		125,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.865		15.572		98,15%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.412.048		21.323.283		91,08%				
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		89		93,2		104,72%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		23.250.802		21.185.704		91,12%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		155		144		92,90%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		142.720		119.077		83,43%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		18.526		18.502		99,87%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		2		2		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		418.803		401.703		95,92%				
		Level variabel manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur pada kematangan PD	Level		4		5		125,00%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		5.939		5.775		97,23%				
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2		2		100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		412.864		395.929		95,90%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		4		4		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		29.000		25.675		88,53%				
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Level		4		4		100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		29.000		25.675		88,53%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		3		7		233,33%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.178.126		3.661.776		87,64%				
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Level		3		5		166,67%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		277.153		266.821		96,27%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		119.493		107.709		90,14%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		14.868		14.631		98,41%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		30.000		29.991		99,97%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		89.974		50.341		55,95%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		30.000		28.115		93,72%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.716.638		2.565.384		94,43%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		250		287		114,80%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		900.000		598.783		66,53%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		90		143		158,89%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.768.626		4.592.596		96,31%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		90		90		100,00%			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1.405.940		1.283.000		91,26%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		310.732		303.918		97,81%				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Pengadaan Mebel		465.128		461.634		99,25%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		131		131		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		189.598		185.490		97,83%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		27		27		100,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		869.355		862.469		99,21%				
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.527.874		1.496.086		97,92%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		85		85		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.838.007		5.565.749		81,39%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		16.200		12.535		77,37%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		2.778.140		2.041.459		73,48%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.043.667		3.511.756		86,85%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.269.091		3.151.111		96,39%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		70,3		117,17%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		167.600		154.104		91,95%				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		4		4		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		659.955		599.331		90,81%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		23		23		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		332.881		330.638		99,33%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		105		105		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2.095.375		2.053.818		98,02%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		11		11		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		13.280		13.220		99,55%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		31		31		100,00%			
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		254.860		136.735		53,65%				
		Persentase Pembayaran gaji dan tunjangan sesuai ketentuan (Bag Umum)	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		254.860		136.735		53,65%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan		2		2		100,00%			
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		907.966		654.172		72,05%				
		Persentase Pemenuhan kebutuhan rumah tangga KDH / WKDH sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		907.966		654.172		72,05%				
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
BAGIAN ORGANISASI				643.040		509.203	643.040	79,19%		Beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target maksimal diantaranya sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	1.Capaian kinerja fisik kategori sangat memuaskan agar dipertahankan untuk kinerja tahun 2026. 2.Kegiatan dan subkegiatan yang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan, Bagian organisasi berinovasi untuk dapat mencapainya, misal bimtek bisa dilakukan dengan gratis online sehingga target output terpenuhi. 3.Aktivitas rutin yaitu surat menyurat,	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		643.040		509.203		79,19%				
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	Persen		75		78,95		105,27%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	indeks		89,5		91,27		101,98%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14.528		12.000		82,60%				
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		89		93,2		104,72%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		14.528		12.000		82,60%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		2		2		100,00%	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. hal tersebut disebabkan adanya perubahan biaya penyelenggaraan diklat dan juga adanya kebijakan efieinsi anggaran.	pemeliharaan dalam laporan kinerja fisik sudah 100% artinya sudah maksimal, agar analisis faktor penghambatnya disesuaikan.	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		18.180		14.960		82,29%				
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Level		4		3		75,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		18.180		14.960		82,29%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang		4		3		75,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		32.514		31.120		95,71%				
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Level		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		8.866		8.740		98,58%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		896		896		100,00%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2.992		2.992		100,00%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan		7.290		6.075		83,33%				
		Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		1.800		1.800		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10.670		10.617		99,50%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		900		900		100,00%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		900		900		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		71.716		66.355		92,52%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		70,3		117,17%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		68.386		63.025		92,16%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		6		6		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.330		3.330		100,00%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		4		4		100,00%			
		Penataan Organisasi		505.202		383.868		75,98%				
		Persentase PD dengan nilai IKM min 80	Persen		85		98,6		116,00%			
		Persentase PD dengan Nilai KOD rata-rata sedang	Persen		86		97,08		112,88%			
		Persentase PD dengan nilai RB min 70	Persen		68		0		0,00%			
		Persentase PD dengan nilai SAKIP min BB	Persen		78		50		64,10%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) yang tersusun sesuai ketentuan	Persen		50		50		100,00%			
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		173.602		130.632		75,25%				
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen		2		2		100,00%			
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		206.420		180.794		87,59%				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		2		2		100,00%			
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		107.521		65.761		61,16%				
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		2		2		100,00%			
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		17.659		6.681		37,83%				
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen		1		1		100,00%	Agenda KDH/ WKDH yang sering mendadak, koordinasi dalam internal dan leading sector kurang maksimal serta jadwal pimpinan yang terus berubah-ubah.	1. Capaian kinerja fisik dan keuangan kategori sangat tinggi, agar dipertahankan kinerjanya di tahun 2026, yaitu seimbang antara capaian fisik dan capaian keuangan. 2. Berkaitan dengan menurunnya alokasi anggaran program, kegiatan dan subkegiatan di tahun 2026, agar target kinerja output yang berbanding lurus kegiatan yang menggunakan fasilitas pemda utamanya pendopo, agar disosialisasikan	
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				3.991.455		3.736.230	3.991.455	93,61%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.991.455		3.736.230		93,61%				
		Persentase ketercapaian IKK outcome Bidang Administrasi Umum	Persen		75		78,95		105,27%			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pemda)	indeks		89,5		91,27		101,98%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		53.610		52.821		98,53%				
		Persentase realisasi serapan anggaran Setda	Persen		89		93,2		104,72%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		36.060		35.283		97,84%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		17.550		17.538		99,93%			kembali ke seluruh masyarakat tentang SOP keprotokolan untuk acara yang dihadiri Bupati/Wakil Bupati.dengan ketersediaan anggaran disesuaikan. 3.Berkaitan dengan adanya masukan dari masyarakat terkait	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		134.544		128.136		95,24%				
		Level variabel Diklat aparatur pada kematangan PD	Level		4		4		100,00%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		134.544		128.136		95,24%				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		4		4		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		95.501		90.512		94,78%				
		Level variabel penjaminan mutu layanan daerah pada kematangan PD	Level		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		28.245		26.988		95,55%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.964		5.776		96,85%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		21.518		21.510		99,96%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.900		92,86%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24		24		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35.574		32.338		90,90%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.500		1.500		100,00%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500		1.500		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		232.298		213.328		91,83%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		60		70,3		117,17%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		212.180		199.696		94,12%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		9		9		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		20.118		13.632		67,76%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		26		26		100,00%			
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.372.925		1.252.314		91,22%				
		Persentase administrasi keuangan dan operasional KDH/WKDH yang sesuai standart (Bag Prokompim)	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		533.376		413.014		77,43%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		839.549		839.300		99,97%				
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan		2		2		100,00%			
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		2.101.077		1.997.619		95,08%				
		Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan, serta pendokumentasian tugas pimpinan (bupati/ wakil bupati) terselenggara sesuai SOP	persen		100		100		100,00%			
		Fasilitasi Keprotokolan		1.534.818		1.468.703		95,69%				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan		12		12		100,00%			
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		391.856		361.946		92,37%				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan		174.403		166.971		95,74%				
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan		12		12		100,00%			
SEKRETARIAT DPRD				54.763.600		51.343.324	54.763.600	93,75%		Perlunya mengidentifikasi waktu yang digunakan, agar realisasi tercapai sesuai jadwal	Diperlukan penyempurnaan perencanaan kegiatan dg mempertimbangkan evaluasi tahun berjalan, termasuk penyesuaian target waktu, peningkatan efisiensi anggaran, serta penguatan kualitas fasilitasi tugas dan fungsi DPRD guna mendukung kinerja yang lebih efektif dan berkelanjutan.	-TKD Kabupaten Kudus TA 2026 mengalami penurunan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		54.763.600		51.343.324		93,75%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		34		39		114,71%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		42.717		42.686		99,93%				
		Persentase capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		17.676		17.675		99,99%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.649		12.649		99,99%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		12.392		12.363		99,77%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.512.332		4.113.662		91,16%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.335.551		3.955.516		91,23%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		26		25		96,15%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		131.460		112.840		85,84%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		45.321		45.306		99,97%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1650		1650		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		101.000		100.575		99,58%				
		Persentase BMD yang di kelola sesuai standar manajemen aset	persen		100		100		100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		101.000		100.575		99,58%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		559.108		491.202		87,85%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	persen		100		100		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		21.744		20.121		92,53%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		60		60		100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		537.364		471.082		87,67%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		57		57		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.348.419		1.312.903		97,37%				
		Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran Sesuai Standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		164.571		164.456		99,93%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		32		32		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		150.217		143.349		95,43%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		71		71		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		239.488		230.795		96,37%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		54		54		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		90.602		90.523		99,91%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		8		8		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		53.297		50.251		94,29%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan	Paket		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penggandaan yang Disediakan										
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		64.080		56.880		88,76%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		72		72		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		360.190		360.159		99,99%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		48		48		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		225.975		216.489		95,80%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		38		38		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.067.985		1.963.665		94,96%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		642.258		587.771		91,52%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		171		171		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		504.039		484.622		96,15%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		50		50		100,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		628.274		605.589		96,39%				
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		5		5		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		293.414		285.683		97,37%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		34		34		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.930.075		3.648.036		92,82%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.240		7.640		92,72%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		733.715		616.096		83,97%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.188.120		3.024.300		94,86%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		195		195		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.130.448		3.006.317		96,03%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		496.840		451.671		90,91%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		33		33		100,00%			
		Pemeliharaan Mebel		56.570		56.505		99,88%				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		80		80		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		91.778		91.110		99,27%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		115		115		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2.182.498		2.126.767		97,45%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		10		10		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		302.762		280.264		92,57%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		242		242		100,00%			
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		38.168.572		35.783.462		93,75%				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD	Laporan		24		24		100,00%			
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		37.549.583		35.271.482		93,93%				
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan		45		45		100,00%			
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		494.080		453.950		91,88%				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket		141		141		100,00%			
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		124.909		58.030		46,46%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang		45		26		57,78%			
		Layanan Administrasi DPRD		902.945		880.816		97,55%				
		Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD Yang Sesuai Ketentuan	Laporan		132		132		100,00%			
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		902.945		880.816		97,55%				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan		132		132		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				9.307.408		9.042.915	9.307.408	97,16%		Perencanaan yang belum optimal dan belum berbasis kinerja serta konsistensi data yang sering berubah-ubah, adanya kebijakan efisiensi anggaran pada sub kegiatan yag terdapat rincian belanja makan minum rapat.	Pentahapan pelaksanaan dan rencanan anggaran kas pada sub kegiatan agar lebih diselaraskan sehingga gap capaian fisik dan keuangan dapat semakin selaras. Terdapat 1 indikator yang tidak tercapai 100 persen (KOPD), agar dapat direview kembali variabel yang masih rendah nilainya, untuk dapat dioptimalkan pada tahun mendatang. Adanya efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadi halangan bagi pencapaian target fisik.	- Terwujudnya perencanaan daerah yang lebih berkualitas dan terukur, meningkatkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta menekan potensi terjadinya SILPA yang tidak wajar. - Terjaganya kesinambungan perencanaan dan penganggaran daerah, terciptanya keselarasan antara visi kepala daerah dengan program pembangunan, serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		9.307.408		9.042.915		97,16%				
		Nilai Kematangan Organisasi perangkat Daerah (Bappeda)	Nilai		49		46		93,88%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		44.898		23.092		51,43%				
		Persentase capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21.587		7.215		33,42%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		9		9		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.175		10.457		73,77%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		6		6		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		6.300		3.490		55,40%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.836		1.930		68,05%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.438.703		7.448.084		100,13%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		90		90		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.372.456		7.392.842		100,28%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		36		36		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		56.840		51.560		90,71%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		7		7		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		9.407		3.682		39,14%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		8		8		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		18.165		16.742		92,17%				
		Jumah Barang Milik Daerah Yang Mendapat Pengamanan	Unit		3		3		100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		18.165		16.742		92,17%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		3		3		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		193.317		182.815		94,57%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Persen		70		70		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		74.837		69.823		93,30%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		55		58		105,45%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		118.480		112.992		95,37%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		21		21		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		430.354		389.205		90,44%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan layanan pengukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.490		6.605		62,96%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		62.491		52.548		84,09%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		45		45		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		20.077		16.315		81,26%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		8		8		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		56.199		47.167		83,93%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		10		10		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		19.712		14.265		72,36%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		8.400		7.275		86,61%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		3		3		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		252.985		245.031		96,86%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		72		72		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		360.654		318.250		88,24%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		61.712		58.270		94,42%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		70		70		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		298.942		259.980		86,97%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		78		78		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		355.148		309.354		87,11%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		96.333		88.304		91,67%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		3		3		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		258.815		221.050		85,41%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		9		9		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		466.169		355.372		76,23%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		420.148		323.863		77,08%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		31		31		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		21.300		15.251		71,60%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		32		32		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		24.721		16.258		65,77%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		32		32		100,00%			
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH				29.732.536		25.395.773	29.732.536	85,41%		1. Pagu tidak sesuai dengan spesifikasi 2. Diklat Pegawai menyesuaikan kebutuhan dan tupoksi	Diharapkan dengan adanya efisiensi belanja, agar dapat mengoptimalkan peranSDM dan sumberdaya lainnya sehingga pencapaian kinerja yang telah disusun dapat tercapai sesuai dengan tahapannya.	- Tujuan: Meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak daerah. -Masalah: Belum seluruh objek pajak restoran dan hotel terpasang tapping box - Hasil: Meningkatnya pengawasan transaksi dan potensi peningkatan PAD dari sektor pajak restoran dan perhotelan. - Tujuan: Optimalisasi penerimaan pajak parkir dari toko swalayan dan toko modern. - Masalah: Tarif pajak parkir belum optimal terhadap potensi yang ada. - Hasil: Dapat kami sampaikan saat ini - Swalayan dan Toko Modern sudah dikenakan tarif pajak parkir. - Tujuan: Optimalisasi kontribusi CSR dalam mendukung pendapatan daerah. - Masalah: Belum tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan Perda CSR. - Hasil: menyusun perbup untuk pelaksanaan CSR yang terarah, transparan, dan akuntabel oleh Perangkat Daerah Terkait. - Tujuan: Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		29.732.536		25.395.773		85,41%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Indeks		45		39		86,67%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.258		21.542		47,60%				
		Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Persen		85		85		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10.099		7.009		69,40%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		18		18		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.078		8.034		44,44%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		10		10		100,00%			
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		10.035		2.885		28,74%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.046		3.615		51,30%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			- Masalah: Belum optimalnya pemanfaatan aset dan digitalisasi pendapatan dan retribusi daerah. - Hasil: Terbangunnya ekosistem digital pendapatan daerah dan meningkatnya potensi PAD serta terwujudnya BPPKAD sebagai OPD percontohan (SIMPAD dan SIMPAD Geo). - Tujuan: Meningkatkan realisasi pendapatan daerah secara optimal dan berkelanjutan. - Masalah: Belum optimalnya sinergi dan penggalan potensi pendapatan daerah dan BUMD. - Hasil: Meningkatnya koordinasi lintas OPD dan BUMD serta optimalisasi realisasi pendapatan daerah serta mendorong Digitalisasi Pajak dan Retribusi Daerah.
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25.684.257		22.098.185		86,04%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		90		90		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		25.511.783		21.949.980		86,04%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		69		69		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		146.400		132.034		90,19%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		26.074		16.171		62,02%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		9		9		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		33.787		32.830		97,17%				
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	Persen		25		25		100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		33.787		32.830		97,17%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		5		5		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		93.848		53.172		56,66%				
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 20 Jam Pelajaran pertahun	Persen		17		17		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		93.848		53.172		56,66%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		20		20		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		310.290		224.462		72,34%				
		Persentase BMD yang dikelola sesuai Standar Manajemen Aset	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.636		2.335		88,59%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		45.459		22.579		49,67%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		58		58		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		9.836		6.381		64,87%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		25		25		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		34.510		22.256		64,49%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		16		16		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		21.324		16.783		78,71%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		11		11		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.320		3.840		72,18%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		4		4		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		191.206		150.289		78,60%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		30		30		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.200.333		2.061.767		93,70%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1.291.573		1.235.600		95,67%				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		8		8		100,00%			
		Pengadaan Mebel		154.328		111.923		72,52%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		76		65		85,53%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		754.432		714.245		94,67%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		54		54		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		628.236		524.503		83,49%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		9.090		5.616		61,78%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		5		5		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		32.366		23.777		73,46%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		586.780		495.110		84,38%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		736.527		379.312		51,50%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		635.849		342.507		53,87%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		57		57		100,00%			
		Pemeliharaan Mebel		6.385		3.010		47,14%				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		31		31		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		37.080		16.509		44,52%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		52		52		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		57.213		17.285		30,21%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		39		39		100,00%			
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				9.625.487		8.811.716	9.625.487	91,55%		Perubahan Kebijakan Nasional yang Dinamis, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Kualitas dan Kelengkapan Data Kepegawaian	1. Target kinerja outcome yang capaiannya di atas 100 agar disesuaikan/ dinaikkan 2. Penguatan koordinasi dan melakukan terobosan/inovasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kelengkapan data kepegawaian. 3. Capaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN relatif rendah, agar dilakukan peningkatan di tahun 2026. 4. Agar dicek kembali untuk indikator Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN jika	- Indikasi kecurangan terkait pelaksanaan lelang jabatan telah terselesaikan dengan penjelasan dari BKN melalui Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Nomor 11422/B-AK.02.02/SD/F.1/ 2025 tanggal 4 Juli 2025 - Pelantikan Hasil Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025, dengan mutasi/rotasi beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, diantaranya Kepala BKPSDM rotasi/ mutasi sebagai Kepala Dinsos, P3AP2KB.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.625.487		8.811.716		91,55%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	nilai		48		47		97,92%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		60.054		32.112		53,47%				
		Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	Persen		88		100		113,64%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		14.251		10.980		77,05%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		12		12		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41.709		17.826		42,74%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		29		29		100,00%	bersifat negatif (semakin kecil capaian semakin baik) maka dikoordinasikan dengan Bappeda untuk kriteria pencapaiannya.	bersifat negatif (semakin kecil capaian semakin baik) maka dikoordinasikan dengan Bappeda untuk kriteria pencapaiannya.	-Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian 6 (enam) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, antara lain: - Asisten Administrasi Umum Sekda; -Kepala Satpol PP; -Kepala Dinas PUPR; -Kepala Dinas Kominfo; -Kepala Badan Kesbangpol; -Kepala BKPSDM. -sampai dengan tanggal 16 Desember 2025 telah memasuki tahapan Uji Kompetensi melalui Assessment Center. -Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul untuk dapat diselesaikan dengan baik, hal tersebut untuk memastikan agar pengadaan ASN dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan -• Pengembangan kompetensi ASN bagi Perencana pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, jumlah 40 peserta • Pengembangan kompetensi ASN di bidang pelayanan publik pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, jumlah 40 peserta • Pengembangan kompetensi dan sertifikasi bagi Kepala Perangkat Daerah dan PPK di Kabupaten Kudus, jumlah 50 peserta Pengembangan kompetensi kepemimpinan bagi Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, jumlah 40 peserta
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		2.280		1.860		81,58%				
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		18		18		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.814		1.446		79,70%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.232.089		7.628.095		92,66%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		87,5		81,75		93,43%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.162.548		7.568.653		92,72%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		54		52		96,30%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		62.400		55.576		89,06%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		7.141		3.866		54,14%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		63		63		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		20.000		19.611		98,06%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	persen		100		100		100,00%			-Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial, teknis dan fungsional di Balai Pelatihan Sonyawarih, Menawan, Gebog, Kudus Telah diikuti oleh ASN di masing-masing Perangkat Daerah secara mandiri
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		20.000		19.611		98,06%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		67.419		43.917		65,14%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP setahun	Persen		33,33		33,96		101,89%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		67.419		43.917		65,14%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		15		40		266,67%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		313.804		278.363		88,71%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.500		1.802		72,07%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		66.887		54.139		80,94%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		16.000		15.773		98,58%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		88.029		87.718		99,65%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		14		14		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.800		4.800		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		13.533		11.880		87,79%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		122.055		102.251		83,77%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		284.286		252.851		88,94%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		60.039		41.095		68,45%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		13		13		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		162.409		155.130		95,52%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		14		14		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		61.838		56.626		91,57%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		12		14		116,67%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		210.391		169.034		80,34%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.650		2.294		34,50%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			131.746		99.094		75,22%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			71.995		67.646		93,96%				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			437.444		387.733		88,64%				
			Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		94		95,8		101,91%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			168.252		149.530		88,87%				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		16		18		112,50%			
		Pemeliharaan Mebel			5.264		4.500		85,49%				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			58.702		32.343		55,10%				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		38		38		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			205.226		201.360		98,12%				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
INSPEKTORAT DAERAH				21.747.123		11.771.829	21.747.123	54,13%		1. Keterbatasan kuota peserta dan penyesuaian jadwal penyelenggaraan dari lembaga penyedia diklat, khususnya yang diselenggarakan oleh instansi pembina atau lembaga terakreditasi, menyebabkan penundaan bahkan pembatalan keikutsertaan peserta. Kondisi ini berdampak langsung pada tertundanya realisasi belanja perjalanan dinas, akomodasi, dan biaya pendaftaran diklat. 2. Penerapan efisiensi anggaran serta kebijakan pengendalian belanja aparatur turut mempengaruhi realisasi anggaran kegiatan bimtek dan diklat. Inspektorat Daerah lebih mengutamakan pemenuhan tugas pengawasan yang bersifat prioritas dan mendesak, sehingga alokasi anggaran pengembangan kompetensi aparatur belum dapat dimanfaatkan secara optimal. 3. Meningkatnya pelaksanaan bimtek dan diklat secara daring (online) atau terintegrasi dengan program pembinaan dari pemerintah pusat, yang relatif	Tahun berikutnya agar pelaksanaan kegiatan realisasi kinerja dan keuangan, sub kegiatan sesuai dengan timeline anggaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan belanja yang diperlukan dalam pengawasan.	-Hasil yang dicapai menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan desa terhadap kewajiban pelaporan. Jumlah desa yang belum menyelesaikan LPJ berangsur menurun, serta kualitas administrasi dan pelaporan keuangan desa mulai membaik. -Hasil tindak lanjut menunjukkan adanya penurunan jumlah dan nilai temuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem pengendalian internal semakin diperkuat, kepatuhan terhadap regulasi meningkat, serta menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		21.747.123		11.771.829		54,13%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		37		35		94,59%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		149.001		95.145		63,86%				
		Persentase Capaian kinerja subkegiatan Perangkat Daerah	Persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.113		4.512		55,62%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		16		16		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		135.938		86.143		63,37%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		9		9		100,00%			
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.950		4.490		90,70%				
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.914.798		8.342.429		93,58%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.804.853		8.273.036		93,96%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		40		40		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		81.180		61.530		75,79%		membutuhkan biaya lebih rendah dibandingkan dengan skema tatap muka 4. Adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan pengawasan yang semula direncanakan dengan survey ke lapangan, berubah menjadi di kerjakan di kantor 5. Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan bimtek dan diklat tidak mencerminkan rendahnya kinerja Inspektorat Daerah, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta upaya efisiensi penggunaan anggaran guna mendukung pencapaian sasaran pengawasan yang lebih optimal.		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		28.765		7.863		27,34%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		30.000		25.582		85,27%				
		Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	Persen		100		100		100,00%			
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		30.000		25.582		85,27%				
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		8.699.704		272.041		3,13%				
		Persentase ASN PD yang memenuhi 40 JP setahun	Persen		100		100		100,00%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		8.126.516		264.368		3,25%				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		40		40		100,00%			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		573.188		7.673		1,34%				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang/Kali		120		120		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		539.425		328.986		60,99%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.584		5.275		80,13%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		69.932		43.657		62,43%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		30		30		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.010		7.006		99,94%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		60.626		30.755		50,73%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		10		10		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		19.837		11.289		56,91%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		10		10		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		4.200		3.220		76,67%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		3		3		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		371.236		227.783		61,36%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.351.612		1.875.640		79,76%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		604.260		530.800		87,84%				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		20		20		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Mebel		220.530		108.920		49,39%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		52		52		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1.091.052		900.975		82,58%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		64		64		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		435.770		334.945		76,86%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		11		11		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		396.645		369.375		93,13%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.500		151		10,03%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		130.667		108.979		83,40%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		264.478		260.246		98,40%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		665.939		462.632		69,47%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		365.350		310.741		85,05%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		37		37		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		55.448		46.650		84,13%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10		10		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		181.400		75.327		41,53%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		63.741		29.913		46,93%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		20		20		100,00%			
KECAMATAN KALIWUNGU				3.908.775		3.064.767	3.908.775	78,41%		Kurangnya Kontrol PPTK terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi inkonsistensi antara rencana anggaran kas (RAK) dengan realisasi anggaran.	pastikan target kinerja sesuai dengan target didalam dokumen renstra OPD yang telah disusun	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.908.775		3.064.767		78,41%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai		41		45		109,76%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.910		4.350		88,59%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.530		2.220		87,74%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.380		2.130		89,50%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.959.505		2.163.671		73,11%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.919.405		2.138.561		73,25%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		22		22		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		39.600		24.860		62,78%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		500		250		50,00%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		75.380		71.755		95,19%				
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		4.353		4.322		99,29%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14.435		14.418		99,88%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		17.616		15.114		85,80%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		14.607		14.092		96,48%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		894		893		99,98%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		4.200		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		180		180		100,00%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		19.096		18.536		97,07%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		16.359		15.984		97,71%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.225		5.994		96,29%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		4		4		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		10.134		9.990		98,58%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		4		4		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		263.591		229.499		87,07%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.200		1.192		99,33%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		53.231		43.527		81,77%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		209.160		184.779		88,34%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		589.030		579.508		98,38%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		128.342		127.454		99,31%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		15		15		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7.830		7.590		96,93%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		11		11		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		449.198		440.984		98,17%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3.660		3.480		95,08%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		22		22		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KECAMATAN KOTA KUDUS				13.969.747		13.291.256	13.969.747	95,14%		Kegiatan yang pelaksanaannya mengindik pada dinas pengampu tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pelaksanaan di tingkat kabupaten	pastikan target kinerja sesuai dengan target pada dokumen renstra yang telah disusun	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		13.969.747		13.291.256		95,14%				
		Nilai Kematangan Organisasi	nilai		41		37		90,24%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.146		13.964		86,49%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.600		7.636		88,79%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.546		6.328		83,86%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.777.185		12.189.831		95,40%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		12.711.223		12.127.749		95,41%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		1288		1134		88,04%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		61.030		57.600		94,38%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4.932		4.482		90,88%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		115.060		108.064		93,92%				
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		8.890		8.208		92,33%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24.234		24.164		99,71%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		47		47		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		19.341		16.332		84,44%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		25		25		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		14.494		14.488		99,96%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		9.252		9.216		99,61%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		4.200		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24		24		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		5.438		5.400		99,31%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1		1		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		29.211		26.057		89,20%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		282.913		270.718		95,69%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		8.551		7.992		93,46%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		7		7		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		44.018		36.630		83,22%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		230.344		226.096		98,16%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		32		32		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		441.606		373.805		84,65%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		600		600		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		119.186		97.749		82,01%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		321.820		275.455		85,59%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		336.837		334.875		99,42%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		138.870		138.804		99,95%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		11		11		100,00%			
		Pemeliharaan Mebel		1.128		1.100		97,52%				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		3		3		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		33.319		33.070		99,25%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		65		65		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		163.520		161.901		99,01%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KELURAHAN PURWOSARI				387.755		368.042	387.755	94,92%		Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan disebabkan adanya rasionalisasi	Perhatikan dengan target renstra OPD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		387.755		368.042		94,92%				
		Nilai Kematangan Organisasi	Nilai		40		37		92,50%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.500		2.254		90,17%				
		Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.250		1.248		99,82%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.250		1.007		80,52%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.486		30.015		89,63%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DFA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		32.236		29.191		90,55%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.250		824		65,90%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		27.383		26.093		95,29%				
		Cakupan Layanan Pendukung sesuai dengan Standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.796		1.796		100,00%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9.817		9.783		99,66%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		30		30		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5.067		5.048		99,63%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		20		20		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6.004		6.004		100,00%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2.900		1.662		57,30%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		124.806		122.350		98,03%				
		Persentase Pengadaan BMD	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		50.713		50.300		99,19%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		7		7		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		74.093		72.050		97,24%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22.484		19.264		85,68%				
		Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.000		2.000		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		20.484		17.264		84,28%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		3		3		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		177.096		168.067		94,90%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12.172		12.070		99,16%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5		5		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.480		5.450		99,45%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		8		8		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		159.444		150.547		94,42%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			
KELURAHAN SUNGGINAN				239.831		232.387	239.831	96,90%		Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan disebabkan adanya rasionalisasi	Sesuaikan dengan target renstra OPD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		239.831		232.387		96,90%				
		Nilai Kematangan Organisasi	nilai		40		37		92,50%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.600		3.566		99,06%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.800		1.778		98,78%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.800		1.788		99,33%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		42.333		37.537		88,67%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		39.633		34.837		87,90%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.700		2.700		100,00%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		32.136		31.861		99,14%				
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.203		2.188		99,30%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14.158		14.111		99,67%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.587		4.393		95,77%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.528		7.509		99,75%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.860		1.860		100,00%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		30.588		30.000		98,08%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30.588		30.000		98,08%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		7		4		57,14%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97.631		95.895		98,22%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000		3.000		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		24.911		23.448		94,13%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		69.720		69.447		99,61%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		33.543		33.528		99,95%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		23.143		23.133		99,95%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		6		6		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.400		10.395		99,95%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10		10		100,00%			
KELURAHAN PANJUNAN				221.238		187.884	221.238	84,92%		Karena Kelurahan bukan OPD, proses pengajuan SPM harus bersamaan sehingga realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah tersusun, oleh karena itu sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.	Sesuaiakan dengan target renstra OPD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		221.238		187.884		84,92%				
		Nilai Kematangan Organisasi	nilai		40		37		92,50%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.500		1.913		76,51%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.500		933		62,18%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		4		4		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.000		980		98,00%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36.613		31.582		86,26%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		35.613		30.600		85,92%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.000		982		98,21%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		4		4		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		43.844		36.899		84,16%				
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		10.391		10.290		99,02%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6.131		6.058		98,80%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		4.766		4.418		92,70%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.412		6.765		91,28%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		10.944		5.169		47,23%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		4.200		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		17.066		16.905		99,06%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7.878		7.826		99,33%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.188		9.080		98,82%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		97.051		79.607		82,03%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.000		4.000		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		23.403		17.354		74,16%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		69.648		58.252		83,64%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		24.164		20.978		86,81%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		18.745		16.787		89,55%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5		5		100,00%			
		Pemeliharaan Mebel		1.000		998		99,80%				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		4		4		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.047		1.825		59,89%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		4		4		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1.372		1.368		99,68%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KELURAHAN WERGU WETAN				225.222		179.105	225.222	79,52%		Beberapa Sub Kegiatan Serapan Anggaran belum mencapai target kinerja karena beberapa faktor : 1.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam item Efisiensi Anggaran Tahun 2025 baik efisiensi Makanan dan minuman rapat maupun Belanja Alat Tulis Kantor. 2.Adanya keterlambatan penyusunan perubahan anggaran sehingga mengganggu jadwal pencairan penatausahaan keuangan. 3.Beberapa Program Unggulan Bupati dan Wabup dialokasikan pada triwulan akhir sehingga kegiatan baru selesai pada triwulan IV. 4.Beberapa Sub Kegiatan Program Penunjang, telah dilakukan efisiensi mandiri dengan tidak mengurani capaian kinerja dan target kinerja.	Perhatikan target kinerja sesuai dengan renstra OPD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		225.222		179.105		79,52%				
		Nilai Kematangan Organisasi	nilai		41		41		100,00%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000		3.954		98,84%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.000		1.955		97,73%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000		1.999		99,95%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		40.989		36.133		88,15%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		39.157		35.077		89,58%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.832		1.056		57,64%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		36.122		28.030		77,60%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.688		3.146		55,31%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.209		11.012		98,24%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		18		18		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.587		2.082		58,04%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		15		15		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.618		4.490		79,92%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.220		5.538		67,37%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.763		97,92%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		29.483		28.625		97,09%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		29.483		28.625		97,09%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		8		8		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22.050		15.374		69,72%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000		3.000		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		5		5		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		19.050		12.374		64,96%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92.578		66.989		72,36%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		16.254		14.871		91,49%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5		5		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.180		7.940		78,00%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		15		15		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		66.144		44.178		66,79%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			
KELURAHAN WERGU KULON				263.926		249.734	263.926	94,62%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		263.926		249.734		94,62%		Mendekati akhir tahun waktunya tidak mencukupi dalam pengajuan GU ditingkat OPD Kecamatan Kota, karena saling	Sesuaikan dengan target renstra OPD	
		Nilai Kematangan Organisasi	nilai		40		37		92,50%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.780		2.604		93,67%		bergantung dan saling menunggu antar kelurahan satu dengan yang lainnya		
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.404		1.398		99,58%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		6		6		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.376		1.206		87,63%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		45.196		39.526		87,45%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		43.980		38.668		87,92%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.216		858		70,55%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		25.674		22.797		88,80%				
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.271		1.187		93,38%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.016		9.022		90,07%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		30		30		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.703		2.438		90,21%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.331		4.264		79,99%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.554		4.127		90,62%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		1.800		1.760		97,78%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14.167		13.653		96,37%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		3.797		3.663		96,47%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.370		9.990		96,34%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98.432		95.683		97,21%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.600		1.600		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		27.844		25.350		91,04%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		48		48		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		68.988		68.733		99,63%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		77.677		75.470		97,16%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		21.003		19.750		94,04%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		7		7		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.719		6.613		98,42%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		6		6		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		49.955		49.107		98,30%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KELURAHAN MLATI KIDUL				307.419		266.265	307.419	86,61%		Curah hujan yang cukup tinggi di Triwulan IV sedikit mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik meskipun tidak sampai menghambat kegiatan.	Pertimbangkan penentuan target kinerja sesuai dengan renstra OPD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		307.419		266.265		86,61%				
		Nilai Kematangan Organisasi	nilai		40		37		92,50%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.000		3.760		94,00%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.000		1.880		94,00%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10		10		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.000		1.880		94,00%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		40.384		32.568		80,65%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		38.384		30.688		79,95%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.000		1.880		94,00%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		8		8		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		26.771		23.476		87,69%				
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.999		1.999		100,00%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10.025		9.013		89,90%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		27		27		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1.997		1.933		96,78%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		11		11		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.586		5.976		78,78%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		3.003		2.656		88,43%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.160		1.900		87,96%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		205.278		176.747		86,10%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.800		1.800		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		45.883		32.904		71,71%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		48		48		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		157.595		142.042		90,13%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		7		7		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30.987		29.714		95,89%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		78,52		78,52%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		26.317		25.074		95,28%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5		5		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		4.670		4.640		99,36%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		15		15		100,00%			
KELURAHAN MLATINOROWITO				429.768		395.929	429.768	92,13%		Faktor penghambat suatu kegiatan adalah adanya perencanaan Kurang kurang cermat serta kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan dan kurangnya pengawasan.	sesuaikan dengan target renstra OPD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		429.768		395.929		92,13%				
		Nilai Kematangan Organisasi	nilai		41		37		90,24%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.679		3.367		91,50%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.561		1.403		89,87%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.118		1.964		92,70%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		41.480		36.718		88,52%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		99,9		99,90%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		39.500		34.740		87,95%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.980		1.978		99,90%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		46.433		39.979		86,10%				
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.473		1.443		97,94%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		17.905		14.263		79,66%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		32		32		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.684		6.150		92,00%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		15		15		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		12.642		10.977		86,83%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.928		5.346		90,18%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		149.492		146.838		98,23%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		10.296		9.879		95,95%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.279		9.700		94,36%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		5		5		100,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		128.916		127.259		98,71%				
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yg Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		103.480		90.274		87,24%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.000		2.000		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		31.760		18.629		58,65%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		69.720		69.645		99,89%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85.204		78.753		92,43%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		27.710		24.832		89,61%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		4		4		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8.890		6.510		73,23%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10		10		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2.000		2.000		100,00%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		46.603		45.411		97,44%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
KELURAHAN KERJASAN				966.015		833.052	966.015	86,24%		.Dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung sudah dilaksanakan tp belum sesuai target karena terkait anggaran .	Perhatikan dengan renstra OPD.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		966.015		833.052		86,24%				
		Nilai Kematangan Organisasi	nilai		40		37		92,50%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.841		3.840		99,99%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.806		1.805		99,97%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10		10		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.035		2.035		100,00%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		16		16		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		24.385		24.125		98,93%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		22.440		22.180		98,84%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		24		24		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.945		1.945		99,98%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		9		9		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		24.950		24.645		98,78%				
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.367		2.367		100,00%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.122		7.117		99,93%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		22		22		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.819		2.819		100,00%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		13		13		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.167		4.167		100,00%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.470		4.470		100,00%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4		4		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		1.800		1.500		83,33%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.205		2.205		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		22		22		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		46.921		44.280		94,37%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		46.921		44.280		94,37%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		145.132		129.970		89,55%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.000		5.000		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		4		4		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		18.995		13.187		69,42%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		121.137		111.783		92,28%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		24		24		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		720.787		606.192		84,10%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		15.250		14.609		95,80%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		5		5		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7.630		7.630		100,00%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		5		5		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		697.907		583.953		83,67%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
KELURAHAN KAJEKSAN				421.171		387.477	421.171	92,00%		Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan disebabkan adanya rasionalisasi	Perhatikan target kinerja sesuai dengan renstra OPD	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		421.171		387.477		92,00%				
		Nilai Kematangan Organisasi	nilai		40		37		92,50%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		358		358		100,00%				
		Presentase Capaian Kinerja Subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		39		39		100,00%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		2		2		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		319		319		100,00%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2		2		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		39.571		35.438		89,55%				
		Presentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		37.571		33.471		89,09%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.000		1.967		98,34%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		38.960		35.509		91,14%				
		Cakupan Layanan Pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		7.140		5.397		75,58%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.811		10.507		88,96%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		12		12		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.788		6.760		99,59%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		4.860		4.860		100,00%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.693		5.356		94,09%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		1.800		1.760		97,78%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		868		868		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1		1		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		31.434		27.172		86,44%				
		Presentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		30.387		26.800		88,20%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		5		5		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.047		372		35,54%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		210.734		190.295		90,30%				
		Presentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.000		2.000		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		33.644		26.227		77,95%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		175.090		162.068		92,56%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100.115		98.706		98,59%				
		Presentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		28.800		28.766		99,88%				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		5		5		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11.370		11.370		100,00%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		17		17		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		59.945		58.570		97,71%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KECAMATAN JATI				3.758.969		3.485.052	3.758.969	92,71%		Efisiensi anggaran menyebabkan ada beberapa kegiatan yang realisasinya kurang mencapai target namun tidak mengurangi capaian kinerja dan target kinerja.	Sesuaikan target kinerja sesuai dgn target dok.renstra opd tg telah disusun	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.758.969		3.485.052		92,71%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		43		40		93,02%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.776		3.461		91,66%				
		Persentase capaian kinerja Sub Kegiatan	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.525		2.220		87,92%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.251		1.241		99,20%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.750.289		2.507.896		91,19%				
		Persentase Anggaran realisasi anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA	persen		87,5		100		114,29%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.704.049		2.466.963		91,23%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		19		15		78,95%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		45.140		39.833		88,24%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.100		1.100		100,00%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		101.426		100.454		99,04%				
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1.722		1.721		99,97%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		19.365		19.332		99,83%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.880		7.846		99,56%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		8.910		8.889		99,76%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		7.565		7.549		99,78%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.800		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.398		1.350		96,57%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		52.786		51.968		98,45%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		58.075		55.428		95,44%				
		Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		14.203		13.420		94,49%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		15		15		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		37.237		35.792		96,12%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		15		15		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6.635		6.216		93,69%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		451.299		427.567		94,74%				
		Prosentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		150		150		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		66.793		55.402		82,95%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		384.356		372.016		96,79%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		394.103		390.246		99,02%				
		Prosentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		68.567		68.220		99,49%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		11		11		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		23.090		23.030		99,74%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		11		11		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		297.790		294.828		99,01%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		4.656		4.167		89,51%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
KECAMATAN UNDAAN				3.445.378		3.137.782	3.445.378	91,07%		Adanya Kegiatan yang belum berjalan karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dari Kabupaten	sesuaikan target kinerja dengan target pada dokumen renstra OPD yang disusun	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.445.378		3.137.782		91,07%				
		Nilai Kematangan OPD	Nilai		41		31		75,61%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.649		2.730		74,82%				
		Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.609		2.516		96,43%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.040		214		20,60%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		5		5		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.612.381		2.424.154		92,79%				
		Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK, DPA/DPPA	persen		90		90		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.568.542		2.390.694		93,08%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		21		16		76,19%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		43.090		32.960		76,49%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		749		499		66,61%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		101.252		96.661		95,47%				
		Cakupan Layanan pendukung yang sesuai dengan Standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.999		6.997		99,98%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25.308		25.203		99,59%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5.495		5.494		99,98%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		15.272		15.272		100,00%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		8.366		8.366		100,00%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.800		1.760		97,78%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		8		8		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.497		1.485		99,22%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		4		4		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36.516		32.084		87,86%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		8.308		8.292		99,80%				
		Persentase BMD yang diadakan sesuai dengan Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8.308		8.292		99,80%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		546.336		454.668		83,22%				
		Persentase Pembayaran Jasa Penunjang Kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		210		210		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		2		2		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		127.890		59.738		46,71%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		418.236		394.720		94,38%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		173.452		151.278		87,22%				
		Persentase BMD dalam Kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		122.850		102.249		83,23%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		14		14		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		14.022		13.029		92,92%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		4		4		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		36.000		36.000		100,00%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		3		3		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		580		0		0,00%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%	1. Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pd aplikasi SIPD yg mengakibatkan keterlambatan/ tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggran 2. Karena fungsi kecamatan sebagai fasilitasi sehingga capaian kinerja maupan serapan anggaran tergantung OPD terkait/OPD Pengampu Kegiatan.	pertahankan capaian sesuai target triwulanan, sehingga hasilnya dapat terlaksana 100 %	
KECAMATAN MEJOBO				4.240.136		3.930.011	4.240.136	92,69%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		4.240.136		3.930.011		92,69%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		42		44		104,76%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.251		5.867		93,86%				
		Persentase capaian kinerja sub kegiatan	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.593		3.435		95,61%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.659		2.432		91,48%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.289.266		3.041.483		92,47%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		91,65		91,65%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.244.112		3.004.154		92,60%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		19		19		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		44.320		37.000		83,48%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		835		329		39,44%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		47.309		46.123		97,49%				
		Cakupan layanan pendukung yang sesuai dengan standart	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.184		3.184		99,99%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		11		11		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13.240		13.208		99,76%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		24		24		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.644		3.418		93,81%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		20		20		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		5.669		5.627		99,26%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3.780		3.737		98,86%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		4.200		100,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.372		2.324		97,97%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		11.220		10.425		92,91%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		245.024		232.244		94,78%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		9.468		9.150		96,64%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		37.055		25.667		69,27%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		10		10		100,00%			
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		198.501		197.427		99,46%				
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		362.869		340.011		93,70%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		720		720		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		74.200		53.211		71,71%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		287.949		286.080		99,35%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		289.417		264.282		91,32%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	persen		100		90		90,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		137.057		117.189		85,50%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		16		16		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		17.860		15.570		87,18%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		26		26		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		134.500		131.523		97,79%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
		Terbayarnya honor piket kantor	bulan		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KECAMATAN JEKULO				4.190.072		3.764.225	4.190.072	89,84%		Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain	pastikan target kinerja sesuai dengan target kinerja pada renstra OPD yang telah disusun	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		4.190.072		3.764.225		89,84%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		45		46		102,22%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.433		4.392		59,09%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	%		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.378		3.858		71,74%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		8		8		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.055		534		25,99%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.033.161		2.698.047		88,95%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	%		80		80		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.984.769		2.650.317		88,79%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		17		17		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		46.390		46.280		99,76%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.002		1.450		72,42%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		68.841		58.904		85,57%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	%		100		100		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.774		3.657		96,91%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		9		9		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		18.039		16.592		91,98%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		44		44		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		10.591		8.026		75,78%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		29		29		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		15.369		13.019		84,71%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.381		3.926		72,96%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.360		80,00%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		12		12		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		817		750		91,80%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1		1		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		10.670		9.575		89,74%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		75.847		74.941		98,81%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	%		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		42.643		42.418		99,47%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10.370		9.990		96,34%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1		1		100,00%			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		22.834		22.533		98,68%				
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		2		2		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		604.947		560.095		92,59%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.000		1.000		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		2		2		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		91.487		86.620		94,68%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		512.460		472.475		92,20%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		399.844		367.845		92,00%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	%		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		141.845		123.756		87,25%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10		10		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16.123		8.377		51,96%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		17		17		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		241.876		235.712		97,45%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
KECAMATAN BAE				3.196.437		2.900.055	3.196.437	90,73%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.196.437		2.900.055		90,73%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		41		45		109,76%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.403		4.987		40,21%				
		Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.290		2.324		25,02%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.113		2.663		85,54%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.444.558		2.213.830		90,56%				
		Persentase Realisasi Anggaran sesuai RAK DPA/ DPPA	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.399.752		2.172.984		90,55%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		20		20		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		43.140		39.180		90,82%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.666		1.666		100,00%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		59.819		49.465		82,69%				
		Cakupan layanan Pendukung yang sesuai dengan Standar	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2.998		2.872		95,81%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13.216		12.548		94,95%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		39		39		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		2.859		2.852		99,76%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		24		24		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		7.081		7.033		99,32%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.916		5.841		98,74%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		8		8		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		4.200		100,00%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24		24		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.178		1.444		66,30%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		21.372		12.675		59,31%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		21.400		20.350		95,09%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		5.161		4.750		92,04%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		3		3		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		16.239		15.600		96,07%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		15		15		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		361.173		321.988		89,15%				
		Persentase pembayaran Jasa Penunjang Kantor Tepat Waktu	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.450		750		51,72%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		62.993		57.996		92,07%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		296.730		263.242		88,71%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		297.084		289.435		97,43%				
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		116.370		114.722		98,58%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10		10		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		174.177		169.858		97,52%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		14		14		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6.537		4.855		74,27%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		12		12		100,00%	Keikutsertaan dalam pameran umkm tidak terlaksana karena OPD terkait tidak jadi melaksanakan	sesuaikan target kinerja dengan renstra OPD yang telah disusun, dan selalu disusahakan agar tercapai 100 %	
KECAMATAN GEBOG				3.772.712		3.483.875	3.772.712	92,34%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		3.772.712		3.483.875		92,34%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		45		46		102,22%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41.088		37.508		91,29%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21.329		19.462		91,25%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19.760		18.046		91,33%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		8		8		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.776.952		2.538.199		91,40%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		87,5		87,5		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.729.027		2.490.804		91,27%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		22		22		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		45.325		45.325		100,00%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.600		2.071		79,64%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		76.386		75.225		98,48%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		500		484		96,80%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		26.822		26.437		98,57%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		39		39		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.576		7.557		99,75%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		24		24		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		10.880		10.695		98,30%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		7		7		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.432		4.403		99,36%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		8		8		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.800		4.620		96,25%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		24		24		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.879		2.869		99,64%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		18.497		18.160		98,18%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		725.160		684.487		94,39%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		250		230		92,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		72.065		59.094		82,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		652.845		625.163		95,76%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		153.125		148.455		96,95%				
		Persentase BMD dalam kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		95.695		92.561		96,72%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		14		14		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15.630		15.194		97,21%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		11		11		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		41.800		40.700		97,37%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		2		2		100,00%			
KECAMATAN DAWE				4.207.390		3.551.995	4.207.390	84,42%		Kurangnya Kontrol PPTK terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi inkonsistensi antara rencana anggaran kas (RAK) dengan realisasi anggaran	sesuaikan target kinerja dengan dokumen renstra yang telah disusun	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		4.207.390		3.551.995		84,42%				
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		44		24		54,55%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.920		15.776		93,24%				
		Persentase capaian kinerja subgiat	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13.636		12.902		94,62%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		11		11		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.284		2.874		87,51%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4		4		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.374.452		2.776.252		82,27%				
		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.328.913		2.737.585		82,24%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		22		20		90,91%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		44.661		37.799		84,63%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		878		868		98,86%				
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		90.977		87.673		96,37%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3.992		3.985		99,81%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		24.682		23.593		95,59%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		20		20		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		18.122		17.831		98,40%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9.890		9.887		99,97%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		5		5		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1.713		1.700		99,23%				
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.840		91,43%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.530		1.530		100,00%				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		26.848		25.308		94,26%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12		12		100,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		40.700		39.700		97,54%				
		Persentase Pengadaan BMD Sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		40.700		39.700		97,54%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		7		7		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		447.758		419.250		93,63%				
		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		600		600		100,00%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12		12		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		65.683		54.837		83,49%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		3		3		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		381.475		363.813		95,37%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		236.583		213.344		90,18%				
		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		130.101		113.683		87,38%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		16		16		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		67.730		66.533		98,23%				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1		1		100,00%			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		38.752		33.128		85,49%				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		22		22		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				4.730.702		4.155.511	4.730.702	87,84%		Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai jadwal yang telah direncanakan menyebabkan ada sedikit penumpukan kegiatan di akhir,	Optimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah, serta target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan.	- Belum optimalnya pemanfaatan bantuan Ormas - Hasil TL : Hibah tersalurkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan - Potensi pelanggaran kegiatan Ormas - Hasil TL : Laporan Monev dan Rekomendasi - Munculnya gesekan dan konflik horizontal - Hasil TL : Konflik tertangani, rekomendasi kebijakan - pengawas, tetapi juga sebagai edukator dan penjaga nilai kebangsaan - Rendahnya literasi politik dan pemahaman demokrasi - Maraknya politik identitas, hoaks dan ujaran kebencian - Hasil TL : Terbentuknya politik beretika - Belum optimalnya pemanfaatan bantuan parpol untuk pendidikan politik - Hasil TL : Bantuan parpol tersalurkan tepat sasaran dan sesuai ketentuan - Resiko penyalahgunaan dan lemahnya akuntabilitas - Rendahnya pemahaman Ormas terhadap aturan dan kewajiban hukum - Hasil TL : Meningkatnya pemahaman Ormas - Data Ormas belum mutakhir dan tidak tervalidasi - Hasil TL : Database Ormas yang valid dan akurat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.730.702		4.155.511		87,84%				
		Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		0		0		0%			
		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	Nilai		38		43		113,16%			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.472		17.548		81,73%				
		Persentase Capaian kinerja sub kegiatan Perangkat Daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		17.870		16.074		89,95%				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		10		10		100,00%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.802		679		24,25%				
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		18		18		100,00%			
		Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		800		795		99,46%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.103.731		3.602.717		87,79%				
		Persentase Realisasi Anggaran Sesuai RAK DPA / DPPA	persen		100		87,79		87,79%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.025.765		3.527.175		87,62%				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		24		24		100,00%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		75.705		73.935		97,66%				
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		12		12		100,00%			
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		2.261		1.607		71,08%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12		12		100,00%			- Kapasitas kelembagaan Ormas masih lemah Hasil TL : Ormas tertib administrasi dan berdaya - Meningkatkan peran DPRD bukan hanya sebagai pembuat kebijakan dan pengawas, tetapi juga sebagai edukator dan penjaga nilai kebangsaan - Kurangnya toleransi Hasil TL : Meningkatkan kondusifitas wilayah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		152.681		140.266		91,87%				
		Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		1.430		1.366		95,48%				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1		1		100,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		27.451		27.360		99,67%				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		6		6		100,00%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		5.249		5.238		99,80%				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		16.202		14.276		88,11%				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3		3		100,00%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		11.983		11.788		98,37%				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		2		2		100,00%			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4.200		3.600		85,71%				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2		2		100,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		86.166		76.638		88,94%				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		36		43		119,44%			

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		71.040		65.233		91,83%				
		Persentase Pengadaan BMD sesuai Ketentuan	persen		100		100		100,00%			
		Pengadaan Mebel		14.443		14.045		97,24%				
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		8		8		100,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		56.597		51.188		90,44%				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		6		6		100,00%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		167.749		152.584		90,96%				
		Cakupan keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		590		590		100,00%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		6		6		100,00%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		27.719		24.362		87,89%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		24		24		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		139.440		127.633		91,53%				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		214.029		177.163		82,78%				
		Persentase BMD dalam Kondisi baik	persen		100		100		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		57.020		45.002		78,92%				

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1		1		100,00%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		134.750		114.216		84,76%				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		12		12		100,00%			
		Pemeliharaan Mebel		16.169		11.935		73,81%				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		9		9		100,00%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6.090		6.010		98,69%				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		3		3		100,00%			

3.1.6. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

(* dalam ribu rupiah)

ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SEKRETARIAT DAERAH													
BAGIAN PEMERINTAHAN					373.981		303.017	373.981	81,02%		Terkait efisiensi anggaran makan minum rapat, realisasi anggaran sub kegiatan evaluasi kerja sama adalah 0 (nihil) akan tetapi kegiatan rapat evaluasi kerja sama masih dilaksanakan tanpa anggaran	1. Penyesuaian target untuk capaian kinerja di atas 100%. 2. Berkaitan dengan turunnya TKDD tahun 2026, berdampak pada menurunnya alokasi anggaran ke perangkat daerah, sebagai tindaklanjut atas hal tersebut, agar disesuaikan target kinerja output yang pencapaiannya berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran.	Harmonisasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial dan keagamaan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			373.981		303.017		81,02%				
			Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra	Persen		75		98,71		131,61%			
		Administrasi Tata Pemerintahan			360.896		296.061		82,04%				
			Persentase ketersediaan administrasi pemerintahan yang sesuai ketentuan	persen		95		100		105,26%			
			Persentase nama rupabumi yang diterima hasil telaahannya oleh provinsi Jawa Tengah	persen		55		56,9		103,45%			
		Penataan Administrasi Pemerintahan			63.800		37.590		58,92%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen		5		9		180,00%			
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			53.912		44.308		82,19%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen		7		7		100,00%			
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			243.184		214.164		88,07%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen		4		4		100,00%			
		Fasilitasi Kerjasama Daerah			13.085		6.956		53,16%				
			Persentase Permohonan Kerjasama yang terfasilitasi	persen		100		100		100,00%			
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			7.080		6.956		98,25%				

ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen		5		20		400,00%	Belum optimalnya koordinasi dengan instansi/ Lembaga terkait	1. Optimalisasi koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dengan cara mendokumentasikan hasil koordinasi dan memperkuat dengan pemantauan dan pengendalian yang efektif. 2. Berkaitan dengan penurunan TKDD yang signifikan di tahun 2026, target kinerja yang berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran agar disesuaikan.	Meningkatkan pendapatan tenaga pendidik dalam upaya mewujudkan misi Bupati Pendidikan berkarakter, kearifan budaya. Selain itu TKGS merupakan salah satu dari dua puluh program unggulan Bupati/ Wakil Bupati
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		6.005		0		0,00%				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan		1		1		100,00%			
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					114.519.415		108.798.386	114.519.415	95,00%				
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		114.519.415		108.798.386		95,00%				
			Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra	Persen		75		75,5		100,67%			
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		114.519.415		108.798.386		95,00%				
			Persentase kebijakan Kesra yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan	Persen		90		100		111,11%			
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		35.392.021		31.772.770		89,77%				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen		34		34		100,00%			
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		8.863.246		8.167.585		92,15%				
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas	Dokumen		7		7		100,00%			
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian		70.264.148		68.858.031		98,00%				

ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat										
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen		22		22		100,00%			
BAGIAN HUKUM				359.177		333.218	359.177	92,77%		Kegiatan pemeliharaan terjadi pergeseran di semester II sehingga pagu bertambah dan realisasi tidak tercapai maksimal	1. Capaian kinerja fisik kategori sangat tinggi agar dipertahankan untuk kinerja tahun 2026 2. Faktor pendorong dan penghambat disampaikan /diidentifikasi/dianalisis secara memadai sehingga dapat menggambarkan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan untuk kinerja berikutnya. 3. Capaian aktivitas Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan indikator Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi mencapai 120% agar dicek kembali dalam menentukan targetnya, apakah sudah berdasar data series capaian tahun-tahun sebelumnya,	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		359.177		333.218		92,77%				
		Persentase pelaporan penerapan SPM sesuai ketentuan	Persen		100		100		100,00%			
		Persentase ketercapaian IKK outcome bidang pemerintahan dan Kesra	Persen		75		98,71		131,61%			
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		359.177		333.218		92,77%				
		IRH (Indeks Reformasi Hukum)	Indeks		88		99,26		112,80%			
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		93.512		88.915		95,08%				
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen		200		485		242,50%			
		Fasilitasi Bantuan Hukum		186.159		170.975		91,84%				
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus		10		6		60,00%			
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		79.506		73.329		92,23%		Kegiatan Pemantauan Kebijakan SDA sebagian besar baru dilaksanakan pada triwulan IV	Capaian kinerja kegiatan dengan indikator persentase BUMD yang mencapai target laba belum mencapai target, sesuai kewenangan Bagian Perekonomian yaitu berkontribusi pada meningkatnya kualitas kebijakan	Meningkatkan pendapatan PD Percetakan Pemda Meningkatkan
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen		300		431		143,67%			
BAGIAN PEREKONOMIAN				336.275		279.322	336.275	83,06%				
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		336.275		279.322		83,06%				
		MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai		2,8		2,95		105,36%			

ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Angka inflasi daerah dalam satu tahun	Angka		3		2,68		89,33%	karena menunggu jadwal dari Pemerintah Provinsi dan menunggu GU 1 Setda. Kabupaten Kudus dan Prosentase BUMD yang mencapai target dibawah dari target 80% realisasinya hanya mencapai 60%	bidang Perekonomian dan pembangunan, maka agar dilakukan monitoring dan evaluasi guna memberikan solusi rancangan kebijakan, sehingga semua BUMD dapat mencapai target laba.	pendapatan PD Tirta Muria]
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	Persen		67		89,83		134,07%			
		Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan	Persen		75		75		100,00%			
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		36.275		32.677		90,08%				
		Persentase BUMD yang Mencapai Target Laba	Persen		80		60		75,00%			
		Persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	Persen		100		100		100,00%			
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		18.366		18.155		98,85%				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen		10		10		100,00%			
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		17.909		14.522		81,09%				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan		4		4		100,00%			
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		300.000		246.645		82,22%				
		Persentase realisasi DBHCHT	Persen		60		96		160,00%			
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		300.000		246.645		82,22%				

ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen		4		4		100,00%			
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				96.465		84.955	96.465	88,07%		1) perencanaan penganggaran yang kurang realistis 2) pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan anggaran maupun capaian kinerja kurang efektif 3) pengendalian internal belum optimal	1. Capaian kinerja fisik kategori sangat tinggi agar dipertahankan untuk tahun2026. 2.Sesuai kewenangan Bagian Administrasi Pembangunan bahwa dokumen administrasi pembangunan yang dihasilkan adalah dalam upaya pengendalian internal yang efektif, maka hasil monitoring dan evaluasi pembangunan tingkat output dipublikasikan ke masuarakat melalui SIPD e-walidata.	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		96.465		84.955		88,07%				
		MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai		2,85		2,95		103,51%			
		Angka inflasi daerah dalam satu tahun	Angka		3		2,68		89,33%			
		Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan, pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	Persen		67		89,83		134,07%			
		Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan	Persen		75		75		100,00%			
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		96.465		84.955		88,07%				
		Persentase PD yang mengimplementasikan MR (Manajemen Risiko) min level 3	Persen		50		82,35		164,70%			
		Persentase realisasi kegiatan pembangunan PD yang tepat waktu	Persen		90,5		96,1		106,19%			
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		21.985		21.381		97,25%				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen		1		1		100,00%			
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		57.484		49.258		85,69%				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan		12		12		100,00%			

ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			16.995		14.317		84,24%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan		2		2		100,00%			
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					1.361.516		1.010.647	1.361.516	74,23%		Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama LKPP RI Nomor 28006/SES/12/202 tanggal 03 Desember 2025 perihal Surat Pemberitahuan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Periode Transisi Tahun 2025, bahwa LKPP tidak melakukan penilaian ITKP, sehingga Nilai ITKP Tahun 2025 akan menggunakan nilai tahun sebelumnya, yaitu Nilai ITKP Tahun 2024	1. Berkoordinasi dan konsultasi dengan LKPP untuk penghitungan/penilaian tata kelola pengadaan setelah masa transisi dan didokumentasikan dengan baik sebagai dasar penyesuaian dalam dokumen perencanaan selanjutnya. 2. Berkaitan dengan menurunnya TKDD tahun 2026, berimplikasi pada berkurangnya alokasi anggaran belanja perangkat daerah, agar disesuaikan target output kegiatan/subkegiatan yang berbanding lurus dengan ketersediaan anggaran.	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			1.361.516		1.010.647		74,23%				
			Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah	Persen		67		89,83		134,07%			
			Persentase ketercapaian IKK outcome bidang perekonomian dan pembangunan	Persen		75		75		100,00%			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.361.516		1.010.647		74,23%				
			Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks		89,5		86,86		97,05%			
			Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen		10		0		0,00%			
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			562.600		280.714		49,90%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen		94		22		23,40%			
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			466.909		415.387		88,97%				
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen		38		38		100,00%			
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			332.007		314.547		94,74%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang		358		449		125,42%			

ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SEKRETARIAT DPRD					36.840.605		26.880.956	36.840.605	72,97%		Perlunya mengidentifikasi waktu yang digunakan, agar realisasi tercapai sesuai jadwal	Diperlukan penyempurnaan perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan evaluasi tahun berjalan, termasuk penyesuaian target waktu, peningkatan efisiensi anggaran, serta penguatan kualitas fasilitasi tugas dan fungsi DPRD guna mendukung kinerja yang lebih efektif dan berkelanjutan.	-TKD Kabupaten Kudus TA 2026 mengalami penurunan
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			36.840.605		26.880.956		72,97%				
			Persentase Ranperda Yang Dibahas Sesuai Standar	persen		100		100		100,00%			
			Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Yang Disahkan	persen		100		95		95,00%			
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			5.419.978		3.851.261		71,06%				
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Dokumen		37		37		100,00%			
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			750.186		362.626		48,34%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		15		15		100,00%			
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			920.658		519.500		56,43%				
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		9		9		100,00%			
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			3.349.134		2.578.721		77,00%				
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen		9		9		100,00%			
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik			400.000		390.414		97,60%				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/ atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen		4		4		100,00%			
		Pembahasan Kebijakan Anggaran			1.483.108		611.556		41,23%				
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen		14		14		100,00%			
		Pembahasan APBD			1.483.108		611.556		41,23%				

ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		14		14		100,00%			
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		10.398.820		7.343.725		70,62%				
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Yang Dilakukan DPRD	Laporan		92		92		100,00%			
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		10.398.820		7.343.725		70,62%				
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		92		92		100,00%			
		Peningkatan Kapasitas DPRD		7.823.640		7.106.856		90,84%				
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan		163		163		100,00%			
		Pendalaman Tugas DPRD		1.258.836		895.172		71,11%				
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		14		14		100,00%			
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		344.800		116.675		33,84%				
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		14		12		85,71%			
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		318.000		310.800		97,74%				
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang		7		7		100,00%			
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD		5.902.004		5.784.208		98,00%				
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen		128		128		100,00%			
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		2.182.004		1.945.054		89,14%				
		Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Laporan		11		11		100,00%			
		Kunjungan Kerja dalam Daerah		400		0		0,00%				

ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATANINDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan		6		6		100,00%			
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		25.440		24.327		95,63%				
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		2		2		100,00%			
		Pelaksanaan Reses		2.156.164		1.920.727		89,08%				
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		3		3		100,00%			
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		289.084		137.335		47,51%				
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		8		8		100,00%			
		Pengawasan Kode Etik DPRD		289.084		137.335		47,51%				
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		8		8		100,00%			
		Fasilitasi Tugas DPRD		9.243.971		5.885.169		63,66%				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	Dokumen		229		229		100,00%			
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		1.731.052		835.296		48,25%				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen		10		10		100,00%			
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		1.483.108		660.414		44,53%				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		18		18		100,00%			
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		6.029.811		4.389.459		72,80%				
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen		201		201		100,00%			

3.1.7. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

(* dalam ribu rupiah)

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH				2.057.830		867.211	2.057.830	42,14%		1. Keterbatasan kuota peserta dan penyesuaian jadwal penyelenggaraan dari lembaga penyedia diklat, khususnya yang diselenggarakan oleh instansi pembina atau lembaga terakreditasi, menyebabkan penundaan bahkan pembatalan keikutsertaan peserta. Kondisi ini berdampak langsung pada tertundanya realisasi belanja perjalanan dinas, akomodasi, dan biaya pendaftaran diklat. 2. Penerapan efisiensi anggaran serta kebijakan pengendalian belanja aparatur turut mempengaruhi realisasi anggaran kegiatan bimtek dan diklat. Inspektorat Daerah lebih mengutamakan pemenuhan tugas pengawasan yang bersifat prioritas dan mendesak, sehingga alokasi anggaran pengembangan kompetensi aparatur belum dapat dimanfaatkan secara optimal.	Tahun berikutnya agar pelaksanaan kegiatan realisasi kinerja dan keuangan, sub kegiatan sesuai dengan timeline anggaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kebutuhan belanja yang diperlukan dalam pengawasan.	- Hasil yang dicapai menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan desa terhadap kewajiban pelaporan. Jumlah desa yang belum menyelesaikan LPJ berangsur menurun, serta kualitas administrasi dan pelaporan keuangan desa mulai membaik. - Hasil tindak lanjut menunjukkan adanya penurunan jumlah dan nilai temuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem pengendalian internal semakin diperkuat, kepatuhan terhadap regulasi meningkat, serta menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		598.037		308.274		51,55%				
			Persentase Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen		88		88		100,00%			
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas kinerja yang selesai ditindaklanjuti	Persen		71		71		100,00%			
			Persentase rekomendasi hasil pengawasan bidang akuntabilitas keuangan yang selesai ditindaklanjuti	Persen		71		71		100,00%			
			Persentase pengaduan yang ditangani sesuai standart	Persen		100		100		100,00%			
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal		334.527		194.792		58,23%				
			Persentase Realisasi Pengawasan Kinerja dan Keuangan terhadap PPBR (perencanaan pengawasan berbasis resiko)	persen		100		90		90,00%			
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		102.736		64.561		62,84%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		46		48		104,35%			
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		33.774		9.531		28,22%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		32		32		100,00%			
			Reviu Laporan Kinerja		36.613		9.953		27,18%				
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		32		32		100,00%			
			Reviu Laporan Keuangan		33.998		28.136		82,76%				
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan		10		10		100,00%			
			Pengawasan Desa		72.915		54.084		74,17%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan		24		24		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		54.491		28.527		52,35%		3. Meningkatnya pelaksanaan bimtek dan diklat secara daring (online) atau terintegrasi dengan program pembinaan dari pemerintah pusat, yang relatif membutuhkan biaya lebih rendah dibandingkan dengan skema tatap muka 4. Adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan pengawasan yang semula direncanakan dengan survey ke lapangan, berubah menjadi di kerjakan di kantor 5. Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan bimtek dan diklat tidak mencerminkan rendahnya kinerja Inspektorat Daerah, melainkan merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta upaya efisiensi penggunaan anggaran guna mendukung pencapaian sasaran pengawasan yang lebih optimal.		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		9		9		100,00%			
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		263.510		113.482		43,07%				
			rata-rata Persentase realisasi PDTT (Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu), pengawasan atas dasar perintah atasan, dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen		100		100		100,00%			
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		5.300		0		0,00%				
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan		1		1		100,00%			
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		258.210		113.482		43,95%				
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		27		27		100,00%			
			PROGRAM PERUMUSAN KEBLIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		1.459.793		558.937		38,29%				
			Indeks integritas	Nilai		80		72,15		90,19%			
			Nilai MCP (Monitoring Center Prevention)	Persen		94		93,44		99,40%			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		84.642		59.243		69,99%				
			Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang disusun	Rekomendasi		2		2		100,00%			
			Penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Rekomendasi		2		2		100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		83.422		59.243		71,02%				
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi		2		2		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		1.220		0		0,00%				
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomen dasi		2		100		5000,00%			
			Pendampingan dan Asistensi		1.375.151		499.694		36,34%				
			persentase penurunan Jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan internal dan eksternal	Persen		25		23		92,00%			
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		123.046		12.778		10,38%				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah		10		10		100,00%			
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		35.937		19.672		54,74%				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah		15		16		106,67%			
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1.139.322		445.442		39,10%				
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		43		43		100,00%			
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		76.845		21.802		28,37%				
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah		34		34		100,00%			

3.1.8. Unsur Kewilayahan

(* dalam ribu rupiah)

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KECAMATAN													
	KECAMATAN KALIWUNGU				1.426.082		1.368.706	1.426.082	95,98%		Kurangnya Kontrol PPTK terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi inkonsistensi antara rencana anggaran kas (RAK) dengan realisasiÂ anggaran.	pastikan target kinerja sesuai dengan target didalam dokumen renstra OPD yang telah disusun	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		116.663		102.394		87,77%				
			Persentase dukungan SPM bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial yang terealisasi	persen		76		76		100,00%			
			Presentase Kepuasan Layanan Kecamatan	persen		91		97,57		107,22%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		106.493		98.494		92,49%				
			Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	persen		100		100		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		106.493		98.494		92,49%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		11		11		100,00%			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		10.170		3.900		38,35%				
			Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		10.170		3.900		38,35%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		6		6		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		463.408		438.178		94,56%				
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa	persen		89		89		100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		463.408		438.178		94,56%				
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Kegiatan		5		5		100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		89.291		88.756		99,40%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		374.117		349.422		93,40%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		15		15		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		529.946		524.786		99,03%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		529.946		524.786		99,03%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	Persen		64		64		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		429.946		427.713		99,48%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		2		2		100,00%			
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		100.000		97.073		97,07%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		2		2		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		103.610		101.372		97,84%				
			Persentase layanan kecamatan sesuai	persen		85		85		100,00%			
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		88		88		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		103.610		101.372		97,84%				
			Persentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		94.010		93.810		99,79%				
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		5		5		100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		9.600		7.562		78,77%				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		6		6		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		212.455		201.976		95,07%				
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	persen		97		97		100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		212.455		201.976		95,07%				
			Pesentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		12.000		12.000		100,00%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		4		4		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		19.548		19.440		99,45%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		99		99		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		172.736		163.146		94,45%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		15		15		100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		7.140		7.140		100,00%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		1.030		250		24,26%				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN KOTA KUDUS				302.029		239.197	302.029	79,20%		Kegiatan yang pelaksanaannya menginduk pada dinas pengampu tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pelaksanaan di tingkat kabupaten	pastikan target kinerja sesuai dengan target pada dokumen renstra yang telah disusun	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		54.199		40.284		74,33%				
			Nilai Kepuasan Dukungan SPM kecuali trantibum	angka		76		92,1		121,18%			
			Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	angka		92,7		92,1		99,35%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		52.149		40.284		77,25%				
			Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		42.193		36.209		85,82%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		6		6		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		9.956		4.075		40,93%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		4		4		100,00%			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		2.050		0		0,00%				
			Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		2.050		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		140.584		116.008		82,52%				
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		91		100		109,89%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		140.584		116.008		82,52%				
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Kegiatan		2		1		50,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		10.225		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		0		0,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		130.359		116.008		88,99%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		36.823		32.415		88,03%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		36.823		32.415		88,03%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		36.823		32.415		88,03%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		20.133		16.162		80,28%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		78		100		128,21%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		20.133		16.162		80,28%				
			Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		20.133		16.162		80,28%				
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		50.291		34.328		68,26%				
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pemdes	persen		97		100		103,09%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		50.291		34.328		68,26%				
			Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen		65		65		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		9.752		3.657		37,50%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		144		144		100,00%			
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		2.310		2.310		100,00%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		144		144		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		24.642		14.805		60,08%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		32		32		100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		11.541		11.511		99,74%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		16		16		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		2.045		2.045		99,99%				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KELURAHAN PURWOSARI				1.656.714		1.560.513	1.656.714	94,19%		Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan disebabkan adanya rasionalisasi	Perhatikan dengan target renstra OPD	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.497.998		1.416.390		94,55%				
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	<i>persen</i>		91		91		100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.442.998		1.361.390		94,34%				
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	Kegiatan		3		3		100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4.954		4.953		99,98%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.064.180		1.045.054		98,20%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		6		6		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		373.864		311.383		83,29%				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		7		7		100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		55.000		55.000		100,00%				
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		55.000		55.000		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan		2		2		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		35.386		24.868		70,28%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		35.386		24.868		70,28%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat teratasi	persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		35.386		24.868		70,28%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		123.330		119.254		96,70%				
			Persentase Konflik Yang Tertangani	Persen		77		77		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		123.330		119.254		96,70%				
			Persentase tindakanlanjut hasil forkopimcam	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		123.330		119.254		96,70%		Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan disebabkan adanya rasionalisasi	Sesuaikan dengan target renstra OPD	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KELURAHAN SUNGGINGAN				1.241.181		1.200.501	1.241.181	96,72%				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.099.623		1.059.906		96,39%				
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		91		91		100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.064.623		1.024.906		96,27%				
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	Kegiatan		3		3		100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5.000		5.000		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		829.000		789.535		95,24%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		4		4		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		230.623		230.371		99,89%				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		6		6		100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		35.000		35.000		100,00%				
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		35.000		35.000		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan		2		2		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		51.456		50.923		98,96%				
			Presentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	Persen		100		100		100,00%			
			Presentase dukungan SPM Bidang Trantib Umum dan kebencanaan yang terealisasi	Persen		16		16		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		51.456		50.923		98,96%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	Persen		100		100		100,00%			
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	Persen		82		82		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		51.456		50.923		98,96%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		90.102		89.672		99,52%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		78		78		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		90.102		89.672		99,52%				
			Presentase tindakanjuit hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		90.102		89.672		99,52%				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KELURAHAN PANJUNAN				863.132		810.176	863.132	93,86%		Karena Kelurahan bukan OPD, proses pengajuan SPM harus bersamaan sehingga realisasi	Sesuaikan dengan target renstra OPD	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		738.153		699.856		94,81%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		91		37		40,66%	anggaran tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah tersusun, oleh karena itu sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		710.153		673.856		94,89%				
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	Kegiatan		3		3		100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4.126		3.820		92,58%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		552.159		539.131		97,64%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		4		4		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		153.868		130.905		85,08%				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		10		10		100,00%			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		10		10		100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		28.000		26.000		92,86%				
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		28.000		26.000		92,86%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan		2		2		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		41.096		30.324		73,79%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		37		37,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		41.096		30.324		73,79%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		41.096		30.324		73,79%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		7		7		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		83.884		79.996		95,37%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		78		37		47,44%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		83.884		79.996		95,37%				
			Presentase tindakanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		83.884		79.996		95,37%				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%	Beberapa Sub Kegiatan Serapan Anggaran belum mencapai target kinerja karena beberapa faktor : 1.Beberapa kegiatan yang termasuk dalam item Efisiensi Anggaran Tahun 2025 baik efisiensi Makanan dan minuman rapat maupun Belanja Alat Tulis Kantor. 2.Adanya keterlambatan penyusunan perubahan anggaran sehingga mengganggu jadwal	Perhatikan target kinerja sesuai dengan renstra OPD	
	KELURAHAN WERGU WETAN				936.256		820.116	936.256	87,60%				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		774.210		671.757		86,77%				
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		100		100		100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		744.210		641.757		86,23%				
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	Kegiatan		3		3		100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5.000		5.000		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		590.339		512.539		86,82%		pencairan penatausahaan keuangan. 3.Beberapa Program Unggulan Bupati dan Wabup dialokasikan pada triwulan akhir sehingga kegiatan baru selesai pada triwulan IV. 4.Beberapa Sub Kegiatan Program Penunjang, telah dilakukan efisiensi mandiri dengan tidak mengurani capaian kinerja dan target kinerja.		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		7		7		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		148.871		124.218		83,44%				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		6		6		100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		30.000		30.000		100,00%				
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		30.000		30.000		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan		2		2		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		71.424		65.686		91,97%				
			Persentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		71.424		65.686		91,97%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		71.424		65.686		91,97%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		90.621		82.674		91,23%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		100		100		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		90.621		82.674		91,23%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		90.621		82.674		91,23%		Mendekati akhir tahun waktunya tidak mencukupi dalam pengajuan GU ditingkat OPD Kecamatan Kota, karena saling bergantung dan saling menunggu antar kelurahansatu dengan yang lainnya	Sesuaikan dengan target renstra OPD	
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KELURAHAN WERGU KULON				1.017.271		870.821	1.017.271	85,60%				
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		862.341		722.158		83,74%				
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		91		91		100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		828.341		688.158		83,08%				
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	Kegiatan		3		3		100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		3.454		3.454		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		7		7		100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		527.995		481.850		91,26%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		1		1		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		296.892		202.855		68,33%				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		7		7		100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		34.000		34.000		100,00%				
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		34.000		34.000		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan		2		2		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		72.260		69.807		96,61%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		72.260		69.807		96,61%				
			Persentase gangguan tranribum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		72.260		69.807		96,61%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		82.670		78.855		95,39%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		78		78		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		82.670		78.855		95,39%				
			Persentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		82.670		78.855		95,39%				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KELURAHAN MLATI KIDUL				1.715.690		1.624.022	1.715.690	94,66%		Curah hujan yang cukup tinggi di Triwulan IV sedikit mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik meskipun tidak sampai menghambat kegiatan.	Pertimbangkan penentuan target kinerja sesuai dengan renstra OPD	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.615.743		1.532.730		94,86%				
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		91		100		109,89%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.591.743		1.508.730		94,78%				
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	Kegiatan		3		3		100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		5.635		2.985		52,97%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		1.414.175		1.343.958		95,03%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		8		8		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		171.933		161.787		94,10%				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		50		50		100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		24.000		24.000		100,00%				
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		24.000		24.000		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan		2		2		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		31.375		26.280		83,76%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		31.375		26.280		83,76%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		31.375		26.280		83,76%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		68.572		65.012		94,81%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		78		100		128,21%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		68.572		65.012		94,81%				
			Presentase tindakanjuit hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		68.572		65.012		94,81%				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		108		108		100,00%			
	KELURAHAN MLATINOROWITO				1.021.353		941.554	1.021.353	92,19%		Faktor penghambat suatu kegiatan adalah adanya perencanaan Kurang cermat serta kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang telah direncanakan dan kurangnya pengawasan.	sesuaikan dengan target renstra OPD	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		904.775		832.564		92,02%				
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		91		91		100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		860.775		788.564		91,61%				
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	Kegiatan		3		3		100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		4.316		4.067		94,23%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		682.293		645.706		94,64%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		5		5		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		174.166		138.791		79,69%				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		4		4		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		44.000		44.000		100,00%				
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		44.000		44.000		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan		2		2		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		29.015		24.000		82,72%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		29.015		24.000		82,72%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		29.015		24.000		82,72%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		87.564		84.990		97,06%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		78		78		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		87.564		84.990		97,06%				
			Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		87.564		84.990		97,06%				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR		SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KELURAHAN KERJASAN					755.938		683.600	755.938	90,43%		.Dalam kegiatan Rehabilitasi Gedung sudah dilaksanakan tp belum sesuai target karena terkait anggaran .	Perhatikan dengan renstra OPD.	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			399.175		362.967		90,93%				
				Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	persen		91		91		100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			389.175		352.967		90,70%				
				Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	Kegiatan		3		3		100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.439		3.439		100,00%				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan		1		1		100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			88.549		83.608		94,42%				
				Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		1		1		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			297.187		265.920		89,48%				
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		17		17		100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			10.000		10.000		100,00%				
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			10.000		10.000		100,00%				
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan		2		2		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			111.627		96.607		86,54%				
				Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			111.627		96.607		86,54%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		111.627		96.607		86,54%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		245.135		224.027		91,39%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		78		78		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		245.135		224.027		91,39%				
			Persentase tindaklanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		137.144		136.231		99,33%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		600		600		100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		107.991		87.796		81,30%				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		13		13		100,00%			
	KELURAHAN KAJEKSAN				727.616		659.032	727.616	90,57%		Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan disebabkan adanya rasionalisasi	Perhatikan target kinerja sesuai dengan renstra OPD	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		593.903		547.059		92,11%				
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat dan desa kelurahan	persen		90		91		101,11%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		577.903		531.059		91,89%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan terealisasi	Kegiatan		3		3		100,00%			
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		2.915		2.915		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LKK Lembaga Kemasyarakatan		6		6		100,00%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		374.599		370.197		98,82%				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		2		2		100,00%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		200.389		157.948		78,82%				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	LKK Pokmas / Ormas		6		6		100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		16.000		16.000		100,00%				
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan		16.000		16.000		100,00%				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan		2		2		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		57.444		45.746		79,63%				
			Prosentase dukungan SPM Bidang Trantibum dan Kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		57.444		45.746		79,63%				
			Presentase gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		57.444		45.746		79,63%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		76.269		66.227		86,83%				
			Presentasi Konflik yang tertangani	persen		78		78		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		76.269		66.227		86,83%				
			Presentasi tindakanjnt hasil Forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		76.269		66.227		86,83%				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
	KECAMATAN JATI				153.013		152.229	153.013	99,49%				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		24.225		21.943		90,58%				
			Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	persen		85		87,66		103,13%			
			Persentase Dukungan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, PU, Perumahan,Rakyat dan Sosial (kecuali trantibum yang terealisasi	persen		76		76		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		23.695		21.497		90,72%		Efisiensi anggaran menyebabkan ada beberapa kegiatan yang realisasinya kurang mencapai target namun tidak mengurangi capaian kinerja dan target kinerja.	Sesuaikan target kinerja sesuai dgn target dok.renstra opd tg telah disusun	
			Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan	persen		62		62		100,00%			
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		14.665		13.636		92,98%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		9.030		7.861		87,05%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		530		446		84,06%				
			Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait	persen		55		55		100,00%			
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		530		446		84,06%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		44.810		50.401		112,48%				
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	persen		93		92		98,92%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		44.810		50.401		112,48%				
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Kegiatan		5		5		100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		750		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		12		12		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		44.060		50.401		114,39%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		28.981		28.136		97,08%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		28.981		28.136		97,08%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		55		55		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		28.981		28.136		97,08%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		2		2		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		29.617		26.907		90,85%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		93		93		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		29.617		26.907		90,85%				
			Presentase tindaklanjut hasil forkopincam	Persen		55		55		100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		28.410		25.835		90,94%				
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		12		12		100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		1.207		1.072		88,82%				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		25.380		24.842		97,88%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	persen		97		100		103,09%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		25.380		24.842		97,88%				
			Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	Dokumen		5		5		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		9.645		9.514		98,64%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		9.910		9.880		99,70%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		300		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5.300		5.225		98,58%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		225		223		99,00%				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN UNDAAN				670.161		643.760	670.161	96,06%		Adanya Kegiatan yang belum berjalan karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dari Kabupaten	sesuaikan target kinerja dengan target pada dokumen renstra OPD yang disusun	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		120.064		116.789		97,27%				
			Persentase Dukungan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Sosial	persen		100		90		90,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Dukungan SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, PU, Perumahan Rakyat dan Sosial	persen		76		76		100,00%			
			Persentase Layanan Kecamatan Sesuai Standar	persen		90,4		90,4		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		117.572		114.826		97,66%				
			Persentase Kepuasan Layanan Kecamatan	Indeks		91,14		91,12		99,98%			
			Persentase Penerapan Standar Pelayanan di Kecamatan	persen		90,4		90,4		100,00%			
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		111.822		110.951		99,22%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		2		2		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5.750		3.875		67,39%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1		1		100,00%			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		1.459		931		63,83%				
			Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait	persen		76		76		100,00%			
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1.459		931		63,83%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		5		5		100,00%			
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.033		1.032		99,89%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Prosentase Pelaksanaann Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Yang Terlaksana	persen		100		100		100,00%			
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		1.033		1.032		99,89%				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		1		1		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		202.436		190.047		93,88%				
			Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Kelompok Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	persen		95		95		100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		202.436		190.047		93,88%				
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terealisasi	Laporan		16		16		100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		5.720		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		196.716		190.047		96,61%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		1		1		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		206.367		204.608		99,15%				
			Prosentase dukungan SPM bidang tranitubum dan kebencanaan yang terealisasi (SPM dukungan kecamatan meliputi apa saja, sehingga di butuhkan forum untuk membahas SPM tersebut dengan Tapem dg 6 pengampu SPM)	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		206.367		204.608		99,15%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		206.367		204.608		99,15%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		4		4		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		11.969		8.511		71,11%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		96		100		104,17%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		11.969		8.511		71,11%				
			Persentase Tindaklanjut Hasil Forkopimcam	persen		94		100		106,38%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		11.969		8.511		71,11%				
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Laporan		4		4		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		129.325		123.805		95,73%				
			Persentase Desa Tertib Administrasi	persen		97		100		103,09%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		129.325		123.805		95,73%				
			Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		4.298		3.008		69,99%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		16		16		100,00%			
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		102.920		101.489		98,61%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		16		16		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12.059		9.807		81,33%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		16		16		100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		8.388		7.918		94,40%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		1.661		1.583		95,31%				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN MEJOBO				202.910		142.209	202.910	70,08%		1. Adanya beberapa kendala teknis terkait dengan sistem pd aplikasi SIPD yg mengakibatkan keterlambatan/ tidak tepat waktu dalam proses penyerapan anggran 2. Karena fungsi kecamatan sebagai fasilitasi sehingga capaian kinerja maupan serapan anggaran tergantung OPD terkait/OPD Pengampu Kegiatan.	pertahankan capaian sesuai target triwulanan, sehingga hasilnya dapat terlaksana 100 %	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		55.042		33.394		60,67%				
			Persentase Dukungan SPM kecuali trantibum yang terealisasi	persen		76		76		100,00%			
			Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	Nilai		92,5		92,52		100,02%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		25.409		20.664		81,32%				
			Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	%		100		100		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		25.409		20.664		81,32%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		4		4		100,00%			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		29.633		12.730		42,96%				
			Persentase pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang telah dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		29.633		12.730		42,96%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		48.170		26.140		54,27%				
			Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat desa	persen		93		93		100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		48.170		26.140		54,27%				
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Kegiatan		5		5		100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		10.426		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		0		0,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		37.744		26.140		69,26%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		42.042		37.634		89,52%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		42.042		37.634		89,52%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	Persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		42.042		37.634		89,52%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		2		2		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		20.676		18.342		88,71%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		100		100		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		20.676		18.342		88,71%				
			Presentase tindakananjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		20.676		18.342		88,71%				
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		5		5		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		36.980		26.699		72,20%				
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemdes	persen		97		97		100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		36.980		26.699		72,20%				
			Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		1.622		1.622		100,00%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		4		4		100,00%			
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1.594		1.594		100,00%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		99		99		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		25.073		16.444		65,58%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		22		22		100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		7.050		7.039		99,84%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		1.641		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN JEKULO				64.956		57.094	64.956	87,90%		Fungsi Kecamatan sebagai Fasilitasi menyebabkan sebagian Sub Kegiatan dalam capaian kinerja dan serapan anggaran tergantung dengan OPD Lain	pastikan target kinerja sesuai dengan target kinerja pada renstra OPD yang telah disusun	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.397		12.143		97,95%				
			Persentase Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi	persen		90		70		77,78%			
			Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	Persen		90,7		70		77,18%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		9.697		9.455		97,51%				
			nilai Kepuasan Dukungan SPM Kecuali Trantibum	nilai		76		63,33		83,33%			
			Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		5.665		5.512		97,29%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4.032		3.944		97,81%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		2.700		2.688		99,56%				
			Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	Persen		81		81		100,00%			
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		2.700		2.688		99,56%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		13.517		12.264		90,73%				
			Persentase Desa dan kelurahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif	<i>persen</i>		93		92,43		99,39%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		13.517		12.264		90,73%				
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Kegiatan		5		5		100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		12.047		11.264		93,50%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1.470		1.000		68,03%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		24.711		21.922		88,71%				
			<i>Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi</i>	<i>persen</i>		100		70		70,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		24.711		21.922		88,71%				
			<i>Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi</i>	<i>persen</i>		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		24.711		21.922		88,71%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1.390		0		0,00%				
			<i>Persentase Konflik yang tertangani</i>	<i>persen</i>		78		70		89,74%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1.390		0		0,00%				
			<i>Presentase tindaklanjut hasil forkopincam</i>	<i>persen</i>		100		100		100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		1.390		0		0,00%				
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		12.941		10.764		83,18%				
			<i>Persentase Desa Tertib Administrasi</i>	<i>persen</i>		97		90		92,78%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		12.941		10.764		83,18%				
			<i>Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar</i>	<i>persen</i>		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		500		297		59,39%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		48		48		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		5.455		4.917		90,13%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		6.311		5.328		84,42%				
			Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Dokumen		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		675		223		33,00%				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN BAE				113.347		86.442	113.347	76,26%		Efisiensi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang realisasinya kurang mencapai target namun tidak mengurangi capaian kinerja dan target kinerja.	sesuaikan target kinerja dengan dokumen renstra OPD yang telah disusun	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		27.193		23.569		86,67%				
			Persentase layanan Kecamatan sesuai Standart	<i>persen</i>		62		62		100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		6.975		6.419		92,03%				
			Persentase Penerapan standart Pelayanan di Kecamatan	<i>persen</i>		100		100		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		6.975		6.419		92,03%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		20.218		17.150		84,83%				
			Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Saranan Pelayanan Umum yang telah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah Terkait	<i>Persen</i>		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		20.218		17.150		84,83%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		3		3		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		40.362		26.098		64,66%				
			Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki kelompok pemberdayaan masyarakat yang aktif	persen		92		92		100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		40.362		26.098		64,66%				
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Kegiatan		5		5		100,00%			
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	persen		91		91		100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		8.925		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		31.437		26.098		83,02%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		15		15		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		24.370		18.293		75,06%				
			Persentase dukungan SPM Bidang Trantib Umum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		24.370		18.293		75,06%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Persentase Gangguan Trantibum dan Kebencanaan yang dapat diatasi	Persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		24.370		18.293		75,06%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		21.422		18.482		86,28%				
			<i>persentase desa tertib administrasi</i>	<i>persen</i>		97		97		100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		21.422		18.482		86,28%				
			Jumlah Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	Persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		1.000		1.000		100,00%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		13.754		10.964		79,71%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		6.143		6.143		100,00%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		525		375		71,43%				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KECAMATAN GEBOG				194.725		176.067	194.725	90,42%		Keikutsertaan dalam pameran umkm tidak terlaksana karena OPD terkait tidak jadi melaksanakan	sesuaikan target kinerja dengan renstra OPD yang telah disusun, dan selalu disusahakan agar tercapai 100 %	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		67.302		64.080		95,21%				
			Nilai Kepuasan Layanan Kecamatan	Nilai		86		88		102,33%			
			Nilai Kepuasan dukungan SPM Kecuali Trantib	Nilai		87		92		105,75%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		64.735		61.619		95,19%				
			Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan	persen		67		67		100,00%			
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		52.732		51.293		97,27%				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12.004		10.326		86,02%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		2.567		2.461		95,89%				
			Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang telah di koordinasikan dengan perangkat daerah terkait	persen		87		87		100,00%			
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		2.567		2.461		95,89%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		42.998		30.414		70,73%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Layanan pemberdayaan masyarakat desa	persen		64		100		156,25%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		42.998		30.414		70,73%				
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa terealisasi	Kegiatan		5		5		100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		9.221		0		0,00%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		33.777		30.414		90,04%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		49.510		48.834		98,64%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		49.510		48.834		98,64%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		62		62		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		49.510		48.834		98,64%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1.920		1.920		99,99%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		78		100		128,21%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1.920		1.920		99,99%				
			Presentase tindakan lanjut hasil forkopincam	persen		60		60		100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		1.920		1.920		99,99%				
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		32.995		30.818		93,40%				
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		32.995		30.818		93,40%				
			Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		9.070		7.382		81,39%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1.258		1.209		96,11%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		13.917		13.842		99,46%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		12		12		100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		7.000		6.678		95,40%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		1.750		1.707		97,56%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			
	KECAMATAN DAWE				217.223		179.614	217.223	82,69%		Kurangnya Kontrol PPTK terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi inkonsistensi antara rencana anggaran kas (RAK) dengan realisasi anggaran	sesuaikan target kinerja dengan dokumen renstra yang telah disusun	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		57.447		52.897		92,08%				
			Nilai Kepuasan Dukungan SPM bidang pendidikan, kesehatan, pu, perumahan rakyat dan sosial (kecuali trantibum) yang terealisasi	persen		76		76		100,00%			
			Nilai kepuasan layanan masyarakat	persen		90,3		90,71		100,45%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		16.204		14.261		88,01%				
			Persentase Penerapan Standart Pelayanan di Kecamatan	persen		90,3		90,71		100,45%			
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		16.204		14.261		88,01%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		11		11		100,00%			
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		41.243		38.637		93,68%				
			Persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persen		74		82		110,81%			
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		41.243		38.637		93,68%				
			Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		12		12		100,00%			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		33.048		21.782		65,91%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Cakupan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen		94		94		100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		33.048		21.782		65,91%				
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	Laporan		7		7		100,00%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		11.578		6.498		56,12%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen		1		1		100,00%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		21.470		15.284		71,19%				
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		12		12		100,00%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		37.019		35.234		95,18%				
			Prosentase dukungan SPM bidang trantibum dan kebencanaan yang terealisasi	persen		100		100		100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		37.019		35.234		95,18%				
			Persentase gangguan trantibum dan kebencanaan yang dapat diatasi	persen		100		100		100,00%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		37.019		35.234		95,18%				
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		2		2		100,00%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		60.682		45.540		75,05%				
			Persentase Konflik yang tertangani	persen		100		100		100,00%			

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		60.682		45.540		75,05%				
			Presentase tindakan lanjut hasil forkopincam	persen		100		100		100,00%			
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		57.000		42.100		73,86%				
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		5		5		100,00%			
			Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		3.682		3.440		93,43%				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		6		6		100,00%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		29.027		24.161		83,24%				
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah desa	persen		97		100		103,09%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		29.027		24.161		83,24%				
			Persentase Dokumen Administrasi Desa yang selesai tepat waktu dan sesuai standar	persen		100		100		100,00%			
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		5.440		5.055		92,92%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		4		4		100,00%			
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1.961		1.655		84,40%				
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		18		18		100,00%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		14.565		11.286		77,49%				

URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT PELAKSANA DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN/ TARGET KINERJA		REALISASI		PERSENTASE		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		18		18		100,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		6,425		5,625		87,55%				
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		1		1		100,00%			
			Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		636		540		84,91%				
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		1		1		100,00%			

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan Strategis yang diambil meliputi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus yang dituangkan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun tindakan yang diambil oleh Bupati Kudus dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kudus tahun 2025-2029	Permendagri No. 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal	- Untuk menyelaraskan kebijakan SPM dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, serta rencana kerja tahunan, sehingga pelaksanaan SPM tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. - Sebagai peta jalan (roadmap) pemenuhan SPM yang memuat tahapan capaian, prioritas layanan, kebutuhan sumber daya, serta pembagian peran antar perangkat daerah
2.	Pembentukan Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2026 Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus.	- Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; - Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja	- Menjamin proses verifikasi administrasi dan teknis pemberian hibah dan bantuan sosial berjalan akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Meningkatkan ketepatan sasaran penerima hibah dan bantuan sosial di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. - Memastikan pelaksanaan, penyaluran, dan pemanfaatan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan proposal, perjanjian, dan tujuan pemberian.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus.	- Menyediakan data dan laporan monitoring serta evaluasi sebagai bahan pengendalian, pembinaan, dan pengambilan keputusan pimpinan. - Mencegah terjadinya penyimpangan, tumpang tindih bantuan, dan permasalahan hukum dalam pemberian hibah dan bantuan sosial.
3.	Penetapan Daftar Nama Tenaga Kependidikan Swasta Penerima Insentif Peningkatan Kesejahteraan Untuk Tenaga Kependidikan Swasta di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025	- Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; - Peraturan Bupati Kudus Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif Peningkatan Kesejahteraan untuk Tenaga Kependidikan Swasta di Kabupaten Kudus	- Meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja tenaga kependidikan swasta dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kudus. - Mewujudkan keadilan dan pemerataan pemberian insentif bagi tenaga kependidikan swasta sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku. - Menjamin proses pemberian insentif dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. - Mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan melalui penguatan peran tenaga kependidikan swasta.
4.	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai sasaran dan prioritas pembangunan daerah bidang kesehatan	Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.7/23/2025 tentang Penetapan Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2025.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan dasar bidang kesehatan.
5.	Perlindungan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.7.1/408/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kudus Tahun 2025.	Menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan tanpa hambatan finansial.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
6.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2025	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyesuaian Detail Rincian Obyek Retribusi Daerah dan Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah
7.	Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung	Undang-undang (UU) tentang bangunan gedung terbaru adalah UU Nomor 28 Tahun 2002. Peraturan pelaksanaan UU ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021	- Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. - Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. - Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. - Memastikan bahwa bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik, aman, nyaman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku
8.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kec. Jekulo	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus 2022 - 2042	
9.	- Penegakan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. - Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.	- Permendagri 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat - Permendagri No. 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal	Melaksanakan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat di wilayah Kabupaten Kudus

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
10.	- Pelaksanaan Penanganan Dan Penyelamatan Kebakaran - Standarisasi Penanganan dan Penyelamatan Kebakaran di Kab/Kota.	Permendagri 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di wilayah Kabupaten Kudus
11.	Meningkatnya PPKS yang berdaya	- Peraturan Bupati Kabupaten Kudus No. 17 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau Tahun 2025; - Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Rentan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; - Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2025 Nomor : 400.9/2184/2025	Peningkatan Penanganan PPKS Verifikasi dan Validasi Data P3KE
12.	Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan	Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender (September 2025)	Adanya Shelter Perlindungan Perempuan dan Kebijakan PUG
13.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Kudus Tahun 2025-2045	Peningkatan pengendalian kuantitas penduduk dan pemahaman kesehatan reproduksi
14.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2025 Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lcmbaran Negara	- Meningkatkan produktivitas usaha mikro dan koperasi demi terciptanya perekonomian yang berdaya saing dan berdaya sanding, - Meningkatkan peran serta usaha mikro dan koperasi sebagai pelaku ekonomi tangguh,

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);	profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan di Daerah - Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif - Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan usaha mikro dan koperasi.
15.	Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2025-2029	Keputusan Bupati Kudus Nomor 500.15.14.1/271.1/2025 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Kudus Masa Jabatan 2025-2029	- Menyediakan wadah koordinasi dan perumusan rekomendasi pengupahan di Kabupaten Kudus. - Menjaga stabilitas hubungan industrial antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah. - Mendorong terciptanya kebijakan pengupahan yang adil, layak, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
16.	Penetapan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Kabupaten Kudus Tahun 2025	Keputusan Bupati Kudus Nomor 500.3/180/2025 tentang Penetapan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih Kabupaten Kudus Tahun 2025	- Mempercepat proses pembentukan dan penguatan kelembagaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Kudus. - Meningkatkan efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program. - Menyelesaikan kendala teknis dan administratif dalam pembentukan koperasi di tingkat desa/kelurahan.
17.	Imbauan pendaftaran keanggotaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bagi seluruh ASN (PNS dan PPPK), Aparat Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT/RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPMD/ LPMK), Penerima Tunjangan Peningkatan	Surat Edaran Bupati Kudus Nomor 500.3/2061/2025 tentang Imbauan pendaftaran keanggotaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih bagi seluruh ASN	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintahan dalam mendukung pembentukan koperasi desa/kelurahan. - Memperluas basis anggota sebagai penguatan modal sosial dan kelembagaan KDKMP.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS), dan Keluarga Penerima Manfaat/ Bantuan Sosial/Hibah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus		- Mempercepat terbentuknya koperasi yang legal, aktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kudus.
18.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi kependudukan di Kabupaten Kudus.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	- Masa berlaku KTP berlaku seumur hidup; - Pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya (GRATIS).
19.	Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Kudus.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Kudus.	- Peningkatan data kependudukan secara cepat, mudah, gratis, dan terukur sesuai ketentuan perundang-undangan; - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Kudus
20.	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD)	Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2023 tentang Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD)	Tujuan : Untuk mendorong terwujudnya peningkatan dan kinerja Aparat Pemerintahan Desa (APD) serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan demokratis.
21.	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus.	Sebagai pedoman untuk mewujudkan tertib administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang cepat, efektif dan efisien serta memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.
22.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/178/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran	- Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran	Peningkatan Pengembangan Kesenian dengan meningkatkan sarana dan prasarana organisasi kesenian di Kabupaten Kudus

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Hibah Uang untuk Peningkatan Pengembangan Kesenian yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025. - Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	
23.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.6/316/2025 Tanggal 18 November 2025 Tentang Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029	- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan - Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.	Menjadi dokumen induk yang menentukan arah kebijakan kebudayaan di Kabupaten Kudus
24.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 400.6.2/378/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Penetapan Perbukitan Slumprit Desa Terban sebagai Situs Cagar Budaya.	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya - Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.	Sebagai salah satu upaya pelestarian cagar budaya, khususnya situs prasejarah yang ada di Kabupaten Kudus dan Melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang sesuai dengan undang-undang dan perda yaitu menetapkan status dan peringkat cagar budaya

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
25.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 900.1/295/2025 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Uang untuk Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus	- Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 13).	Untuk memberdayakan individu agar dapat mengembangkan usaha kreatifnya secara mandiri dan berkelanjutan. Bantuan ini digunakan untuk mendukung pengadaan modal usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan adanya bantuan ini, pelaku usaha kreatif diharapkan lebih mandiri, inovatif, dan mampu bersaing sambil berkontribusi pada perekonomian nasional.
26.	➤ Peningkatan jumlah koleksi ➤ Peningkatan sarana prasarana perpustakaan ➤ Penguatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	- Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. - Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten / Kota.	- Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat - Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. - Meningkatnya pengunjung perpustakaan per tahun - Meningkatnya koleksi bahan pustaka - Meningkatkan kualitas dan kuantitas berbagai jenis perpustakaan
27.	Mengoptimalkan pengelolaan arsip secara baku	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	- Sebagai pedoman bagi pencipta arsip dalam melaksanakan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, serta alih media Arsip.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus - Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2022 tentang tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.	- Memberikan petunjuk /pedoman bagi Perangkat Daerah/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus - Sebagai pedoman bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip - Sebagai pedoman penyusutan arsip (meliputi pemindahan arsip dinamis in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis dari Perangkat Daerah ke Dinas Kearsipan selaku LKD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
28.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus	Perpres 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional	- Penyesuaian nomenklatur, tugas fungsi dan susunan organisasi bidang BRIDA di gabungkan di BAPPEDA - Perubahan nomenklatur BAPPEDA menjadi BAPPERIDA sesuai Perpres No. 78 Tahun 2021
29.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Perpres 55 Tahun 2024 Tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	- Tindak lanjut surat rekomendasi Gubernur Jateng tgl. Des 2024 No. 000.8/644 hal persetujuan atas pembentukan UPTD Kabupaten Kudus. - Pembentukan UPTD PPA sesuai amanat Perpres 55 Th. 2024 dan pembentukan UPTD lainnya (UPTD Pengelolaan Limbah Domestik, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, UPTD Metrologi Legal) dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan, kebutuhan organisasi dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
30.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 77 Tahun 2025 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Permendagri Nomor 10 tahun 2024 Tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	- Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. - Meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu adanya pengaturan mengenai pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
31.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 000.8.3/189/2025 Tentang Perubahan Keenam Lampiran I dan II Keputusan Bupati Kudus Nomor 065.2/205/2016 Tentang Nomenklatur, Singkatan, Akronim, Bentuk dan Kode Pengaman Stempel, Jabatan Serta Stempel Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus	- Sebagai tindak lanjut dari Perbup Kudus Nomor 32 Tahun 2025 bahwa dengan perubahan nomenklatur BAPPEDA menjadi BAPPERIDA maka perlu disesuaikan nomenklatur, singkatan, akronim, bentuk dan kode pengaman stempel serta stempel PD. - Stempel sebagai legalisasi atas produk administrasi PD.
32.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 000.8.6.3/288/2025 Tentang Penetapan Indikator Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah	- Sesuai dengan pasal 4 ayat 3 bahwa Bupati wajib menetapkan IKU untuk Pemkab dan SKPD serta unit kerja di bawahnya. - Sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah.
33.	Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana	- Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu lima tahun mendatang yaitu tahun 2025-2029

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	- Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama lima tahun. - Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. - Membangun sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat. - Menjabarkan penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, berkeadilan dan berkesinambungan.
34.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	- Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah. - Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat; - Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan; - Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
35.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan	- Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2026 dengan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya; - Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang tertuang rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) Tahun 2026; - Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
36.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	- Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan pedoman penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah; - Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta program RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2025-2029, yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2025; - Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			anggaran; dan Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 serta penyesuaian pendapatan terutama dana perimbangan dan belanja daerah.
37.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2026	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	- Mengesahkan dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah. - Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat; - Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan; - mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
38.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 000.7/163/2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2025	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah	- Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	- Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah serta program RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029, yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2025; - Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran; - Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 serta penyesuaian pendapatan terutama dana perimbangan dan belanja daerah.
39.	Surat Edaran Bupati Kudus Tanggal 9 Desember 2025 Nomor 800.1.2/3747/2025 perihal Penyelesaian Pegawai Non-ASN di Lingkungan Kabupaten Kudus	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasal 65 dan Surat Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 25 November 2025 Nomor B/5645/SM.01.00/0417	Penataan non ASN bertujuan untuk memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan efisiensi pelayanan publik

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Sedangkan pelaksanaan dan tindaklanjut atas rekomendasi DPRD Kabupaten Kudus sesuai dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 100.1.7/02/2025 Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024 tanggal 14 Mei 2025, adalah sebagai berikut :

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Urusan Pendidikan		
1.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar melibatkan peran aktif dari anggota DPRD Kabupaten Kudus (Khususnya Komisi D) yang membidangi dalam setiap kegiatan baik sosialisasi, penyusunan kebijakan, pengawasan serta hubungan masyarakat yang berkaitan dengan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus menyambut baik serta mengapresiasi masukan tersebut. Keterlibatan aktif Anggota DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Komisi D, merupakan bentuk sinergi yang penting dalam mendukung penyelenggaraan urusan Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Ke depan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga akan mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Kudus dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi, penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, hingga hubungan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas program dan kegiatan, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan mutu layanan Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga di Kabupaten Kudus.	Keterlibatan aktif Anggota DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Komisi D, dalam setiap kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi antar-lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pengawasan, serta hubungan masyarakat di bidang Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Hal ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan koordinasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program, serta memastikan kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kualitas perumusan kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, dan kepercayaan publik terhadap layanan Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga di Kabupaten Kudus dapat terus ditingkatkan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2.	Pemberi hibah dan penerima hibah dalam melaksanakan kegiatannya harus mendasarkan/ memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sudah dibuat.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus sependapat dan menegaskan bahwa pemberi hibah dan penerima hibah dalam melaksanakan kegiatan wajib mendasarkan dan mematuhi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah disepakati. NPHD menjadi acuan utama dalam pelaksanaan, penyaluran, pemanfaatan, serta pertanggungjawaban hibah guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap NPHD akan terus diperkuat melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.	Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus berpedoman pada Surat Keputusan Tim Teknis Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2026. Pembentukan tim teknis ini bertujuan untuk menjamin proses verifikasi, penyaluran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Keberadaan tim teknis tersebut sekaligus menjadi solusi atas potensi ketidaktepatan sasaran, lemahnya pengawasan, serta risiko penyimpangan dan permasalahan administrasi, sehingga pelaksanaan hibah dan bantuan sosial dapat sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.
3.	Untuk Menunjang operasional dan sarana prasarana Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga agar dapat mengajukan Mobil Operasional dalam perubahan APBD 2025.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus memahami dan mencermati usulan pengadaan mobil operasional dimaksud. Namun demikian, dengan memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2025, pengajuan pengadaan mobil operasional pada perubahan APBD akan dikaji secara selektif dan proporsional berdasarkan tingkat urgensi, ketersediaan sarana yang ada, serta kemampuan keuangan daerah. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	Usulan pengadaan mobil operasional pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk menunjang kelancaran operasional dan pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga berdasarkan kebutuhan riil dan tingkat urgensi. Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk mengatasi keterbatasan sarana transportasi dinas dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran melalui optimalisasi pemanfaatan aset yang telah tersedia serta penyesuaian dengan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		akan mengutamakan optimalisasi dan pemanfaatan aset kendaraan yang telah tersedia, serta menyesuaikan kebijakan penganggaran dengan prioritas program dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, dukungan sarana prasarana dapat terpenuhi tanpa mengabaikan prioritas program dan kebijakan pengendalian belanja daerah.
4.	Input data terhadap validasi data HKGS agar lebih dicermati dengan seksama supaya penyaluran bisa tepat sasaran.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus telah melaksanakan input dan validasi data TKGS secara cermat dan berlapis dengan melakukan pengecekan kesesuaian data penerima berdasarkan persyaratan yang ditetapkan. Proses validasi dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran, meminimalkan kesalahan data, serta mencegah terjadinya duplikasi penerima. Dengan demikian, penyaluran TKGS dapat dilaksanakan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.	Pencermatan input dan validasi data TKGS dilaksanakan untuk meningkatkan akurasi data penerima sebagai dasar penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Langkah ini bertujuan meminimalkan kesalahan input, mencegah duplikasi penerima, serta memastikan hanya pihak yang memenuhi persyaratan yang menerima bantuan. Dengan validasi data yang dilakukan secara cermat dan berkelanjutan, penyaluran TKGS diharapkan berjalan lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5.	Menyediakan database yang akurat berkaitan pembangunan fisik sekolah dalam skala prioritas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, dengan harapan bangunan sekolah yang sudah dalam kondisi tidak layak dapat segera diperbaiki.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus telah melakukan pengumpulan, pemutakhiran, dan penyusunan database kondisi fisik sekolah secara bertahap berdasarkan hasil pendataan lapangan dan verifikasi teknis. Database tersebut disusun dengan pengelompokan skala prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sebagai dasar perencanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan. Dengan tersedianya	Penyediaan database kondisi fisik sekolah yang akurat dan terbaru bertujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan secara terarah dan berbasis prioritas jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Database ini menjadi solusi atas keterbatasan data yang selama ini menghambat penetapan skala prioritas, sehingga bangunan sekolah yang berada dalam kondisi tidak layak dapat segera ditangani secara tepat sasaran, efektif, dan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		database yang lebih akurat, penanganan bangunan sekolah yang tidak layak dapat direncanakan dan dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
	Urusan Kesehatan		
	<i>Dinas Kesehatan</i>		
1.	Perlu adanya peningkatan dan perbaikan aspek perencanaan, kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal.	Kami menyambut baik rekomendasi dari DPRD Kabupaten kudus terkait peningkatan dan perbaikan dalam aspek perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal dalam mendukung upaya tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan akuntabel.	- Perencanaan Kinerja: Melakukan peninjauan kembali dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), serta target yang ditetapkan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis perencanaan kinerja juga akan kami - Pelaporan Kinerja: Memperkuat sistem pelaporan kinerja dengan memperjelas alur pelaporan, memperbaiki kualitas data yang dilaporkan, dan melaksanakan monitoring secara periodik terkait konsistensi antara realisasi kinerja dan rencana yang telah disusun. - Evaluasi Internal: Melaksanakan Evaluasi internal yang lebih sistematis dan objektif, mekanisme monitoring yang lebih rutin dan komprehensif, serta penyusunan laporan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2.	Dinas Kesehatan agar melibatkan peran aktif dari anggota DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Komisi D yang memUrusani dalam setiap kegiatan baik sosialisasi, penyusunan kebijakan, pengawasan serta hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.	Dinas Kesehatan Kabupaten menyambut baik rekomendasi DPRD Kabupaten Komisi D untuk melibatkan peran aktif anggota DPRD dalam setiap kegiatan sosialisasi penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kolaborasi dengan Komisi D dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kudus.	- Koordinasi dan komunikasi : Menjalin komunikasi secara intensif dengan Komisi D DPRD Kabupaten Kudus untuk memastikan sinergi dalam perencanaan program dan penyusunan kebijakan bidang kesehatan. - Pelibatan dalam Sosialisasi dan Advokasi: Mengundang anggota Komisi D dalam setiap kegiatan sosialisasi program kesehatan untuk memperkuat penyebaran informasi kepada masyarakat.
3.	Perlunya efektifitas dalam penggunaan fasilitas kesehatan terutama Puskesmas Pembantu agar dapat difungsikan secara optimal.	Kami berupaya meningkatkan sarana prasarana di Puskesmas Pembantu melalui rehab fisik maupun pemenuhan sarana pendukung dalam rangka mendekatkan akses layanan kesehatan di masyarakat	Pemenuhan layanan kesehatan sesuai siklus hidup di tingkat desa Meningkatkan kualitas serta kemudahan akses Bagi masyarakat Diperolehnya gambaran terkait permasalahan kesehatan di suatu wilayah.
4.	Dalam rangka rekrutmen pegawai, perlu diperhatikan kompetensi dan sesuai dengan keilmuan dari SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi.	a. Dalam pemenuhan kebutuhan pegawai, dari Dinas Kesehatan sudah sesuai dengan kebutuhan. b. - Membuat usulan tenaga kesehatan dan tenaga medis prioritas - Syarat kualifikasi pendidikan pemantapan harus sesuai aturan yang berlaku (Contoh : kebutuhan tenaga Promosi Kesehatan : syarat pendidikan lulusan S1 Kesehatan Masyarakat dengan peminatan Ilmu Perilaku dan Promosi Kesehatan).	Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan BKPSDM Kab. Kudus terkait kebutuhan tenaga atau pegawai tersebut. Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan mendapat SDM (Tenaga Kesehatan & Tenaga Medis) sesuai prioritas dan sesuai kualifikasi pendidikan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5.	Perlunya Sertifikasi Layak Fungsi (SLF) dalam pembangunan dan pemberdayaan UPTD Puskesmas.	Kami sdh menginventarisir serta membuat rencana penganggaran pembuatan dokumen sertifikat laik fungsi bagi gedung layanan Puskesmas	Dipenuhinya aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan akses dari sebuah bangunan gedung
6.	Dalam rangka penataan kebijakan BPJS perlu adanya Perda sebagai payung hukum yang berkaitan dengan kewenangan penentuan kepesertaan serta pengaturan rujukan kepada fasilitas kesehatan lanjutan.	Terkait regulasi dalam rangka kewenangan penentuan kepesertaan BPJS diatur di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kudus No. 54 tahun 2019 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus. Untuk pengaturan rujukan tertuang dalam kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan dengan mengedepankan kemudahan akses layanan	Sebagai dasar dalam proses pengusulan kepesertaan khususnya segmen PBPUPemda. Masyarakat mendapatkan layanan kesehatan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat lanjut dalam rangka mengatasi permasalahan kesehatan.
7.	Pentingnya peran aktif Satgas BPJS Kesehatan yang ditugaskan di UPTD Puskesmas untuk menunjang efektifitas pelayanan kesehatan.	Sependapat, terhadap peran aktif dari BPJS Kesehatan pada masing-masing UPTD Puskesmas untuk menunjang efektifitas pelayanan kesehatan	Akan dilaksanakan penguatan satgas dan jaringan puskesmas yang sudah ada.
8.	Perlu adanya <i>grand design</i> dalam pembangunan sarpras kesehatan di Kabupaten Kudus dan perlu SDM di Dinas yang menangani hal tersebut.	Sependapat dengan rekomendasi untuk grand desain pembangunan sarana prasarana dengan SDM terkait	- Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan BKPSDM Kabupaten Kudus, Bapelkes Provinsi Jawa Tengah dan Kemenkes terkait SDM dalam pembangunan sarana prasarana kesehatan. - Pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui UKOM dengan CAT.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
9.	Untuk seluruh pegawai/karyawan di instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.	Sependapat, terkait kepesertaan BPJS wajib diikuti oleh pegawai/karyawan sebagai perlindungan dan kesejahteraan pegawai.	Setiap pegawai/karyawan di Dinas Kesehatan agar mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua.
	<i>RSUD dr. Loekmonohadi</i>		
1.	RSUD dr. Loekmonohadi harus mampu menjadi Rumah Sakit percontohan serta pilot institution bagi Rumah Sakit lain.	- Tahun 2025 : Konsolidasi Internal dan Standardisasi - Tahun 2026 : Implementasi Model Pilot dan Replikasi - Tahun 2027 : Ekspansi & Pembinaan Eksternal	Tujuan Masalah yang diselesaikan: Dengan modal tata kelola yang kuat, kesiapan infrastruktur, dan komitmen pimpinan, RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus siap menjadi Rumah Sakit percontohan nasional yang mampu meningkatkan standar pelayanan kesehatan di daerah. Hasil Tindak Lanjut : Telah disusun Masterplan pengembangan Tahun 2025 Pemaparan Masterplan ke stakeholder
2.	RSUD dr. Loekmono Hadi agar melibatkan peran aktif dari anggota DPRD Kabupaten Kudus, Khususnya komisi D yang membidangi dalam setiap kegiatan baik sosialisasi, penyusunan kebijakan, pengawasan serta hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, RSUD dr. Loekmono Hadi agar melibatkan peran aktif dari anggota DPRD Kabupaten Kudus, Khususnya komisi D yang membidangi dalam setiap kegiatan baik sosialisasi, penyusunan kebijakan, pengawasan serta hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat	Forum Konsultasi Publik & Penjaringan Aspirasi Kesehatan Masyarakat	Tujuan Masalah yang diselesaikan: Dokumen masukan kebijakan RSUD Hasil Tindak Lanjut : Sudah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik tanggal 8 Desember 2025 tentang Kemoterapi & Lalabora

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Workshop Penyusunan Kebijakan Layanan RSUD (Perda, SOP, Program Inovasi)	Tujuan Masalah yang diselesaikan: Draft kebijakan berbasis aspirasi. Hasil Tindak Lanjut : Telah dilakukan Pendampingan penyusunan rancangan Draf Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi dan rancangan Draf Peraturan Bupati tentang Barang dan Jasa RSUD dr. Loekmono Hadi
		Monitoring & Evaluasi Layanan Prioritas (IGD, Rawat Inap, BPJS, Gizi Buruk, dll)	Tujuan Masalah yang diselesaikan: Laporan Monitoring dan Evaluasi Komisi D-RSUD. Hasil dijadikan dasar perbaikan layanan Hasil Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi rutin per tiga bulan
		Sosialisasi Layanan Unggulan RSUD dan Program Promotif-Preventif	Tujuan Masalah yang diselesaikan: Peningkatan literasi kesehatan masyarakat Hasil Tindak Lanjut : Sudah dilaksanakan promosi pelayanan melalui media digital online dan Televisi
		Program “Komisi D Mendengar” di RSUD	Tujuan Masalah yang diselesaikan: - Aspirasi masyarakat langsung terjaring - Bentuk transparansi layanan publik Hasil Tindak Lanjut : Telah direncanakan dialog dengan komisi D di Tahun 2026

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3.	Target layanan kesehatan pada Ruang Dahlia agar dapat difungsikan secara optimal guna menunjang pelayanan.	Ruang Dahlia bisa difungsikan secara optimal guna menunjang pelayanan Kesehatan kepada pasien	Tujuan Masalah yang diselesaikan: Adanya peningkatan pelayanan Rawat Inap Hasil Tindak Lanjut : Telah dibukanya pelayanan Rawat Inap di Ruang Dahlia 2
4.	Perlunya kajian terhadap efektifitas poli sore sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien.	Melakukan kajian terhadap efektifitas poli sore	Tujuan Masalah yang diselesaikan: Tercapainya peningkatan pelayanan Rawat Jalan secara efektif dan efisien. Hasil Tindak Lanjut : Sudah dilakukan Monev setiap hari
5.	Untuk layanan unggulan KJSO-KIA yang belum di approve BPJS agar segera dilakukan supaya masyarakat dapat terlayani untuk KJSO-KIA	Mengajukan approve ke BPJS	Tujuan Masalah yang diselesaikan: Pelayanan unggulan KJSO-KIA bisa di approve BPJS Hasil Tindak Lanjut : Layanan Kemothorapi sudah di approve BPJS Bulan November 2025 dan DSA Bulan Oktober 2025, sehingga layanan unggulan KJSU-KIA bisa dilayani untuk masyarakat Kudus dan sekitarnya
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.	Program perencanaan fisik di Dinas PUPR Kabupaten Kudus yang tidak maksimal di TA 2024 berdampak terhadap pekerjaan fisik yang kurang maksimal, serta tata pengelolaan pengawasan pekerjaan fisik kurang baik.	- Perencanaan kegiatan di DPUPR Kabupaten Kudus telah dilaksanakan dengan matang, tepat waktu dan memprioritaskan Insfrastrutur yang membutuhkan penanganan	Penyelesaian pekerjaan tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi
2.	Seringnya pekerjaan fisik yang selalu dilaksanakan di akhir tahun menjadikan	- Perencanaan kegiatan berada ditahun yang sama dengan kegiatan fisik, akan di	Percepatan pelaksanaan kegiatan fisik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	kualitas hasil pekerjaan kurang optimal (asal-asalan), sehingga tidak sesuai harapan.	tindak lanjuti dengan perencanaan ditahun sebelumnya - Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi di DPUPR harus melalui beberapa tahapan yaitu : melalui tahap perencanaan, persiapan pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan dan serah terima pekerjaan	
3.	Untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya diharapkan adanya jalinan komunikasi yang baik antara OPD terkait dengan DPRD, sehingga dapat tercapai tujuan secara maksimal.	Akan kami tindaklanjuti dengan menjalin komunikasi yang baik antara OPD dengan DPRD	Komunikasi yang baik antara OPD dengan DPRD
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.	Banyak tiang-tiang listrik permukiman yang besinya mengalami korosi, sehingga perlu adanya pembaharuan tiang listrik dan penambahan jaringan listrik yang dapat tersambung ke permukiman warga desa yang masih minim jaringan listrik.	Dinas PKPLH akan melaksanakan pengecekan dan pendataan tiang listrik di lingkungan perumahan yang kondisinya keropos	Perbaikan dan penggantian tiang listrik yang keropos oleh pihak PLN
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
	BPBD		
1.	BPBD agar melibatkan peran aktif anggota DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Komisi D yang membidangi dalam setiap kegiatan baik sosialisasi, penyusunan kebijakan, pengawasan serta hubungan masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah.	- BPBD Kabupaten Kudus dalam melaksanakan program penaggulangan bencana berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus.	BPBD Kabupaten Kudus berupaya berkoordinasi dengan anggota DPRD Kabupaten Kudus sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyusunan kebijakan, pengawasan serta hubungan masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam upaya pencapaian target SPM Bidang Kebencanaan.	
2.	Kalak BPBD mohon dievaluasi kinerjanya.	Penilaian Kinerja Kalak BPBD dilaksanakan setiap 3 bulan sekali pada Aplikasi MyASN.	Lebih selektif dalam melakukan Penilaian Kinerja ASN baik Kalak BPBD maupun staf dengan berpedoman pada capaian kinerja OPD yang telah direncanakan setiap tahunnya.
3.	Penggunaan dana TT yang mendasarkan pada Perda maupun Perbup mengenai kebencanaan agar lebih dioptimalkan.	Penggunaan Dana TT berdasarkan pada situasi darurat bencana.	Dalam pengajuan Dana TT BPBD Kabupaten Kudus berpedoman pada Perda maupun Perbup mengenai kebencanaan sehingga penggunaan Dana TT lebih optimal
	Satpol PP		
1.	Dengan banyaknya penegakan Perda yang dilakukan saat ini sebaiknya di tambah anggaran untuk penegakan Perda supaya bisa dilaksanakan lebih maksimal	Dengan penambahan anggaran, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan meliputi: - Peningkatan intensitas operasi penegakan Perda, baik rutin maupun insidentil, di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. - Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi Perda kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagai upaya pencegahan. - Penguatan penanganan pelanggaran secara tuntas, termasuk pendampingan proses hukum oleh PPNS. - Pemenuhan kebutuhan operasional penegakan Perda, meliputi dukungan personel, transportasi, dan perlengkapan lapangan.	Manfaat yang diharapkan dari penambahan anggaran ini antara lain: - Penegakan Perda berjalan lebih optimal, terukur, dan berkelanjutan. - Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada. - Berkurangnya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. - Terwujudnya stabilitas sosial yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan Perda sebagai dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan ke depan.	
2.	Pada tahun 2024 kabupaten Kudus mengalami berbagai kasus yang berkaitan dengan ketertiban umum, termasuk penertiban reklame liar, operasi tempat karaoke di akhir tahun dan razia tempat kos terutama dalam menjaga keamanan menjelang Pilkada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk tahun 2025 perlu ditambah anggaran penegakan perda, khususnya pada kegiatan penertiban reklame, operasi tempat karaoke dan razia tempat kos.	- Peningkatan intensitas operasi penertiban reklame tidak berizin secara terpadu dan berkesinambungan. - Peningkatan frekuensi operasi dan pengawasan terhadap usaha hiburan/karaoke sesuai ketentuan Perda. - Pelaksanaan razia dan pembinaan terhadap pengelola serta penghuni tempat kos. - Penguatan koordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, dan perangkat daerah terkait. - Peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta pelaku usaha.	- Tertibnya penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan Perda. - Meningkatnya kepatuhan usaha hiburan/karaoke terhadap ketentuan perizinan dan operasional. - Terciptanya lingkungan tempat kos yang tertib administrasi dan kondusif. - Terjaganya stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum menjelang dan selama Pilkada Tahun 2025.
3.	Berkaitan banyaknya tempat kos di Kabupaten Kudus dan untuk mencegah tindakan asusila dan kriminalitas maka diperlukan pengaturan tempat kos dalam bentuk Perda, yang pengaturannya meliputi perijinan, jam kunjungan tamu, serta pembatasan-pembatasan kegiatan, sehingga tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.	- Telah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pasal 18 yang membahas perijinan, jam kunjungan tamu, serta pembatasan-pembatasan kegiatan pada tempat kost, sewa/ kontrakan. - Sinkronisasi dengan Perda Ketertiban Umum dan regulasi perizinan. - Sosialisasi kepada pemilik kost, sewa/ kontrakan dan penghuni kost serta masyarakat.	- Tertibnya pengelolaan tempat kos. - Berkurangnya gangguan ketertiban dan pelanggaran norma. - Lingkungan masyarakat yang lebih aman dan kondusif. - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran pemerintah daerah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Penguatan pengawasan dan penegakan oleh Satpol PP Kabupaten Kudus bersama kepada Desa/Lurah	
	Badan Kesbangpol		
1.	Pada tahun 2024, terdapat penambahan 32 ormas baru, sehingga totalnya menjadi 120, dan di awal tahun 2025 ada tambahan tiga ormas baru, sehingga jumlah sampai dengan saat ini menjadi 123 ormas yang dinyatakan aktif. Untuk kegiatan ormas belum tersedia alokasi bantuan dana khusus bagi ormas secara umum, sehingga perlu adanya dukungan anggaran untuk ormas yang dinilai aktif dan berkontribusi dalam kegiatan sosial dengan melalui fasilitasi dan kolaborasi antara ormas dan Kesbangpol, disamping itu juga perlu verifikasi dan pembinaan kepada ormas yang belum terdaftar, sehingga tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum	Menindaklanjuti peningkatan jumlah organisasi kemasyarakatan, dilakukan pendataan dan verifikasi ormas aktif sebagai dasar pemberian hibah, pembinaan terhadap ormas yang belum terdaftar, serta penguatan fasilitasi dan kolaborasi antara Kesbangpol dan ormas penerima hibah guna mendukung kegiatan sosial dan menjaga ketenteraman serta ketertiban umum	Pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan sosial ormas yang aktif, mengatasi keterbatasan pendanaan, meningkatkan peran ormas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta mendorong tertib administrasi dan pembinaan ormas agar tidak menimbulkan potensi gangguan sosial
2.	Anggota DPRD agar lebih dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi sebagai narasumber pada kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meningkatkan koordinasi dan pelibatan DPRD dalam kegiatan sosialisasi pada Tahun Anggaran 2025	Pelibatan Anggota DPRD sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertujuan memperkuat sinergi kelembagaan, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan daerah, serta mendukung efektivitas penyampaian materi kebangsaan dan stabilitas politik

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Bidang Sosial		
1.	Dinsos P3AP2KB agar melibatkan peran aktif dari anggota DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Komisi D yang membidangi dalam setiap kegiatan baik sosialisasi, penyusunan kebijakan, pengawasan serta hubungan masyarakat yang berkaitan dengan urusan Sosial, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, serta Keluarga Berencana	- Akan melibatkan Komisi D pada setiap kegiatan urusan pemberdayaan seperti : Penyaluran BLT (setiap penyaluran sejak Tahap I tahun 2025 sudah bersurat ke DPRD dan OPD terkait seperti Disnaker Inkop UMKM dan Sekretariat) - Koordinasi intensif antar Komisi D dan OPD terkait dalam setiap kegiatan urusan pemberdayaan kelembagaan sosial dan keluarga miskin (Pekerja Rentan) - Untuk Pokir peningkatan Kapasitas PSKS (SDM PKH dan Sosialisasi Bansos kepada KPM) lebih melibatkan koordinasi dengan OPD Kecamatan, Dinas PMD dan Komisi D	Kegiatan Bantuan kepada masyarakat Tepat Sasaran
2.	Perlunya monitoring terhadap data base penerima bantuan oleh admin desa.	Pada saat ini, penerima bansos masuk dalam Data Base DTSEN. Untuk monitoring masih menunggu mekanisme teknis DTSEN, tetapi monitoring oleh bidang Pemberdayaan secara berkala selalu koordinasi dengan Dinas PMD dan Pemangku wilayah terkait, TKSK dan Pendamping PKH.	Kegiatan Bantuan kepada masyarakat Tepat Sasaran (melalui crosscutting antar OPD)
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
	Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
1.	Program pelatihan keterampilan agar tidak berhenti sampai kegiatan pelatihan di BLK	Telah dilaksanakan monitoring kebekerjaan dan secara berkala telah dilaporkan kepada Bappeda Kabupaten Kudus	Monitoring kebekerjaan dilakukan untuk: - Mengetahui sejauh mana alumni berhasil mendapatkan pekerjaan atau wirausaha.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	selesai, harus monitoring dari dinas terkait kelanjutan dari alumni BLK.		- Memperoleh data dan informasi terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi alumni saat memasuki dunia kerja serta merumuskan tindak lanjut yang tepat.
2.	Perlu diandakan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan di BLK manakala dari hasil monitoring ditemukan adanya banyak alumni yang tidak berhasil dalam mengembangkan hasil pelatihan.	Monitoring Alumni telah dilaksanakan dan dilaporkan secara berkala kepada Bappeda Kabupaten Kudus	Monitoring kebekerjaan dilakukan untuk: - Mengetahui sejauh mana alumni berhasil mendapatkan pekerjaan atau wirausaha - Memperoleh data dan informasi terkait tantangan dan hambatan yang dihadapi alumni saat memasuki dunia kerja serta merumuskan tindak lanjut yang tepat.
3.	Usaha-usaha yang sudah berjalan dengan skala kecil agar dicatat sehingga dapat diketahui mana yang berkembang dan tidak, untuk diberi tambahan pelatihan atau permodalan.	Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap UMKM binaan yang telah berjalan, termasuk perkembangan usahanya. Hasil pendataan digunakan sebagai dasar penentuan intervensi lanjutan berupa pelatihan tambahan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.	Meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM binaan melalui intervensi yang lebih tepat sasaran sesuai kewenangan OPD. Hasil tindak lanjut berupa tersedianya data UMKM binaan yang terpetakan, meningkatnya kapasitas pelaku usaha, serta terarahnya fasilitasi pelatihan dan permodalan.
4.	Di era globalisasi peserta pelatihan agar dibekali dengan digital marketing;	Pelatihan Digital Marketing akan dilaksanakan di tahun 2026	Tujuan : - Memungkinkan UMKM menjangkau konsumen secara lebih luas, tidak terbatas jarak dan waktu. - Efisiensi biaya dan waktu. - Membangun kredibilitas UMKM. Perbaikan strategi melalui analisis data yang lebih baik
5.	Penertiban Lapak PKL di lingkungan SIHT yang nenempati di sempadan jalan agar	Dinas Nakerperinkop UKM telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan Satpol PP untuk menindaklanjuti penertiban	Menjaga ketertiban dan fungsi sempadan jalan. Koordinasi lintas OPD telah dilaksanakan, namun kepatuhan PKL masih

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	diadakan relokasi di lingkungan SIHT dan tidak menempati lagi di sempadan jalan.	lapak PKL. Namun demikian, sampai dengan saat ini masih terdapat PKL yang belum sepenuhnya mematuhi larangan penggunaan sempadan jalan.	belum optimal sehingga diperlukan tindak lanjut secara bertahap.
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.	Guna percepatan pembangunan Kantor UPTD PPA, agar DED dapat segera diajukan pada perubahan APBD 2025;	Pembangunan UPTD PPPA dan Rumah Aman sudah teranggarkan di RKPD Perubahan 2025, yang saat ini (3 Juni 2025) sudah ditahap Rancangan Perubahan KUA PPAS	Mandatory Kementerian PPPA
2.	Pentingnya realisasi terhadap pengembangan Sekolah rakyat untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem;	Sekolah Rakyat adalah inisiatif negara untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan Pendidikan berkualitas. Dengan konsep sekolah berasrama, mereka tidak hanya belajar akademik, tetapi juga dibentuk menjadi pemimpin Tangguh dengan karakter kuat dan keterampilan masa depan.	Negara hadir dan memfasilitasi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem bisa mengenyam pendidikan, menuju Indonesia Emas tahun 2025
		Rencana Lahan Sekolah Rakyat dialokasikan di sebagian tanah HP 52 dan HP 54 seluas 5.000 m2 (luas yang dipersyaratkan untuk Sekolah Rakyat adalah 5 s/d 10 ha, namun Pemkab Kudus tidak memiliki tanah dengan luasan tersebut) Lokasi Sekolah Rakyat terletak di Kelurahan Purwosari /Belakang PKB	
		Desk Dokumen untuk Kabupaten Kudus dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan dengan catatan sebagai berikut : - Lahan yang tersedia tidak memenuhi kriteria minimal, namun dari Kabupaten Kudus dalam sesi klarifikasi menyampaikan, jika memang tidak bisa 3 (tiga) jenjang, maka dipilih hanya 1 (satu) jenjang saja, yaitu jenjang SMP. - Akan dicarikan lahan lain yang bisa memenuhi syarat minimal untuk pembangunan Sekolah Rakyat. - Kekurangan guru, akan melakukan rekrutmen dari guru PPG. - Dalam sertifikat nama pemegang hak tidak sesuai dengan database Kementerian ATR BPN, selanjutnya Pemerintah Daerah akan mengajukan SKPT di kantor Pertanahan Kudus.	
3.	Perlu adanya pemberian hibah kepada JPPA (Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak) dan KDS (Kelompok Dukungan Sebaya) Guna menunjang tugas dan kewajiban serta kinerja dari JPPA dan KDS;	Pemberian hibah kepada Lembaga kemasyarakatan berdasarkan Perbup 14 tahun 2021 tentang Hibah Bansos. Hibah tidak boleh diberikan secara berturut2 kecuali Lembaga yang bersangkutan terbentuk berdasarkan Keppres Pada tahun 2024 sudah teralokasi Hibah kepada Lembaga JPPA sebesar Rp.70.000.000,- berikutnya tahun 2026 silahkan mengajukan proposal.	Untuk menunjang tugas dan kewajiban serta kinerja dari JPPA dan KDS

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4.	Agar segera dibangun Rumah Aman bagi korban kekerasan perempuan dan anak.	Pembangunan UPT PPA dan Rumah Aman akan segera dilaksanakan, menunggu DPA Perubahan 2025 disyahkan.	Mandatory Kementerian PPPA, dan Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan
	PANGAN		
1.	Dinas Pertanian dan Pangan agar berperan lebih aktif dalam mengawal anggaran 20% Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan.	Dinas Pertanian dan pangan telah melayang surat kepada Dinas PMD Nomor : 400.10/211/2025 tanggal 12 Maret 2025 terkait Program Pekarangan Pangan Bergizi	Adanya koordinasi dan kolaborasi pendampingan pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan
2.	Dinas Pertanian dan Pangan agar berkoordinasi dengan OPD terkait yaitu Dinas PMD dan Para Camat untuk merealisasikan anggaran 20% Dana Desa untuk Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Kudus. Untuk anggaran Dana 20% disosialisasikan kepada GAPOKTAN, POKTAN, RW, dan RT. Alokasi dana tersebut bisa dipergunakan untuk kebutuhan petani seperti pengadaan benih dan pupuk serta kebutuhan prioritas petani.	Melalui tenaga PPL selaku tenaga pendamping teknis pertanian di desa selalu berkoordinasi dengan Pemdes dan Camat terkait pemanfaatan dana desa, dan dari langkah koordinasi telah dilaksanakan beberapa desa dalam memanfaatkan dana desa dapat memberikan kontribusi positif contoh di desa Burikan Kota Kudus yang telah memanfaatkan dana desa untuk pengembangan pekarangan pangan lestari yang dapat memberikan dampak ekonomi dan pemenuhan gizi bagi masyarakat, dan beberapa desa yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan insfrastruktur JUT maupun JITUT	Desa dapat memberikan kontribusi ketahanan pangan melalui dana desa, sehingga dapat membantu pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan
3.	Jasa penyembelihan unggas di Kabupaten Kudus harus berlabel sertifikasi halal, sehingga masyarakat tidak ragu dalam menggunakan jasa tersebut.	Ke depan diharapkan dapat dilakukan secara lebih masif dengan memperbanyak jumlah peserta yang dapat mengikuti sosialisasi tersebut. Dinas Pertanian dan Pangan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan telah melaksanakan pendataan pelaku usaha	Peningkatan kapasitas dan kesadaran para pelaku usaha pemotongan unggas dalam rangka terwujudnya Jaminan Produk Halal

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		pemotongan unggas di pasar wilayah Kabupaten Kudus dan telah dikirimkan kepada Ketua Komisi B DPRD Kab. Kudus melalui surat dengan Nomor 500.7.2/685/2025. Didapatkan data pelaku usaha sebanyak 54 orang dengan jumlah pemotongan 2068 ekor per hari. Dan saat ini sedang dalam proses pendataan TPU yang tersebar di masyarakat melalui Surat Kepala Dinas Pertanian dan Pangan kepada Kepala Desa di Kabupaten Kudus Nomor 500.7.2/680/2025 tentang Permohonan Data Rumah Potong Unggas di Masyarakat. Yang selanjutnya dapat dijadikan data base sasaran kegiatan sosialisasi Penjaminan Produk Halal.	
4.	Selama ini tidak ada yang mengawasi, dikarenakan Dinas Pertanian tidak mempunyai tenaga untuk pengawasan tersebut, maka harus ada tenaga pengawas terhadap jasa penyembelihan unggas tersebut.	Pada PP nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan disebutkan fungsi pengawasan terhadap : - unit pemotongan hewan - Unit Usaha tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan - Unit Usaha yang menghasilkan produk Hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan	Penjaminan produk asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) sehingga menciptakan ketentraman batin pada masyarakat/ konsumen

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dalam satu kegiatan terintegrasi yaitu sertifikasi jaminan produk hewan yang higienis dan halal dengan melalui sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) pada unit pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya PP 95/2012 tersebut disebutkan bahwa Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner. Sehingga kegiatan pengawasan terhadap unit RPU yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Kudus dijalankan dengan secara berkesinambungan melalui kegiatan: - Pembinaan - Sosialisasi - Standarisasi / sertifikasi Monitoring dan surveillance pasca sertifikasi	
5.	Untuk memastikan penyembelihan unggas agar sesuai dengan syariat yang berlaku, perlu koordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama, untuk mengadakan diklat bagi petugas penyembelihan unggas.	- Dalam kegiatan sosialisasi penyembelihan halal, Dinas Pertanian dan Pangan selalu melibatkan stake holder terkait sebagai narasumber yaitu MUI Kudus, LPPOM MUI Jateng, DPW Juleha Jateng dan DPD Juleha Kudus. - Fasilitasi bantuan sertifikasi halal dari CSR BI pada 3 pelaku usaha pemotongan unggas.	Memberikan pemahaman mengenai teknis penyembelihan yang sah secara Islam sehingga menghasilkan produk yang halal

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Lingkungan Hidup		
1.	Permasalahan sampah saat ini menjadi salah satu prioritas, oleh karena itu, setiap desa perlu adanya TPST, selain itu apabila terdapat lahan bengkok yang luas di suatu Kecamatan untuk bisa disewakan sebagai upaya perluasan TPA selain di Tanjungrejo.	Melakukan pemetaan kebutuhan TPST di setiap desa. Melakukan inventarisasi lahan bengkok desa yang memungkinkan untuk disewa sebagai lokasi TPST atau perluasan TPA. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan terkait kesiapan lahan dan dukungan masyarakat. Menyusun perencanaan teknis dan anggaran pembangunan TPST.	Mengurangi permasalahan penumpukan sampah di desa. Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis wilayah/desa. Tersedianya lokasi TPST dan alternatif perluasan TPA guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan.
2.	Dalam permasalahan penampungan sampah yang overload di TPA Tanjungrejo, perlu adanya peralihan penampungan sampah sementara di desa-desa. Oleh karena itu, perlu disediakan TPST Sementara di desa-desa untuk penampungan sampah.	Menyediakan TPST sementara di desa-desa sebagai lokasi penampungan dan pengolahan awal sampah. Mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Tanjungrejo melalui pemilahan dan pengolahan di tingkat desa. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis desa.	Mengurangi beban dan kapasitas overload di TPA Tanjungrejo. Menyediakan solusi sementara penanganan sampah di desa. Terwujudnya pengelolaan sampah yang lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.
3.	Program Bank Sampah yang sudah dijalankan oleh Dinas PKPLH Kabupaten Kudus di desa-desa, perlu lebih dioptimalkan. Hal ini bisa dilakukan mulai dengan adanya sosialisasi kesadaran sampah ke Pemerintah Desa-desa dan anak-anak sekolah terkait pentingnya pengelolaan sampah.	- Membuat Instruksi Bupati Kudus tentang Gerakan Pilah Sampah - Sosialisasi dan Pelatihan Pilah Sampah di Desa Gamong - Sosialisasi Instruksi Bupati Kudus tentang Gerak Pilah Sampah dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Pilah Sampah - Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 tentang	Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan Gebog, Dawe, Jekulo - Sosialisasi Penguatan Madrasah Ramah Lingkungan di MAN 1 Kudus - Sosialisasi Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup kepada Sekolah/Madrasah - Sosialisasi Pengelolaan Sampah kepada Desa/Kelurahan	
4.	Retribusi sampah menjadi keluhan Masyarakat, Masyarakat desa sudah bersedia membantu memilah sampah, tetapi tetap diwajibkan membayar retribusi sampah. Oleh karena itu, Perda terkait Retribusi Sampah bagi masyarakat untuk dihapuskan agar tidak menjadi ketentuan yang mengikat dan membebani Masyarakat.	Penarikan retribusi sampah tetap dijalankan untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah	Penarikan retribusi sampah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
5.	Program-program Dinas PKPLH Kabupaten Kudus yang sudah lama berjalan dan aset-aset kota Kudus yang sudah ada seperti taman-taman kota mohon untuk dibenahi, ditata dan dikelola yang lebih baik sehingga dapat berpotensi menjadi wisata anak-anak.	Sudah melaksanakan peremajaan terhadap beberapa fasilitas permainan ana yang rusak, merapikan tanaman dan lingkungan taman.	Menyediakan lingkungan taman yang bersih, aman, dan ramah anak.
6.	Terkait masalah penghijauan, banyak ranting pohon yang sudah melengkung ke jalur tiang listrik dan apabila musim hujan seringkali listrik dipadamkan dengan alasanantisipasi adanya pohon tumbang yang mengenai listrik, mohon dilakukan pemeliharaan pohon secara berkala melalui kerjasama dengan pihak-pihak Kecamatan.	Melaksanakan perimbasan sesuai jadwal yang telah dibuat.	Perimbasan dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani permasalahan yang akan atau sudah terjadi akibat adanya pohon tumbang. Saat ini di sebagian wilayah Kabupaten Kudus sudah dirimbasi, sehingga tidak ada kendala terkait permasalahan pohon tumbang.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
7.	Dinas PKPLH Kabupaten Kudus perlu mengkaji ulang terkait aturan penataan jarak penanaman pohon dari bahu jalan, karena semakin ditanami banyak pohon, justru lebar jalan semakin sempit.	- Melakukan penebangan selektif atau pemindahan pohon yang melanggar jarak aman. - Menanam kembali pohon dengan jenis dan jarak yang sesuai. - Menetapkan pedoman resmi sebagai acuan penanaman pohon di masa mendatang.	Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dan menjaga fungsi ekologis penghijauan tanpa mengurangi fungsi jalan.
8.	Perlu dilakukan pengecekan usia dan kondisi pohon secara berkala untuk dilakukan pembaharuan penanaman pohon.	Sudah dilaksanakan pengecekan kondisi pohon dan penanaman pohon yang sudah ditebang.	Program masih berlanjut dan akan terus dilaksanakan.
9.	Perlu adanya evaluasi kinerja dari Bupati Kudus dalam hal meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus dan untuk penyegaran kinerja dalam penanganan persampahan perlu adanya rotasi Kepala Dinas.	-	Meningkatkan kinerja Dinas PKPLH
	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1.	Dinas belum menyampaikan data mengenai implementasi dari KTP digital, hanya disampaikan data mengenai jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (KTP, KIA dan surat Pindah),	Jumlah implementasi aktivasi IKD (KTP Digital) Tahun 2025 adalah 44.413 orang (6,80%) dari target 653.478 orang. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, terdapat peningkatan aktivasi IKD (KTP Digital) Tahun 2025 yaitu dari capaian 30.985 (4,77%) menjadi 44.413 (6,80%).	Meningkatnya capaian aktivasi IKD (KTP Digital) Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 sejumlah 30.985 orang (4,77%) menjadi 44.413 orang (6,80%).
2.	Berkaitan dengan adanya kewajiban bagi masyarakat untuk mengaktifkan KTP digital serta mengakses layanan administrasi kependudukan dan Mall Pelayanan Publik,	Guna kelancaran jaringan untuk pelayanan IKD, Dinas Dukcapil Kab. Kudus telah menganggarkan penyediaan akses internet VPN di Tahun 2025 sejumlah	Tersedianya dukungan anggaran dalam pelayanan administrasi kependudukan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	maka diperlukan dukungan jaringan internet yang memadai, sehingga perlu dukungan teknis dan anggaran agar persoalan akses tidak mengganggu program KTP digital sebagaimana telah dicanangkan pada 25 Januari 2023 (lihat https://dukcapil.kuduskab.go.id/2023/01/25/identitas-kependudukan-digital-4/).	Rp.250.840.000,- untuk pelayanan di Dinas, Kecamatan, MPP, Jemput Bola, dan Pelayanan Online.	
3.	Utamakan pelayanan yang ramah dan selalu tersenyum kepada Masyarakat.	Pelayanan kepada masyarakat sudah dan akan selalu diterapkan dengan menggunakan Pelayanan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) kepada masyarakat dan sudah menjadi bagian dari Standar Pelayanan. Guna peningkatan kompetensi Petugas pelayanan juga akan dilaksanakan bimtek Hospitality Pelayanan Prima Administrasi Kependudukan.	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan per Triwulan IV Tahun 2025 di Kab. Kudus dengan nilai IKM 95,85.
4.	Tingkatkan dan kejar target KTP digital, serta harus lebih ditingkatkan turun langsung ke lapangan untuk sosialisasi.	Telah dilakukan pelayanan Jemput Bola untuk IKD (KTP Digital) Tahun 2025 ke Koordinator Wilayah (Dawe, Jekulo, Mejobo, Jati, Kota, Undaan), Puskesmas (Kaliwungu, Sidorekso, Dawe, Gribig, Ngembal Kulon, Rendeng, Wergu Wetan, dan Purwosari), Nojorono, RSUD Loekmono Hadi, dan RS Sarkies dengan output sejumlah 6.007 orang. Selain itu telah dilaksanakan sosialisasi IKD melalui penerbitan SE publikasi di website dan media sosial, cetak spanduk sosialisasi aktivasi IKD yang didistribusikan di 132 desa/kelurahan.	Meningkatnya capaian aktivasi IKD (KTP Digital) Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024 sejumlah 30.985 orang (4,77%) menjadi 44.413 orang (6,80%).

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5.	Data serapan anggaran sangat baik, dan dari data tersebut yang disampaikan sebaiknya ditentukan indikator kinerja utama, baru indikator-indikator kinerja tambahan, dan sebaiknya indikator kinerja tambahan tersebut merupakan indikator yang jelas dan bisa terukur, sehingga pengukuran keberhasilan program bisa lebih mudah dilakukan.	Telah ditentukan dan ditetapkan indikator kinerja dari Indikator Tujuan, Indikator Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama/IKU), dan Indikator Kinerja Tambahan (Program, Kegiatan, dan Subkegiatan) yang telah dicantumkan pada dokumen Perubahan Renja Tahun 2025, Renja Tahun 2026, dan Renstra 2025-2029.	Diperolehnya sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terukur, efektif, dan akuntabel.
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1.	Peningkatan pencairan dana desa pada tahun 2024 seyogyanya dibarengi dengan peningkatan kapasitas SDM dan sarpras sehingga dana desa bisa efektif dan berdampak bagi masyarakat.	Sudah kami laksanakan setiap tahun anggaran bintek pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan yg berlaku	
2.	Kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan desa dan pengelolaan asset desa tetap diperlukan.	Masih sangat diperlukan karena Dinamika tentang Pengelolaan Keuangan Desa sangat Dinamis.	
3.	Peningkatan kapasitas Rukun Tetangga sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa, juga diperlukan untuk peningkatan pemahaman terkait peran RT sebagai mitra Pemerintah Desa.	Iya sangat diperlukan dan untuk itu telah kami terbitkan Buku Pedoman Administrasi RT dan juga telah kami inisiasi pembuatan Aplikasi SILKADE (Sistem Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa)	
4.	Pada Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, anggaran sebesar 15 juta, terealisasi 8,5 juta sehingga ada penghematan sebesar 6,5 juta rupiah. Sedangkan kegiatan sudah mencapai target sebesar 100% apakah salah perencanaan dalam penganggaran.	Menyesuaikan Penawaran Bintek dan Pelatihan dari BKPSDM	Untuk memenuhi target 20jp maka diwajibkan bagi seluruh ASN untuk mengikuti Bintek.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5.	Pada Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kewenangan Desa, terdapat penghematan biaya sebesar 11,4% dan kegiatan sudah mencapai target sebesar 100%. Kami harapkan pemerintah desa bisa ikut memanfaatkan kegiatan tersebut dengan baik untuk meningkatkan perkembangan perekonomian di desa, sebagaimana hal-hal yang harus di laksanakan Dinas PMD untuk menunjang visi Misi Bupati Bidang Perekonomian.	Bahwa pada 123 Desa sudah terbit Perdes tentang Kewenangan Desa yang menjadi Acuan dalam menentukan Program dan Kegiatan sesuai Kewengan.	
6.	Pembinaan kepada Desa-desa agar lebih di tingkatkan terkait administrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban pemerintah Desa.	Siap, kami akan selalu inten dalam melakukan Pembinaan.	
7.	Monitoring kegiatan Desa agar lebih di tingkatkan guna kelancaran pelayanan pada Masyarakat.	Siap, kami akan selalu inten dalam melakukan Monitoring.	
8.	Pada tahun 2024 LPJ Desa-Desa banyak yang belum melaporkan sampai bulan ini, sehingga diperlukan program peningkatan kapasitas tata kelola anggaran di tingkat desa, baik dari sisi SDM, maupun sarana prasarana. Untuk itu pembinaan dan pengawasan agar lebih di tingkatkan lagi.	Siap, kami akan selalu meningkatkan pembinaan dan pengawasan	
9.	Kepala Dinas PMD di tahun 2024 melanggar kode etik ASN, sangat jelas mendukung salah satu pasangan calon di pilkada yang di tuangkan atas komentarnya di media sosial dan ini salah satu pelanggaran berat bagi ASN,	Bukan kewenangan Dinas PMD	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	untuk Inspektorat agar kejadian seperti ini segera ditindak dan didisiplinkan, dan kami mengusulkan Bupati yang bersangkutan untuk di evaluasi.		
	Bidang Perhubungan		
1.	Terkait pengelolaan LPJU, Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus perlu menerapkan sistem digitalisasi smart LPJU untuk dapat melakukan perbaikan dengan cepat, sehingga apabila ada LPJU rusak/padam muncul pemberitahuan secara otomatis dari sistem LPJU tersebut tanpa harus menunggu aduan/laporan dari Masyarakat.	- Sebagai langkah awal penataan LPJU dan dalam rangka memperoleh data akurat LPJU yang terpasang, Dinas Perhubungan telah dan akan terus melaksanakan investarisasi LPJU pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Kudus, dengan hasil inventarisasi sebanyak 307 ruas jalan terdapat 5.652 titik LPJU. - Dinas Perhubungan akan melaksanakan studi tiru pada daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan digitalisasi <i>smart</i> LPJU sebagai bahan masukan dan kajian penerapan digitalisasi smart LPJU di Kabupaten Kudus.	- Telah terinventarisasi 307 titik LPJU yang tersebar pada 307 ruas jalan. - Sistem digitalisasi smart LPJU bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan LPJU rusak atau padam tanpa harus menunggu laporan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan penerangan jalan umum, keselamatan pengguna jalan, dan efisiensi pemeliharaan LPJU
2.	Program Digitalisasi Retribusi Parkir di Kabupaten Kudus perlu ditingkatkan mengingat potensi PAD dari Pendapatan Dinas Perhubungan cukup besar sebagai upaya transparansi dan pencegahan adanya kebocoran-kebocoran pendapatan.	- Dinas Perhubungan Kudus akan terus berupaya mewujudkan Digitalisasi Retribusi Parkir. - Program Digitalisasi Retribusi Parkir yang dikelola Dinas Perhubungan sudah dilaksanakan pada Parkir Tepi Jalan Umum sebanyak 20 (dua puluh) titik dengan menggunakan QRIS, sedangkan pada parkir khusus motor Ramayana, parkir mobil Balai Jagong, parkir di Terminal Bus Bakalan Krapyak parkir Terminal Cargo Jati Wetan dan parkir di	- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi parkir - meminimalkan potensi kebocoran pendapatan retribusi parkir, - mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Pangkalan Truk Klaling, mulai bulan April 2025 sudah menerapkan digitalisasi dengan memakai alat MPOS - Pada tahun Anggaran 2026, telah dianggarkan untuk rencana pemasangan palang pintu otomatis secara elektronik pada pintu masuk dan keluar pada Gedung Parkir Khusus Ramayana.	
3.	Jumlah kendaraan semakin bertambah karena tidak ada pembatasan, sehingga lalu lintas jalan semakin semrawut. Oleh karena itu, perlu adanya konsep smart traffic light berbasis ATCS di setiap titik lokasi traffic light.	Dinas Perhubungan sependapat atas tersebut : - Konsep smart traffic light berbasis ATCS (Automatic Traffic Control System) dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah lalu lintas yang semakin semarawut di Kabupaten Kudus. - Terkait hal tersebut, Dinas Perhubungan telah dan akan terus berupaya untuk merealisasikan penerapan smart traffic light berbasis ATCS di setiap titik lokasi traffic light pada titik simpang yang dipandang perlu. - Tahun anggaran 2024, Dinas Perhubungan sudah memasang smart traffic light berbasis ATCS pada titik Simpang Pentol. - Tahun 2025 direalisasikan memasang smart traffic light berbasis ATCS pada Simpang DPRD. - Tahun 2026 telah dianggarkan pemasangan smart traffic light berbasis ATCS pada Simpang Jember	Mendukung pengelolaan transportasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan lalu lintas, mengurangi jumlah antrian kendaraan pada titik simpang dengan volume lalu lintas tinggi yang berpotensi menimbulkan kemacetan, meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, serta mendukung pengelolaan transportasi yang ramah lingkungan yang berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK sektor transportasi.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Sebagai bahan perencanaan selanjutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus akan melaksanakan kajian simpang pada titik-titik simpang yang dianggap perlu untuk dipasang smart traffic light berbasis ATCS.	
4.	Evaluasi kinerja dari Bupati Kudus dalam hal meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus, dan untuk penyegaran kinerja dalam hal uji petik muatan dan pemeliharaan LPJU yang masih kurang maksimal perlu adanya mutasi Kepala Dinas agar ada perbaikan.		
	Bidang Komunikasi dan Informatika		
1.	Program Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi, dengan indikator jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi, presentase kinerjanya mencapai 116,7%. Pencapaian kinerja diatas 100%, tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana penganggarannya, serta mengapa dari rencana 60 orang yang diikuti program kegiatan terealisasi sebanyak 70 orang. Hal ini perlu dikaji ulang.	Pencapaian realisasi yang lebih besar dari 100% dikarenakan kesalahan dalam penentuan target indikator output pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Penentuan target output disesuaikan dengan volume belanja yang telah dianggarkan.	Agar output dan penganggaran sesuai
	Penanaman Modal		
1.	Untuk optimaslisasi pelayanan, agar berkoordinasi secara intensif dengan dinas/instansi vertikal untuk membuka gerai	- Melaksanakan rapat evaluasi terhadap pelayanan di gerai MPP yang dihadiri oleh perwakilan gerai baik dari OPD teknis	Mendekatkan pelayanan dari Dinas atau Instansi vertikal kepada Masyarakat.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	pelayanan di MPP dan disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.	maupun instansi vertikal dan dilaksanakan setiap triwulan. - Dinas PMPTSP telah berkoordinasi dengan dinas/instansi vertikal untuk membuka gerai layanan di MPP. Instansi vertikal yang bergabung antara lain Kantor Imigrasi, BBPOM Semarang, Kementerian Agama, Kantor ATR BPN, Polres, Bea Cukai, PT. Taspen, PLN, PDAM, KPP Pratama, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan, Samsat dan BPD Jateng. Dengan berjalannya waktu karena keterbatasan personil Imigrasi sudah tidak dapat membuka layanan pengurusan paspor di MPP Kudus. Polres untuk SIM Keliling sudah tidak membuka layanan di MPP.	
2.	Setiap gerai pelayanan di MPP dilayani oleh pegawai yang berkompeten dalam melayani Masyarakat.	Untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan gerai dilaksanakan bimbingan teknis service Excellent dan pelatihan bahasa isyarat dengan tema “Pelayanan publik unggul: Hospitality, komunikasi efektif, dan bahasa isyarat untuk inklusi sosial”.	Petugas layanan gerai semakin meningkat kompetensinya dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik.
3.	Dinas PMPTSP agar mensosialisasikan kepada perangkat daerah terkait dalam hal percepatan atau kemudahan dalam mengurus perizinan, misalnya NIB dan PBG.	- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung melalui kegiatan pendampingan perizinan di CFD maupun melalui media sosial DPMPSTSP. - Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diikuti oleh OPD teknis dan kelompok masyarakat	Pelayanan perizinan semakin mudah, cepat dan transparan.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4.	Terkait maraknya pendirian toko swalayan / minimarket yang termasuk klasifikasi usaha beresiko rendah, dengan berlakunya perizinan online OSS, dengan mudahnya izin tersebut keluar yang terkadang mengabaikan keberadaan masyarakat sekitar, oleh karena itu perizinan agar juga memperhatikan aspek sosial/lingkungan kemasyarakatan serta berpedoman Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus.	Berdasarkan PP No 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan ditujukan untuk memastikan proses pemenuhan standar kegiatan usaha yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sebagaimana pernyataan pemenuhan standar usaha yang telah dibuat pelaku usaha pada saat proses pengajuan permohonan perizinan berusaha. Dinas PMPTSP telah melakukan pengawasan yang terdiri dari : a. Pengawasan Rutin Dilakukan secara berkala dan terjadwal secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha. Pengawasan rutin dilaksanakan dalam bentuk inspeksi lapangan dan pemantauan laporan pelaku usaha. Usaha yang dilakukan pengawasan terdiri dari kegiatan usaha dengan risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Pengawasan rutin juga mengikutsertakan instansi terkait. b. Pengawasan Insidental Merupakan pengawasan yang dilakukan pada waktu tertentu dan dapat ditindaklanjuti dengan inspeksi lapangan	Dengan adanya kegiatan pengawasan baik rutin maupun insidental diharapkan tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat sehingga seluruh ketentuan standar pengajuan perizinan berusaha termasuk komitmen pengelolaan lingkungan dari pelaku usaha dapat dipenuhi.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		atau secara virtual. Pengawasan insidental ini dilaksanakan berdasarkan adanya pengaduan dari masyarakat dan pelaku usaha yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.	
5.	Perda Nomor 12 Tahun 2017 sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman dan regulasi, maka perlu diadakan revisi/perubahan perda tersebut.	Berkoordinasi dengan dinas perdagangan utk mengkaji harmonisasi Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan di Kabupaten Kudus.	Penerbitan perizinan toko swalayan sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga tidak menimbulkan permasalahan dengan lingkungan/ masyarakat.
6.	Permasalahan perijinan Hotel Sato yang sampai ini belum terselesaikan, mohon untuk segera diselesaikan secara transparan dan sesuai dengan regulasi. Dikarenakan sampai saat ini masih jadi pertanyaan masyarakat.	Mediasi tindak lanjut penyelesaian permasalahan Hotel Sato.	Permasalahan Hotel Sato terselesaikan dengan baik.
	Kepemudaan dan Olahraga		
1.	Hibah kepada KONI harus dievaluasi khususnya terkait SDM, penggunaan anggaran, sistem pelaporan, prestasi olahraga, dan tata Kelola organisasi dan agar kegiatan dilaksanakan lebih optimal.	Hibah kepada KONI penting untuk mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, namun perlu disertai evaluasi yang menyeluruh. Evaluasi tersebut mencakup kualitas SDM, efektivitas penggunaan anggaran, sistem pelaporan yang akuntabel, capaian prestasi olahraga, serta penerapan tata kelola organisasi yang baik. Dengan pengawasan dan indikator kinerja yang jelas, hibah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan olahraga	Hibah kepada KONI bertujuan mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga melalui penguatan SDM, pelaksanaan program yang berkelanjutan, serta tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Namun, masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan, antara lain kualitas SDM yang belum optimal, penggunaan anggaran yang belum sepenuhnya efisien dan berbasis kinerja, sistem pelaporan yang belum tertib, capaian prestasi olahraga yang belum sebanding dengan besaran hibah, serta penerapan tata kelola organisasi yang belum maksimal.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Perpustakaan dan Kearsipan		
1.	Untuk meningkatkan pelayanan dan minat baca dalam kunjungan pembaca ke Dinas, perlu diperbanyak penyediaan pojok baca digital dengan cara scan barkode dan pengadaan mobil keliling.	Peningkatan layanan dan minat baca dapat diakselerasi melalui penyebaran Pojok Baca Digital (Pocadi) berbasis scan barcode dan pengadaan mobil perpustakaan keliling, yang bertujuan mempermudah akses informasi. Tindak lanjut ini meningkatkan efektivitas layanan dinas, menjangkau area minim buku, serta mendigitalisasi budaya baca.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Meningkatnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat. Meningkatnya minat baca anak-anak sekolah. Meningkatnya pengunjung perpustakaan. Meningkatnya pengetahuan teknologi digital masyarakat.
2.	Personil yang menangani kegiatan bunda literasi masih kurang, untuk itu Ibu Wakil Bupati agar lebih proaktif dalam kegiatan tersebut.	Membentuk atau memperkuat kelompok kerja (Pokja) khusus yang didedikasikan untuk mendukung program Bunda Literasi.	
3.	Kerjasama dengan Dinas pendidikan terutama sekolah-sekolah untuk aktif membaca buku-buku dengan cara mendatangi kesekolah (jemput bola), jangan hanya untuk fisik di perbanyak digital mobil keliling di perbanyak scan barkot E-Book.	Mengadakan sesi membaca digital bersama di lapangan atau aula sekolah menggunakan gawai masing-masing. Duta Literasi Digital: Memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki jumlah peminjaman e-book terbanyak melalui aplikasi. Workshop Kilat: Edukasi cara mencari referensi tugas sekolah melalui perpustakaan digital agar siswa tahu bahwa koleksi kita relevan dengan kebutuhan mereka.	
4.	Meningkatkan kerjasama dan inovasi literasi untuk anak usia sekolah sehingga tidak tergantung pada gadget/handphone.	Mengadakan Literasi digital membantu mereka dalam mengumpulkan informasi, berkolaborasi dengan teman sebaya secara daring, dan meningkatkan pengalaman	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		belajar mereka dengan memperkenalkan mereka pada platform pembelajaran digital atau virtual . Mengingat bagaimana berbagai hal telah berubah dalam beberapa dekade terakhir, ini adalah keterampilan penting yang harus dimiliki setiap siswasosialisasi	
	Bidang Pariwisata		
1.	Dinas Pariwisata harus mempunyai kajian secara komprehensif pengembangan kawasan obyek wisata terutama di obyek wisata colo sebagai andalan dalam peningkatan PAD.	Penyusunan kajian pengembangan kawasan obyek wisata Colo secara komprehensif	Agar pengembangan obyek wisata dilakukan terencana, berkelanjutan dan membeikan manfaat optimal bagi semua pihak
2.	Penggunaan anggaran untuk biaya-biaya promosi lebih besar tapi tidak ada timbal balik atau pendapatan yang lebih baik bagi sektor wisata.	Anggaran biaya promosi yang besar merupakan sebuah konsekuensi untuk memperkenalkan destinasi pariwisata Kabupaten Kudus ke luar daerah dan luar negeri. Pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan yaitu: - Promosi pariwisata merupakan investasi jangka panjang. Dampaknya tidak langsung terlihat, namun secara bertahap seiring dikenalnya branding destinasi wisata di Kabupaten Kudus. - Pendapatan sector pariwisata bukan hanya diukur dari pendapatan ticketing obyek wisata yang dikelola Pemerintah, namun terdapat dampak berganda/ multiplayer effect dan pemberdayaan masyarakat yang terjadi dengan bergeraknya sector pariwisata yang	Dengan pelaksanaan promosi pariwisata secara masif, diharapkan dapat menjangkau target pasar yang lebih luas sehingga jumlah kunjungan meningkat, serta memperkuat citra pariwisata Kabupaten Kudus

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		tersebar ke sektor lain seperti perhotelan, restoran, penyediaan akomodasi lainnya, transportasi, dan UMKM lokal, yang tidak secara langsung tercatat sebagai PAD	
3.	Perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola obyek-obyek yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	Pengusulan objek-objek yang dapat dipihakketigakan	Mengoptimalkan PAD
4.	Untuk meminimalisir kebocoran dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka penarikan retribusi di Portal Colo menggunakan digital retribusi dimulai saat ini secara bertahap, juga disemua obyek wisata yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	- Digitalisasi dengan pembayaran non tunai melalui QRIS/transfer - Digitalisasi dengan e-ticketing	Menciptakan pengelolaan retribusi yang transparan, efisien, aman dan modern
5.	Pengalih fungsi lahan dan pemanfaatan aset-aset yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mangkrak, antara lain Terminal Wisata Colo dan Villa Colo.	Penyusunan masterplan Graha Muria dan masterplan Terminal Wisata Colo	Mengoptimalisasi aset-aset Pemkab dalam peningkatan PAD
6.	Dinas membuat kajian secara komprehensif mengenai arah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Kudus.	Perda Kab. Kudus no. 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kab. (RIPPARKAB) Kudus Tahun 2020-2035 telah menetapkan arah pembangunan pariwisata Kab. Kudus yg dirumuskan dalam 4 DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten) yaitu: 1. DPK Gunung Muria dan sekitarnya 2. DPK Pusat Kota dan sekitarnya 3. DPK Patiayam dan sekitarnya 4. DPK Wonosoco dan sekitarnya.	Dengan berdasarkan Dokumen Basic Design Pembangunan DPK Gunung Muria diharapkan dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata di Kudus sehingga jumlah kunjungan wisata akan meningkat dan hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kudus.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Guna memperjelas arah kebijakan pembangunan pariwisata di setiap DPK, telah disusun Dokumen Basic Design Pembangunan DPK Gunung Muria yg difokuskan pada pengembangan potensi wisata di kawasan G. Muria. dan selanjutnya pada tahun anggaran berikutnya, akan disusun Basic Design Pembangunan DPK lainnya	
7.	Terkait dengan kemungkinan kerjasama pengelolaan DTW (Daya Tarik Wisata) dengan pihak ketiga dinas membuat kajian DTW mana yang baik untuk di pihak ketigakan dan DTW mana yang tetap dikelola oleh dinas.	Pengusulan ke BPPKAD	Mengoptimalkan PAD
8.	Dalam rangka peningkatan PAD dan pelayanan kepada pengunjung DTW colo direkomendasikan: ➤ Integrasi dan perluasan lahan parkir bus dengan jasa pelayanan ojek; ➤ Penyediaan lahan parkir sepeda motor.	Penyusunan masterplan Terminal Wisata Colo	Peningkatan sarpras dan pelayanan bagi wisatawan
	URUSAN PILIHAN		
	Pertanian		
1.	S.osialisasi tentang penggunaan alat/fasilitas yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan tidak hanya untuk Gapoktan, tetapi juga harus disosialisasikan ke semua kecamatan dan desa.	Sosialisasi penggunaan fasilitas atau sarana produksi pertanian dan prasarana pertanian sudah diinformasikan kepada petani yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan melalui PPL di semua Kecamatan di Kabupaten Kudus	- Petani yang tergabung dalam Poktan/ Gapoktan dapat memanfaatkan alat dan mesin pertanian secara gratis sesuai dengan persyaratan teknis dan administrasi. - Petani yang tergabung dalam kelompok tani dapat mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi.

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
			- Petani atas nama pribadi atau kelompok tani dapat mengajukan rekomendasi pembelian BBM subsidi - Petani yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan dapat mengajukan permohonan bantuan obat-obatan pertanian untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman - Petani yang tergabung dalam Poktan/Gapoktan dapat mengajukan permohonan bantuan prasarana pertanian.
2.	Perlunya ketersediaan sistem pengairan dan pupuk yang cukup untuk suksesnya program pertanian.	- Sistem pengairan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian adalah jaringan irigasi tersier. - Sistem pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui RDKK sudah terinformasikan kepada petani melalui PPL. Mekanisme pengalokasian dan penyaluran pupuk bersubsidi sudah dilaksanakan dengan sistem sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah terinformasikan kepada stake holder terkait pupuk bersubsidi.	Dinas Pertanian melalui PPL membantu penyusunan RDKK. Pembagian alokasi pupuk bersubsidi memperhitungkan RDKK dan LP2B. Mekanisme penyaluran melalui distributor, kios pupuk lengkap (pengecer) dan kelompok tani.
3.	Dinas Pertanian agar menginventarisir saluran sekunder dan tersier untuk mensukseskan swasembada pangan Kabupaten Kudus supaya tersedia dan berfungsi dengan maksimal.	- Sistem pengairan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian adalah jaringan irigasi tersier. - Dinas Pertanian telah menginventarisir kondisi jaringan irigasi tersier di desa-desa di Kabupaten Kudus	Data inventarisasi jaringan irigasi tersier di Kabupaten Kudus

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
4.	Menuju kedaulatan pangan diperlukan adanya program- program pemberdayaan petani dan perlu dimasilkan gerakan bertani bagi kaum millennial.	- Penguatan kelembagaan Gapoktan dan poktan dengan membentuk paguyuban gapoktan tingkat kecamatan dan kabupaten - Program kegiatan untuk petani milenial melalui sakataruna bumi sebagai salah satu wadah regenerasi petani milenial - Melibatkan petani milenial dalam pelaksanaan kegiatan di poktan dan gapoktan	- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani - Upaya pembinaan generasi muda untuk pengenalan pertanian - Upaya regenerasi SDM pertanian
5.	Perlu adanya dukungan dan kolaborasi dari dinas terkait terhadap program pertanian. strategi pemasaran produk-produk-produk pertanian.	- Mengikuti kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, dan pariwisata. - Melaksanakan pelatihan pemasaran Online produk-produk pertanian	Meningkatkan pemasaran produk pertanian dan olahan hasil pertanian
	Bidang Perdagangan		
1.	Peningkatan SDM pedagang dengan memfasilitasi pelatihan penjualan digital;	Pada Bulan Oktober 2025 telah diselenggarakan Pelatihan Digital Marketing bagi Pedagang Pasar di Kabupaten Kudus adapun materi Sbb : 1. Pengenalan Digital Marketing 2. Penggunaan Platform Pemasaran 3. Teknik Dasar Foto dan Video Live Streaming Tiktok dan Penggunaan AI	- Meningkatkan literasi digital bagi Pedagang Pasar/Pelaku UMKM. - Membekali Pedagang Pasar/Pelaku UMKM dengan keterampilan pemasaran online (e-commerce, marketplace, media sosial). - Mendorong Pedagang Pasar/Pelaku UMKM memanfaatkan aplikasi digital untuk operasional usaha. - Memperluas akses pasar melalui platform digital. - Meningkatkan omset penjualan bagi para Pedagang Pasar

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2.	Rendahnya minat pembeli yang datang ke pasar, berakibat pada "magkraknya" sarpras pasar berupa gedung/kios/los, Pemerintah Daerah harus berinovasi terhadap pemanfaatan asset/sarpras pasar tersebut supaya lebih optimal;	Dinas perdagangan telah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat yaitu Pedagang yang tidak melakukan aktivitas jual beli selama 2 bulan berturut-turut atau 90 hari dalam satu tahun secara kumulatif tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan maka kepemilikan kios/ los akan kembali ke Pemerintah Daerah dan dapat dimanfaatkan oleh pedagang baru	- Kios/los yang kosong/ tidak ada aktivitas jual beli akan dimanfaatkan oleh pedagang baru. - Memberikan kesempatan kepada pedagang lain untuk berjualan di pasar - Meningkatkan pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat
3.	Menggandeng pihak ketiga untuk meningkatkan mutu atau penjualan di sektor pasar;	Pedagang diberikan pelatihan agar bisa berjualan di platform digital seperti Shopee & Tiktokshop sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatannya	- Meningkatkan omset penjualan bagi para Pedagang Pasar - Memperluas akses pasar melalui platform digital. - Mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat
4.	Menggalakkan atau mempromosikan produk lokal dalam daerah dengan menggunakan platfom digital;	- Gerakan Ayo Belanja ke Pasar Tradisional - ASN minimal se bulan sekali di sela kegiatan olah raga untuk belanja ke Pasar Tradisional - ASN untuk membudayakan belanja ke Pasar Tradisional ASN yang berbelanja di pasar tradisional untuk promosikan produk dagangan dgn cara di <i>upload</i> pada media sosial (<i>Instagram, Facebook, Tiktok dll</i>)	- mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para pedagang di pasar tradisional. - menumbuhkan kembali kebiasaan berbelanja produk lokal, Meningkatkan pendapatan para pedagang di Pasar Tradisional
5.	Agar kantor operasioanal Dinas Perdagangan bertempat di salah satu pasar di Kabupaten Kudus;	Saat ini, fungsi operasional Dinas Perdagangan di tingkat pasar sudah terwakili oleh adanya Koordinator Pasar di masing-	- Mendekatkan jarak dan waktu dalam pengurusan administrasi pasar

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		masing pasar. Koordinator tersebut telah dilengkapi dengan personel yang siap melayani administrasi dan pengawasan dan operasional pasar setiap hari	- Aduan dan kebutuhan pedagang selesai di pasar tanpa harus ke kantor Dinas - Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing pasar
6.	Sesuai hasil sidak dan audiensi DPRD bersama Paguyuban Pedagang Pasar dan Dinas Perdagangan dimohon untuk memperhatikan keluhan pedagang yaitu sepiunya pembeli dan keberatan retribusi sesuai Perda yang baru, dan diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih memperhatikan kondisi pedagang pasar serta mengakomodir keberatan retribusi pedagang pasar.	- Telah diterbitkan Perbub Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Detail Obyek Retribusi Daerah dan Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Daerah - Pengurangan Retribusi Pasar sebesar 15% bagi Pedagang Pasar yang belum membayar dari Januari s/d Juni 2025 bagi yang mengajukan Pengurangan Sanksi Administrasi/pembebasan Denda bagi Para Pedagang yang belum membayar Retribusi PKD (dari Tahun 2016 s/d 2023)	- Menurangi biaya operasional pedagang pasar - Menjaga kelangsungan usaha/ membantu pedagang pasar untuk menjaga kelangsungan usahanya Peningkatan kepatuhan untuk membayar retribusi
	Hasil sidak Komisi B bersama Dinas Perdagangan di Pasar Bitingan pada tanggal 19 Maret 2025 ditemukan produk minyak goreng MINYAKITA yang diproduksi CV. AMALY FOOD beralamat di GRESIK-61124-INDONESIA kemasan 1 Liter yang takarannya berisi 970 mililiter, Dinas Perdagangan harus menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengambil sample 20 botol. Apabila hasilnya terdapat pelanggaran maka Komisi B meminta perusahaan tersebut diproses secara hukum dan produknya ditarik dari pasar di Kabupaten Kudus.	- Tidak dilakukan surat peringatan karena: Produsen bukan Perusahaan yang berdomisili di kabupaten kudas - Perngujian belum memenuhi semua persyaratan pengujian Dimana hanya ditemukan 1 (satu) botol	

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
7.	Dinas Perdagangan berperan aktif dalam pengawasan terhadap toko swalayan dan toko modern terkait jam operasional.	- Telah dilakukan sosialisasi secara berkala kepada pengelola toko swalayan dan toko modern melalui pertemuan, surat edaran, dan media daring - Telah dilakukan inspeksi langsung ke toko swalayan dan toko modern untuk memastikan kepatuhan terhadap jam operasional - Mendokumentasikan hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut - Melaporkan hasil pengawasan	- Menjamin kepatuhan toko swalayan dan toko modern terhadap ketentuan jam operasional yang berlaku. - Menjaga ketertiban umum serta kenyamanan Masyarakat - Meningkatkan tingkat kepatuhan toko swalayan dan toko modern terhadap jam operasional
8.	Dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas penerimaan retribusi di pasar yang dikelola Dinas Perdagangan maka mulai saat ini agar dirintis penarikan dengan digital retribusi secara bertahap.	Pada Tahun 2025 telah dilakukan penarikan E Retribusi di Pasar Kliwon dan Pasar Bitingan dan selanjutnya akan di lakukan di Pasar-Pasar yang lainnya secara bertahap	- Mempermudah proses pembayaran Retribusi - Mengurangi penyalahgunaan/kebocoran retribusi - Meningkatkan Pendapatan Daerah
9.	Mengembangkan platform digital untuk mempromosikan produk dan jasa yang ada di pasar.	Kliwon Departemen story Gerakan Ayo Belanja ke Pasar Tradisional kepada para ASN yang berbelanja di pasar tradisional untuk promosikan produk dagangan dgn cara di <i>upload</i> pada media sosial (<i>Instagram, Facebook, Tiktok dll</i>)	- Menyampaikan informasi produk/ barang dagangan - Meningkatkan omset penjualan - Meningkatkan pendapatan pedagang di Pasar Tradisional
10.	Ditemukan pedagang liar di Pasar Dawe dan pedagang sayur di Pasar Bitingan yang berjualan disekitar pasar. Untuk itu harus ada penertiban pedagang khususnya dipasar tersebut, dan juga semua pasar di Kabupaten Kudus.	Kami sudah sering menertiban pedagang-pedagang tersebut di masing-masing pasar namun mereka kembali lagi, karena di luar pasar, seperti halaman pasar, bahu jalan, atau trotoar peluang pembeli yang lebih banyak Untuk pedagang Sayur Pasar Bitingan yang berada di Pelataran, Jl. dr Loekmonohadi dan Mayor Basuno rencana akan di relokasi ke Pasar Saerah	- Menciptakan ketertiban, kebersihan dan keamanan dilingkungan Pasar. - Menjaga fungsi fasilitas umum yang ada di sekitar pasar

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
11.	Dinas Perdagangan harus melakukan pengawasan terkait jam operasional Toko Modern sehingga tidak ada lagi pelanggaran jam operasional, yang menjadi keluhan pelaku UMKM.	- Melakukan sosialisasi dan penegasan kembali ketentuan jam operasional kepada seluruh pengelola Toko Modern - Menyampaikan sanksi yang akan dikenakan apabila terjadi pelanggaran	- Memastikan Toko Modern mematuhi ketentuan jam operasional yang telah ditetapkan - Pelanggaran jam operasional tersebut menimbulkan keluhan dari pelaku UMKM karena berdampak pada persaingan usaha - Diberikannya teguran dan sanksi administratif kepada Toko Modern yang melanggar ketentuan - Meningkatnya kepatuhan Toko Modern terhadap jam operasional
	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG		
	Sekretariat Daerah		
1.	Kurangnya personil dalam pembahasan Pansus, Pembahasan Perda dan Pembahasan Perbup agar dapat di penuhi.	Pada Tahun 2025 Bagian Hukum telah mendapatkan personil CPNS yang berkualifikasi sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan berjumlah 2 orang	Pemenuhan kebutuhan personil dalam pembentukan produk hukum daerah
2.	Efisiensi anggaran ATK untuk meminimalisir bahan cetakan contoh undangan, materi rapat, dan sebagainya.	Sudah dilaksanakan	
3.	Bagian Kesra agar melibatkan peran aktif dari anggota DPRD Kabupaten Kudus, khususnya Komisi D yang membidangi dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan urusan Kesejahteraan Sosial dan keagamaan.	Sudah dilaksanakan	
4.	Mendasarkan pada Visi-Misi Bupati Kudus Tahun 2025-2030, bahwa bantuan untuk Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Guru Swasta agar segera diwujudkan.	- Visi, Misi Bupati Kudus dalam Program Unggulan Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta dan Madin Rp. 1.000.000,-/bulan telah dilaksanakan sebagai berikut : - Penetapan Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemberian	Tujuan : - Meningkatkan kesejahteraan Guru Swasta; - Meningkatkan mutu dan derajat pendidikan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus pada tanggal 13 Juni 2025. - Pemberian Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta di Kabupaten Kudus sebesar Rp1.000.000,- mulai dilaksanakan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/152/2025 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru Swasta yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus untuk 7 Bulan mulai Bulan Juni 2025 sejumlah 7.377 guru swasta	- Meningkatkan kinerja dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat khususnya bagi peserta didik
5.	Filosofi kudus yaitu Lamun siro banter ojo nglancangi, Lamun siro landep ojo natoni, Lamun siro pinter ojo ngguroni yang bermakna kooperatif, kolaboratif, dan toleransi sebagai filosofi kita dalam berkehidupan, yang pernah terpasang di halaman pendopo Kabupaten Kudus agar dikembalikan.	Akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026	
6.	Terkait dengan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap BUMD oleh Bagian Perekonomian Setda direkomendasikan: Secara umum semua BUMD mendapatkan laba kecuali PD. Percetakan Pemda, untuk itu saudara Bupati agar menghimbau kepada semua OPD yang membutuhkan jasa cetak untuk menggunakan jasa percetakan Pemda.	Akan memberikan himbauan dalam Rapat Pimpinan agar OPD yang membutuhkan jasa cetak dapat menggunakan jasa PD. Percetakan Kabupaten Kudus.	Meningkatkan pendapatan PD. Percetakan Kabupaten Kudus agar PD. Percetakan Kabupaten Kudus dapat mencapai target laba yang telah ditetapkan dalam RKA

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
7.	Dengan terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Setiap Badan Usaha yang terjangkau oleh jaringan Perumda Tirta Muria harus menyediakan air yang bersumber dari Perumda Tirta Muria paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah total kebutuhan air masing-masing Badan Usaha. Bupati Kudus segera mengeluarkan Perbup pelaksanaan perda tersebut yang berpotensi meningkatkan pendapatan dari Perumda Tirta Muria;	Akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang menyusun Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan melakukan kajian kemungkinan penyusunan Perbup pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut	Potensi peningkatan pendapatan dan laba Perumda Tirta Muria dari Badan Usaha yang terjangkau oleh jaringan Perumda Tirta Muria. Badan Usaha tersebut diharuskan menyediakan air yang bersumber dari Perumda Tirta Muria paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah total kebutuhan air masing-masing Badan Usaha
8.	Perumda Tirta Muria dari salah satu BUMD yang ada di Kudus untuk laba bersih setelah pajak pada tahun 2023 sebesar Rp.4.502.031.553, dan tahun 2024 sebesar Rp. 4.727.351.385,- dari selisih nominal tersebut hanya memperoleh peningkatan laba bersih sebesar Rp. 225.319.832, maka DPRD memberikan catatan kinerja BUMD Perumda Tirta Muria kurang maksimal;	Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Perumda Tirta Muria, telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 900.1.13/398/2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirta Muria Kabupaten Kudus Tahun Buku 2025	Memaksimalkan kinerja Perumda Tirta Muria. Dengan harapan target laba tahun 2025 sebesar Rp6.732.811.000,00 dapat tercapai. Target laba tersebut lebih tinggi Rp2.005.459.615,00 dibandingkan realisasi laba tahun 2024
10.	Untuk meningkatkan pendapatan, Perumda Tirta Muria agar berinovasi memproduksi air minum dalam kemasan dan pengelolaan limbah;	Perumda Tirta Muria merencanakan inovasi produksi air minum dalam kemasan dengan merk Seha +. Saat ini sudah sampai pada tahap pengurusan perizinan. Untuk inovasi pengelolaan limbah, dalam waktu dekat belum dapat dilaksanakan karena sumber daya yang tersedia akan difokuskan pada kegiatan penurunan tingkat kebocoran air Perumda Tirta Muria yang saat ini masih sangat tinggi	Meningkatkan pendapatan dan memaksimalkan kinerja Perumda Tirta Muria

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Sekretariat DPRD		
1.	Penganggaran tablet untuk anggota agar segera di realisasikan untuk mempermudah kinerja anggota Dewan	Belum dianggarkan pada tahun 2025 karena keterbatasan anggaran	
	BAPPEDA		
1.	Bappeda merupakan ujung tombak perencanaan daerah, untuk itu harus selalu menjadi contoh bagi organisasi perangkat daerah lainnya untuk membuat perencanaan yang bagus agar tidak terjadi silpa terlalu banyak.	Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penguatan koordinasi lintas OPD, penerapan manajemen waktu dan manajemen risiko, serta penajaman perencanaan kegiatan sejak tahap awal penyusunan RKPD dan Renja OPD. Telah dilaksanakan dan berjalan sesuai perencanaan	Terwujudnya perencanaan daerah yang lebih berkualitas dan terukur, meningkatkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta menekan potensi terjadinya SILPA yang tidak wajar
2.	Pagu anggaran pada tahun 2024 lebih banyak dari pada tahun 2025, sedangkan tahun 2025 ada bupati dan wakil bupati definitif, untuk itu agar menjadi catatan untuk perencanaan awal yang lebih baik;	Melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran tahun berjalan serta penajaman perencanaan awal tahun berikutnya dengan memperhatikan arah kebijakan kepala daerah terpilih dan proyeksi kemampuan keuangan daerah dan Telah disesuaikan pada perubahan APBD 2025 dan dalam proses pelaksanaan	Terjaganya kesinambungan perencanaan dan penganggaran daerah, terciptanya keselarasan antara visi kepala daerah dengan program pembangunan, serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah
	BKPSDM		
1.	Pada tahun 2024 ada pelaksanaan lelang jabatan yang seharusnya tidak di lakukan di tahun politik, dan adanya indikasi kecurangan di buktikan adanya temuan bahwa panitia penyelenggara seleksi terbuka atas lelang jabatan tersebut ternyata sudah di berhentikan dari universitas penyelenggara dan anggaran tersebut hanya terserap 50%, maka dari itu kami mengusulkan kepada	- Terkait indikasi kecurangan pada lelang jabatan, telah kami tindaklanjuti dengan mengirimkan Surat ke BKN Nomor: 800/1541/2025 perihal Mohon Penjelasan tertanggal 26 Juni 2025 dan telah dijawab melalui Surat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN pada BKN Nomor 11422/B-AK.02.02/ SD/ F.I/2025 tanggal 4 Juli 2025;	- Indikasi kecurangan terkait pelaksanaan lelang jabatan telah terselesaikan dengan penjelasan dari BKN melalui Surat Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN Nomor11422/B-AK.02.02/SD/F.I/ 2025 tanggal 4 Juli 2025. - Pelantikan Hasil Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	bapak bupati untuk mengevaluasi kepala BKPSDM.	- Anggaran terserap 50% karena rencana untuk pelaksanaan Uji Kompetensi dan Seleksi Terbuka, izin lengkap turun di tanggal 12 November 2024 sehingga waktu tidak mencukupi untuk di Tahun 2024	Kabupaten Kudus telah dilaksanakan pada tanggal 30 September 2025, dengan mutasi/rotasi beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama , diantaranya Kepala BKPSDM rotasi/mutasi sebagai Kepala Dinsos, P3AP2KB. - Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian 6 (enam) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, antara lain: 1. Asisten Administrasi Umum Sekda; 2. Kepala Satpol PP; 3. Kepala Dinas PUPR; 4. Kepala Dinas Kominfo; 5. Kepala Badan Kesbangpol; 6. Kepala BKPSDM.
2.	Seleksi PPPK dilakukan belum transparan dan masih banyak honorer siluman yang lolos, dalam seleksi administrasi meskipun tidak memenuhi syarat dan kelulusan sejumlah peserta PPPK juga di batalkan setelah diverifikasi ulang yang menunjukkan peserta tidak memenuhi kriteria yang di tentukan.	- Seleksi administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan aturan, - Seleksi administrasi dilaksanakan secara teknis oleh Tim Sekretariat dari BKPSDM dari hasil verifikasi tim teknis dibahas keseluruhan oleh Tim Pansel. - Apabila ada indikasi honorer siluman yang terakomodir lolos seleksi administrasi agar memberi informasi terkait identitas peserta untuk di kroscek ulang dokumen persyaratan peserta dan apabila ditemukan ketidaksesuaian persyaratan dapat diajukan pembatalan ke BKN	Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul untuk dapat diselesaikan dengan baik, hal tersebut untuk memastikan agar pengadaan ASN dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3.	Dengan masih kurangnya kompetensi SDM dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta sarana dan prasarana yang belum memadai, maka Perangkat Daerah agar: - Lebih mencermati dan memperhitungkan dengan tepat terkait target program/kegiatan/sub kegiatan agar capaian kinerja bisa tercapai secara maksimal. - Memaksimalkan seluruh kemampuan sumberdaya dan srpras yang ada agar kinerja dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditentukan. - Mengupayakan optimalisasi ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah, serta penyusunan renja kedepan. Memperhatikan aktifitas walidata karena merupakan bagian dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data statistik daerah agar isian yang masih kosong segera diisi,	- BKPSDM telah menganggarkan untuk peningkatan kompetensi dan akan memberangkatkan diklat baik daring maupun luring sesuai kebutuhan untuk tercapainya kinerja organisasi - BKPSDM akan lebih mencermati memperhitungkan dengan tepat terkait target program/ kegiatan/sub kegiatan agar capaian kinerja bisa tercapai secara maksimal - BKPSDM akan berupaya memaksimalkan seluruh kemampuan sumber daya dan sarpras yang ada agar kinerja dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditentukan - BKPSDM akan mengevaluasi dan mengupayakan optimalisasi ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah, serta penyusunan renja kedepan. - BKPSDM akan segera mengisi isian yang masih kosong secara berkala (rutin) dengan memperhatikan aktifitas walidata karena merupakan bagian dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyebarluaskan data statistik daerah	- Pengembangan kompetensi ASN bagi Perencana pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, jumlah 40 peserta - Pengembangan kompetensi ASN bagi Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, jumlah 40 peserta - Pengembangan kompetensi dan uji sertifikasi bagi kepala Perangkat Daerah dan PPATK di Kabupaten Kudus, jumlah 50 peserta - Pengembangan kompetensi dan pembekalan kepemimpinan bagi pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus, jumlah 40 peserta
4.	SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi dan minim kuantitas SDM, minim kualitas dan kuantitas sarpras, untuk itu agar	BKPSDM telah menganggarkan untuk peningkatan kompetensi dan akan memberangkatkan diklat baik daring	- Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial,

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	ditingkatkan kompetensi dan optimalkan sarpras pendukung sehingga mampu merumuskan strategi dan implementasi penanganan permasalahan sesuai urusan yang diampu Perangkat Daerah.	maupun luring sesuai kebutuhan untuk tercapainya kinerja organisasi	teknis dan fungsional di Balai Pelatihan Sonyawarih, Menawan, Gebog, Kudus - Telah diikuti oleh ASN di masing-masing Perangkat Daerah secara mandiri
	INSPEKTORAT		
1.	Monitoring dan evaluasi kecamatan terhadap desa-desa yang masih banyak belum mematuhi aturan, agar segera meminta LPJ kepada Desa-desa yang sampai sekarang belum menyelesaikannya.	- Mengkoordinasikan dengan camat untuk secara aktif meminta dan menagih LPJ dari desa-desa yang belum menyelesaikan kewajibannya; - Menyusun jadwal monitoring rutin dan terstruktur; - Memberikan pembinaan dan asistensi teknis kepada perangkat desa;	Hasil yang dicapai menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan desa terhadap kewajiban pelaporan. Jumlah desa yang belum menyelesaikan LPJ berangsur menurun, serta kualitas administrasi dan pelaporan keuangan desa mulai membaik
2.	Hasil temuan BPK agar di tindaklanjuti semaksimal mungkin agar tidak terjadi temuan-temuan lagi pada tahun berikutnya;	- Penyusunan action plan tindak lanjut rekomendasi BPK; - Meminta perangkat daerah terkait untuk menyelesaikan setiap temuan sesuai batas waktu; - Monitoring dan evaluasi berkala oleh Inspektorat; - Penguatan SPIP di Perangkat Daerah	Hasil tindak lanjut menunjukkan adanya penurunan jumlah dan nilai temuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem pengendalian internal semakin diperkuat, kepatuhan terhadap regulasi meningkat, serta menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
	BPPKAD		
1.	Untuk transparansi serta kontribusi pendapatan asli daerah berasal dari sektor pajak yang bersumber dari pajak dan retribusi dari objek pajak (restoran dan perhotelan) agar secara keseluruhan terpasang tapping box.	- Melakukan pendataan dan verifikasi ulang obyek pajak , restoran dan perhotelan secara berkala - Melaksanakan koordinasi dengan penyedia layanan tapping box dan Bank Jateng	Masalah : Belum seluruh obyek pajak restoran terpasang tapping box Tujuan :Meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak daerah khususnya pengawasan transaksi dan potensipeningkatan pajak daerah dari pajak restoran dan perhotelan

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Melakukan pemasangan tapping box secara bertahap sesuai prioritas omzet dari wajib pajak	
2.	Dengan banyaknya toko swalayan dan toko modern menjadi salah satu sumber pajak daerah yaitu pajak parkir yang saat ini prosentasenya sangat kecil, perlu penguatan regulasi dan evaluasi perda terkait kenaikan prosentase tersebut.	- Melakukan evaluasi terhadap realisasi pajak parkir khususnya pada swalayan dan toko modern - Melaksanakan sosialisasi kepada pengelola parkir - Memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk pajak parkir pada seluruh Swalayan dan Toko Moderen yang ada di Kabupaten Kudus	Masalah :Target pajak parkir pada swalayan dan toko modern belum optimal terhadap potensi yang ada. Tujuan : Optimalisasi penerimaan pajak parkir dari Swalayan dan Toko Moderen sesuai dengan ketentuan
3.	Dengan terbitnya Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) agar ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan perda tersebut sebagai bagian dari pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah Kabupaten Kudus.	- Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam penyusunan Peraturan Bupati - Melakukan inventarisasi Perusahaan potensial pelaksana CSR untuk meningkatkan pendapatan daerah.	Masalah : Belum tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan Perda/Perbup CSR Tujuan: Optimalisasi kontribusi CSR dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah
4.	Harus ada inovasi upaya peningkatan PAD, pemanfaatan aset yang tidak produktif, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara digital untuk efektivitas dan transparansi dengan membangun ekosistem digital, untuk itu BPPKAD sebagai OPD percontohan untuk OPD yang lain.	- Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem digital pendapatan dan retribusi daerah. - Melakukan pendataan dan pemetaan aset daerah yang belum produktif - Menyusun skema pemanfaatan aset daerah secara optimal dan berdaya guna. - Meningkatkan integrasi sistem informasi pendapatan daerah	Masalah : Belum optimalnya pemanfaatan dan digitalisasi pendapatan daerah dan retribusi daerah Tujuan :Terbangunnya ekosistem digital pendapatan dan retribusi daerah dan meningkatkan potensi PAD melalui aplikasi SIMPAD dan SIMPAD GEO

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2025	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		- Melaksanakan peningkatan kapasitas SOM pengelola pendapatan daerah	
5.	Semua OPD pengelola pendapatan dan jajaran BUMD agar dapat meningkatkan realisasi pendapatan lebih maksimal.	- Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada OPD pengelola pendapatan daerah dan BUMD - Melaksanakan monev realisasi pendapatan secara berkala - Mengoptimalkan penggalian potensi pendapatan daerah dan BUMD - Meningkatkan sinergi dan integrasi data pendapatan daerah	Masalah :Belum optimalnya sinergi dan penggalian potensi pendapatan dan BUMD Tujuan:Meningkatkan realisasi pendapatan and BUMD secara optimal dan berkelanjutan dengan melakukan koordinasi dengan OPD dan BUMD untuk mendorong digitalisasi pendapatan dan retribusi daerah

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tugas Pembantuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendekatkan pelaksanaan urusan pemerintahan kepada daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Adapun Penugasan merupakan pemberian tugas tertentu dari Pemerintah Pusat kepada daerah atau dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan atau urusan pemerintahan tertentu di luar urusan yang menjadi kewenangan daerah, dengan tetap berada dalam kerangka kebijakan dan pengendalian pemberi tugas.

Penugasan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat strategis, prioritas, atau mendesak. Pendanaan pelaksanaan Penugasan pada prinsipnya disediakan oleh pemberi tugas, dan pelaksanaannya tidak mengurangi kewenangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sendiri

Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tidak terdapat Tugas Pembantuan maupun Penugasan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan di Kabupaten Kudus pada periode pelaporan dinyatakan nihil, dan kondisi tersebut mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara mandiri sesuai kewenangan yang dimiliki sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Tabel 4.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Diterima
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025

NO	K/L	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- NIHIL -											

**4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

Mengingat Tahun 2025, tidak adanya Tugas Pembantuan dan Penugasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kudus dari Pemerintah Pusat (Lembaga dan Kementerian) maupun dari Pemerintah Provinsi maka permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan tidak dapat dilaporkan secara spesifik.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kudus Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sekaligus sebagai wujud transparansi kepada masyarakat atas pelaksanaan urusan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arah kebijakan daerah. Kontribusi program dan kegiatan yang berkualitas diharapkan dapat memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah sebagai bukti keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hasil kinerja Kepala Daerah disajikan secara transparan dan terukur, dalam bentuk capaian indikator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan setahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, serta partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengelolaan sumber daya daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kudus Tahun 2025 disampaikan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama dan masukan konstruktif bagi Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kudus dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di masa yang akan datang, menuju terwujudnya Kabupaten Kudus yang Sejahtera, Harmoni, dan Takwa.